



PROCEEDINGS SEMINAR

Prosiding Seminar SMERU

*Wawasan tentang LSM
Indonesia: Sejarah,
Perkembangan, serta
Prospeknya*

Isi dari masing-masing makalah adalah hasil pemikiran dan pandangan dari masing-masing penulis dan tidak berhubungan atau mewakili Group Bank Dunia maupun lembaga-lembaga yang mendanai kegiatan dan pelaporan SMERU. Mohon hubungi kami di nomor telepon: 62-21-3909317; 3909363, Fax: 62-21-3907818; Email: smeru@smeru.or.id; Web: www.smeru.or.id

Laporan khusus dari Social Monitoring and Early Response Unit (SMERU). Suatu unit yang didukung oleh Bank Dunia, AusAID, ASEM, dan USAID.

15 Agustus 2000

PENDAHULUAN

Sejak tahun '70an pembangunan di Indonesia terus melaju dengan cepat, dan dampak positifnya perkembangan ekonomi pun meningkat. Namun pembangunan ternyata juga menimbulkan dampak negatif, terutama meningkatnya kemiskinan, represi terhadap hak-hak azasi manusia, dan perusakan lingkungan hidup. Upaya untuk menanggulangi dampak negatif kemudian melahirkan lembaga-lembaga swadaya masyarakat atau LSM yang semula dikenal sebagai Organisasi Non Pemerintah atau Ornop. Istilah Ornop adalah terjemahan dari *Non-Governmental Organization* atau NGO.

Sebagian masyarakat menganggap bahwa LSM adalah suatu lembaga swadaya yang bekerja untuk pembangunan masyarakat kecil yang tertindas, masyarakat miskin atau mereka yang terpinggirkan. Tetapi dalam perkembangannya banyak sekali bermunculan gerakan-gerakan sosial yang tidak dimengerti oleh masyarakat awam apakah gerakan-gerakan tersebut adalah LSM atau bukan LSM. Apakah gerakan keagamaan yang kegiatannya terfokus pada pembangunan masyarakat juga disebut LSM, dan apakah PKK, LKMD, KNPI, Yayasan Yatim Piatu atau Anak Jalanan juga termasuk LSM.

Istilah LSM juga membingungkan, karena kata “swadaya” tidak sesuai dengan realitas konkrit LSM sendiri yang sebenarnya sangat tergantung pada bantuan luar negeri. Dengan kata “swadaya” banyak orang mengira bahwa LSM adalah Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM). Hal ini juga menjadi pertanyaan apakah KSM juga sebuah LSM.

Sementara itu, pemerintah menganggap bahwa LSM adalah gerakan masyarakat yang selalu beroposisi terhadap pemerintah. LSM adalah organisasi anti pemerintah yang kerjanya menjelek-jelekkan pemerintah. Namun dalam perkembangannya kemudian banyak LSM menjadi mitra pemerintah dalam pembangunan sehingga peranan kritis LSM terhadap pemerintah berkurang. Banyak orang menyebut bahwa LSM seperti ini adalah LSM “pelat merah” dan masih banyak lagi julukan yang lain.

Sejak tahun 90an perkembangan LSM di Indonesia sangat luar biasa, bagai jamur di musim hujan, tidak ada data yang pasti berapa jumlah LSM di Indonesia (saat ini SMERU hanya memiliki 1600 data LSM di Indonesia). Bahkan pada saat krisis ekonomi melanda Indonesia, jumlah dan aktifitas LSM bertambah. Dengan perkembangan ini diduga bahwa pengertian peranan LSM telah mengalami perkembangan dari konsep awal.

Masalah besar yang dihadapi LSM adalah belum membudayanya sistem audit terhadap LSM, baik audit finansial maupun audit dampak sosial. Selama ini terkesan LSM membelanjakan sedemikian banyak uang, tetapi pembukuannya tertutup. Apakah dana-dana tersebut dimanfaatkan dengan baik? Untuk menilai itu, perlu diadakan *impact assesment* terhadap program LSM. Bersediakah LSM diaudit secara *financial* dan dinilai dampak kegiatannya agar akuntabilitas mereka meningkat?

Beberapa tahun belakangan ini banyak orang mendiskusikan tentang “*civil society*” atau masyarakat sipil terutama di kalangan LSM. Ada yang mengatakan bahwa LSM adalah salah satu embrio dari *civil society* yang bersusah payah mempertahankan independensi dan otonominya dalam berbagai kehidupan politik tetapi ada pula yang berpendapat LSM

adalah elemen dari *civil society*. Namun banyak juga orang yang belum mengerti apa itu *civil society* dan apa hubungan antara LSM dan *civil society* itu sendiri. Untuk itu kita perlu memadukan pandangan mengenai *civil society* yang sesuai dengan konteks sistem masyarakat Indonesia, serta komponen-komponen potensial apa yang dapat menumbuhkan *civil society* di Indonesia.

SMERU (*Social Monitoring and Early Response Unit*) berinisiatif mengadakan seminar sehari mengenai “Wawasan Tentang LSM Indonesia: Sejarah, Perkembangan, serta Prospeknya” dengan tujuan untuk menyamakan persepsi apa LSM Indonesia dengan menelusuri sejarah, perkembangan dan prospeknya; mendapat pemahaman tentang arah perjuangan LSM/Ornop ketika era reformasi masuk di Indonesia dan terjadinya perubahan pemerintahan; mendapat pemahaman tentang *civil society* dalam konteks Indonesia.

SMERU lahir pada Juli 1998 dari suatu keprihatinan mendalam beberapa warga Indonesia dan yang juga terungkap dalam pertemuan CGI (*Consultative Group for Indonesia*), yaitu bahwa upaya pemantauan yang independen, dapat diandalkan, dan aktual atas dampak krisis di Indonesia masih sangat terbatas. Untuk menjawab hal ini, atas inisiatif beberapa negara donor yang bekerjasama dengan peneliti Indonesia, maka dibentuklah SMERU. Kegiatan lembaga ini didanai oleh beberapa sumber, khususnya AusAID, ASEM, dan USAID, serta mendapat dukungan logistik dan administratif dari Bank Dunia.

SMERU melaksanakan mandatnya dengan meneliti dampak krisis terhadap kemiskinan, pasar tenaga kerja, kesehatan, pendidikan, persoalan *gender*, kriminalitas, serta kinerja dan dampak program penanggulangan krisis.

SMERU bukan suatu organisasi NGO atau Ornop, tetapi merupakan suatu unit penelitian. Sejak awal, SMERU sebagai unit penelitian ingin berhubungan secara erat dengan teman-teman dari LSM/Ornop di Indonesia. Mengapa? Oleh karena kita menganggap LSM/Ornop, apalagi yang berada di daerah atau di luar ibu kota, pasti mempunyai persepsi dan informasi tentang dampak krisis yang sangat penting. Saat ini data base SMERU mengenai LSM/Ornop di seluruh Indonesia selalu di *up-date*, karena jumlahnya yang terus bertambah. Mungkin yang terdata hanya sebagian kecil dari jumlah LSM/Ornop yang ada di Indonesia.

Selama dua tahun ini SMERU dan LSM/Ornop saling berbagi informasi, termasuk informasi tentang program pemerintah, misalnya Program JPS. SMERU sudah berusaha untuk mengirim contoh folder informasi JPS diperoleh dari kalangan pemerintahan. Selain itu, SMERU juga sering dikunjungi oleh teman-teman LSM/Ornop yang datang dari luar Jakarta atau luar Jawa.

Pada seminar ini SMERU hanya bertindak sebagai fasilitator. Kami menganggap bahwa pada saat ini sangat penting teman-teman dari LSM/Ornop mendapat kesempatan untuk berbicara bersama-sama tentang tugas sebagai LSM/Ornop. Dalam hal ini SMERU tidak mempunyai persepsi dan tidak mempunyai peran kecuali sebagai fasilitator.

Seminar ini dihadiri oleh berbagai kalangan. Selain LSM/Ornop, juga hadir kalangan pemerintah, lembaga internasional donor, dan lembaga penelitian dari beberapa universitas di Jakarta. Khusus peserta dari LSM/Ornop, SMERU telah mengundang 20 LSM/Ornop dari berbagai daerah seperti Aceh, Sumatra Utara, Sumatra Barat, Riau,

Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, NTB, NTT, Kalimantan Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara dan dua orang dari Maluku Utara yang kebetulan berada di Jakarta.

SMERU mengundang 6 pembicara, dua pembicara berbicara dalam lingkup nasional dan empat pembicara lainnya berbicara tentang kegiatan LSM/Ornop di daerahnya masing-masing.

Pembicara pertama dalam lingkup nasional adalah Bapak MM Billah dari CPSM (Center for Participatory Social Management). Semua orang LSM/Ornop di Indonesia pasti mengenal Pak Billah. Selain aktivis LSM, beliau juga seorang pakar mengenai LSM Indonesia. Kali ini Pak Billah berbicara mengenai “Perkembangan Ornop di Indonesia”. Pembicara kedua dalam lingkup nasional adalah Bapak Rizal Malik dari Oxfam GB Indonesia. Pak Rizal adalah direktur Oxfam GB Indonesia yang berkantor di Yogyakarta. Pada seminar ini Pak Rizal membawakan makalahnya yang berjudul “Dinamika Ornop Utara dan Selatan: Pengalaman Oxfam GB di Indonesia.”

Moderator pada dua sesi di atas adalah Bapak Dr. Risman Musa. Di kalangan LSM/Ornop mungkin Pak Risman tidak begitu dikenal karena Pak Risman bukan orang LSM/Ornop. Pak Risman adalah salah satu direktur dari BKKBN yaitu Direktur Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi.

Empat pembicara lainnya masing-masing adalah Bapak Tabrani Yunis dari CCDE (Center for Community Development and Education) Aceh dengan topik “Kelahiran & Perkembangan LSM di Aceh”; Bapak Pahir Halim dari FIK-Ornop Sulsel (Forum Informasi dan Komunikasi Organisasi Non Pemerintah) berbicara mengenai “Mencermati Dinamika Pergerakan Ornop di Sulsel”; Bapak Ali Dahlan dari YSM (Yayasan Swadaya Membangun) NTB dengan topik “Gerakan LSM NTB, Sebuah Perbandingan”; dan terakhir adalah Bapak Johnny Simanjuntak dari ATMA Solo berbicara mengenai “Dinamika LSM dan Politik Lokal: Beberapa Catatan Lapangan”.

Moderator pada sesi 4 ini adalah Ibu Lery Mboik dari PIAR (Pusat Informasi dan Advokasi Rakyat). Ibu Lery adalah salah satu srikandi dari NTT, lembaga yang dipimpinnya banyak menangani masalah tanah masyarakat adat dan pengungsi.

Karena keterbatasan waktu, kami tidak dapat menampilkan keinginan teman-teman LSM/Ornop lain untuk presentasi pada seminar kali ini. Namun demikian, pada seminar ini SMERU menerima sumbangan tulisan Bp. Surya Dharma dari YASIKA (Yayasan Indonesia untuk Kemajuan Indonesia) Medan dengan judul “Pandangan dan Pemikiran YASIKA terhadap Keberadaan LSM dan Masalah-masalah Perdesaan”. Kami memutuskan untuk memasukkan tulisan tersebut ke dalam prosiding, karena makalah tersebut dapat menjadi wawasan tambahan pada isu-isu yang dihasilkan pada seminar ini.

Harapan kami dari seminar ini kita dapat mengetahui dan memahami apa itu LSM secara baik dan benar, dan kita sadar bahwa LSM merupakan salah satu bagian penting dalam pembentukan masyarakat sipil. Dengan demikian kita bisa bersama-sama membangun masyarakat sipil Indonesia agar terjadi keseimbangan kekuatan antara negara dan masyarakat sipilnya.

Prosiding ini memuat makalah pembicara dan diskusi yang berlangsung dalam seminar. Bahasa diskusi seminar ini telah diubah dari bahasa aslinya tanpa mengubah makna yang dimaksudkan.

Terakhir, kami ucapkan terima kasih kepada seluruh pembicara, moderator, dan para peserta seminar untuk kesediaannya hadir dan berperan serta aktif dalam diskusi pada seminar ini. Tidak lupa ucapan terima kasih disampaikan kepada tim SMERU yang telah banyak membantu pada penyelenggaraan seminar ini.

SMERU mohon maaf bila dalam penyelenggaraan seminar ini ada hal-hal yang tidak berkenan bagi peserta seminar.

Selamat membaca dan semoga bermanfaat.

Jakarta, 15 Agustus 2000

Hariyanti S. Samekto
NGO Liaison Officer

AGENDA SEMINAR

Wawasan Tentang LSM Indonesia: Sejarah, Perkembangan, serta Prospeknya

Selasa, 15 Agustus 2000
Hotel Cemara, Jakarta

Waktu	Topik	Pembicara	Moderator
09.00-09.30	Registrasi		
09.30-10.00	<ul style="list-style-type: none">▪ Pembukaan▪ Laporan Panitia	John Maxwell Hariyanti S. Samekto	
10.00-10.30	Perkembangan Ornop di Indonesia	M.M. Billah	Dr. Risman Musa
10.30-11.00	Jeda Kopi		
11.00-12.00	Diskusi		Dr. Risman Musa
12.00-12.30	Kelahiran & Perkembangan LSM di Aceh	Tabrani Yunis	Lery Mboik
12.30-13.30	Makan Siang		
13.30-14.00	Dinamika Hubungan Ornop Utara Selatan: Pengalaman Oxfam GB di Indonesia	Rizal Malik	Dr. Risman Musa
14.00-15.00	Diskusi		Dr. Risman Musa
15.00-15.15	Jeda Kopi		
15.15-16.45	Diskusi Panel: <ul style="list-style-type: none">▪ Mencermati Dinamika Pergerakan Ornop di Sulawesi Selatan▪ Gerakan LSM di NTB: Sebuah Perbandingan▪ Dinamika LSM & Dinamika Politik Lokal: Beberapa Catatan Lapangan	Pahir Halim Ali Dahlan Johny Simanjuntak	Lery Mboik
16.45-17.00	Penutup	John Maxwell	

DAFTAR ISI

	<i>halaman</i>
Pendahuluan	i
Agenda Seminar	v
Daftar Isi	vi
Perkembangan Ornop di Indonesia	1
Latar Belakang	2
Ornop atau LSM?	3
Spektrum Ornop di Indonesia	4
Ornop dan Negara	6
Ornop dan Masyarakat Sipil?	8
Ornop dan Demokrasi	12
Ornop dan Advokasi	14
Ornop dan Pemberdayaan Rakyat	15
Ornop dan Gerakan Perempuan	17
Ornop dan Masa Transisi	18
Lampiran	27
Diskusi	33
Dinamika Ornop Utara-Selatan: Pengalaman Oxfam GB di Indonesia	36
Pendahuluan	37
Batasan	37
Alasan	38
Bentuk Kerjasama	40
Wilayah Ketegangan	41
Prospek di Masa Depan: Agenda Bersama Utara-Selatan	42
Diskusi	43
Kelahiran dan Perkembangan LSM di Aceh	46
Latar Belakang	47
Kelahiran dan Perkembangan LSM di Aceh	47
Munculnya Aliansi Baru	52
Hubungan Ornop dengan Negara dan Pemerintah	57
Rekomendasi dan Diskusi	58
Diskusi	59
Mencermati Dinamika Pergerakan Ornop Sulsel	61
Pendahuluan	62
Fenomena Ketergantungan	63
Dinamika Ornop di Sulawesi Selatan	63
Rekomendasi untuk Diskusi Lebih Lanjut	65

Gerakan LSM di Nusa Tenggara Barat: Sebuah Perbandingan	66
Umum	67
YSM dan Kegiatannya	67
Sumber Dana	68
Akuntabilitas	68
Bagaimana yang Lain	68
LSM dan Pemerintah (Daerah)	68
Kesimpulan Sementara	69
LSM dan Dinamika Politik Lokal: Beberapa Catatan Lapangan	70
Pemaknaan tentang Reformasi	71
Rakyat dan DPRD	72
Rakyat dan Pemerintah Daerah/Desa	73
Pers dan Kepentingan Demokrasi	74
Kelompok Penekan	74
Posisi dan Peran LSM	74
Diskusi Panel	76
Pandangan dan Pemikiran Yasika terhadap Keberadaan LSM	79
Paradigma Pembangunan Perdesaan dan Masalahnya	80
Paradigma Perkembangan Perdesaan Masa Kini	81
LSM dan Model Pengembangan Alternatif	82
Sasaran dan Pencapaian Sasaran LSM	83
Hubungan Kerjasama dengan Pemerintah	84
Jaringan Kerjasama LSM	85
Daftar Peserta Seminar	86

PERKEMBANGAN ORNOP DI INDONESIA¹

Latar Belakang

- Setidaknya ada dua kecenderungan perkembangan pembangunan yang terjadi pada awal dua-dasawarsa terakhir abad ini, yakni tetap meluasnya kemiskinan sampai ke derajat yang sangat tidak manusiawi dan tidak lagi bisa diterima²; dan semakin menurunnya ketersediaan sumber-sumber keuangan untuk membiayai pemberantasan kemiskinan itu³. Praktek-praktek pembangunan selama ini selalu menekankan pengalihan modal, perencanaan formal, spesialisasi, dan pengendalian oleh pemerintah pusat. Teori-teori pembangunan *konvensional* yang dijadikan dasar sangat menekankan pentingnya meletakkan tanggung-jawab pengendalian dan pengalokasian sumber-sumber pembangunan pada pemerintahan terpusat, karena dengan demikian dianggap akan dapat dihasilkan pengambilan keputusan yang optimal tentang investasi. Pendekatan sistem komando atas pengelolaan sumber-sumber ini lebih sering menghasilkan pemantapan *sistem patronase* dan membangun proyek-proyek ekonomi yang lembek, mengabaikan disiplin ekonomi, meningkatkan ketergantungan pada sumber-sumber luar, dan menggusur prakarsa lokal. Selain itu, pendekatan semacam ini cenderung mendorong ke arah *otoritarianisme*, dan pemusatan kekayaan dan kekuasaan politik⁴.
- Sebagai tanggapan terhadap kecenderungan itu, kemudian muncullah suatu tuntutan agar pembangunan lebih berkiblat pada rakyat yang menekankan pentingnya penguatan kapasitas kelembagaan dan sosial yang mendukung pengembangan pengendalian, pertanggung-gugatan (*accountability*), prakarsa, dan kemandirian lokal. Pengalihan modal dilihat sebagai bukan masalah yang paling utama, dan sebaliknya prioritas diutamakan pada proses demokratisasi. Rakyat didorong untuk memobilisasikan dan mengelola sumber-sumber mereka sendiri. Dengan pendekatan yang terdesentralisasikan dan penekanan pada kemampuan mengorganisasikan-diri untuk mengelola sumber-sumber pembangunan seperti itu, pada umumnya akan dihasilkan

¹ Pokok-pokok pikiran yang disajikan pada seminar 'Wawasan tentang LSM Indonesia: Sejarah, Perkembangan dan Prospeknya' yang diselenggarakan oleh SMERU di Jakarta, 15 Agustus 2000. Terima kasih saya tujukan kepada Hariyanti S. Samekto yang memberi kesempatan kepada saya untuk terlibat di dalam seminar ini.

² Simbol dan sekaligus realitas kemiskinan itu seringkali ditayangkan oleh CNN berupa gambar 'mayat hidup' anak-anak, yang merintih dan kemudian disuapi makanan bubur, di negeri miskin Afrika Hitam, atau sekelompok orang tua lelaki dan perempuan serta anak-anak yang mengais-ngais gunung sampah di lokasi pembuangan sampah Bantar Gebang Bekasi yang ditayangkan televisi.

³ Indonesia, misalnya, mencari berbagai sumber dana luar negeri, baik berupa hibah maupun pinjaman, untuk menanggulangi kemiskinan yang semakin meluas dan mendalam sejak krisis ekonomi dua tahun terakhir, karena sumber-sumber dalam negeri yang langka dan jauh dari cukup. Bahkan di dalam praktek, dana penanggulangan kemiskinan (antara lain lewat program JPS = *Jaring Pengaman Sosial*) itupun masih dianggap perlu dikorup oleh aparat birokrasi dan pejabat negara (di dalam program JPS ini juga terlibat beberapa Ornop, yang seringkali menutup mata terhadap praktek korupsi yang dilakukan birokrasi, atau bahkan bias jadi ikut menikmati praktek korupsi itu).

⁴ Kombinasi dari teori-teori dan praktek pembangunan seperti itu di dalam kenyataannya bahkan berkembang menjadi doktrin dan dogma yang diberi nama 'pembangunanisme' (*developmentalism*) [Lihat misalnya Sach, Wolfgang, *The Development Dictionary: A Guide to Knowledge as Power*, London, Zed Books, 1992. Buku ini sudah diterbitkan di dalam bahasa Indonesia oleh CPSM pada tahun 1995 dengan judul '*Kritik atas Pembangunanisme: telaah Pengetahuan sebagai Alat Penguasaan*']. Doktrin dan dogma semacam itulah yang juga menjadi 'ideologi' rezim Suharto di Indonesia selama tiga-dasawarsa di penghujung abad 20. Banyak Ornop di Indonesia yang juga terhegemoni secara ideologis oleh doktrin semacam itu, dan secara sukarela menjadikannya sebagai landasan kegiatan mereka selama ini. [lihat misalnya hasil penelitian yang dilakukan oleh CPSM tahun 1994].

suatu pengelolaan sumber-sumber yang lebih efisien dan produktif, peningkatan prakarsa dan pertanggung-gugatan lokal, dan penguatan disiplin ekonomi⁵. Pendekatan seperti yang disebut terakhir ini seringkali didaku digunakan oleh Ornop yang pada prakteknya cenderung memiliki minat yang kuat dalam demokratisasi [Korten, 1987]⁶.

Ornop atau LSM?

- Panitia secara sengaja dan tegar menggunakan istilah 'LSM' untuk menyebutkan suatu organisasi yang di kalangan luas dikategorikan sebagai organisasi non-pemerintah, meskipun ada juga berbagai istilah lain⁷. Bagi mereka yang yakin menggunakan istilah itu dan yang secara sengaja mempertahankannya, serta bagi para pengikutnya, istilah (LSM) itu bukanlah dipilih secara serampangan, jika saja dilihat dari teori yang menyatakan bahwa tindakan sosial selalu bersifat *'intensional'*. Setidaknya ada dua maksud, terkatakan atau tidak, di belakang penggunaan istilah itu. Istilah itu dipilih karena dianggap pas mewakili semangat dan kehendak *'depolitisasi rakyat'* serta secara nyata mengejawantahkan tindakan nyata dari slogan *'politik no, pembangunan yes'* yang dipropagandakan secara gencar oleh Orde Baru. Celaknya propaganda Orde Baru itu diterima dengan sukacita dan penuh keyakinan oleh berbagai kalangan, termasuk sebagian dari komunitas Ornop. Istilah itu juga dipilih dengan maksud untuk mengaburkan dan bahkan menafikan posisi konfliktual antara organisasi itu dengan pemerintah, karena sesungguhnya, menurut keyakinan politis dan ideologis kalangan ini, organisasi seperti itu adalah 'mitra pemerintah' atau bahkan juga merupakan bagian integral dari pemerintah (negara). Dengan kata lain, pemilihan istilah itu disesuaikan dengan pandangan integralistik mereka mengenai negara, yang dikenal dengan paham negara integralistik atau *'organic statism'*. Di dalam paham ini memang tidak dikenal istilah oposisi, dan bahkan cenderung 'mengharamkan' oposisi. Perbedaan pendapat dan kritik selalu ditafsirkan sebagai *'mbalelo'* atau *'makar'*, sehingga oleh karena itu dianggap sah untuk dipangkas dan ditindas atau perlu *'digebug'*⁹. Pendek kata penggunaan istilah (LSM) itu mencerminkan kuatnya

⁵ Dasar-dasar dan akibat dari aliran yang kontras ini dikembangkan secara substansial dan rinci oleh Chambers [1986]; D. Korten [1987], dan Korten dan Klaus [1984].

⁶ Oleh karena itulah Ornop, baik di negara-negara maju dan terutama di negara-negara berkembang, kemudian menjadi bagian penting dari proses perubahan yang terjadi di penghujung abad ini. Jaringan Ornop pada tingkat lokal maupun pada tingkat internasional memiliki peluang yang cukup luas untuk ikut mengambil peran di dalam proses pengelolaan sumber-sumber, proses pengambilan keputusan, dan proses demokratisasi. Meskipun demikian, di Indonesia terdapat juga Ornop yang menggunakan gagasan ini hanya sebagai 'retorika', karena di dalam prakteknya Ornop seperti ini masih memperlihatkan secara kuat perilaku yang justru melawan gagasan dasarnya.

⁷ Misalnya saja dikenal juga istilah NGO (*non-governmental organization*), PVO (*privat voluntary organization*).

⁸ *'Depolitisasi rakyat'* ini adalah program politik elite Orde Baru yang berintikan militer, terutama 'militer pragmatis', yang beranggapan bahwa rakyat tidak perlu dilibatkan di dalam proses politik, karena dianggap masih bodoh dan tidak siap. Oleh karena itu elite politik ini yakin bahwa negara ini haruslah mereka pimpin. Strategi yang ditempuh oleh elite ini adalah 'dominasi' dan 'hegemoni', dan banyak unsur masyarakat sipil yang ternyata terhegemoni secara kuat.

⁹ Istilah yang bernuansa kekerasan ini populer dan dipopulerkan oleh rezim represif-otoritarian Orde Baru, yang pada mulanya dikenalkan oleh Suharto untuk menanggapi kritikan beberapa perwira senior TNI atas pidatonya di Pekanbaru pada bulan 27 Maret 1980. Bahasa kekerasan seperti itu memang nyata pada pidato itu, misalnya Suharto menyatakan: *'...dua pertiga anggota (dari MPR) dapat, bila mereka menginginkan, mengubah Undang-undang Dasar (1945). (Tetapi) ABRI tidak ingin ada satu perubahanpun, dan bila ada perubahan, adalah tugas (ABRI) untuk menggunakan senjata...Daripada menggunakan senjata di dalam menghadapi perubahan dari UUD '45 dan Pancasila, kita lebih baik menculik satu diantara dua pertiga yang ingin melakukan perubahan, karena dua pertiga kurang satu tidak sah menurut UUD '45'* [Lihat Jenkins, David, *Suharto and His Generals: Indonesia Military Politics 1975-1983*, New York, Cornell Modern Indonesia Project, 1984, p.157; juga *Tempo*, 14 Juni 1980]

'hegemoni' negara atas unsur-unsur masyarakat sipil. Sebaliknya, istilah Ornop (organisasi non-pemerintah) merupakan wacana-tanding (*counter discourse*) yang sengaja dipergunakan sebagai upaya dekonstruksi wacana hegemonis yang sampai saat ini pengaruhnya terasa masih sangat kuat, bahkan di dalam komunitas Ornop sendiri.

Spektrum Ornop di Indonesia

- Dalam dasawarsa-dasawarsa terakhir ini, ketika pembangunan di berbagai negara-berkembang mulai dan terus digalakkan, peran Ornop dilihat semakin meningkat [Drabek, 1987], dan bahkan Chambers mengenalkan konsep '*additionality*' untuk menggambarkan sumbangan potensial dari Ornop bagi proses pembangunan¹⁰. Pada mulanya Ornop dilihat sebagai organisasi yang bergerak secara eksklusif pada tingkat lokal dengan tujuan '*memenuhi kebutuhan kelompok miskin tanpa mempertimbangkan dampak yang luas*'; akan tetapi kemudian terjadi pergeseran yang mendasar yakni bahwa Ornop tidak lagi hanya berupaya '*memenuhi kebutuhan kelompok miskin*' melainkan juga membantu mereka untuk mengartikulasikan kebutuhan mereka dan memberikan kemampuan kepada mereka untuk mengontrol proses pengambilan keputusan yang dapat mempengaruhi kehidupan mereka [Drabek, 1987].
- Meskipun tujuan dan kegiatan serta pengalaman Ornop sangat beranekaragam, sehingga terasa sangat sulit untuk diklasifikasikan [Korten, 1987], akan tetapi Ornop Indonesia, menurut Eldridge [1990], memiliki ciri-ciri umum yang kurang lebih sama, yakni antara lain: (1) orientasi mereka kepada penguatan kelompok-kelompok komunitas sebagai basis dari masyarakat dan sebagai pengimbang bagi pemerintah; (2) pada umumnya ada komitmen yang kuat terhadap cita-cita partisipasi rakyat di dalam pengambilan keputusan; (3) adanya satu komunitas Ornop di Indonesia, dengan banyak hubungan-silang antar pribadi dan kelembagaan, yang saling mendukung, terdapat pertukaran gagasan dan sumber-daya, yang memberikan potensi pada satu *front* bersama pada berbagai tingkat. Hubungan-silang itu dilatar belakangi oleh bentuk dan skala organisasi serta keaneka-ragaman kegiatan Ornop. Hal yang disebut terakhir ini seringkali dianggap sebagai kekuatan komunitas Ornop, tetapi sekaligus juga kelemahannya [Eldridge, 1990]. Hasil utama yang dicapai oleh Ornop pada tingkat makro adalah pemunculan *issues* dari pengalaman lapangan mereka menjadi agenda politik nasional. Ornop juga menyampaikan refleksi dan lebih mengartikulasikan kepedulian umum pada lingkungan hidup, hak-azasi dan demokratisasi. Dampak¹¹ dari kegiatan Ornop yang mempunyai makna politis terlihat pada keseluruhan keseimbangan kekuatan antara kelompok-kelompok sosial dan ekonomi, pemerintah Indonesia dan berbagai agen-agennya. Sampai derajat tertentu Ornop menunjukkan kapasitasnya dalam meningkatkan kemandirian pengelolaan organisasi berbagai kelompok yang kurang beruntung, dan memberikan kemampuan kepada kelompok-

¹⁰ Konsep '*additionality*' itu dimaksudkan sebagai upaya membuat sesuatu lebih baik daripada yang sebelumnya, yang memberi kemungkinan baik maupun buruk. Upaya mencari '*additionality*' yang tinggi memerlukan empat unsur: mengidentifikasi dan mempertemukan kebutuhan dan peluang; menilai manfaat terbandingkan (*comparative advantage*) – yaitu melihat apa yang dikerjakan oleh satu Ornop dibandingkan dengan yang dikerjakan Ornop lain --; belajar dan menerima lewat aksi; dan mencapai dampak yang luas. Satu Ornop dapat mencapai dampak yang luas dalam banyak cara termasuk memperluas kegiatannya; mengenalkan dan mengembangkan teknologi hingga semakin luas; mengembangkan dan menggunakan pendekatan yang kemudian diadopsi oleh Ornop lain ataupun oleh pemerintah; mempengaruhi perubahan kebijakan dan tindakan donor; mengambil manfaat dan menebarkan pemahaman tentang pembangunan [Robert Chambers dalam '*Thinking about NGO Priorities*', sebagaimana dikutip Drabek, 1987].

¹¹ Dampak itu bisa jadi tak-langsung dan dalam jangka panjang dan dapat pula langsung dan segera.

kelompok itu untuk menghadapi aparat pemerintah dan kekuatan lain yang sangat kuat dalam kedudukan sederajat; singkat kata mereka melayani kepentingan untuk memperkuat masyarakat.

- Beberapa kajian tentang Ornop di Indonesia telah dilakukan¹² oleh beberapa peneliti, dan berbagai kategorisasi juga telah dilakukan. Korten [1987] menggunakan 7 variabel¹³ untuk membuat kategorisasi Ornop di Indonesia, dan hasilnya menunjukkan tiga generasi Ornop. CPSM [1994] dan Fakhri [1996] cenderung menggunakan pembeda yang kurang lebih sama, yakni segi-segi 'ideologis', sehingga menghasilkan Ornop '*developmentalis*',¹⁴ Ornop '*reformis*', dan Ornop '*transformatoris*'.¹⁵ Villegas [1987] mengkategorikan Ornop ke dalam ornop *parastatal*, Ornop *professional*, dan (c) Ornop *progressif* secara politik¹⁶. Eldridge, dengan menggunakan empat kriteria¹⁷, mengemukakan tiga kategori pokok Ornop dan satu kategori tambahan berdasarkan perkembangan mutakhir. Tiga kategori pokok itu adalah (a) '*High level Cooperation-Grass-roots Development*', (b) '*High level Politics-Grass-roots Mobilization*', (c) '*Empowerment from below*', dan (d) yang lebih '*radikal*' [Eldridge, 1996:35-38]. Sedangkan Uhlin [1997] mengidentifikasi empat ciri ideologi dasar, yaitu *radikal*, *liberal*, *konservatif*, dan *Islam*¹⁸. Drabek [1989]¹⁹ dan CPSM [1993] melihat posisi Ornop *vis-a-vis* negara²⁰.

¹² Untuk menyebut beberapa contoh kajian mutakhir mengenai Ornop di Indonesia, misalnya adalah: Korten, *Third Generation NGO Strategies: A Key to People-Centered Development, World Development*, September 1987; Indeco de Unie, *Laporan Studi tentang LSM*, 1993; beberapa laporan CPSM/PERAN: '*Gerakan Transformasi Sosial Untuk Menegakkan Kedaulatan Rakyat di dalam Masyarakat Sipil yang Kokoh: Fajar Baru bagi Ornop*', Januari 1994; Ornop Mencari Format Baru: *Laporan Pertemuan Cisarua*, Juli 1993; '*Laporan Kunjungan Dialog tentang Visi, Masalah, Posisi dan Paradigma Ornop di Indonesia serta Upaya untuk mengatasinya*', 1993; Eldridge, *Non-Government Organization and Democratic Participation in Indonesia*, Kuala Lumpur, Oxford University Press, 1995; Fakhri, *Masyarakat Sipil untuk Transformasi Sosial: Pergolakan Ideologi LSM Indonesia*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 1996; Setiawan, *Organisasi Non-Pemerintah dan Masyarakat Sipil*, PRISMA, No.7 Tahun XXV, Juli 1996; Uhlin, *Oposisi Berserak: Arus Deras Demokratisasi Gelombang Ketiga di Indonesia*, Bandung, Penerbit Mizan, 1998; Setiawan, *Ornop dalam Gerakan Masyarakat Sipil: Analisis terhadap Reposisi Ornop Pasca Orde Baru*, INFID, Jakarta, 1998 (tidak dipublikasikan)

¹³ Ke 7 variabel itu adalah: (1) ciri-ciri masalah/isu yang didefinisikan; (2) masalah yang didefinisikan untuk ditanggulangi; (3) kerangka-waktu; (4) lingkup khusus; (5) aktor utama; (6) pendidikan pembangunan; dan (7) kiblat pengelolaan. Ketiga generasi Ornop itu adalah: generasi pertama yang bersifat 'bantuan dan kesejahteraan', Ornop generasi kedua yang bersifat 'pembangunan swadaya lokal berskala kecil', dan generasi ketiga yang bersifat 'pembangunan berkelanjutan'. Lihat Korten, *Third Generation NGO Strategies*, op.cit.

¹⁴ Fakhri menggunakan istilah '*konformis*' untuk Ornop '*developmentalis*' ini. Lihat Fakhri, Dr. Mansour, *Masyarakat Sipil untuk Transformasi Sosial: Pergolakan Ideologi LSM di Indonesia*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 1996

¹⁵ Variabel yang digunakan antara lain adalah: (1) pandangan terhadap struktur sosial; (2) cara memandang masalah; (3) penyebab masalah; (4) cita-cita atau tujuan; (5) program/cara pemecahan masalah; (6) jenis cara perubahan yang diinginkan; (7) jenis kepemimpinan yang ditekankan; (8) Jasa pelayanan yang diberikan; dan (9) ideologi yang mengilhaminya.

¹⁶ Ornop *parastatal* adalah Ornop yang mengidentifikasi diri secara utuh dengan model pembangunan dan misi pemerintah; Ornop *professional*, yang menggambarkan diri sendiri sebagai a-politis yang secara sosial progressif dan kritis terhadap negara dan partai oposisi; dan Ornop *progressif* secara politik melakukan kegiatan oposisi terhadap negara, dan beraliansi secara politik dengan aliran kiri.

¹⁷ Kriteria itu adalah: kedudukannya dalam program resmi pembangunan, hubungan Ornop dengan pemerintah, konsep tentang demokrasi, dan pendekatannya untuk mobilisasi rakyat.

¹⁸ Empat kategori dasar itu dikembangkannya menjadi 10 wacana demokrasi yang berbeda-beda, yakni: Marxisme, populisme kiri, feminisme, demokrasi sosial, liberalisme politik, liberalisme ekonomi, konservatisme, modernisme Islam, neo-modernisme Islam, dan transformisme Islam. Lihat Uhlin, *Oposisi Berserak: Arus Demokratisasi Gelombang Ketiga di Indonesia*, Bandung, Mizan, 1997.

¹⁹ Drabek [1987] juga mengemukakan bahwa Ornop di India pada umumnya menerima dukungan dan dorongan dari pemerintah, cenderung bekerja sama secara erat dengan pemerintah; dan Ornop Afrika cenderung bekerja sama dengan pemerintah dan menghindari antagonisme; sedangkan Ornop Amerika Latin secara historis berfungsi sebagai oposisi.

²⁰ CPSM [1993] di dalam penelitiannya menemukan 'persepsi diri Ornop' sebagai berikut: (a) Ornop sebagai bagian integral dari pemerintah (istilah yang digunakan adalah '*mitra pemerintah*', atau '*sekutu bukan seteru, dan kawan bukan lawan*'); (b) Ornop sebagai mediator antara pemerintah dengan masyarakat (istilah yang digunakan adalah '*jembatan antara pemerintah dengan masyarakat*'); (c) Ornop yang secara tegas menyatakan memihak rakyat dalam

Ornop dan Negara

- Negara bukanlah hanya sekedar 'pemerintah' tetapi sebagai satu sistem administratif, legal, birokratik dan paksaan yang berkesinambungan. Satu negara tidak selalu *unitary* atau *monolitik*. Setiap negara terdiri dari berbagai bagian, seperti eksekutif, administrasi yang permanen, peradilan (*judisiari*), aparat pemaksa (*coersive*). Elite strategis yang ditugasi sebagai aparat negara pada kenyataannya mengontrol semua bagian komponen dari negara secara bervariasi²¹ [Stepan, 1978]. Pada dasarnya, ada dua pandangan dikotomis Ornop tentang negara, yaitu: (a) '*organic stateism*', menyatakan bahwa negara otonom (atau hampir sepenuhnya otonom) yang memiliki peran sentral di dalam '*polity*' (masyarakat politik), bahwa negara mengatur masyarakat²²; dan (b) pandangan '*liberalist pluralist*', dan pandangan *Marxist* di mana negara diperlakukan sebagai '*dependent variable*' sehingga negara hanya sedikit memiliki kebebasan dan peran di dalam politik, karena masyarakatlah yang memiliki kekuasaan untuk mengatur negara²³.

Pandangan Ornop terhadap Negara

- Meskipun belum ada kajian khusus dan mendalam tentang bagaimana pandangan Ornop terhadap negara, akan tetapi ada tanda-tanda awal yang dapat dijadikan petunjuk sementara adanya tiga cara bagaimana Ornop memandang negara. Ornop yang menganut '*organic stateism*' dan/atau '*corporate stateism*' adalah, menurut 'kategorisasi CPSM', (1) Ornop yang menganggap dirinya sebagai bagian integral dari pemerintah dan (2) Ornop yang menganggap dirinya sebagai mediator antara pemerintah dan masyarakat. Kelompok Ornop ini tidak memberi perhatian pada demokrasi, karena '*kesengsem*' (*ideologically occupied*) oleh '*developmentalisme*', dan tetap percaya pada '*bureaucratic polity*', serta tidak memiliki wawasan perubahan struktural dan bahkan juga pergeseran kontrol dari sistem yang ada [Eldrige, 1990]²⁴.

berhadapan dengan negara (istilah yang digunakan adalah '*pendamping rakyat*'); (d) Ornop yang melebur dan menyatu dengan rakyat (istilah yang digunakan adalah '*menyatu dalam organisasi kelompok basis*').

²¹ Kontrol nyata atas aparat negara bervariasi pada kesatuan (*unity*) atau keretakan (*disunity*) dari elite strategis [lihat Stepan, Alfred, *The State and Society: Peru in Comparative Perspective*, Princeton, New Jersey, Princeton University Press, 1978]

²² Paham 'negara integralistik' yang diintroduksi oleh Soepomo untuk menyebut bentuk negara Indonesia adalah contoh nyata dari pandangan 'organic stateism' ini [lihat Simanjuntak, *Pandangan Negara Integralistik*, Jakarta, Grafiti, 1991].

²³ Stepan mengemukakan tiga kemungkinan hubungan antara negara dan masyarakat sipil, yaitu: (a) bahwa negara bersifat netral secara prosedur dan mengizinkan proses yang otonom dan kompetitif dari agregasi kepentingan dan tuntutan kelompok-kelompok di dalam masyarakat sipil; (b) bahwa negara adalah alat kelas di mana kekuasaan memaksa (*coersive*), administratif, dan legal digunakan untuk mendominasi beberapa fraksi kelas yang di perintah dan melindungi yang lain yaitu kelas yang berkuasa; (c) bahwa negara adalah otonom terhadap masyarakat sipil dan menentukan dirinya sendiri [Stepan, 1978].

²⁴ Pendirian kelompok Ornop ini tercermin di dalam sikap dan tingkah laku mereka terhadap isu yang berkaitan dengan dua kondisi demokrasi yang disebut oleh Dahl ('kebebasan berserikat dan kebebasan berpendapat') yaitu 'rancangan Keppres LSM'. 'Rancangan Keppres LSM' yang sedang ramai dibicarakan parohan terakhir tahun 1994 bermaksud mengontrol Ornop, baik secara politis, organisatoris, maupun finansial. Maksud ini mencerminkan ideologi dan praktek 'korporatisme' negara. Terhadap rancangan 'regulasi' itu, kelompok ini mengakui bahwa negara memang berhak mengatur kehidupan Ornop lewat undang-undang dan sebagai imbalan pengakuan itu 'LSM' hendaknya diikuti sertakan sebagai subyek. Basis analisisnya untuk menelaah 'rancangan Keppres' itu adalah 'itikad baik pemerintah', atau sebagaimana yang dikatakan Eldrige 'tetap percaya pada *bureaucratic polity* dan tidak memiliki wawasan struktural'. Dengan demikian, kelompok ini juga hanya menggunakan peluang partisipasi insitusional yang 'negara korporatis' yang bersifat '*compulsary, state directed and non-conflictual*'. Oleh karena itu, hambatan paling besar yang dihadapi oleh kelompok ini dalam proses 'demokratisasi yang berkedaulatan rakyat' sesungguhnya bersifat internal, karena terletak di dalam darah-dagingnya sendiri, dan bersifat mendasar, karena berupa hambatan 'ideologis' yakni kepercayaan pada konsep '*organic stateism*' dan/atau '*state corporatism*'. Dengan kata lain, selama Ornop kelompok ini tidak mengganti ideologi

- Ornop yang menganut paham '*liberalist-pluralist*' pada intinya berpendapat bahwa masyarakat dibentuk oleh individu-individu yang mengejar kepentingan ekonomi (pertumbuhan modal), sosial (*status*), dan politik (*power*) mereka sendiri-sendiri²⁵. Negara diberi tugas berbeda, yaitu: (a) melindungi masyarakat dari kekerasan dan serbuan dari masyarakat lain, (b) melindungi setiap anggota masyarakat dari ketidakadilan dan penindasan dari anggota lain, (c) melakukan dan memelihara pekerjaan dan lembaga-lembaga publik yang tidak dilakukan oleh orang karena tidak '*profitable*' [Stepan, 1978]²⁶.
- Kelompok Ornop *radikal* menyatakan bahwa negara adalah alat kekuasaan dari kelas dominan untuk menindas, atau negara adalah alat pemaksa (*coercive instrument*) dari kelas dominan. Negara pada awalnya muncul sebagai satu alat paksaan yang diperlukan (*a necessary means of coercion*) ketika terjadi pembagian kerja, dan pada gilirannya menjadi alat penindasan (*instrument of oppression*) sampai dengan terbentuknya masyarakat nir-kelas. Setelah pemilikan pribadi dihapus, dan perbedaan kelas hilang, kebutuhan akan negara sebagai alat penindasan sudah tidak ada lagi, sehingga pada tingkat ini negara tidak lagi diperlukan karena pada dasarnya secara internal masyarakat bisa mengatur dirinya sendiri²⁷.
- Ruang politik antara Ornop dengan pemerintah dibayangi oleh empat hal [Rikker, 1993], yaitu: (a) azas dan ideologi, di mana pemerintah mencari kompatibilitas, kalau

mereka, selama itu pula mustahil mengharapkan mereka terlibat secara aktif dan konstruktif terhadap proses 'demokratisasi yang berkedaulatan rakyat', setidaknya secara teoritis. Meskipun demikian, harapan terjadinya perubahan wawasan ideologis itu bukan sama sekali tertutup oleh karena, menurut penelitian CPSM, ternyata Ornop tidak selalu unitary dan monolitik, sebaliknya seringkali terdapat elemen-elemen pro-demokrasi yang progressif di dalam kebanyakan Ornop model ini, walaupun posisi di dalamnya masih marginal dan kekuatannya belum terlalu besar.

²⁵ Secara implisit teori ini memiliki pra-anggapan yang sama dengan liberalisme klasik bahwa masyarakat pada dasarnya 'mengatur dirinya sendiri' (*self-regulating*). Persaingan antar individu untuk mengejar kepentingan sendiri diatur oleh '*the invisible hand*' lewat mekanisme pasar. Masyarakat adalah sistem *homeostatis* yang hanya mempunyai kebutuhan minimal atas peran negara, atau bahkan sebenarnya tidak ada satupun upaya yang harus dilakukan oleh negara.

²⁶ Ornop ini menyebut dirinya sebagai 'pendamping rakyat' *vis-a-vis* negara. Kelompok Ornop ini berusaha mencari dan menciptakan ruang bagi 'penyadaran sosial dan politik, analisa struktural dan kepedulian tentang hak-hak dasar (HAM), dan demokrasi, serta berinteraksi secara keras dengan pemerintah untuk mempengaruhi, membujuk, dan bilamana perlu menantang dan melawan. Kelompok ini menganggap dirinya mengemban misi untuk: (a) membela rakyat yang memperoleh perlakuan sewenang-wenang dan tidak adil dari negara, (b) melakukan kontrol terhadap tindakan negara yang a-demokratis, melecehkan dan melanggar HAM, atau mendesak negara sampai ke titik di mana '*negara hanya berperan sejauh perlu, dan tidak berperan sejauh mungkin*'; (c) melakukan proses pemberdayaan masyarakat agar mampu melindungi diri dari tindak kesewenang-wenangan negara, atau mendorong (memfasilitasi, menyediakan peralatan bagi) rakyat untuk mengambil peran (partisipasi) sejauh mungkin, dan memiliki akses terhadap sumber-daya dan proses pengambilan keputusan sejauh mungkin. Dalam kasus 'rancangan Keppres LSM' seperti yang disebut di atas, kelompok Ornop ini berpandangan bahwa 'regulasi' seperti 'rancangan Keppres' itu dianggap tidak perlu, karena pada dasarnya Ornop (atau masyarakat) adalah 'mengatur diri sendiri' (*self-regulating*). Ornop ini secara tegas menentang 'rancangan Keppres' itu, dan akan menyerukan atau melakukan aksi '*civil disobedience*' bilamana rancangan itu benar-benar direalisasikan. Kelemahan Ornop ini, seperti yang dikhawatirkan oleh kubu Gramscian, adalah bahwa demokratisasi yang dilakukan dapat terjerumus ke dalam 'bias ideologi' karena perjuangannya tidak diletakkan dalam perspektif perjuangan kelas tertindas, dan 'bias kelas menengah' karena tidak menempatkan kelompok akar-rumput sebagai basis gerakannya.

²⁷ Masyarakat teremansipasi sehingga memiliki kapasitas otonom dan manajemen yang *non-coercive* untuk mengatur dirinya pandangan ini, sebagaimana telah disebutkan, mengatakan bahwa negara dan masyarakat sipil adalah segi-segi dari supra-struktur, sehingga saling berhadapan dalam kontradiksi. Menurut kubu ini, Ornop haruslah 'menyatu dengan kelompok basis' dan melakukan model pendekatan '*empowerment at the grass-roots*'. Kelompok ini sangat menekankan 'peningkatan kesadaran' dan 'kepedulian akan hak', melakukan kegiatan tatap muka secara informal mendorong gerakan rakyat, dan kurang menggantungkan pada perubahan kebijaksanaan pemerintah. Demokratisasi, dalam pandangan Ornop ini, bukanlah dilakukan dengan memperkuat masyarakat sipil, melainkan haruslah secara tegas diletakkan di dalam perjuangan kelas yang tertindas (*mustadza'fin*) untuk membebaskannya. Sikap kelompok Ornop ini terhadap 'rancangan Keppres LSM' adalah bahwa 'regulasi' itu 'dianggap tidak ada' karena tidak relevan bagi 'gerakan rakyat' di tingkat akar-rumput.

bukannya konformitas; (b) sumber dana; (c) organisasi, termasuk manajemen teknis dan sumber-daya manusia; dan (d) partisipasi di dalam debat kebijakan dan masukan untuk mengambil kebijakan. Oleh karena itu terdapat berbagai kemungkinan hubungan antara Ornop dengan pemerintah: (a) 'pembiaran' karena azas otonomi Ornop diterima pemerintah; (b) promosi dan fasilitasi aktif kegiatan Ornop; (c) kolaborasi dan kooperasi; (d) kooptasi dan inkorporasi; (e) penahanan dan penghancuran. Rikker [1993] melihat bahwa pola kolaborasi dan kooperasi, serta kooptasi dan inkorporasi paling banyak terjadi. Jadi pada umumnya Ornop menerima hegemoni negara secara sukarela atau 'menginternalisasikan negara ke dalam dirinya'²⁸

Ornop dan Masyarakat Sipil?

Masyarakat

- Konsep mengenai 'masyarakat' seringkali di dianggap salah satu konsep yang nampaknya berarti apa saja dan bukan apapun [Brittan, 1985], atau 'masyarakat' seringkali dianggap memiliki batas-batas sama dengan negara-bangsa [Kuper & Kuper, 1985]²⁹. Untuk menghindari kesulitan seperti ini, beberapa ahli Marxis, telah mengganti istilah 'masyarakat' dengan istilah 'formasi sosial' (*social formation*), tetapi pada prakteknya dua istilah ini sama [Abercrombie et.al, 1984].
- Di dalam sosiologi³⁰, 'masyarakat' dilihat secara luas dan sempit. Di dalam arti yang luas, masyarakat dilihat sebagai satu kerangka atau keseluruhan di mana di dalamnya manusia terikat di dalam hubungan-hubungan sosial. Masyarakat sebagai satu keseluruhan lebih dari sekedar 'latar-belakang', ia dilihat sebagai pembentuk dari semua perilaku orang (*human conduct*). Masyarakat, dari sudut pandang ini, nampaknya bertindak sebagai satu kekuatan menentukan yang luar biasa. Manusia dilahirkan ke dalam satu rangkaian hubungan sosial yang telah ada (*a ready made set of social relationships*) yang mendominasi kehidupan mereka secara menyeluruh³¹. Dalam artinya yang paling lemah dan sempit, 'masyarakat' dianggap sebagai semacam 'setting' bagi satu pertunjukan di mana pusat perhatiannya pada tujuan (*intension*) dan tindakan dari pelaku (aktor). Dengan kata lain, masyarakat dianggap sebagai satu lingkungan sosial yang meliputi *agregasi* dari seluruh orang sebegitu rupa sehingga mereka mempengaruhi dan membentuk tingkah laku tertentu dari orang.
- Konsep 'masyarakat' sulit dirumuskan dan biasanya yang ada adalah rumusan yang kabur. Sejarah sosiologi dipenuhi oleh berbagai ragam upaya untuk mencapai satu

²⁸ 'Internalisasi ke dalam negara' ini dilakukan lewat lewat (a) penamaan dirinya dengan sebutan LSM, (b) memperlakukan diri sebagai perpanjangan tangan pemerintah (negara korporatis), dan (c) penerimaan 'ideologi developmentalisme' yang dianut negara [CPSM,1993].

²⁹ Para ahli sosiologi pada prakteknya sering menggunakan istilah sehari-hari ini, padahal pendapat seperti itu dianggap tidak memadai, karena masyarakat tidak selalu berhubungan dengan batas-batas politik (sebagaimana terjadi di dalam 'masyarakat Palestina') [lihat Abercrombie et.al, 1984: 231-232].

³⁰ Sosiologi diharapkan menjadi 'kajian mengenai masyarakat' [Kuper & Kuper,1985] dan menganalisis masyarakat yang dapat diperlakukan pada setiap tingkat (misalnya, interaksi diadik, kelompok sosial, organisasi luas atau keseluruhan masyarakat). [Abercrombie et.al., *Dictionary of Sociology*, London, Penguin Books, 1984, pp. 231-232].

³¹ Sejak dari bayi yang baru lahir sampai ke liang kubur orang disosialisasikan oleh masyarakat, atau, lebih tepatnya, oleh agen-agen di dalam masyarakat. Sudah barang tentu, definisi yang kuat ini biasanya dikualifikasikan oleh pengangkatan konteks sosial tertentu. Meskipun kita berbicara tentang dunia atau masyarakat internasional, para ahli ilmu-ilmu sosial cenderung memusatkan pada masyarakat tertentu. Jadi, misalnya, masyarakat Inggris adalah satu totalitas (keseluruhan) yang relevan bagi ahli sosiologi Inggris. Dengan demikian, adalah masyarakat tertentu yang biasanya diberi penjelasan utama di dalam analisis social [Brittan, 1985].

rumusan yang memuaskan³². Ahli-ahli teori sosial telah berupaya untuk mengkonseptualisasikan ‘masyarakat’³³, sebagai berikut:

- (1) *Masyarakat sebagai struktur (society as structure)*³⁴.
- (2) *Masyarakat sebagai yang selalu berulang terjadi (society as recurrence)*³⁵.
- (3) *Masyarakat sebagai kontradiksi (society as contradiction)*³⁶.
- (4) *Masyarakat sebagai kebudayaan (society as culture)*³⁷.
- (5) *Masyarakat sebagai proses (society as process)*³⁸.

- Pada satu setengah dasawarsa terakhir abad 20, beberapa ahli mengenai ‘Teori yang Membebaskan’ (*Liberating Theory*) mencoba mengembangkan satu perspektif baru tentang ‘masyarakat’, yaitu yang mereka sebut sebagai perspektif yang bersifat *monistis, pluralis, dan holistis* (Albert et.al., 1986).

³² Diskusi klasik Durkheim atas ‘masyarakat’ sebagai satu keberadaan yang bersifat eksternal terhadap individu telah memiliki pengaruh lama dan kuat pada banyak ahli sosiologi. Pendakuannya bahwa pengetahuan dan individualitas secara fundamental berasal dari sosial masih tetap cenderung mendominasi pemikiran sosial. Lebih dari itu, di dalam diskusi-diskusi mutakhir subyektivitas dan intensionalitas telah diperlakukan sebagaimana hal itu keseluruhannya bersifat sosial. Masalahnya dengan cara berpikir seperti ini adalah bahwa hal itu cenderung menjadikan ‘masyarakat’ sebagai satu benda (*a thing*) yang merefleksikan proses dengan mengisinya dengan satu kehidupan mereka sendiri [lihat Brittan, 1985].

³³ Semua strategi ini secara implisit atau eksplisit mengandung anggapan (asumsi) tentang sifat-sifat manusia dan individu. Beberapa teori mutakhir telah menolak secara penuh individu sebagai satu datum bagi analisis sosial [Althusser, 1969; Foucault, 1972]. Meskipun demikian, oposisi antara individu dengan masyarakat tetap menjadi satu tema kesadaran populer dan akademis, khususnya di dalam konteks dari kepedulian kontemporer mengenai serangan dadakan bahwa birokrasi dan negara telah masuk ke dalam sphere individu. Perbedaan lama antara ‘negara’ dan ‘masyarakat’ sulit dipelihara di dalam satu periode di mana negara kelihatannya masuk ke dalam setiap segi kehidupan sosial [Brittan, 1985].

³⁴ Ahli sosiologi arus utama cenderung untuk mentakrifkan ‘masyarakat’ sebagai struktur, yaitu, satu jejaring yang dapat dikenal dari lembaga-lembaga (*institutions*) yang saling berhubungan. Kata ‘dapat dikenal’ (*recognizable*) adalah krusial di dalam konteks ini, karena hal itu menyarankan bahwa cara di mana masyarakat berbeda satu dengan lainnya tergantung pada kebiasaan (*manner*) di mana lembaga-lembaganya yang tertentu saling berhubungan (*interconnected*) [Brittan, 1985].

³⁵ Pemikiran bahwa masyarakat distrukturkan tergantung pada reproduksinya sepanjang waktu. Di dalam hal ini istilah ‘lembaga’ (*institution*) adalah krusial. Bentuk ‘terlembagakan’ (*institutionalized*) dari perilaku sosial (*social conduct*) mengacu ke cara-cara kepercayaan (*modes of belief*) dan tingkah laku yang terjadi dan terjadi-ulang (*recur*) atau ... yang diproduksi-ulang secara sosial (*socially reproduced*) [Giddens, 1982]. Oleh karenanya, meskipun masyarakat Inggris terus-menerus berubah, misalnya, dapat dikenali ciri-ciri utamanya karena hal itu diproduksi-ulang di dalam bentuk yang terlembagakan (*institutionalized*).

³⁶ Dalam pandangan bahwa ‘masyarakat’ distrukturkan dan diproduksi-ulang tidak digambarkan mengapa dan bagaimana distrukturkan dan direproduksi. Pandangan Marxis mencoba memberikan satu basis untuk memahami bagaimana formasi tertentu muncul dan berkaitan dengan cara produksi tertentu (*particular modes of production*). Dalam hal ini, masyarakat bukanlah satu struktur yang statis dan berkembang damai secara gradual, melainkan dilihat sebagai pemecahan sementara (*tentative solution*) atas konflik yang muncul dari hubungan sosial antagonistik dari produksi. Jadi masyarakat kapitalis selalu merupakan proses yang ditransformasikan oleh ketegangan dan kontradiksi yang secara implisit ada di dalam cara produksi [Marx, 1913].

³⁷ Seringkali, ahli-ahli ilmu-ilmu sosial menekankan segi-segi budaya dari hubungan sosial. Dalam melakukan hal itu, dilihat bahwa masyarakat dimungkinkan oleh adanya pemahaman yang sama (*shared understanding*) dari anggota-anggotanya. Manusia berada di dalam satu universe linguistik dan simbolik yang telah mereka bangun sendiri, sehingga ‘masyarakat’ diperlakukan sebagai satu sistem simbolik dan komunikasi yang amat kompleks. Penekanan pada kebudayaan ini terkait dengan pemikiran bahwa masyarakat adalah didukung oleh gagasan (*ideas*) dan nilai-nilai [Weber, 1930; Parsons, 1968]. Ada satu masalah yang terus-menerus terjadi (*perennial*) dari analisis sosial ini yaitu pembedaan analitis antara kebudayaan dengan masyarakat.

³⁸ Pandangan ini menekankan terus-menerus berlangsungnya interaksi orang yang satu dengan yang lainnya. Istilah kuncinya adalah ‘perundingan’ (*negotiation*), ‘diri – yang lain’ (*self-other*), ‘reflexivity’. Implikasinya adalah bahwa ‘masyarakat’ dinyatakan dan dinyatakan-ulang (*constitute and reconstitute*) di dalam interaksi sosial. Masyarakat tidaklah dipaksakan pada orang di dalam definisi prosessual; melainkan masyarakat harus diterima dan dikonfirmasi oleh partisipannya. Setiap episode interaksi di dalamnya berisi kemungkinan inovasi dan perubahan. Jadi berlawanan dengan pandangan masyarakat yang dilihat sebagai satu ‘struktur’, pandangan proses mendesak (*assert*) bahwa orang ‘membuat’ struktur (Mead, 1934; Goffman, 1959; Garfinkel, 1967). Gagasan ini bisa mengaitkan pandangan proses atas masyarakat dengan pandangan Marxisme yang humanistik.

- (1) Perspektif monistis pada dasarnya bersifat *reduksionis* karena beranggapan bahwa hubungan-hubungan sosial yang penting berakar pada satu determinan (misalnya ekonomi, negara atau politik, kebudayaan, atau *gender*) yang merupakan kekuatan penggerak sejarah. Marxist idealis ortodoks melihat bahwa ekonomi dan hubungan-hubungan kelas sebagai alat untuk menjelaskan semua bentuk dominasi, tidak saja dominasi ekonomi, akan tetapi juga dominasi seksual, rasial, politik. Demikian feminis idealis, yang hanya melihat pada *gender*; sedangkan nasionalis idealis melihat pada kebudayaan, dan anarkis idealis melihat pada negara (Albert et.al., 1986:6).
- (2) Perspektif pluralis menolak monistis yang reduksionitis dan terlalu berlebihan menekankan hanya pada satu faktor determinan tunggal seraya mengabaikan dinamika faktor-faktor yang lain. Misalnya dengan hanya menggunakan konsep kelas saja akan mengalami banyak kesulitan untuk menjelaskan kehidupan pabrik sehari-hari, dan bahkan hanya dengan menggunakan konsep itu saja akan sulit memahami sistem ekonomi, dan sistem masyarakat. Para penganut paham pluralis ini mencoba menghindari distorsi seperti itu.
- (3) Perspektif holistik memandang bahwa bagian-bagian dari realitas bekerja bersama untuk membentuk anyaman keseluruhan. Dalam terminologi ahli ilmu alam David Bohm, semua gejala 'seharusnya dipahami tidak sebagai bagian-bagian yang bebas dan keberadaannya tetap... melainkan sebagai hasil yang telah dibentuk didalam keseluruhan gerak dan yang pada akhirnya mencari kembali menjadi gerakan'.

Masyarakat Sipil

- Di dalam ilmu-ilmu sosial, tidak ada kesepakatan pemisahan teoritis dan empiris antara hubungan politik, ekonomis dan sosial [Abercrombie et.al.,1984]. 'Masyarakat sipil' sebagai istilah dan konsep teoritik masih terus berkembang, dan paling tidak istilah atau konsep itu dipergunakan dalam berbagai pengertian³⁹. Pada abad 18, A. Ferguson (1767) memperlakukan 'masyarakat sipil' sebagai masalah '*civility*' dan sebagai akibat dari '*civilisasi*', dan juga memperlakukan 'masyarakat sipil' sebagai istilah politik, yang mengkontraskan pemerintahan Barat dengan despotisme Timur (*oriental despotism*). Istilah itu juga mempunyai konotasi ekonomi dalam arti '*civilisasi*' dikontraskan dengan masyarakat (negara barbarik) di mana kepemilikan pribadi (*private property*) tidak ada⁴⁰. Istilah 'masyarakat sipil' akhirnya sampai ke dalam ilmu sosiologi⁴¹ lewat analisis dari G. Hegel dan K. Marx.

³⁹ Pergeseran makna dari konsep 'masyarakat sipil' menunjukkan perubahan sikap teoritis terhadap hubungan antara ekonomi, masyarakat dan negara.

⁴⁰ Ferguson (1767) memahami 'masyarakat sipil' sebagai 'suatu visi etis dalam kehidupan bermasyarakat' untuk melihat perubahan sosial yang diakibatkan oleh revolusi industri dan berkembangnya kapitalisme. Ekonomi pasar telah menggusur tanggung jawab sosial seraya mengejar pemuasan kepentingan pribadi. Oleh karena itu 'masyarakat sipil' mencoba mengembalikan semangat publik dan solidaritas sosial seraya menangkak munculnya kembali *despotisme*.

⁴¹ Sosiologi muncul dari ekonomi politik, filsafat sosial dan 'statistik moral', maka ia menjelajah wilayah fenomena interaksi sosial, simbolik dan normatif yang terjadi di dalam 'masyarakat'/'*society*', sementara itu hubungan politis (negara, kekuasaan, pemerintahan, partai politik, dsb.) dibiarkan tetap menjadi ranah ilmu politik, dan ekonomi menjadi ilmu pengetahuan tentang produksi dan distribusi sumber-sumber ekonomi. Berlawanan dengan kecenderungan perbedaan intelektual ini, sosiologi juga dapat diperlakukan sebagai satu sintesis yang mencoba mengintegrasikan gejala politik, ekonomi, dan sosial (sebagaimana dikemukakan oleh A. Comte). Di dalam Marxisme juga ada ambivalensi yang sama. Di dalam metafora basis dan superstruktur, basis ekonomi dikontraskan dengan superstruktur hukum, hubungan politik dan sosial. Sebaliknya, diargumentasikan

- Hobbes dan Locke menggunakan istilah itu sebagai satu tahapan evolusioner dari masyarakat alamiah (*natural society*), di mana ‘masyarakat sipil’ dianggap sama dengan negara yang berfungsi sebagai pelindung kebebasan dan hak warga negara, karena manusia terlibat di dalam konflik terus-menerus (*homo homini lupus*). Bagi Hobbes, negara harus mempunyai kekuasaan mutlak untuk melakukan kontrol atas warga negara; sedangkan Locke menolak pandangan itu, karena warga negara memiliki hak untuk menolak kekuasaan negara, jika negara tidak menjamin kebebasan dan tidak melindungi hak warga negara. Hegel [1873] melihat ‘masyarakat sipil’ sebagai ‘*buergerliche gesellschaft*’, yaitu ranah individual dan kepentingan pribadi, yang dipergunakan untuk memenuhi kepentingan individu dan kelompok, sehingga kemakmuran masyarakat secara keseluruhan diabaikan. ‘Masyarakat sipil’ menjadi satu lembaga perantara (*intermediate institution*) antara keluarga dan hubungan politik di dalam negara. Sebaliknya negara memiliki pandangan meliputi yang akan membawa manusia menuju kemakmuran bersama. Oleh karenanya negara mewakili kepentingan umum dan berada di atas masyarakat, di mana individu harus tunduk.
- Marx, sekalipun tetap mempertahankan pandangan Hegel mengenai masyarakat sipil, membalikkan pandangan Hegel tentang negara karena. Di dalam *The German Ideology* [1845b], Marx dan Engels⁴² berpendapat bahwa ‘masyarakat sipil adalah sumber-sumber yang sebenarnya dan drama dari semua sejarah’, yaitu, penjelasan mengenai peristiwa politik, perubahan legal dan perkembangan kebudayaan yang dilihat di dalam perkembangan struktur dari masyarakat sipil. Bagi Marx, negara tidaklah berada di atas masyarakat melainkan merupakan perwujudan dari struktur masyarakat, karena negara dianggap sebagai pelaksana dari kelas (borjuis) yang memerintah.
- Konsepsi Marxis diadopsi oleh Gramsci (1971) yang berpendapat bahwa ‘masyarakat sipil’ merupakan wilayah dari kehidupan sosial yang muncul sebagai ranah warga negara pribadi dan kerelaan (*consent*) individual, yang terletak diantara *sphere* hubungan memaksa (*coercive relation*) dari negara dengan *sphere* produksi ekonomi. ‘Masyarakat sipil’ dan negara adalah segi-segi dari supra-struktur yang keduanya tidak saling bertentangan (negara merupakan segi kekuasaan, masyarakat sipil mencerminkan segi kebudayaan di mana hegemoni kelas penguasa ditanamkan)⁴³. Pandangan lain adalah bahwa ‘masyarakat sipil’ sebagai kekuatan penyeimbang dari kekuatan negara, sebagaimana yang dikemukakan oleh Alexis de Tocqueville. ‘Masyarakat sipil’ dilihat sebagai ranah kehidupan sosial yang terorganisasikan yang bercirikan kesukarelaan, keswasembadaan, keswadayaan, kemandirian dalam berhadapan dengan negara [Hikam, 1996].
- Belum ada kajian yang luas ataupun mendalam mengenai bagaimana pandangan Ornop terhadap masyarakat dan masyarakat sipil. Akan tetapi di dalam berbagai diskusi para aktivis dan ahli seringkali muncul tanda yang kuat menonjolnya pandangan Hegelian (Budiman, 1990), dalam arti ada kecenderungan kuat bahwa

bahwa, misalnya, hubungan produksi secara serentak bersifat hubungan sosial, ekonomi dan legal [Abercrombie et. al., 1984]

⁴² Di dalam karya Marx dan Engels, jarang dapat ditemukan istilah ‘masyarakat sipil’. Mereka berpendapat bahwa ada dikotomi yang lebih mendasar antara ‘masyarakat sipil’ (hubungan sosio-ekonomis secara menyeluruh dan kekuatan-kekuatan produksi) dengan negara sebagai perwujudan superstruktur dari hubungan kelas di dalam masyarakat sipil [Abercrombie et. al., 1984].

⁴³ Rumusan Gramsci mengenai hubungan antara ekonomi, masyarakat dan negara dalam arti dua yang kontras antara kehidupan pribadi dan publik, kerelaan (*consent*) dan paksaan (*coercion*) telah memainkan peran yang fundamental di dalam analisis Marxis kontemporer mengenai ideologi dan kekuasaan (*power*). Pengaruh ini khususnya terlihat di dalam kontras antara ‘*ideological state apparatus*’ dan ‘*repressive state apparatus*’ di dalam karya L. Althusser [lihat Althusser, Louis, *Ideology and Ideological State Apparatus (Notes Towards an Investigation)* dalam Hanhardt, John G., *Video Culture: A Critical Investigation*, New York, Visual Studies Workshop Press, 1986, pp.56-95].

negara dihadap-mukakan kepada masyarakat sipil sebagai dua instansi yang saling berlawanan. Implikasi dari padangan seperti itu adalah bahwa, misalnya, demokrasi akan terwujud bilamana masyarakat sipil diperkuat.

Ornop dan Demokrasi

Demokrasi

- Pembahasan tentang demokrasi pada umumnya selalu cenderung diletakkan di dalam konteks interaksi antara negara dan masyarakat sipil⁴⁴, sehingga demokratisasi dimengerti sebagai satu proses memperkuat masyarakat sipil. Pandangan ini benar dalam konteks definisi masyarakat sipil sebagai masyarakat dengan hak-hak dasarnya; tetapi bilamana diletakkan dalam interpretasi Gramscian, maka upaya memperkuat masyarakat sipil tidak serta merta sama dengan demokratisasi yang berpihak pada rakyat tertindas di mana kedaulatan rakyat benar-benar menjadi kenyataan. 'Demokrasi yang berkedaulatan rakyat' memang terdengar agak 'redundant', akan tetapi istilah itu menjadi bermakna bilamana istilah itu dipergunakan untuk menyebut proses demokratisasi yang berpihak pada dan datang dari rakyat lapis bawah sekaligus membedakannya dengan demokrasi yang telah dinikmati oleh lapisan menengah dan datang dari atas (cf. Wiradi, 1994).
- Robert Dahl merumuskan tatanan politik demokrasi⁴⁵ dengan menggunakan dua dimensi, yaitu: (1) seberapa tinggi tingkat kontestasi, kompetisi atau oposisi yang dimungkinkan; dan (2) seberapa banyak warga negara memperoleh kesempatan berpartisipasi dalam kompetisi politik itu. Sistem demokrasi mencerminkan mekanisme politik yang dianggap bisa menjamin adanya pemerintah yang tanggap terhadap preferensi dan keinginan warga negaranya. Untuk itu rakyat harus diberi kesempatan untuk: (1) merumus preferensinya atau kepentingannya sendiri; (2) memberitahukan preferensinya itu kepada sesama warga negara dan kepada pemerintah melalui tindakan individual maupun kolektif; dan (3) mengusahakan agar kepentingan itu dipertimbangkan secara setara dalam proses pembuatan keputusan pemerintah, artinya tidak didiskriminasikan berdasar isi atau asal-usulnya. Kesempatan (bagi rakyat) hanya mungkin tersedia kalau lembaga-lembaga dalam masyarakat menjamin adanya berbagai kondisi⁴⁶. Dengan kata singkat demokrasi adalah masalah

⁴⁴ Dengan anggapan bahwa bilamana masyarakat sipil nisbiah kuat *vis-a-vis* negara, maka demokrasi dianggap menang; demikian juga sebaliknya bilamana negara kuat dan masyarakat sipil lemah, maka dianggap demokrasi kalah.

⁴⁵ Dahl menggunakan istilah 'poliarki'; sedangkan demokrasi didefinisikan sebagai: 'suatu sistem pemerintahan yang memenuhi tiga sarat pokok: kompetisi yang sungguh-sungguh dan meluas diantara individu-individu dan kelompok-kelompok organisasi (terutama partai politik) untuk memperebutkan jabatan-jabatan pemerintahan yang memilik kekuasaan eksekutif, pada jangka waktu yang reguler dan tidak melibatkan penggunaan daya paksa; partisipasi politik yang melibatkan sebanyak mungkin warga negara dalam pemilihan pemimpin atau kebijakan, paling tidak melalui pemilihan umum yang diselenggarakan secara reguler dan adil, sedemikian rupa sehingga tidak satupun kelompok sosial (warga negara dewasa) yang dikecualikan; dan satu tingkat kebebasan sipil dan politik, yaitu kebebasan berbicara, kebebasan pers, kebebasan untuk membentuk dan bergabung ke dalam organisasi, yang cukup untuk menjamin integritas kompetisi dan partisipasi politik' (Diamond, et.al., 1990: 6-7; dikutip dari Mas'ood, 1994)".

⁴⁶ Kondisi itu adalah: (1) kebebasan untuk membentuk dan bergabung dalam organisasi; (2) kebebasan mengungkapkan pendapat; (3) hak untuk memilih dalam pemilihan umum; (4) hak untuk menduduki jabatan publik; (5) hak para pemimpin untuk bersaing memperoleh dukungan suara; (6) tersedianya sumber-sumber informasi alternatif; (7) terselenggaranya pemilihan umum yang bebas dan jujur; (8) adanya lembaga-lembaga

pengendalian atas asets politik dan ekonomi, yang didistribusikan secara luas, dan arus informasi yang terbuka, sehingga ada kemajuan yang merata dan berkesinambungan (Korten, 1987). Oleh karenanya proses 'demokratisasi' memerlukan 'pengembangan organisasi bebas (independen) dan saling terkait dalam satu mozaik yang kompleks di mana orang mendefinisikan dan mengejar kepentingan individu dan kolektif di dalam kerangka kebijakan nasional.

- Di Indonesia dapat dilihat tiga perspektif tentang demokrasi, yaitu:
 - (1) Demokrasi perwakilan atau konstitusional dalam konteks Barat (atau yang disebut dengan 'demokrasi liberal'), yang didasarkan pada pemilihan kompetitif dan terbuka yang menghasilkan pilihan perwakilan/wakil-wakil yang bertanggung jawab kepada rakyat pemilih (paling tidak di dalam prinsip);
 - (2) Demokrasi Pancasila, yang bertumpu pada proses musyawarah dan mufakat (paling tidak demikianlah yang selalu diklaim); dan
 - (3) Demokrasi Kedaulatan Rakyat, yang sering dikaitkan dengan kubu kiri⁴⁷.

Pandangan Ornop terhadap Demokrasi

- Pandangan Ornop dalam proses 'demokratisasi yang berkedaulatan rakyat' itu akan bergantung pada definisi mereka tentang masyarakat, yaitu apakah didasarkan pada pandangan konsensus⁴⁸ dan pandangan konflik⁴⁹, meski sebenarnya terdapat berbagai varian, misalnya saja model konsensus memiliki varian-varian antara lain model 'karitatif', model 'developmentalistik', dan model 'reformistis'. Sehubungan dengan perspektif demokrasi yang terdapat di Indonesia, Ornop bersikap ambivalen terhadap perspektif demokrasi perwakilan (atau demokrasi 'liberal'). Pada umumnya Ornop merasa kurang 'sreg' (kurang pas) dengan sisi individualistik yang ditonjolkan di dalam ideologi demokrasi liberal ini. Disamping itu nampak tidak ada legitimasi kultural bagi model politik yang diberi cap liberal atau barat ini. Ornop cenderung memilih perspektif 'demokrasi Pancasila' yang bertumpu pada azas musyawarah dan

yang menjamin agar kebijaksanaan publik tergantung pada suara dalam pemilihan umum dan pada cara-cara penyampaian preferensi yang lain (Dahl, 1973--dikutip dari Mas'ood, 1994).

⁴⁷ Berkaitan dengan perspektif demokrasi yang terakhir ini terdapat dua model. Pertama, model Hatta, yaitu demokrasi kedaulatan rakyat dalam arti bahwa pemerintah bertanggung jawab lewat legislatif yang dipilih (sistem perwakilan); dan kedua model Tan Malaka, yang bertumpu pada aksi massa langsung (di Barat disebut dengan *anarcho-syndicalist*), di mana pengambilan keputusan dilakukan lewat aksi atau partisipasi langsung massa. 'Demokrasi kedaulatan rakyat', meski sudah ada sejak lama tetapi kemudian mati terlihat mulai muncul di beberapa Ornop radikal dewasa ini. Berkaitan dengan ini nampak ada konvergensi antara Ornop yang radikal dan Ornop arus utama pada tuntutan 'hak berorganisasi' sesuai dengan Ps. 28 UUD'45 [Eldridge, 1995].

⁴⁸ Pandangan konsensus pada dasarnya menganggap bahwa struktur sosial itu merupakan hasil konsensus (kesepakatan) bersama dari anggota masyarakat. Setiap masyarakat pada hakekatnya teratur dan stabil, karena adanya kebudayaan bersama (yakni nilai-nilai, norma-norma, dan tujuan bersama) yang dianut dan dihayati oleh anggota masyarakat. Masalah yang muncul dinilai sebagai penyimpangan dari nilai dan norma bersama, sehingga dianggap membahayakan stabilitas sosial. Dengan demikian pemecahannya selalu diusahakan dalam kerangka tatanan sosial yang ada oleh karena tatanan sosial yang ada harus dipertahankan dan dijunjung tinggi. Model ini menjadi pangkal tolak dari ideologi konservatif, ideologi developmentalisme, dan ideologi liberalisme.

⁴⁹ Berbeda dengan model konsensus, pandangan konflik memandang struktur sosial yang ada sebagai hasil pemaksaan sekelompok kecil anggota masyarakat terhadap mayoritas warga masyarakat, bukannya sebagai hasil kesepakatan bersama. Norma, hukum, dan undang-undang dalam masyarakat adalah ciptaan kelompok elite yang berkuasa untuk mempertahankan kekuasaan, kepentingan dan milik mereka. Model ini selalu mempertanyakan tatanan yang sudah ada dan mapan, dan memandang perubahan sosial dan konflik sebagai positif. Praktek dan tindakan a-demokratis, misalnya, dipandang sebagai akibat dari struktur yang tidak adil, sebagaimana tercermin dari praktek dominasi, penindasan dan eksploitasi, bukannya sebagai akibat dari unsur-unsur internal seperti nilai dan mentalitas. Oleh karenanya program aksi demokratisasi adalah menggalang solidaritas kelompok yang terhegemoni atau tertindas untuk mewujudkan satu tatanan politik, ekonomi, sosial dan budaya yang lebih manusiawi, adil, dan merata lewat pendidikan penyadaran.

mufakat, karena dua alasan, yaitu: demokrasi ini dianggap cocok dengan retorika mereka, dan juga cocok dengan kehidupan sehari-hari mereka. Demokrasi Pancasila diberi makna sesuai dengan pandangan mereka sendiri: tujuan/cita-cita akhir adalah mencari pemecahan bagi kelompok secara keseluruhan daripada bagi segelintir orang/individu.

- Satu hal lagi yang perlu dikemukakan sehubungan dengan persoalan demokrasi dan masyarakat sipil. Tafsiran Gramscian yang menyatakan bahwa negara (masyarakat politik) dan masyarakat sipil adalah bagian dari supra-struktur sehingga keduanya tidaklah berhadapan-hadapan, maka perjuangan demokratisasi bukanlah dicapai melalui upaya memperkuat masyarakat sipil, karena masyarakat sipil tidaklah berada di dalam kontradiksi dengan negara. Masyarakat sipil bekerja bergandengan tangan dengan negara untuk memperkuat sistem sosial yang dominan yang ada (yakni '*mode of production*'). Di dalam kerangka pikir ini, demokrasi dapat berkembang bilamana kelas penguasa yang sedang berkuasa berpikir perlunya mendemokratisasikan sistem politik untuk memperkuat hegemoninya. Demokrasi adalah satu fungsi dari perkembangan sejarah sistem sosial yang dominan, bukannya dinamisasi dari masyarakat sipil. Demokrasi tidak selalu berarti adanya kemajuan sejarah atas pembebasan kelas tertindas, karena demokrasi dapat pula berarti hanya berpihak kepada kelas penindas, untuk memperkuat hegemoni dari kelas ini dan negara atas kelas yang tertindas. Oleh karena itu, bagi Gramsci, proses demokratisasi haruslah diletakkan di dalam perspektif perjuangan kelas ini yaitu apakah ia berpihak kepada kelas tertindas atau kelas penindas.

Ornop dan Advokasi

- Di kalangan Ornop di Indonesia, kata *advokasi* itu sering dilekatkan pada satu jenis Ornop yang dianggap banyak melakukan kritik dan bahkan oposisi terhadap pemerintah atau negara, sehingga banyak pula Ornop yang cenderung 'alergi' terhadap kata itu, khususnya pada masa jaya rezim Orde Baru. Sedangkan di kalangan Ornop yang tidak 'alergi' terhadap kata itu, seringkali juga terdapat perbedaan penafsiran yang tajam, di satu pihak kata itu digunakan untuk menunjuk hanya pada berbagai kegiatan yang ditujukan untuk mendorong perubahan kebijakan publik (pemerintah) saja, sehingga upaya pemberdayaan rakyat tidaklah termasuk di dalam pengertian itu; di lain pihak tafsiran lain mengatakan bahwa dalam kata itu tersirat juga adanya kegiatan pemberdayaan.
- Ornop 'developmentalistik'⁵⁰ yang terlibat di dalam 'gerakan kesejarahan' [Touraine, 1985]⁵¹ yang dipimpin oleh rezim 'developmentalis-modernis' yang dikemudikan oleh militer [Hadiz, 1992] secara eksplisit menganggap dirinya sebagai 'mitra pemerintah' atau bahkan 'kepanjangan tangan pemerintah' [CPSM, 1994]. Ornop **ini tidak**

⁵⁰ Fakih [1996] menyebutnya dengan Ornop 'konformistis'. Ornop yang disindir dengan sebutan 'BINGO' yang berdomisili di Jakarta, dengan amat sedikit perkecualian, kebanyakan masuk di dalam kategori Ornop ini

⁵¹ 'Gerakan kesejarahan' (*historical movement*) adalah gerakan yang dilakukan oleh negara sebagai aktor utama dalam perubahan sosial, baik atas nama borjuasi nasional ataupun borjuasi asing, maupun atas nama negara nasional atau negara asing, sehingga peran campur-tangan negara menjadi lebih besar daripada peran prakarsa masyarakat. Gerakan kesejarahan ini, oleh Touraine, dibedakan dengan 'gerakan sosial' dan 'gerakan kebudayaan' di mana pelaku utamanya adalah kelas-kelas atau kelompok-kelompok sosial di dalam masyarakat [lihat Touraine, A., *Social Movement and Social Change*, dalam Orlando False (ed.), *The Challenge of Social Change*, London, Sage, 1985]

mengenal konsep dan oleh karena itu menolak kegiatan advokasi, yang diberi arti sangat sempit dan negatif sebagai tindakan-politis oposisi terhadap negara.⁵²

- Ornop 'reformatoris' pada umumnya memberi tafsiran atas advokasi sebagaimana tafsir aliran liberal⁵³. Inti dari tafsir ini adalah bahwa tatanan politik, ekonomi, dan sosial yang ada dianggap sudah layak dan benar, dan masalah yang ada adalah masalah penyimpangan dari pelaksanaan aturan-aturan yang telah ada. Lembaga-lembaga politik yang ada sudah layak, hanya tidak berfungsi, pelaksanaan perekonomian menyimpang dari prinsip-prinsip ekonomi pasar persaingan bebas, dan praktek sosial tidak dilandasi oleh aturan hukum yang disepakati bersama. Oleh karena itu advokasi, antara lain, adalah 'penegakan hukum' (*law enforcement*).
- Ornop 'transformatoris' memberi takrif 'advokasi' lebih radikal, karena menganggap bahwa tatanan sosial dan politik itu diciptakan oleh kelas yang berkuasa sehingga tidak adil bagi rakyat. 'Advokasi' bagi Ornop ini adalah kegiatan oleh-kekuasaan yang ditujukan pada penyelenggara kekuasaan negara, pemegang kekuasaan ekonomi, dan tatanan masyarakat sipil dengan tujuan agar terjadi perubahan pada tataran '*infrastruktur*', '*struktur sosial*', dan '*suprastruktur ideologis*' sehingga tercipta '*global good governance*'. Ornop jenis ini jumlahnya tidak terlalu banyak.

Ornop dan Pemberdayaan Rakyat

- Upaya melawan perampasan daya masyarakat yang dilakukan secara sistematis⁵⁴ pada skala lokal dilakukan oleh Ornop, meskipun tidak berarti bahwa Ornop adalah satu-satunya pelaku yang melakukan hal itu. Upaya itu meliputi suatu pentakrifan-ulang peran antara negara dan masyarakat sipil, dan antara masyarakat sipil dengan korporasi ekonomi, dengan perhatian khusus diberikan pada bentuk partisipasi politik yang baru di dalam perencanaan, tindakan komunal, organisasi ekonomi, dan hubungan *gender* di dalam rumah tangga dan di dalam komunitas politik. Ada tiga dimensi pemberdayaan, menurut Friedmann (1992), yakni masing-masing berkaitan dengan kekuasaan sosial, politik, dan psikologis.
- **Kekuasaan sosial** (*social power*) berkaitan dengan akses kelompok-kelompok basis (antara lain rumah tangga, serikat buruh, koperasi rakyat) kepada informasi, pengetahuan dan ketrampilan, partisipasi di dalam organisasi sosial, dan sumber keuangan. Jika kelompok-kelompok basis itu meningkatkan aksesnya pada berbagai hal itu, maka kemampuannya untuk merancang dan mencapai tujuan juga meningkat.

⁵² Sebagai contoh nyata adalah sikap Ornop jenis ini pada masa jaya Suharto ketika pemerintah pada tahun 1994 berkeinginan menerbitkan 'Keppres untuk mengatur LSM'. Ornop jenis ini menentang rencana aksi advokasi yang akan digelar oleh komunitas Ornop, dengan alasan bahwa: (a) 'rancangan Keppres' itu adalah 'itikad baik pemerintah', (b) negara memang berhak mengatur kehidupan Ornop lewat undang-undang, (c) kegiatan advokasi semacam itu bersifat politis, padahal Ornop seharusnya tidak berpolitik, (d) kegiatan advokasi itu bersifat oposisional terhadap negara dan pemerintah, padahal seharusnya Ornop berfungsi sebagai 'mitra pemerintah' di dalam pembangunan, dan (e) Ornop bahkan seharusnya ikut di dalam proses penyusunan aturan itu supaya diperlakukan sebagai subyek. Sebagaimana yang dikatakan Eldrige [1990] 'tetap percaya pada *bureaucratic polity* dan tidak memiliki wawasan struktural'. Dengan demikian, kelompok ini juga hanya menggunakan peluang partisipasi insitusional yang 'negara korporatis' yang bersifat '*compulsary, state directed and non-conflictual*'.

⁵³ Lihat takrif 'advokasi' yang dikemukakan oleh pakar advokasi Cohen [1995] dari negara demokrat liberal seperti AS, sebagaimana yang dikemukakan di halaman 2.

⁵⁴ Friedman [1992] menyatakan bahwa globalisasi kapital telah secara nyata meningkatkan pertumbuhan ekonomi dunia, akan tetapi disamping itu disertai oleh tiga proses penghilangan daya rakyat secara sistematis (*systematic process of disempowerment*), yaitu penghilangan daya politik, sosial, dan psikologis [lihat Friedmann, John, *Empowerment: The Politics of Alternative Development*, Cambridge – Oxford, Blackwell Publisher, 1992]

Peningkatan kekuasaan sosial oleh karenanya juga dapat dimengerti sebagai peningkatan akses kelompok-kelompok basis pada kekayaan produktifnya.

- **Kekuasaan politik** (*political power*) berkaitan dengan akses kelompok-kelompok basis dan anggota-anggota individual rumah tangga ke proses di mana keputusan diambil, khususnya keputusan yang mempengaruhi masa depan mereka sendiri⁵⁵. Kekuasaan politik oleh karena itu bukan hanya kekuasaan untuk memilih; akan tetapi juga merupakan kekuasaan berbicara dan bertindak secara kolektif⁵⁶. Meskipun individu dapat berpartisipasi di dalam politik secara pribadi, suara mereka meningkat tetapi juga dapat lebih efektif jika suara itu bergabung dengan banyak suara lain di dalam perserikatan politik yang lebih luas, yakni partai, gerakan sosial, atau satu kelompok kepentingan seperti serikat buruh atau tani⁵⁷.
- Adapun **kekuatan psikologis** (*psychological power*) sangat berkaitan dengan kesadaran akan potensi individual. Kesadaran akan potensi individual ini terlihat di dalam tingkah laku yang lebih percaya-diri. Oleh karena itu ada dua dimensi pemberdayaan psikologis yaitu yang berkenaan dengan kebebasan-batiniah (*inner freedom*)⁵⁸ dan kebebasan-lahiriah (*outer-freedom*)⁵⁹. Upaya pemberdayaan psikologis pertama-tama diarahkan untuk menguak kesadaran-batiniah yang terdalam untuk mengikis kekuatan

⁵⁵ Di dalam politik-mikro rumah tangga, orang dapat berbicara tentang kekuasaan politik dari anggota-anggota individual, tentang perempuan dan laki-laki, anak-anak, dan orang yang lebih tua.

⁵⁶ Hal ini sebenarnya juga merupakan pengejawantahan dari hak-hak sipil dan politik yang merupakan bagian dari hak azasi manusia. Hak-hak sipil adalah hak kebebasan berpikir dan beragama, hak kebebasan menyatakan pikiran dan pendapat, termasuk akses pada informasi, hak kebebasan berserikat dan berkumpul. Sedangkan hak politik adalah hak untuk ikut dalam proses pemerintahan, hak atas kesempatan yang sama dalam memperoleh pelayanan publik, dan hak untuk ikut serta dalam pemilihan umum.

⁵⁷ Proses pemberdayaan sosial politik memiliki tujuan jangka panjang untuk menyeimbangkan kembali struktur kekuasaan di dalam masyarakat dengan cara membuat tindakan negara lebih dapat dipertanggung-gugat (*accountable*), penguatan kekuatan masyarakat sipil di dalam manajemen atas urusannya sendiri, dan membuat perusahaan ekonomi menjadi lebih bertanggung-jawab secara sosial. Pemberdayaan terutama berupaya secara politik untuk memberikan perlindungan atas kepentingan rakyat, khususnya sektor yang tak-berdaya, perempuan, dan generasi penerus; dan tuntutan itu diletakkan pada berbagai ruang kehidupan baik di tingkat lokal, regional, maupun bangsa. Oleh karena itu, meskipun pemberdayaan itu pada mulanya didasarkan khususnya pada lokalitas, tujuan jangka panjangnya adalah keseluruhan masyarakat lewat tindakan politik pada tingkat nasional dan internasional. Tanpa lompatan kuantum dari lokal ke global ini, pemberdayaan tetap berada di dalam kotak sempit satu sistem kekuasaan yang bersifat sangat membatasi (*restriktif*), dan tidak akan mampu menerobos pembangunan murni yang dicarinya.

⁵⁸ Kebebasan-batiniah berkaitan dengan kebebasan dari segala ketakutan atau kebebasan dari anggapan, kesimpulan, dan kepercayaan, serta konsep yang telah ditakrifkan terlebih dulu dari luar dan oleh orang luar. Kebebasan-batiniah merupakan persoalan pribadi yang penting, dan bahkan dapat tetap terpelihara meski orang terpenjara secara fisik, atau yang berada dalam kondisi yang paling menindas sekalipun. Akan tetapi kebebasan-batiniah ini memberi kemungkinan kepada seseorang untuk memperoleh sebuah kekuatan hidup yang luar biasa bagi pengembangan kehidupan orang itu sendiri, tetapi juga dapat memberikan sumbangan kepada perjuangan orang lain demi sebuah kehidupan yang lebih baik dengan cara yang bermakna.

⁵⁹ Kebebasan-lahiriah adalah kebebasan yang lahir dari upaya luar untuk melindungi rakyat dari kekerasan dan penyalah-gunaan kekuasaan, yakni kebebasan yang muncul dari upaya advokasi. Kebebasan-lahiriah ini akan tercermin dalam perangkat kelembagaan (kaidah normatif, hukum positif) yang tersedia di dalam masyarakat, seperti misalnya yang diungkapkan di dalam rumusan tentang hak-hak sipil dan politik. Itu berarti bahwa kebebasan-lahiriah itu akan dinikmati secara langsung oleh rakyat dan warga negara (*unsur direct enjoyment of rights*), bilamana masyarakat memberikan jaminan atas hak-hak sipil dan politik. Sebaliknya jikalau jaminan semacam itu belum tersedia, maka akan terjadi tuntutan untuk atas hak semacam itu (*assertive exercise of a rights*), sebagaimana yang tercermin dari kegiatan advokasi yang dilakukan oleh banyak Ornop. Tetapi kebebasan-lahiriah ini tidak pernah dapat membantu orang-orang yang terasingkan (*teralienasi*) untuk berkembang dalam kebaikan, atau hidup dalam kebijaksanaan dan keindahan. Dengan kata lain kebebasan-lahiriah tidaklah menyentuh ranah kebebasan-batiniah. Sebaliknya kebebasan batiniah dapat memberikan kehidupan pada kebebasan-lahiriah, dan membuat kedua kebebasan dapat dicapai dan penuh makna.

hegemonis negara atas rakyat⁶⁰. Massa rakyat perlu memiliki kesadaran kritis dalam ‘perang budaya maupun ideologis’ (*cultural and ideological war*) di berbagai tingkatan untuk merebut ‘kepemimpinan moral dan intelektual’ (*moral and intellectual leadership*) dengan menundukkan satu demi satu unsur-unsur masyarakat sipil seperti lembaga pendidikan, media massa, lembaga keagamaan dan sebagainya; dan kedua untuk melawan proses perampasan daya secara sistematis (*systematic process of disempowerment*).

Ornop dan Gerakan Perempuan

Dalam dua dasawarsa terakhir mobilisasi sosial dan politik perempuan mencapai titik zenit dalam sejarah dunia terutama di Amerika Serikat, sehingga gerakan perempuan ini disebut sebagai ‘gelombang kedua’ yang ditandai oleh banyaknya penelitian mengenai kehidupan perempuan⁶¹, atau yang oleh Jessie Bernard disebut sebagai ‘Pencerahan Perempuan’ (*the Feminist Enlightenment*). Teori-teori tentang perempuan yang mencerminkan suatu sistem gagasan umum dan luas mengenai dunia dari satu sudut pandang yang terpusat-pada-perempuan (*a women-centered perspective*) berkembang lewat tiga tahapan (Lengerman & Brantley, 1990):

pertama, perempuan sebagai sasaran kajian, yang memberi tekanan bahwa bersama dengan laki-laki, perempuan secara aktif memproduksi dunia – baik dunia ekonomi, ilmu pengetahuan, seni, agama, dan sebagainya. Pengenalan terhadap rangkaian pelaku secara keseluruhan ini menuntut peninjauan-ulang atas gambaran dan penjelasan mengenai situasi sosial. Pada ujungnya, kesadaran itu memunculkan pertanyaan lanjutan mengenai organisasi dunia sosial, khususnya tentang cara bekerjanya jenjang dominasi.

Kedua, teori mengenai perempuan berkembang menjadi teori yang terpusat-pada-perempuan dalam arti perempuan menjadi subyek utama, yang mengarahkan pada *subyektivitas* untuk memandang dunia. Para ahli tentang perempuan tidak lagi hanya meletakkan perempuan di dalam kehidupan sosial, akan tetapi juga – yang paling penting – bagaimana kehidupan itu terlihat oleh perempuan. Bagi para ahli tentang perempuan ‘pengetahuan mutlak’ yang dikenal selama ini sesungguhnya merupakan satu hasil yang *partikularistik* yang dikembangkan secara luas oleh laki-laki dan yang selalu di seputar wacana yang didominasi oleh laki-laki yang telah menggeneralisasikan atas dasar pengalaman mereka tentang *gender* dan kekuasaan. Tahap ketiga adalah teori perempuan yang terpusat-pada-perempuan dalam arti kritis dan aktivis atas nama perempuan, di mana persoalan yang diketengahkan adalah: *‘bagaimana mengubah dan memperbaiki dunia menjadi lebih adil dan manusiawi, bukan hanya buat perempuan akan tetapi juga bagi kemanusiaan’*⁶². Oleh karena itulah Chafetz berpendapat bahwa teori feminis dapat digunakan untuk menantang, melakukan aksi-tandingan, atau mengubah satu keadaan status-quo yang merugikan dan melecehkan perempuan. Chafetz, sebagaimana dikutip oleh Wallace, menekankan tiga unsur di dalam teori feminis:

⁶⁰ Kekuatan hegemonis ini telah mengasingkan dan membelenggu serta menina-bobokkan rakyat ke dalam kesadaran yang terhegemoni (atau kesadaran palsu), sehingga rakyat tidak lagi memiliki kesadaran kritis atau kebebasan-batiniah

⁶¹ Misalnya saja yang diberi predikat sebagai ‘Kajian Perempuan’ dan ‘*the new scholarship on women*’ (lihat Lengerman & Brantley, dalam Ritzer (ed.), George, *Frontiers of Social Theory: The New Synthesis*, New York, Columbia University Press, 1990

⁶² Pengaruh tahap-tahap gerakan perempuan itu pada sosiologi feminis terlihat pada tiga segi: (1) organisasi sosiologi sebagai profesi; (2) hubungan antara teori sosiologi feminis dengan feminisme; dan (3) masalah perbedaan di dalam kosa-kata dan nuansa antara sosiologi dan feminisme (lebih lanjut lihat Lengerman & Brantley, *Feminist Sociological Theory: The Near Future Prospect*, dalam Ritzer, op.cit.

Pertama, gender mengandung satu titik-pusat atau subyek dari teori. Teori feminis pada ujungnya berupaya memahami sifat-sifat gender dari semua hubungan sosial, lembaga, dan proses yang nampak. *Kedua*, hubungan gender dipandang sebagai satu masalah teori berupaya memahami bagaimana gender berkaitan dengan ketimpangan, ketegangan dan kontra-diksi sosial. Terakhir, hubungan gender tidaklah dipandang sebagai yang wajar saja, melainkan hubungan gender yang berkaitan dengan *status quo* dilihat sebagai suatu produk dari kekuatan sosio-budaya dan historis yang telah diciptakan, dan secara terus-menerus dicipta-ulang oleh manusia, dan oleh karenanya secara potensial dapat dirubah oleh manusia sebagai pelaku.

Ornop dan Masa Transisi

Tafsiran atas 'Masa Transisi'

- Kata 'transisi' selalu dikaitkan dengan perubahan yang sedang terjadi, sehingga pada masa transisi keadaan pada umumnya dianggap belum mantap (stabil)⁶³. Di dalam kamus sosiologi dapat ditemukan konsep 'transisi demografis'⁶⁴ dan 'zona transisi'⁶⁵, selain itu pada tataran makro-historis dikenal 'transisi feodalisme ke kapitalisme', dan 'transisi kapitalisme ke sosialisme' dalam sosiologi Marxis, dan pada tataran empiris-politis dapat ditemukan konsep 'transisi ke demokrasi'.
- '*Transisi dari feodalisme ke kapitalisme.*'
 - Konsep ini seringkali dikaitkan dengan gagasan-gagasan Marx dan Engels, meski sebenarnya tidak pernah menjadi pemikiran yang utama melainkan selalu dikaitkan dengan gagasan tentang *metode materialis-historis* [Bottomore, 1985]⁶⁶.

⁶³ Secara leksikal 'transisi' sedang berubah, perubahan, dari satu kondisi atau rangkaian keadaan ke (kondisi) yang lain: misalnya, 'periode transisi di Afrika', ketika negara-negara kolonial menjadi negara yang memerintah-diri sendiri (Hornby, AS., *Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English*, London, Oxford University Press, 1982, p.919). Atau 'transisi' adalah peralihan dari keadaan (tempat, tindakan, dsb.) kepada yang lain; masa transisi, masa peralihan; masa pancaroba: pada masa transisi, pada umumnya keadaan belum stabil (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (edisi kedua), Jakarta, Balai Pustaka, 1996, p.1070).

⁶⁴ Transisi demografis: satu proses di mana ada perubahan-perubahan di dalam tingkat pertumbuhan penduduk yang mencerminkan kecepatan yang tak-sama dengan mana terjadi perubahan tingkat kelahiran dan tingkat kematian (sebagai hasil dari industrialisasi atau modernisasi). Secara teoritis, ada tiga fase di dalam proses ini. Di dalam periode pra-industri tingkat kelahiran dan tingkat kematian keduanya tinggi, yang menghasilkan tingkat pertumbuhan penduduk yang rendah. Dengan dikenalkannya industrialisasi yang dibarengi kesehatan lingkungan (sanitasi) dan obat-obat modern, tingkat kematian menurun. Tetapi, dalam periode ini tingkat kelahiran masih tetap tinggi, yang menghasilkan tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi. Di dalam periode yang ketiga tingkat kematian yang rendah diimbangi oleh tingkat kelahiran yang rendah dan pertumbuhan penduduk sekali lagi menjadi rendah (Theodorson & Theodorson, *A Modern Dictionary of Sociology*, New York, Thomas Y. Crowell Company, 1970)

⁶⁵ Zona dalam Transisi adalah zona yang kedua dari lima wilayah (*zone*) transisi dari E.W.Burgess: satu wilayah yang berada di sekitar dekat Daerah Pusat Bisnis (Central Business District) dari satu kota besar yang telah diserbu (diinvasi) oleh perluasan bisnis dan industri. Harga tanah sangat tinggi dan diharapkan menjadi lenih tinggi lagi ketika wilayah itu pada akhirnya menjadi bagian dari daerah pusat bisnis. Oleh karena hal itu ada spekulasi *real estate* yang berderajat tinggi (*intense*) Bangunan sangat tua dan buruk, dan tuan tanah, yang seringkali adalah para spekulan tanah, hanya memiliki rangsangan kecil untuk memperbaiki atau mendandaniya. Wilayah ini adalah daerah '*slums*' (kumuh), dan di dalam hipotesis wilayah terpusat (*concentric zone*) keberadaan daerah kumuh dijelaskan terutama dalam arti adanya proses transisi tata-guna tanah (Theodorson & Theodorson, 1970: 469).

⁶⁶ Bottomore [1985] berpendapat bahwa gagasan 'transisi dari feodalisme ke kapitalisme' merupakan gagasan yang diungkap secara berulang-ulang di dalam diskusi dari tema yang lebih sentral seperti metode materialis historis (*historical materialist method*), cara-cara produksi kapitalis (*capitalist mode of production*), atau konflik kelas di dalam sejarah. Oleh karena itu perhatian kepada 'transisi' bersifat *episodic*, sebagaimana terlihat di dalam sketsa yang suggestif dari *German Ideology*, proposisi yang jelas dari *Communist Manifesto*, dan catatan-catatan Marx yang kompleks dan kaya yang diterbitkan dalam *Pre-Capitalist Economic Formations*, serta diskusi yang berkelanjutan atas *Primitive Accumulation* dan *Merchant Capital* di dalam *Capital*. Transisi ke kapitalisme

Tafsiran substantif Marx atas ‘transisi dari feodalisme ke kapitalisme’, menurut Bottomore, tetap ambivalen, karena Marx melihatnya dari dua perspektif, yakni pertama, menurunnya feodalisme karena didesak oleh pertumbuhan kegiatan perdagangan, pasar dunia, dan kota-kota industri; dan kedua, meningkatnya pergeseran produsen menjadi kapitalis⁶⁷.

- o Ambivalensi teoritis dan ketidak-memadaian empiris ini, menurut Bottomore [1985] tetap menjadi topik perdebatan yang terus-menerus (*perennial*)⁶⁸. Ada tiga pendekatan yang sangat tersebar yang muncul di dalam awal tahun 1950an⁶⁹, yakni perspektif ‘hubungan pertukaran’, perspektif ‘hubungan kepemilikan’, dan sintesis antara pendekatan Marxian dan neo-Malthusian.
 - Perspektif ‘hubungan pertukaran’ (*exchange relations*) [Sweeny, 1976; Wallerstein, 1974]⁷⁰ berpendapat bahwa kapitalisme muncul lewat kekuatan-kekuatan seperti perdagangan dan pembagian pekerjaan internasional (*international division of labor*) yang dilihat sebagai eksternal terhadap feodalisme.
 - Perspektif ‘hubungan kepemilikan’ (*property relations*) [Dobb, 1946; Hilton, 1973; Brenner, 1976], berpendapat bahwa feodalisme⁷¹ pecah berantakan lewat kontradiksi internal, sebagaimana terwujud di dalam konflik kelas, yang cenderung merusak perbudakan dan menciptakan langkah maju ke arah penguasaan tanah pertanian (*agrarian tenure*) yang lebih bebas. ‘Transisi

dideduksikan dari beberapa rumus umum tentang perubahan sosial. Hal ini kelihatan nyata di dalam pergeseran penekanan utama Marx pada determinasi ‘kekuatan produksi’ (*production forces determination*) yang kadangkala dipotret sebagai satu ‘determinasi teknologis’ (*technological determinism*) (pada tahun 1840-an) [*Poverty of Philosophy*, ch. II, sect. 1]. Secara kontras, di dalam *Pre-Capitalist Economic Formation*, Marx menggunakan satu rangkaian konsep-konsep formal (misalnya *mode of production*, *property*, dsb.) tetapi yang diterapkan secara berbeda pada instansi tertentu dari perubahan sosial. Dengan kata lain, tidak ada teori generik atas ‘transisi’.

⁶⁷ Perspektif pertama itu muncul secara nyata pada tahun 1840-an dan 1850-an, ketika Marx menekankan efek korosif atas sistem feodalisme sebagai akibat dari kegiatan merkantil (perdagangan), pertumbuhan dari pasar dunia, dan kota-kota baru yang berkembang. Kapitalisme perdagangan (*Mercantile capitalism*) menimbulkan dinamika dalam kapitalisme. Perspektif kedua, muncul secara jelas khususnya di dalam *Capital*. Perspektif ini memusatkan pada ‘produsen’ (*producers*) dan proses di mana ‘produsen’ menjadi pedagang dan kapitalis (yang disebut oleh Marx sebagai ‘lorong revolusioner yang senyatanya’ [*the really revolutionary path*]). Analisis sebab-akibat kemudian diarahkan pada pra-kondisi yang memungkinkan beberapa produsen menjadi kapitalis, terlihat dari pemisahan mayoritas produsen yang amat banyak dari kepemilikan (*ownership*) atas alat-alat produksi (*the means of production*) dan penciptaan buruh-upahan yang tak mempunyai kepemilikan. Di dalam *Capital*, Marx berbicara tentang varian ini sebagai dua cara dari pertumbuhan kapitalis. Kegiatan perdagangan dapat mengubah produksi menjadi semakin bersifat komoditi. Tetapi, menurut Bottomore, hal itu tidak menjelaskan bagaimana dan mengapa kekuatan buruh itu sendiri harus menjadi komoditi. Oleh karena itu hal itu tidak dapat menjelaskan transisi. Sebab yang utama, oleh karenanya, tidaklah terletak di dalam hubungan pertukaran (*exchange relation*), melainkan lebih di dalam hubungan sosial dari produksi. Oleh karena itu, di dalam *Capital*, perhatian kurang diarahkan pada dinamika dari pasar dunia atau kota yang terus meluas, melainkan lebih kepada perubahan di dalam hubungan kepemilikan yang terwujudkan di dalam perjuangan kelas, sebagaimana di Tudor Inggris, di mana orang-orang tani kehilangan tanah mereka dan proletariat tuna-kisma secara gradual diciptakan. Dalam hal ini Marx sebenarnya lebih berusaha untuk membangun satu pra-kondisi bagi munculnya kapitalisme, daripada mekanisme sebab-akibat yang rinci di mana pra-kondisi direalisasikan [Bottomore, 1985].

⁶⁸ Di dalam masa pasca perang dan Marxisme Pasca-Stalinis, perhatian lebih besar telah ditujukan analisis atas transisi dari feodalisme ke kapitalisme di Eropa Barat, daripada ke pertanyaan yang lebih kontroversial apakah transisi ini dapat diingat sebagai satu tahap universal dari evolusi sosial lewat mana semua masyarakat harus melaluinya [Bottomore, 1985].

⁶⁹ Perdebatan dimunculkan antara lain oleh Sweezy dan Dobb (lihat Dobb, 1946; Hilton, 1976).

⁷⁰ Sweeny [1976] dan Wallerstein [1974] mendefinisikan kapitalisme dalam arti produksi untuk laba lewat pertukaran pasar yang dikontraskan dengan ekonomi feodalisme yang mendekati subsistensi.

⁷¹ Kapitalisme, dalam hal ini didefinisikan sebagai hubungan sosial dari produksi yang ditemukan di dalam buruh-upahan yang bebas, yang melakukan desakan struktural pada akumulasi kapital yang terus-menerus. Sebaliknya, secara kontras dikemukakan bahwa feodalisme didasarkan pada hubungan ketergantungan pribadi (*relations of personal dependence*), kewajiban bersama (*mutual obligation*) dan pengambilan (ekstraksi) surplus yang didesakkan secara hukum (*juridically-enforced*), di dalam lembaga seperti perbudakan (*serfdom*) dan *vassalage* (system menjadi vassal: menyediakan tenaga untuk tentara sebagai imbalan dari menggunakan tanah).

feodalisme ke kapitalisme' ini menghasilkan satu struktur sosial yang didasarkan pada petani kapitalis dan buruh yang tuna-kisma⁷².

- 'Pendekatan sintesis' Anderson (1974a, 1974b)⁷³ yakin bahwa perubahan di dalam hubungan sosial mendahului perkembangan ciri-ciri kekuatan produksi dari kapitalisme.
- '*Transisi kapitalisme ke sosialisme*'. Konsep Marxis mengenai revolusi sosialis menyiratkan bahwa harus ada satu periode transisi dari kapitalisme ke sosialisme. Kontras dengan revolusi borjuis yang merupakan pemakzulan atas kekuasaan politik dari aristokrasi (pemerintahan bangsawan) pada titik akhir dari satu proses panjang pertumbuhan ekonomi kapitalis dan kebudayaan borjuis di dalam kerangka masyarakat feodal, pengambil-alihan kekuasaan politik dari borjuasi adalah, menurut Marx, hanya 'satu episode pertama' dari transformasi revolusioner dari kapitalisme ke sosialisme⁷⁴. Beberapa langkah perlu diambil menuju sosialisme⁷⁵:
 - Langkah pertama adalah 'memenangkan pertarungan demokrasi' (*winning the battle of democracy*), 'meningkatkan proletariat ke posisi kelas yang memerintah' (*raising the proletariat to the position of ruling class*), 'mengambil-alih kekuasaan politik' (*seizing political power*)⁷⁶.
 - Membentuk 'negara diktator proletariat'⁷⁷ yang bersifat transisional untuk memusatkan semua instrumen produksi di tangan negara dan meningkatkan keseluruhan kekuatan produktif secepat mungkin⁷⁸.

⁷² Pandangan seperti itu membantu menjelaskan masalah yang ada di dalam perspektif 'hubungan pertukaran' seperti kurangnya korelasi antara menurunnya perbudakan dan hadirnya kekuatan pasar. Tetapi, dalam pandangan ini tetap belum jelas bagaimana perjuangan kelas antara tuan tanah (*lords*) dan budak yang bebas harus ditempatkan tertentu mengarahkan ke kapillais agrarian, dan di tempat lain ke arah tani pertanian (*peasant agriculture*) [Bottomore,1985].

⁷³ Pendekatan Anderson ini merupakan sintesis dari tema non-Marxis, seperti demografi neo-Malthusian, dengan penekanan Marxis yang lebih konvensional. Anderson menolak setiap teori sederhana dari perubahan di mana perjuangan kelas di dalam feodalisme memainkan peran yang menentukan di dalam melahirkan 'krisis feodalisme'. Keyakinan Anderson searah dengan Dobb et.al. Seperti Sweezy dan Wallerstein, ia menekankan pentingnya kota-kota dan perdagangan internasional. Tetapi dinamisme budaya kota dilihat sebagai satu warisan dari dunia klasik Yunani dan Roma. Di sini Anderson sependapat dengan Max Weber tentang satu pemikiran atas pentingnya warisan bagi pembentukan kapitalisme. Anderson secara tersirat membaca sejarah manusia sebagai munculnya tatanan material (*material order*) yang mampu menguniversalkan warisan budaya dan politik kota dari masyarakat klasik yang didasarkan pada perbudakan. Hal ini kontras dengan pandangan Smithian atas manusia yang tersirat di dalam Sweezy dan Wallerstein, dan juga penggantian-pelaku (*recast*) teleology Marxis tradisional di mana sejarah dikuak sebagai hasil dari dorongan kemanusiaan untuk merealisasikan kekuasaannya yang esensial dari praksis kreatif lewat penguasaan alam dan pemecahan alienasi hubungan sosial [Bottomore,1985].

⁷⁴ Marx (*Critique of the Gotha Programme*, sect.3) membedakan antara *fase lebih rendah* dari komunisme (satu masyarakat campuran yang tetap kekurangan dasar-dasar/fondasinya) dan *fase yang lebih tinggi* (setelah munculnya 'pembukuan subordinasi dari individu pada pembagian kerja' dan 'antitesis antara buruh mental dan fisik', ketika keberlimpahan akan dicapai bahwa barang-barang dapat didistribusikan kepada setiap orang 'menurut kebutuhannya'). Kebanyakan Marxis mengidentifikasi fase yang lebih rendah sebagai 'sosialisme' dan fase yang lebih tinggi sebagai 'komunisme'. Di dalam Sosialisme tetap ada kelas, pembagian kerja okupasional, unsur dari ekonomi pasar dan hak-hak borjuasi, yang dicontohkan di dalam azas-azas distribusi barang-barang menurut jumlah tenaga yang diberikan kepada masyarakat) [Bottomore,1985].

⁷⁵ Program asli dari Marx dan Engels, yang dirumuskan di dalam *Communist Manifesto*, sangat luwes dan memberi kemungkinan transisi ke Komunisme sebagai satu rangkaian langkah-langkah yang pada akhirnya merevolusionerkan keseluruhan cara-cara produksi [Bottomore,1985].

⁷⁶ Marx sadar bahwa kekuasaan politik sesungguhnya merupakan kekuasaan yang terorganisasikan dari satu kelas untuk menindas kelas yang lain, akan tetapi di dalam pandangannya proletariat 'dipaksa oleh kekuatan keadaan' (*is compelled by force of circumstances*) untuk menggunakannya agar melenyapkan dengan kekuatan kondisi-kondisi produksi yang lama, umumnya kelas-kelas, dan supremasinya sendiri sebagai satu kelas [Bottomore,1985].

⁷⁷ Marx menggunakan istilah '*Dictatorship of Proletariat*' ('diktator proletariat') untuk menspesifikasikan ciri-ciri dari negara buruh, yang sangat kontroversial. Adalah menjadi bagian dari ideologi Marxis di semua negara dari 'sosialisme yang sesungguhnya' bahwa pembentukan satu diktator proletariat, khususnya, bentuk yang sangat sentralistis. Gagasan ditantang oleh banyak sosialis demokrat masa kini. Para 'anarkis' (khususnya Bakunin) keberatan bahwa idea (gagasan) itu akan membantu melahirkan negara otoritarian dan birokrat tiranikal dari elite yang memerintah. Di pihak lain, 'reformis' (misalnya Bernstein) menolak gagasan mengenai revolusi politik itu

- Program ekonomi nasionalisasi atas alat-alat produksi: kepemilikan tanah dan hak-hak warisan akan dihapuskan, kepemilikan dari semua emigran dan pemberontak akan dirampas, perusahaan lain hanyalah secara gradual akan beralih ke tangan negara.
- Menegakkan tatanan sosial-politik sosialisme untuk memecahkan kontradiksi internal di dalam ‘negara diktator proletariat’⁷⁹.
- ‘*Transisi ke demokrasi*’. Transisi dari satu rezim otoritarian otokratik ke suatu rezim demokratis pluralistik lahir akibat krisis⁸⁰ yang dialami rezim pertama. Transisi dimulai oleh krisis dari rezim yang ada dan berakhir dengan terbentuknya rezim baru, mengakhiri tahap perantara berupa pemerintahan-pemerintahan sementara, azas-azas dan peraturan-peraturan yang tumpang tindih dan berlawanan, dan ketidak-pastian

karena mereka pikir proses ekonomi dari kapitalisme mengarahkan secara spontan ke sosialisme [Bottomore, 1985].

⁷⁸ Ketika Bolshevik berkuasa pada tahun 1917, mereka menasionalisasikan keseluruhan ekonomi (di luar pertanian) dalam satu kali tindakan dan arah ini diikuti di dalam revolusi sosialis di abad 20 yang lainnya. Pengalaman telah menunjukkan bahwa negara baru yang diciptakan dengan cara ini secara beragam lari dari kontrol kelas dan menjadi instrumen dominasi dari partai pelopor. Setelah serangkaian pembersihan pelopor revolusioner tumbuh menjadi satu birokrasi yang kokoh yang mengandaikan adanya kontrol yang kurang lebih menyeluruh terhadap semua *sphere* kehidupan publik, politik, ekonomi, dan kebudayaan. Perencanaan administrasi yang kaku memantapkan pertumbuhan umum yang *ajeg* tetapi prakarsa dan inovasi terhempas, dan hal itu telah mendatangkan efek yang buruk pada semua cabang ekonomi yang sebenarnya memerlukan pengambilan keputusan yang terdesentralisasikan secara luwes (pertanian, produksi skala kecil, perdagangan, jasa). Sekali satu pusat kekuasaan yang baru terasingkan (*teralienasi*) diciptakan perkembangan lebih jauh ke arah sosialisme gagal terjadi. Negara dengan organ-organ paksaannya dan apparatnya yang profesional cenderung menjadi semakin kuat daripada ‘hancur’ (*whiter-away*). Panitia-panitia buruh (*soviet*) kehilangan artinya. Kebudayaan yang diharapkan mekar secara bebas tidak terjadi, dan malahan ada satu pertumbuhan kuantitatif secara spektakuler dari kebudayaan yang didominasi oleh ideologi resmi. Perkembangan dari satu ‘kesejahteraan dari kebutuhan’ secara luas diganti oleh upaya untuk mengejar kesejahteraan material [Bottomore, 1985].

⁷⁹ Supremasi politik dari kekuatan sosialis radikal dapat terjadi pada saat mendekati akhir dari proses ini. Sekali mereka memenangkan kekuatan-kekuatan ini mereka akan mampu membalikkan negara ke dalam yang memerintah diri-sendiri (*self-governing*) daripada struktur yang otoritarian. Satu tentara yang profesional akan diganti oleh yang non-profesional, organisasi bela-diri. Kelompok-kelompok sosial yang tak-diuntungkan (*under-privilege*) [perempuan, bangsa atau ras yang ditindas] akan memiliki, persamaan hak (*equality of rights*), dan kemudian juga persamaan kondisi (*equality of condition*). Alat-alat produksi akan disosialisasikan dan diletakkan di bawah kontrol badan yang mengatur dirinya-sendiri (*self governing bodies*). Pasar untuk modal dan buruh akan musnah, upah buruh menjadi diganti oleh satu bagian di dalam pendapatan bersih dari organisasi yang bekerja, yang berkaitan dengan jumlah, intensitas dan mutu dari kerja mereka. Pasar dari komoditi akan tetap menjadi indikator dari kebutuhan sosial untuk waktu yang lama, akan tetapi semakin banyak barang-barang akan kehilangan ciri-ciri komoditi, karena diproduksi untuk memenuhi kebutuhan manusia dan kurang atau lebih disubsidi oleh masyarakat (obat-obatan medis, barang dan jasa pendidikan dan kebudayaan, perumahan/ papan, pangan pokok). Peningkatan produktivitas buruh akan tetap menjadi kebijakan yang terakhir, akan tetapi tujuannya bukan lagi peningkatan output material melainkan pembebasan dari kerja yang panjang, pengurangan jam kerja. Kebutuhan budaya, spiritual, komunal yang lebih tinggi berkembang menjadi penting. Kerja secara gradual akan kehilangan ciri yang terasing, dengan partisipasi buruh di dalam pengambilan keputusan, pilihan bebas diantara berbagai alternatif teknologi, dan satu reorganisasi atas proses produksi untuk menekankan otonomi dan pengendalian-diri (*self-control*) buruh dan juga satu koordinasi rasional diantara mereka. Azas federalisme akan menjadi organisasi sosial pada semua tingkat. Di dalam sosialisasi individu, persiapan untuk kerja akan kehilangan sangat pentingnya hari-ini, dan juga menjadi jauh lebih luwes dengan pilihan bebas atas kerja, dan akses pada kerja tanpa memandang jenis kelamin, ras, kebangsaan atau usia. Pembagian kerja tidak akan lagi begitu diprofesionalkan secara kaku dan akan ada peluang yang luas bagi buruh untuk mengubah peran kerjanya ketika tambahan pengetahuan dan ketrampilan mengualifikasikan mereka bagi pekerjaan baru. Lebih jauh, kegiatan yang paling penting akan terbuka bagi mereka di mana kapasitas prakarsa individual menemukan pengungkapan, apakah hal itu kerja yang produktif atau di luarnya [Bottomore, 1985].

⁸⁰ Krisis ini mungkin berasal dari ketidak-mampuannya menyelesaikan masalah estafet kepemimpinannya sendiri, atau dari ketidak-mampuannya menyesuaikan diri dengan keadaan-keadaan yang berubah cepat tak terduga. Biasanya krisis itu terungkap dalam melemahnya kohesi internal rezim itu dan/atau lenyapnya kemampuan untuk menekan konflik dan menghalangi munculnya sebuah cara pemerintahan alternatif [Phillippe C. Schmitter, ‘*Speculation about Possible Demise of Authoritarian Regimes and Its Possible Consequences*’ (Woodrow Wilson Center Latin America Working Papers, no.60, Washington D.C., 1980)]

politik dan hukum. Akhir dari transisi⁸¹ itu biasanya ditandai oleh diterimanya suatu konstitusi baru yang dirancang oleh majelis yang dipilih, atau dengan pemilihan parlemen begitu konstitusi telah dipulihkan. Dengan perkataan lain, konsolidasi dimulai begitu lembaga-lembaga dasar tata-politik yang baru sudah diorganisir dan mulai bekerja dan berinteraksi menurut aturan-aturan permainan yang baru. Karena itu transisi rezim diakhiri oleh pelembagaan secara legal-formal. Konsolidasi adalah proses yang, pada akhirnya, akan membawa pada *pelembagaan politik-material*⁸². Secara singkat, bisa didefinisikan bahwa konsolidasi mencakup proses-proses yang dipakai oleh rezim yang baru muncul itu untuk melenyapkan, mengurangi sampai minimum, atau menyerap inkonsistensi-inkonsistensi ideologis dan institusional awal; menegakkan otonominya dalam menghadapi kekuatan-kekuatan mapan yang sudah ada di negara itu, terutama angkatan bersenjata; memobilisasi masyarakat sipil ke dalam bentuk-bentuk ekspresi politik; dan mengembangkan serta memelihara suatu sistem partai yang berstruktur dan relatif stabil, yang mampu menjamin pemerintahan yang bertanggung-jawab kepada rakyat [Maravall & Santamaria, 1992]. Ada tiga pendekatan atas kajian transisi ke demokratisasi:

- (1) pendekatan (*paradigma*) fungsionalis⁸³, menyatakan: bahwa rangkaian variable yang berkaitan dengan negara demokrasi yang sudah ada dianggap sebagai pra-kondisi bagi kelayakan demokrasi di mana-mana. Variabel itu antara lain: pembangunan ekonomi dan modernisasi social yang tinggi, pemerintah berdasarkan kesepakatan rakyat, budaya masyarakat atau koherensi antara model-model otoritas dan system politik yang ada dengan model-model dominan di dalam kelompok-kelompok social lainnya.
 - (2) Pendekatan genetik terhadap kajian atas transisi (Dankwart Rustow)⁸⁴: pengkajian atas berbagai proses perubahan rezim dan pengaruh masing-masing perubahan atas fase berikutnya.
 - (3) Pendekatan probabilistik (Robert Dahl)⁸⁵: menetapkan kombinasi-kombinasi khusus variable-variabel sosio-ekonomik dan politik yang dapat memungkinkan dimulainya satu transisi dan variable-variabel yang mungkin mendukung konsolidasi satu rezim demokratik baru.
- ‘*Transisi*’ dalam ‘*skenario Indonesia masa depan*’⁸⁶. Ada tiga kekuatan pembelok (*driving forces*) yang kritical yang dianggap dapat membelokkan arah perkembangan masa

⁸¹ Dalam proses transisi juga terjadi konsolidasi. Di satu pihak, melalui proses substitusi, rezim sebelumnya dibubarkan dan sebuah rangkaian lain perangkat kekuatan politik menggantikannya. Di pihak lain, melalui proses pengembangan, rezim baru mengambil jalan yang berbeda dari rezim lama dan mengentalkan (mengkritalisasi) struktur institusionalnya [Maravall & Santamaria, 1992].

⁸² Istilah ‘pelembagaan politik-material’ ini dipinjam dari istilah yang pengertiannya diajukan oleh Samuel P. Huntington dalam ‘*Political Order in Changing Societies*’ [New Haven: Yale University Press, 1968]

⁸³ Pendekatan ini dominan pada tahun 1950-an dan 1960-an. Lihat: Daniel Lerner, *The Passing of Traditional Society* (New York, Free Press, 1958); S.M.Lipset, ‘*Some Social Requisites of Democracy: Economic Development and Political Legitimacy*’, *American Political Science Review* 53, no.1 (1959): 69-105; Phillips Cutright, ‘*National Political Development: Measurement and Analysis*’, *American Sociological Review* 28 (1963): 253-64; D. Jaros and L.V.Verba, *The Civic Culture* (Princeton: Princeton University Press, 1963); Harry Eickstein, *Division and Cohesion in a Democracy* (Princeton: Princeton University, 1966)

⁸⁴ Dankwart A, Rustow, ‘*Transition to Democracy*’, *Comparative Politics* 2, no.3 (April, 1970): 337-63

⁸⁵ Robert A. Dahl, *Polyarchy* (New Haven: Yale University Press, 1971)

⁸⁶ ‘Skenario Indonesia Masa Depan’ adalah 4 skenario yang dihasilkan oleh satu rangkaian dialog dan lokakarya sejak setahun yang lalu di sejumlah (14) kota yang diikuti sekitar 600-700 orang dari berbagai latar belakang. Dialog dan lokakarya ini menggunakan ‘metode perencanaan skenario’, yang pada awalnya diterapkan dalam bidang militer oleh Herman Kahn, seorang perwira Angkatan Udara AS, dan dikembangkan oleh Pierre Wack, seorang ahli perencanaan pada Royal Dutch/Shell, pada tahun 1970-an di dalam tataran perusahaan (bidang bisnis). Pada tataran negara, metode ini mula-mula diterapkan di Afrika Selatan [lihat Schwartz, *The Art of the Long view*, ABN, 1988].

depan Indonesia, yaitu: (a) **tatanan politik**⁸⁷ (lebih demokratik atau lebih otoritarian); (b) **kebijakan ekonomi**⁸⁸ (lebih pro-pemerataan vs. lebih pro-pertumbuhan) dan (c) **tingkat kekuatan masyarakat sipil**⁸⁹ (masyarakat sipil kuat vs. lemah)⁹⁰. Kombinasi dari tiga kekuatan pembelok ini menghasilkan 4 skenario Indonesia masa depan⁹¹, yakni:

1. tatanan politik demokratis, kebijakan ekonomi lebih pro-pemerataan (tingkat pertumbuhan ekonomi rendah), masyarakat sipil kuat (metafora: '*Lambat Tapi Selamat*')⁹²;
2. tatanan politik demokratis, kebijakan ekonomi lebih pro-pertumbuhan (tingkat pemerataan rendah), masyarakat sipil kuat (metafora: '*Mengayuh Biduk Retak*')⁹³;

⁸⁷ Dalam tatanan politik ini termasuk: sistem politik; hukum ('*supremasi hukum*') digerogoti oleh: lemahnya *law enforcement*, reduksi hukum menjadi alat kekuasaan, ketidak-pastian hukum, ketak-taat-azasan hukum, '*impunity*', dan pelanggaran hak azasi manusia. Tiga persoalan mengemuka dalam hal supremasi hukum dan HAM: (1) bagaimana *law enforcement* mengantisipasi dan mempersiapkan masa depan, (2) bagaimana masyarakat mengetahui lingkungannya dan perlakuan macam apa yang diberlakukan terhadap lingkungan dalam arti yang seluas-luasnya, (3) karena sumber-daya dan anggaran terbatas, apa strategi yang diperlukan untuk mengetahui bahwa masyarakat telah memperlakukan sumber-daya yang tersedia dengan sebaik-baiknya [Roger,1996]; perimbangan kekuasaan antara 'pusat dan daerah'; peran militer dalam bidang non-militer; sikap negara terhadap agama. Tatanan politik ini dihadapkan pada '*ungovernability*' [Dorff,1996], yakni: merosotnya kemampuan melaksanakan berbagai tanggung jawab pengelolaan negara modern dalam lingkungan yang semakin kompleks (gejala perang saudara, bentrok antar etnis, kekacauan dan anarki, tampilnya penguasa militer, dan putus-asa massal). '*Ungovernability*' itu membawa akibat merosotnya efektivitas pemerintah, dan lunturnya kepercayaan publik. Ancaman '*ungovernability*' itu akan semakin nyata jika elite politik memanipulasi keanekaragaman masyarakat demi kepentingan sendiri dengan cara mengerahkan massa dalam konflik horisontal lewat sentimen primordial.

⁸⁸ Dalam pasang surut '*demokrasi ekonomi*' terlihat: enam dikotomi (Jawa-luar Jawa; Jakarta-non Jakarta; Pusat-Daerah; Indonesia Barat-non Barat; Muslim-non Muslim; pribumi-nonpribumi), konflik antara modal dan buruh, kebijakan atau sistem ekonomi (ekonomi pasar yang kapitalistik, ekonomi kerakyatan, ekonomi kesejahteraan).

⁸⁹ Termasuk di dalamnya sikap masyarakat terhadap pluralisme, sikap terhadap ideologi gender, respons masyarakat terhadap globalisasi, praktek demokrasi masyarakat, posisi tawar masyarakat terhadap negara, orientasi sistem pendidikan. '*Interplay*' antara kekuatan penindas '*daulat penguasa*' (yakni '*negara*' / '*state*') dengan kekuatan unsur-unsur '*daulat rakyat*' masyarakat sipil akan memberi warna pada wajah Indonesia masa depan. Unsur-unsur masyarakat sipil yang mengemuka adalah: organisasi rakyat akar-rumput, kelompok penekan (termasuk Ornop) yang mempunyai beragam kiblat (pro-*status-quo*, sosial-demokratik, atau radikal), kelompok kepentingan, 'masyarakat adat', cendekiawan, 'kesadaran politik rakyat', '*people power*'.

⁹⁰ Ketiga kekuatan pembelok yang kritikal (*critical driving forces*) ini dihasilkan dari analisis 12 kekuatan pembelok yang diidentifikasi di dalam dialog, yakni: sistem politik, hokum, orientasi kebijakan ekonomi, sikap masyarakat terhadap pluralisme, perimbangan kekuasaan antara 'pusat dan daerah', peran militer dalam bidang non-militer, orientasi sistem pendidikan, sikap terhadap ideologi gender, respons masyarakat terhadap globalisasi, sikap negara terhadap agama, praktek demokrasi masyarakat, posisi tawar masyarakat terhadap negara [lihat laporan Dialog Indonesia Masa Depan,2000].

⁹¹ Sebenarnya secara teoritis ada 8 kombinasi yang mungkin, yaitu: (1) tatanan politik demokratis, kebijakan ekonomi lebih pro-pemerataan (tingkat pertumbuhan ekonomi rendah), masyarakat sipil kuat (contoh Perancis); (2) tatanan politik demokratis, kebijakan ekonomi lebih pro-pertumbuhan (tingkat pemerataan rendah), masyarakat sipil kuat (Taiwan); (3) tatanan politik otoritarian, kebijakan ekonomi lebih pro-pemerataan (tingkat pertumbuhan ekonomi rendah), masyarakat sipil lemah (Burma); (4) tatanan politik otoritarian, kebijakan ekonomi lebih pro-pertumbuhan (tingkat pemerataan rendah), masyarakat sipil lemah (contoh Singapura); (5) tatanan politik otoritarian, kebijakan ekonomi lebih pro-pertumbuhan (tingkat pemerataan rendah), masyarakat sipil kuat (tidak ada contoh); (6) tatanan politik demokratis, kebijakan ekonomi pro-pertumbuhan (tingkat pemerataan rendah), masyarakat sipil lemah (tidak ada contoh); (7) tatanan politik otoritarian, kebijakan ekonomi pro-pertumbuhan (tingkat pertumbuhan ekonomi rendah), masyarakat sipil kuat (tidak ada contoh); (8) tatanan politik otoritarian, kebijaksanaan ekonomi pro-pertumbuhan (tingkat pemerataan rendah), masyarakat sipil kuat (tidak ada contoh). Akan tetapi diantara yang 8 itu hanya 4 yang dianggap sangat mungkin terjadi.

⁹² Dalam skenario ini Indonesia Masa Depan digambarkan sebagai berikut: Penerapan otonomi daerah dan desentralisasi menyelamatkan Indonesia dari kehancuran. Dan, kehidupan demokratis dipertahankan setelah Orde Baru runtuh. Investor asing kembali masuk, dan kepercayaan dunia internasional memulih. Kekerasan mereda. Keadilan mejadi landasan untuk menyelesaikan konflik. Pertumbuhan ekonomi tak mencolok, namun pemerataan berlangsung sampai ke daerah-daerah [lihat Skenario Indonesia 2010]

⁹³ Indonesia memasuki kehidupan demokratis. Kemerdekaan pers dijamin, dan supremasi hokum ditegakkan. Otonomi daerah diberikan seluas-luasnya. Masalah ekonomi diselesaikan dengan memacu pertumbuhan, bukan hanya dengan mengundang investasi baru, tapi juga mendorong pemanfaatan aset yang sudah ada [lihat Skenario Indonesia 2010].

- (4) tatanan politik otoritarian, kebijakan ekonomi lebih pro-pertumbuhan (tingkat pemerataan rendah), masyarakat sipil lemah (metafora: *'Di Ujung Tanduk'*)⁹⁴;
- (5) tatanan politik otoritarian, kebijakan ekonomi lebih pro-pemerataan (tingkat pertumbuhan ekonomi rendah), masyarakat sipil lemah (metafora: *'Masuk ke Rabang Buaya'*)⁹⁵.

Masa transisi di sini berarti masa peralihan antara situasi dan kondisi politik, ekonomi, dan masyarakat sipil dewasa ini (tahun 2000) ke 4 skenario masa depan tersebut di atas.

Masalah Strategi Advokasi pada Masa Transisi.

- Strategi advokasi Ornop pada masa transisi akan ditentukan oleh berbagai hal, yakni:
 - (1) Bagaimana Ornop memahami dirinya sendiri;
 - (2) bagaimana Ornop meletakkan diri di dalam ranah dan ruang kehidupan (negara atau masyarakat politik, korporasi ekonomi atau masyarakat ekonomi, dan masyarakat sipil)⁹⁶;
 - (3) bagaimana Ornop memberi takrif terhadap strategi advokasi;
 - (4) bagaimana Ornop memahami 'masa transisi'.

Kemungkinan Peran Ornop

- Dengan menyilangkan keempat skenario Indonesia Masa Depan dan ragam Ornop akan diperoleh sketsa berbagai kemungkinan peran yang bisa dimainkan oleh Ornop. Secara teoritis akan diperoleh 12 kemungkinan peran Ornop di masa datang.

Ragam Ornop Skenario	'Developmentalis' ('konformis')	'Reformis'	'Transformatoris'
Skenario 1	1	2	3
Skenario 2	4	5	6
Skenario 3	7	8	9
Skenario 4	10	11	12

- (a) Pada skenario 1 di mana terjadi demokrasi politik (pemilu yang teratur, oposisi yang sejati, kebebasan berpendapat dijamin, partisipasi rakyat tinggi, peran negara kecil), demokrasi ekonomi (kebijakan ekonomi yang berkiblat pada kepentingan rakyat, upah dan kesejahteraan buruh memadai, terjadi persaingan sehat, pajak progresif, ada subsidi, tumbuh industri kecil), terjadi supremasi hukum (hukum jelas dan adil, *law*

⁹⁴ Gerakan separatisme mengakibatkan Indonesia mengalami disintegrasi. Konflik antar daerah dan pusat melebar menjadi konflik antar agama, suku, buruh-majikan, bahkan antar pribumi-keturunan. Pembangunan sipil meningkat. Pendidikan dan agama digunakan untuk menyeragamkan cara berpikir. Pertumbuhan ekonomi diterapkan dengan mendorong industri berteknologi tinggi dan bermodal besar. Setelah Aceh dan Papua, Riau ikut melepaskan diri dari Indonesia [lihat Skenario Indonesia 2010].

⁹⁵ Skenario ini mengungkapkan kondisi Indonesia yang berubah menjadi negara otoriter akibat kebijakan ekonomi tertutup. Untuk mensubsidi rakyat, pemerintah menguras sumber-daya alam. Tak banyak pabrik beroperasi, karena bahan baku sulit diperoleh. Kebijakan Cultur Stelsel seperti masa penjajahan Belanda kembali diberlakukan. Setiap perlawanan rakyat dibungkam lewat kekerasan dan terror. Kelompok militer professional-nasionalis bergabung dengan kekuatan nasionalis-kerakyatan, dan melakukan kudeta [lihat Skenario Indonesia 2010].

⁹⁶ Friedman membagi ruang kehidupan (territori) ke dalam: Negara (kekuasaan negara, eksekutif, dan cabang-cabang yudikatif); masyarakat politik (kekuasaan politik, gerakan sosial, dan organisasi politik); korporat ekonomi (masyarakat ekonomi: kekuasaan ekonomi, perusahaan dan lembaga keuangan); masyarakat sipil (kekuasaan sosial: orang, rumah tangga, dan perkumpulan sipil, yaitu ranah kebudayaan dan struktur sosial) [lihat Friedmann, John, Empowerment: The Politics of Alternative Development, Cambridge & Oxford, Blackwell, 1992]

enforcement baik, HAM ditegakkan), masyarakat sipil berdaulat, pendidikan kreatif-innovatif, suburnya komunalisme komunitarian, tumbuh pemimpin lokal, maka peran yang mungkin dimainkan Ornop adalah:

- (1) Ornop '*developmentalis*'/*konformis* (atau Ornop *parastatal*) akan terbawa oleh berbagai perubahan yang terjadi dan menyesuaikan diri dengan perubahan itu, karena kalau tidak Ornop jenis ini justru akan menjadi beban dan penghalang bagi perkembangan masyarakat sipil yang telah mulai menguat dan berdaya kembali. Penyesuaian itu akan terjadi baik pada tataran ideologis dan nilai-nilai (*culture structure*) maupun pada tataran organisasi dan program-programnya (*social structure*). Pendek kata Ornop ini didorong untuk mentransformasikan dirinya, paling tidak menjadi Ornop '*reformatoris*' atau '*professional*', atau mereka akan mengkombinasikan berbagai kegiatan pembangunan (*development*) dengan upaya reformasi.
 - (2) Ornop '*reformatoris*' (atau Ornop '*professional*') akan mengukuhkan dirinya dan memperoleh tambahan 'jumlah anggota' (yaitu Ornop '*developmentalis*' atau '*parastatal*' yang telah mentransformasikan dirinya), sehingga persaingan akan semakin ketat meskipun tetap sehat, dan sekaligus akan terbuka jalinan kerja sama *professional* yang semakin kokoh. Dengan demikian pelayanan jasa kepada masyarakat sipil *akan meningkat mutu dan jumlahnya*. Ada peluang bagi Ornop '*reformatoris*' ini untuk merefleksi dan mentransformasikan diri menjadi Ornop yang '*transformatoris*'.
 - (3) Ornop '*transformatoris*' menuai apa yang selama ini diperjuangkannya, sehingga luasnya peran akan menyusut karena lembaga-lembaga demokrasi bekerja sesuai dengan fungsinya, serta lembaga ekonomi dan mekanisme pasar tidak lagi terdistorsi, meskipun mutu perannya sebagai lembaga kontrol kehidupan demokrasi dan ekonomi akan bertambah tinggi. Ornop ini akan mengubah dirinya menjadi pemantau, dan sesekali melakukan tekanan (seperti ditandai oleh munculnya ICW, ParWi, Human Rights Watch dan sebagainya).
- (b) Dalam skenario 2 terjadi pertarungan kekuasaan terus-menerus antara penguasa/pemerintah, yang mendasarkan kebijakan dan perilakunya pada 'teori negara kekuasaan' yang cenderung otoriter dan repressif, dengan berbagai kelompok dalam masyarakat yang kesadaran dan partisipasi politiknya tinggi dan semakin bertambah kuat. Pemerintah semakin repressif, tetapi sebaliknya masyarakat sipil semakin menentang repressi pemerintah. Dalam situasi seperti itu peran yang mungkin dipilih Ornop adalah:
- (4) Ornop '*developmentalisme*'/'*konformis*' (atau *parastatal*) memainkan peran 'konvensional' sesuai dengan ideologi dan nilai-nilai yang dianut oleh negara, menjadi 'mitra' (satu istilah yang dengan bangga dipertahankan dan diyakininya) dalam melaksanakan program pembangunan pemerintah yang merupakan wujud dari negara kekuasaan (akan tetapi juga sekaligus mendominasi rakyat);
 - (5) Ornop '*reformatoris*' (*professional*) akan berusaha menghindari keterlibatan dalam program pembangunan sentralistik yang dilakukan oleh pemerintah negara kekuasaan, atau bilamana harus bekerja-sama dengan pemerintah Ornop ini tetap bersikap kritis (memelihara jarak dengan struktur negara), seraya melakukan advokasi hak-hak politik dan ekonomi rakyat, serta berusaha untuk melakukan proses penyadaran dan penguatan kelompok-kelompok kecil dalam masyarakat sipil dan mendorong prakarsa pada tingkat akar rumput.

- (6) Ornop '*transformatoris*' mengambil posisi menentang dan menantang program-program pembangunan pemerintah negara kekuasaan, menentang struktur negara, dan menggalakkan advokasi hak-hak sipil dan politik, serta mendorong, mengorganisasikan dan melakukan aksi massa dan demonstrasi untuk menentang dominasi dan hegemoni negara.
- (a) Pada Skenario 3 yang menggambarkan keadaan kacau yang ditandai oleh '*ungovernability*' yang tinggi, aparat pemerintah sangat repressif dan melakukan pelanggaran HAM, serta penegakan hukum lemah, kelompok-kelompok di dalam masyarakat sipil yang cenderung apatis dan a-politis, sehingga kontrol masyarakat tidak berfungsi; Peran yang mungkin diambil Ornop adalah:
- (7) Ornop '*developmentalistik*'/'*konformistik*' (*parastatal*) berperan sebagai bagian dari negara (terkooptasi dan terhegemoni) atau sebagai kepanjangan tangan negara untuk melaksanakan program pembangunan pemerintah, seraya menikmati kucuran dana dan bahkan terlibat KKN, atau setidaknya 'menutup mata' terhadap praktek korupsi. Ornop ini juga dengan senang hati menjadi kepanjangan tangan pemerintah untuk menghegemoni rakyat lewat kegiatan pembentukan kelompok-kelompok kecil, yang dilaksanakan oleh apa yang mereka sebut sebagai 'CO' (*community organizers*) untuk melaksanakan program pemerintah (misalnya program JPS).
- (8) Ornop '*reformasionis*' cenderung terbelah menjadi dua. Kelompok pertama berupaya menjalin kerjasama dengan pemerintah meskipun dengan susah payah berusaha tetap kritis, atau bahkan karena repressi pemerintah kelompok ini mengaku sebagai Ornop '*developmentalis*'. Kelompok kedua berusaha menghindari keterlibatan dalam program pemerintah, tetap memelihara jarak, meningkatkan prakarsa rakyat pada tingkat akar-rumput, dan memberdayakan rakyat kecil. Kelompok ini juga berupaya menjalin solidaritas dengan Ornop '*transformatoris*'.
- (9) Ornop '*transformatoris*', karena tekanan-tekanan aparat repressi negara, cenderung melakukan gerakan terselubung menentang negara, dan sejauh ada peluang tetap berupaya melakukan aksi massa dan demonstrasi. Sekelompok Ornop ini akan didesak untuk meradikalisasi-diri, dan sekelompok lain berusaha melunakkan perlawanan terbuka terhadap negara repressif dengan cara mengubah sifat radikal ke sifat reformatoris.
- (b) Skenario 4 di mana masyarakat sipil terhegemoni oleh negara dan pemerintah yang cenderung melakukan manipulasi terhadap hukum dan mengabaikan aspirasi rakyat, maka peran yang mungkin dilakukan Ornop adalah:
- (10) Ornop '*developmentalistik*'/'*konformistik*' menggalang kerjasama dengan pemerintah lokal oleh karena undang-undang otonomi daerah dan perimbangan keuangan pusat-daerah dilaksanakan, dengan demikian Ornop ini berupaya mengakomodasikan struktur negara, dan memecahkan masalah secara partisipatori, pendekatan dari bawah ke atas (*bottom up*) dengan membentuk kelompok-kelompok kecil di dalam masyarakat.
- (11) Ornop '*reformatoris*' menggalakkan advokasi hak-hak ekonomi dan politik seraya melakukan program ekonomi untuk rakyat kecil dan peningkatan kesadaran masyarakat lewat kelompok-kelompok kecil di dalam masyarakat yang dibentuknya.
- (12) Ornop '*transformatoris*' memelopori kampanye ekonomi kerakyatan dan redistribusi aset ekonomi (mempromosikan *land reform*), terutama aset yang dikuasai negara seperti tanah perkebunan.

Lampiran

1

Model Sosiologis Analisis Masalah Demokrasi dan Perubahan Sosial

Model	Konsensus		Konflik
	Developmentalis	Reformis	
Madzhab	Developmentalis	Reformis	Transformatoris
Struktur Sosial	Hasil kesepakatan sosial, tidak dipermasalahkan, bahkan dipertahankan	Hasil kesepakatan sosial, tidak dipermasalahkan, cenderung dipertahankan	Hasil pemaksaan kelompok/kelas sosial dominan; selalu dipermasalahkan/dipertanyakan
Penyebab masalah Demokrasi	Faktor endogen/ internal: pelaku/agen; misalnya: kebodohan, kemiskinan, keterbelakangan, keterpencilan	Tatanan sosial-politik tidak berfungsi dengan baik; kurangnya kesempatan partisipasi dan akses pada sumber-sumber	Faktor eksogen/eksternal: tatanan/struktur sosial politik yang tidak adil, menindas dan dipaksakan oleh kelompok/kelas dominan
Pemecahan masalah	Mengubah faktor endo-gen/internal: nilai budaya, mentalitas	Memfungsikan/memperluas peluang partisipasi dan akses pada sumber-sumber	Mengubah tatanan/struktur yang tidak adil, tidak demokratis; kekuasaan di tangan rakyat
Model Perubahan	Perubahan mentalitas & budaya ←----- Mengindari	Perubahan fungsional (dalam struktur) -----→ konflik	Perubahan structural (tatanan) ←-----→ Mengelola konflik
Motivasi	Menjalankan tugas/karitatif	Menegakkan aturan main / hukum	Visi Transformatoris
Pelaku / agensi	Pemerintah, Elite	Pemerintah, Elite	Rakyat sendiri
Gaya Kepemimpinan	Birokratik, paternalistik	Birokratik, teknokratik	Partisipatori, demokratis

Source: Anne Hope & Sally Himmel, 1984 (dimodifikasi oleh MMB)

2

Paradigma dan Pendekatan

Kategori Orientasi	Tiga Model Ornop			Radikal Baru
	1	2	3	4
Sikap terhadap Program pembangunan resmi	Bekerja sama; memelihara pengembangan partisipasi komunitas	Kolaborasi/ kerjasama kritis	Menghindari keterlibatan	Menentang dan menantang
Orientasi terhadap Struktur Negara	Mengakomodasi	Memperbaharui	Memelihara jarak	Menentang
Konsep tentang Demokrasi	Pemecahan masalah secara partisipatori	Menyeimbangkan hak-hak politik dan hak ekonomi	Prakarsa tingkat akar rumput	Pengambilan keputusan langsung
Mobilisasi populer	Pembentukan kelompok-kelompok kecil	Program ekonomi; menggalakan kesadaran	Pemberdayaan kelompok kecil	Aksi masa dan demonstrasi

Source: Eldrige,1995

3

The Four Dimensions of Social Practice

STATE: State power: executive and judicial branches

CIVIL SOCIETY: Social Power: natural persons, households, and civil association (the domein of cultural and social structure)

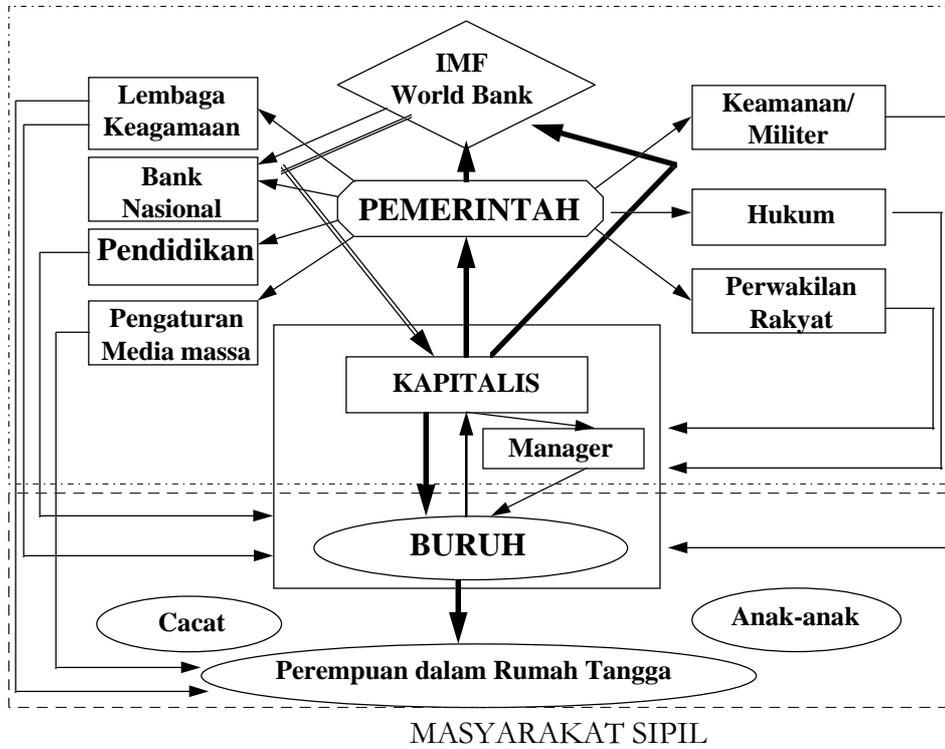
CORPORATE ECONOMY: economic power, corporations and financial institutions (i.e. judicial persons)

POLITICAL COMMUNITY: political power, social movements and political organizations.

Source: Friedmann,1992:27

Analisis Struktural Developmentalisme (Negara dan Masyarakat Sipil)

NEGARA



Sumber: Fakhri, 1996:80

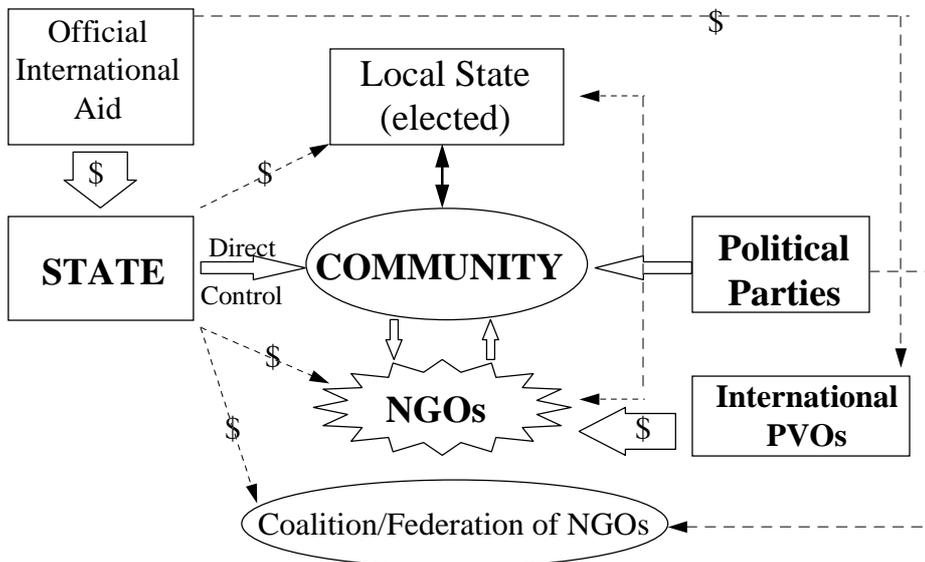
5

Model of State - NGOs relation : A. Authoritarian Regime



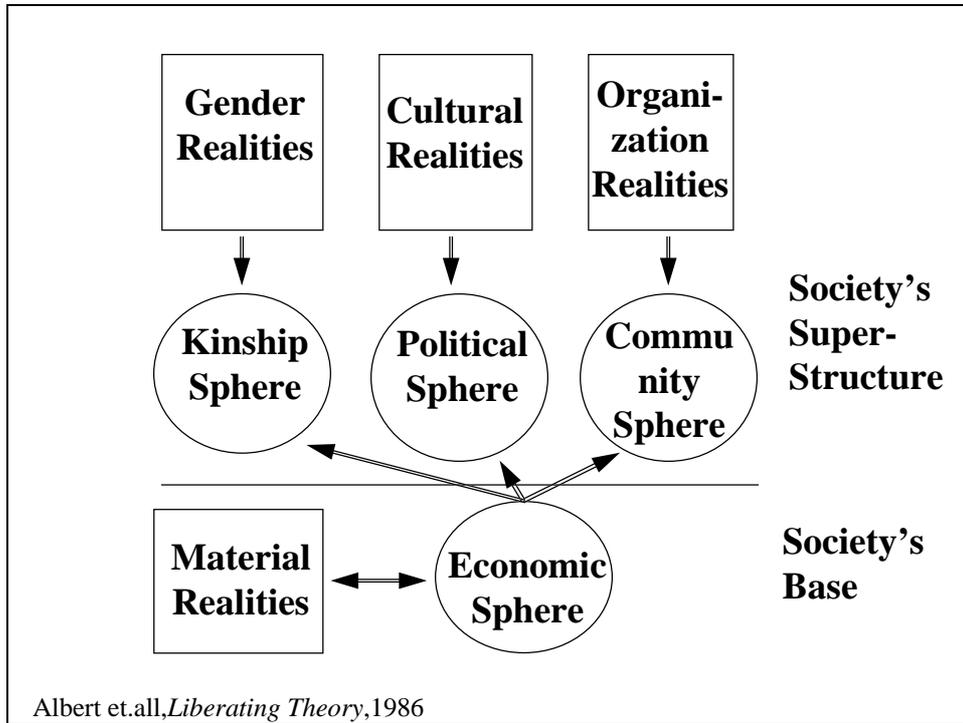
6

Model of State-NGOs Relation : B. Democratic Transition Regime



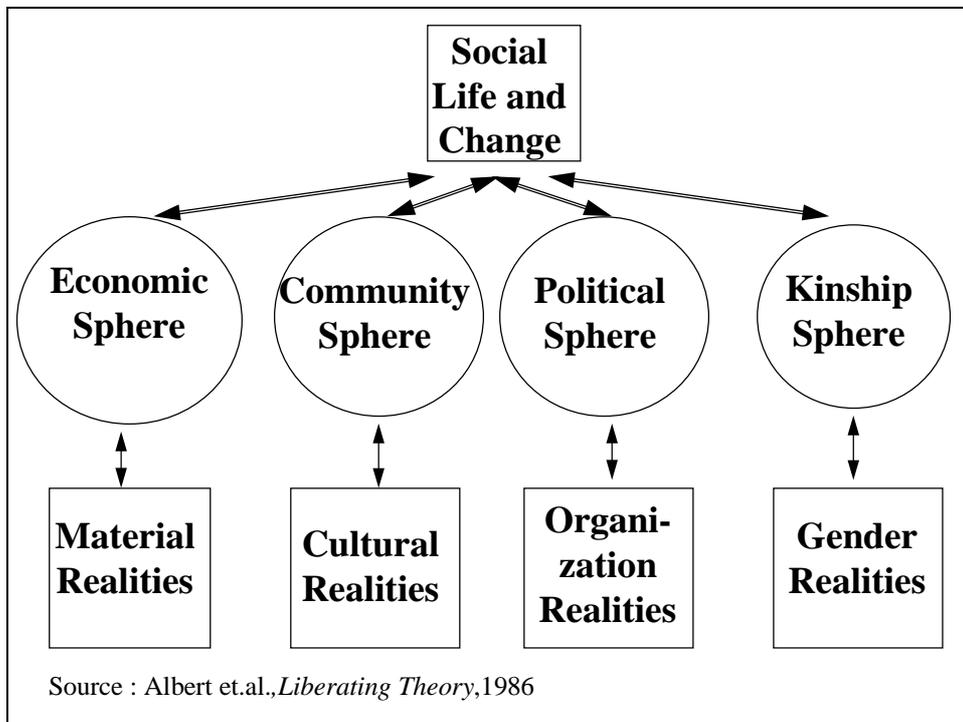
7

Subtle Monist Conceptualisation Economic Version

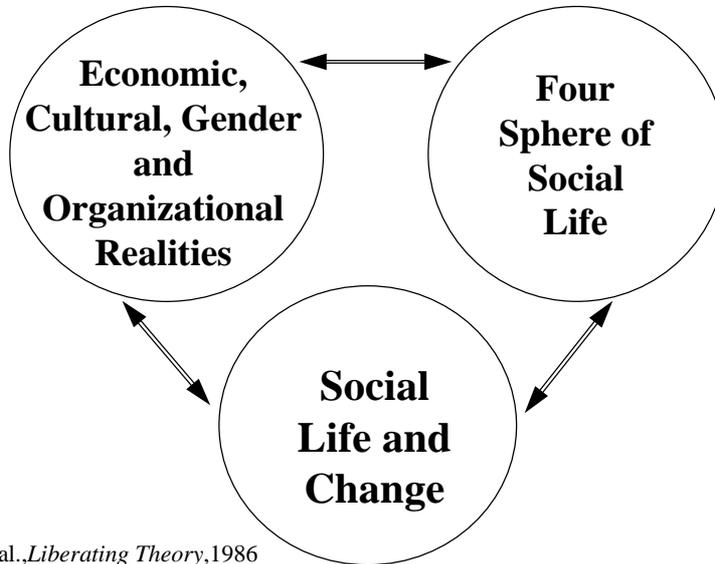


8

A Pluralist Conceptualisation

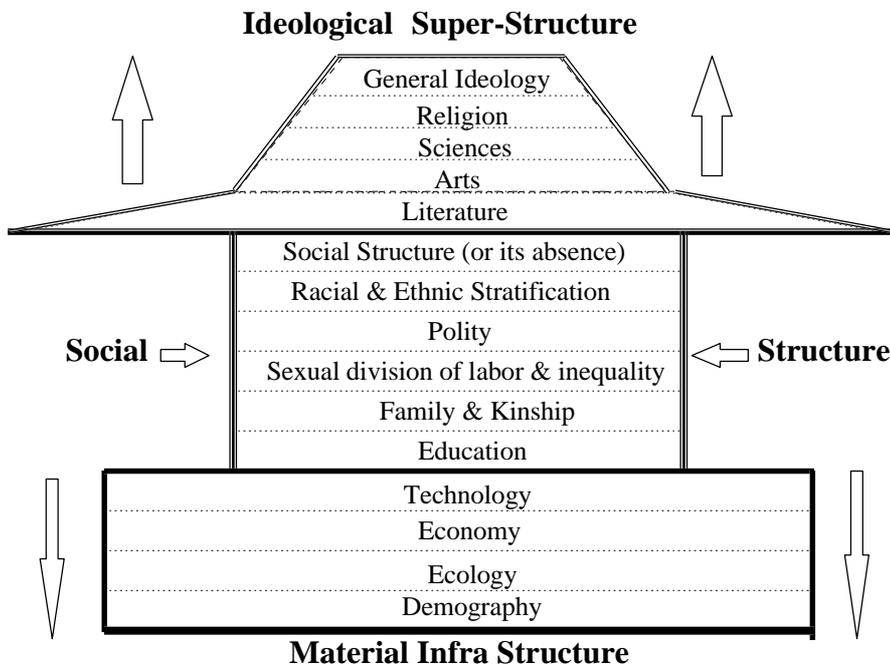


**A COMPLEMENTARY HOLIST
CONCEPTUALIZATION**



Source:
Albertet.al., *Liberating Theory*, 1986

The Basic Components of Socio-Cultural Systems



Source:
Sanderson, *Macro Sociology: An Introduction to Human Society*

DISKUSI

Pertanyaan

1. Mahsanah Asnawi (Muslimat NU, Jakarta)
Di samping ada LSM ada juga organisasi-organisasi kemasyarakatan seperti Ormas Keagamaan. Apakah dalam framework ini disebut LSM juga? Bagaimana hubungannya selama ini? Apakah NGO mempunyai grassroots? Muslimat NU mengakui bahwa tujuan LSM selaras dengan Ormas Keagamaan. Untuk yang akan datang, apakah program-program LSM bisa dipadukan (kerjasama) dengan ormas-ormas? Misalnya di Aceh ada LSM yang ingin membantu, tetapi tidak diterima oleh masyarakat setempat.
2. Pahir Halim (FIK-Ornop Sulsel, Makasar)
 - Ada kesan dari Billah bahwa yang Ornop developmentalis tidak benar. Menurut saya semua bermanfaat sepanjang bisa saling mengisi dalam perannya masing-masing. Semua LSM baik karena bermanfaat bagi masyarakat.
 - Saat ini isu Masyarakat Sipil sedang banyak dibicarakan orang. Bila Masyarakat Sipil terbentuk apakah negara/pemerintah masih diperlukan?
 - Makalah Pak Billah (Perkembangan Ornop di Indonesia) ini bagus, apakah tidak lebih baik dibentuk dalam sebuah buku karena sangat bermanfaat?
3. Abdurrahman (ASEAN Secretariat, Jakarta)
 - Mengenai klasifikasi Ornop/LSM tidak perlu ada dikotomi yang tajam antara yang developmentalis dan yang transformatif (strukturalis). Ada yang menggunakan kedua peran tersebut. Pandangan yang didasari Teori Dependensi Gunder Frank ini perlu dikaji secara lebih terpadu.
 - Aktivistis LSM harus bersikap kritis pada tempat dan posisi yang tepat, tidak sepotong-sepotong.
 - Good Governance merupakan korelasi dari 3 komponen yaitu negara, masyarakat (termasuk LSM), dan pasar. Perlu ada hubungan yang kritis dari 3 komponen tersebut dan masing-masing harus memahami fungsinya masing-masing. Yang paling penting adalah komunikasi dari ketiga elemen ini. Selama ini LSM Strukturalis sering menganggap yang bekerja di lapangan itu kacangan. Sebaliknya LSM yang di lapangan menyebut yang strukturalis hanya bicara saja.
4. Peni Chalid (Tim Pengendali JPS, Jakarta)
 - Beberapa pengalaman menunjukkan bahwa perlu adanya kerjasama antar NGO, karena satu dengan lainnya meng-*claim* masing-masing. Kalau NGO bertemu, sulit untuk menyatukan visi. Dari sekian rumitnya hubungan antar NGO itu pada sisi mana NGO bisa ketemu? NGO tidak bisa bekerja sendiri, perlu ada mitra yang lain.
 - Jika NGO meng-*claim* sebagai agen transparansi, demokrasi. Mungkinkah transparansi dan akuntabilitas diterapkan di dalam NGO sendiri?
 - Ada *flash back* dari Teori Neo Klasik, Teori Kritis dan Teori Dependensi. Jadi sebenarnya tidak ada batas yang tegas antara NGO developmentalis, reformis dan transformatoris.

5. Farida (Bina Sumber Daya Mitra, Jakarta)
Bila kita bernostalgia tentang LSM, dulu bila mendengar LSM adalah sama dengan berbicara tentang aktivis-aktivis yang heroik, sangat idealis, dan fundamental. Aktivis-aktivis banyak yang menjadi pelatih partisipatif, menjadi *agent of change*. Kemudian dalam proses perkembangannya, aktivis-aktivis ini 'sakit hati' menjadi LSM, karena kalau mereka turun ke lapangan banyak masyarakat tidak suka kepada LSM karena LSM suka menipu. Misalnya dengan adanya P3T banyak LSM-LSM yang di bawah orang-orang Depnaker. Kegiatannya bersifat '*project-oriented*'. Apakah ada krisis idealisme sehingga LSM menjadi oportunist? Peran LSM sebagai peneliti, advokasi, community development, penerbitan ini menjadi bagaimana?
6. Ribut Susanto (Riau Mandiri, Riau)
Dengan adanya *booming* LSM, apa yang harus dilakukan ke depan? Dengan *booming* LSM ini, mereka mengejar profit. Ada kemungkinan LSM terpuruk oleh kelakuan yang berlangsung di kalangannya. Yang kita takutkan adalah di dalam LSM terjadi perubahan-perubahan yang luar biasa, Apakah perlu melahirkan suatu kode etik, misalnya dengan persyaratan yang ketat, membangun jaringan yang mampu menjaga moral gerakan? Banyak LSM di Riau berkantor di Dinas PU, Bappeda dan sebagainya. Bahkan ada kantor LSM yang dilempari masyarakat.

Jawaban

Terima kasih atas komentar-komentarnya. Jangan memperlakukan saya sebagai dokter dan anda sebagai pasien.

1. Konteks Ormas sebenarnya masuk ke dalam kategori Ornop, tetapi dalam pelaksanaannya jaringan-jaringan NGO tidak memasukkan ormas, karena Ormas berpijak pada kekuatan massa (*mass-oriented*), sedangkan NGO berpijak pada isu (*issue-oriented*). Ornop tidak pernah mengklaim mewakili masyarakat, tetapi bisa ikut memperjuangkan kepentingan masyarakat. Ada dua kemungkinan interaksi: kerjasama dan konflik. Seringkali kepentingan Ornop dan Ormas tidak sama. Tidak selamanya ormas mengambil keputusan secara demokratis, sesuai dengan aspirasi anggotanya. Pengambilan keputusannya oligarkis. Pada ormas terjadi hegemoni pengurus terhadap anggota-anggotanya. Misalnya dalam Konggres atau Mukhtamar, keputusan-keputusan dilakukan oleh pengurus-pengurus cabang, bukan oleh anggota. Sedangkan Ornop bersifat kritis dan ada yang mempraktekkan, yang sifatnya partisipatoris.

Apakah perbedaan ideologis menutup kemungkinan kerja sama? Tentu tidak. Ideologi berbeda tetapi tetap dapat bekerja sama (kolaborasi). Misalnya PKI yang memiliki organ sampai ke bawah dan Perhimpunan Indonesia. Keduanya walaupun mempunyai ideologi berbeda tetapi bisa bekerja sama dalam penanganan isu. Bisakah Ornop bekerja sama dengan Ormas? Tentunya bisa, karena kedua-duanya memiliki pendapat yang sama, misalnya soal kemiskinan, dan sudah banyak yang melakukan hal itu.

2. Ornop developmentalis.
Pembagian NGO bisa dari kegiatannya (penelitian, advokasi, dsb.), orientasi ideologisnya, atau teoritisnya. Perbedaan kategori berdasarkan pada sifat-sifat ini juga tidak menutup kemungkinan kerja sama asal tidak pada tataran ideologi. Pada tataran ideologis atau teori, ada asumsi: masyarakat terjadi karena adanya proses negosiasi ---

menimbulkan kaidah-kaidah, tatanan yang disepakati untuk dilaksanakan sehari-hari. Di masyarakat, tatanan tidak ditanyakan, tetapi bagaimana diterapkan dalam masyarakat. Sedangkan konflik timbul bila ada yang mendominasi dan yang didominasi, antara harmonisme dan perebutan kepentingan.

3. Masyarakat sipil.

Di kalangan Islam sudah dipertanyakan: Mungkinkah masyarakat sipil tanpa negara? Apakah negara masih dibutuhkan? Mungkinkah kita bermasyarakat tanpa negara atau mendekonstruksikan negara.

Negara adalah bentuk sementara, sebelum terbentuk masyarakat nirnegara. Ada kelompok yang menerapkan pemilikan kolektif untuk komunitasnya. Negara semula diciptakan oleh manusia, namun kemudian (seperti robot yang) menguasai manusia.

4. Klasifikasi Ornop.

NGO bisa dipandang dari berbagai sudut pandang. Ketika kita memandang dari sudut pandang ideologis, banyak hal sulit dilakukan bersama. Ideologi dipakai sebagai alat pembeda.

5. *Good governance*

Good governance juga berlaku bagi NGO. NGO yang maling juga ada, NGO yang muncul kalau ada proyek. NGO ini menyebut dirinya NGO tetapi menipu rakyat. Penerapan transparansi dan akuntabilitas publik dari NGO menjadi agenda yang sangat kritis, tetapi sangat perlu secara terus menerus dipaksakan.

6. Pembelajaran NGO satu dengan yang lain.

NGO tetap menjadi non partisan dan kelompok penekan. Ada yang menjadi konsultan pembangunan: menjadi konsultan berbagai lembaga dunia maupun negara.

7. Teori Kritis dan Teori Dependensi

Ketika anda menghadapi dilema, akan terlihat apakah anda oportunistis atau idealis. NGO sebagai *training ground* untuk pengembangan cara pandang kritis. Teori Dependensi dikenalkan oleh LSP-nya Adi Sasono. Pada tahun 1980an pemerintah memotong kegiatan-kegiatan mahasiswa dengan konsep NKK/BKK. Pada saat itu, mahasiswa perlu mengaktualisasikan kegiatannya. Kemudian mereka masuk/bergabung dengan NGO, melakukan inovasi, dan akhirnya NGO menjadi kritis.

8. Kecenderungan yang sudah terjadi

Peran NGO tetap non partisan dan kelompok penekan. Ketika partai politik lumpuh, masyarakat membelokkan ke NGO. NGO tetap melakukan tekanan-tekanan. NGO (terutama yang developmentalis) memetaformasikan ke konsultasi, tenaga-tenaga terampil ke masyarakat. Misalnya LP3ES yang mengambil bentuk konsultasi (untuk Bappenas, Bank Dunia, dsb.). Namun pada saat menghadapi dilema, akan kelihatan apakah tersebut NGO oportunistis atau tidak. Banyak NGO besar yang menghadapi dilema. Misalnya pada saat membuat proposal dibuat *mark-up*. Setelah negosiasi, dilakukan pemotongan atau pemberian kepada pihak tertentu, dan pada saat tanda tangan kontrak dana sebesar 30% dipotong, misalnya untuk panitia pelaksana dari orang Depdagri yang dibayar tanpa kerja. NGO yang bekerja sama dengan pemerintah yang korup akan terbawa kepada masyarakat.

DINAMIKA ORNOP UTARA-SELATAN

PENGALAMAN OXFAM GB DI INDONESIA

Pendahuluan

Kerjasama antara Ornop Utara-Selatan telah menjadi pokok perdebatan dalam komunitas Ornop Indonesia paling tidak sejak awal tahun 70an. Isu yang menjadi bahan perdebatan berubah-ubah sesuai dengan perkembangan jaman. Pada tahun 70an yang menjadi pokok perdebatan adalah ideologi. Kata kuncinya adalah: sosialisme, liberalisme, dan berbagai jenis isme yang lain. Tahun 80an perdebatan lebih banyak terpusat pada mekanisme pengelolaan dana. Kata kunci pada dasawarsa ini adalah: *direct funding*, *North-South Forum*, *gate keeper*, dan lain sebagainya. Tahun 90an perdebatan kembali lagi kepada gagasan besar: neo-liberalisme, globalisasi, dan masyarakat sipil (*civil society*). Secara amat disederhanakan, hubungan antara Ornop utara-selatan dapat disebut sebagai sebuah ketegangan (*tension*) terus-menerus. Bila dikelola dengan baik, ia akan dapat menjadi sumber energi untuk perubahan. Akan tetapi dia juga bisa menjadi sumber "pembusukan" komunitas Ornop.

Makalah ringkas ini berusaha untuk mengenali sumber-sumber ketegangan itu dengan mengupas motivasi masing-masing pihak melakukan hubungan, serta bagaimana hubungan itu diwujudkan selama ini. Pada bagian akhir coba dilihat isu-isu penting yang perlu dikenali agar tidak menjadi ganjalan. Untuk memperjelas maksud yang hendak disampaikan, contoh dari hubungan Oxfam dengan mitranya akan dikemukakan bilamana diperlukan.

Batasan

Ornop

Organisasi Non-Pemerintah (Ornop) merupakan entitas yang sangat beragam. Sebuah daftar yang dikeluarkan oleh PBB, misalnya, mencantumkan lembaga penelitian, organisasi profesi, serikat buruh, kamar dagang dan industri, organisasi pemuda, organisasi keagamaan, perkumpulan orang lanjut usia, lembaga promosi pariwisata, yayasan swasta, partai politik, dan lain sebagainya sebagai Ornop. Apa yang akan kita diskusikan di sini adalah satu jenis Ornop yang pada masa lalu dikenal sebagai Lembaga Pengembangan Swadaya Masyarakat (LPSM). Yaitu organisasi yang didirikan untuk kepentingan orang lain, bukan kepentingan pendiri atau anggotanya, dengan misi yang biasanya berhubungan dengan pengurangan kemiskinan, pembangunan, atau pemberdayaan masyarakat.

Dalam konteks industri pembangunan (*aid industry*), Ornop jenis ini merupakan lembaga perantara yang penting dalam menyalurkan dana dari negara-negara kaya (=utara) ke negara-negara miskin (=selatan). Dalam diskusi ini, istilah-istilah yang mengaburkan arti seperti negara yang sedang berkembang, atau dunia ketiga, sengaja tidak dipergunakan untuk memudahkan rujukan bersama. Selain itu, setelah berakhirnya perang dingin

penggunaan istilah timur-barat, dan dunia ketiga semakin kekurangan angin dalam perdebatan-perdebatan di kalangan Ornop.

Utara

Yang dimaksud Utara di sini adalah negara-negara kaya anggota OECD yaitu negara-negara di Eropa Barat, Amerika Utara, ditambah dengan Jepang dan Australia. Tentu saja batasannya, dengan demikian juga keanggotaannya, dapat selalu diperdebatkan.

Selatan

Tentu saja tidak semua negara-negara "Selatan" berada di belahan selatan bumi. Sejak runtuhnya tembok Berlin, dan bangkrutnya imperium Uni Soviet, negara-negara yang dikategorikan miskin dan mendapat bantuan pembangunan dari negara-negara OECD menjadi semakin bertambah. Pemakaian istilah Selatan untuk negara-negara non-OECD semakin diterima dalam perdebatan-perdebatan internasional, misalnya dengan kerjasama Selatan-Selatan, atau Kelompok Selatan (G-77).

Alasan

Pertanyaan yang sering ditanyakan oleh Ornop Indonesia kepada Oxfam adalah apa motivasi kami bekerja di Indonesia. Melihat pada perjalanan sejarah Oxfam, paling tidak ada empat alasan yang dapat dicatat:

Derma (Charity)

Oxfam lahir di tengah-tengah berkecamuknya perang dunia ke dua, ketika tentara sekutu memblokir Yunani yang tengah diduduki oleh tentara Jerman. Pada saat itu, banyak warga sipil Yunani yang menjadi korban karena kelaparan. Warga Inggris kemudian melakukan pengumpulan dana, makanan dan pakaian untuk dikirimkan kepada warga Yunani dengan menembus blokade tentara sekutu. Motivasi membantu mereka yang membutuhkan mendapatkan dorongan dari ajaran agama-agama besar di dunia. Orang-orang Samaria merupakan model yang ditunjukkan oleh kitab Injil. Dalam agama Islam hal itu dilembagakan melalui zakat. Derma juga merupakan ajaran penting bagi agama-agama yang lahir di India. *Charity* sampai saat ini merupakan motivasi penting bagi masyarakat Inggris untuk memberikan sumbangannya kepada Oxfam. Saat ini ada kurang lebih 200,000 orang yang secara teratur memberikan sumbangan kepada Oxfam. Sumbangan ini merupakan hampir seperempat dari seluruh pemasukan Oxfam, yang memungkinkan Oxfam dapat lebih fleksibel dalam menyusun prioritas-prioritasnya.

Tanggung Jawab Etis

Setelah perang dunia ke dua, Inggris memulai proses dekolonisasi negara-negara jajahannya. Bersamaan dengan itu, kembali pula serombongan besar pejabat-pejabat kolonial, dan imigran dari negara-negara bekas jajahan. Orang-orang ini membawa dimensi baru dalam dunia Ornop di Inggris yaitu informasi mengenai negara-negara di seberang lautan, dan juga kekayaan yang dapat disumbangkan pada kegiatan-kegiatan charity. Mereka juga memperkuat perasaan bertanggungjawab masyarakat Inggris

terhadap kerusakan yang dialami oleh negara-negara bekas jajahannya. Satu motivasi yang merupakan lanjutan dari "Tanggungjawab orang putih untuk membangun peradaban" yang kental pada awal kolonisasi dan misionari. Dalam bentuknya yang baru, tanggungjawab ini dibungkus dalam bentuk tanggungjawab masyarakat Inggris sebagai warganegara dunia.

Solidaritas

Setelah periode radikalisme di akhir tahun 60an yang ditandai dengan protes anti-nuklir dan anti perang Vietnam, kesadaran baru akan saling ketergantungan antar manusia yang hidup dalam "kapal ruang angkasa bumi" semakin mendapatkan momentum. Gerakan lingkungan hidup, feminisme, hak asasi manusia dan sejenisnya lahir pada masa-masa ini. Kesadaran baru ini, tentu saja, juga mempengaruhi Ornop-Ornop yang sudah mapan seperti Oxfam. Pada saat itu juga mulai bermunculan organisasi baru yang mengadopsi falsafah Oxfam yang lahir di Inggris, seperti Oxfam-solidarite di Belgia, Oxfam Jerman, Oxfam Canada, Oxfam Amerika, Oxfam Hongkong dan Oxfam New Zealand. Kemudian, beberapa organisasi lain yang memiliki sejarah yang berbeda akan tetapi memiliki orientasi nilai yang sama seperti NOVIB (Belanda), INTERMON (Spanyol) dan CAA (Australia), bergabung untuk membentuk persekutuan Oxfam Internasional. Persekutuan ini dibangun untuk memberi dampak yang lebih besar terhadap perubahan tata dunia yang lebih adil untuk semua orang yang hidup di Utara dan Selatan, tanpa membedakan keturunan dan status sosial, laki-laki dan perempuan, anak-anak dan orang tua, generasi sekarang dan generasi yang akan datang.

Dana

Tahun 80an memperlihatkan tumbuh-kembangnya komunitas Ornop di dunia. Pada saat itu, sejalan dengan dominannya paradigma neo-liberalisme yang disponsori oleh duet Ronald Reagan dan Margareth Thatcher, Ornop Utara dilihat sebagai saluran yang efektif untuk menyalurkan bantuan. Bantuan resmi pemerintah (*official development aid*) menjadi sumber pembiayaan yang terbesar dari Ornop-Ornop utara. Oxfam, misalnya menetapkan batas maksimum sepertiga dari pemasukannya dari bantuan pemerintah untuk menjaga independensinya. Akan tetapi banyak Ornop di negara-negara utara yang hampir seratus persen dari pemasukannya berasal dari bantuan resmi pemerintah.

Sukar bagi kita untuk dapat menggeneralisasikan motivasi Ornop Selatan untuk mau melakukan hubungan dengan Ornop Utara. Akan tetapi dari pengalaman berhubungan dengan mitra Oxfam selama ini, paling tidak ada 3 hal yang menonjol:

Inspirasi

Sebagian besar dari Ornop Indonesia lahir pada tahun 70an dan 80an. Pada saat itu bentuk pengorganisasian Ornop merupakan ruang yang terbuka sejak dimulainya konsolidasi politik rezim orde baru. Banyak Ornop mendapatkan inspirasi dari bacaan-bacaan yang populer di kalangan mahasiswa dan kelas menengah terdidik saat itu: perdebatan mengenai teori ketergantungan, gerakan lingkungan hidup, feminisme, dan lain sebagainya. Ada juga yang berdiri karena termotivasi dengan hadirnya Ornop internasional yang diijinkan masuk ke Indonesia setelah tahun 1968.

Persekutuan

Dalam situasi politik yang semakin pengap pada akhir tahun 80an, maka banyak agenda perubahan Ornop Indonesia hanya mungkin dilaksanakan dengan membangun persekutuan dengan Ornop-Ornop lain di luar Indonesia. Pembentukan forum-forum Ornop Indonesia-Canada, Indonesia-Australia, dan pendirian INGI (kemudian berubah menjadi INFID) di paruh kedua tahun 80an merupakan bentuk persekutuan yang efektif memperkuat posisi tawar Ornop Indonesia di dalam maupun di luar negeri.

Bantuan

Tak dapat diingkari, bantuan keuangan dan bantuan teknis merupakan alasan banyak Ornop Indonesia membangun kontak dan hubungan dengan Ornop dari Utara. Sampai saat ini, bantuan dana masih tetap merupakan alasan yang penting dalam mengikat hubungan ke dua belah pihak, dan mungkin pula merupakan sumber ketegangan yang utama dalam hubungan ini.

Bentuk Kerjasama

Proyek

"Proyek" telah mendapat nama begitu buruk selama ini di Indonesia. Akan tetapi proyek masihlah merupakan bentuk kerjasama yang utama dalam industri pembangunan, termasuk dalam hubungan Ornop Utara dan Selatan. Kerjasama proyek biasanya tujuannya sangat spesifik, dengan jangka waktu dan pendanaan yang terbatas. Bentuk kerjasama ini bisa berupa penanaman jagung di satu lokasi tertentu, sampai dengan upaya perubahan undang-undang agraria. Bisa dalam bentuk lokakarya, atau berupa pembelian barang-barang modal. Rentangnya luas sekali.

Kerjasama proyek, karena waktunya terbatas, sering menimbulkan banyak permasalahan. Yang pertama adalah tidak ada jaminan bahwa ada hubungan yang berlanjut setelah proyek selesai, padahal upaya perubahan yang ingin dilakukan oleh Ornop biasanya berjangka menengah atau panjang. Yang kedua, jarang sekali ada lembaga pemberi dana untuk bersedia memberikan bantuan dalam pengembangan kemampuan Ornop, atau barang-barang modal, dalam bentuk proyek. Padahal hal inilah merupakan kebutuhan utama Ornop yang baru mulai.

Program

Untuk mengatasi kelemahan-kelemahan pendekatan proyek, maka banyak Ornop mulai membangun kerjasama atas dasar program. Hubungan ini biasanya berjangka lebih panjang 3-5 tahun, dengan komponen yang lebih terintegrasi, misalnya: peningkatan produksi pertanian, penyediaan modal, advokasi, dan pengembangan kelembagaan. Untuk mendapatkan dampak yang lebih besar, kerjasama program juga biasanya melibatkan lebih banyak Ornop yang memiliki keahlian atau minat yang komplementer. Sejak tahun 1995, sembilan puluh persen dari kerja Oxfam di Indonesia merupakan kerjasama program. Dalam tahun terakhir ini, proporsi ini agak bergeser dengan banyaknya proyek bantuan kemanusiaan di lokasi-lokasi yang dilanda konflik.

Pendekatan program, sesungguhnya banyak lebih mempermudah administrasi Ornop Utara, karena memindahkan beban itu kepada sekretariat bersama yang dibentuk oleh mitra. Selain itu, komponen pengembangan kelembagaan yang dirancang untuk menjamin keberlanjutan kegiatan setelah program berakhir dapat dengan mudah "disusupkan" ke dalam rancangan program. Akan tetapi hal ini juga akan membuat Ornop menjadi kurang lentur dalam menanggapi perubahan-perubahan yang terjadi secara cepat. Pengalaman Oxfam di Maluku, misalnya, menunjukkan bahwa komitmen program jangka panjang dengan mitra membuat Oxfam tidak dapat dengan cepat menyesuaikan diri dengan perubahan karena banyaknya pihak-pihak yang terlibat dan harus diajak berkonsultasi. Masalah juga bisa muncul bila mitra-mitra yang bergabung dalam kerjasama program masih belum selesai dengan usaha membangun visi bersama, dan tidak memiliki mekanisme pengambilan keputusan yang dapat diterima oleh semua pihak.

Aksi Solidaritas

Pada masa-masa terakhir ini mulai tumbuh satu bentuk kerjasama baru, yaitu aksi solidaritas. Salah satu bentuk dari kerjasama ini adalah tidak ada, atau minimalnya, transfer dana dari Utara ke Selatan, maupun sebaliknya. Yang dipertukarkan adalah informasi, yang kemudian dipergunakan di kedua belahan bumi untuk melakukan perubahan kebijakan negara. Contoh yang paling mutakhir adalah gerakan Jubilee 2000 yang bertujuan untuk menghapuskan hutang negara-negara paling miskin di dunia.

Wilayah Ketegangan

Nilai

Ornop merupakan cerminan dari masyarakat tempat ia lahir dan tumbuh. Oleh karena itu tak dapat dihindarkan nilai-nilai Ornop Utara dan Selatan ada yang berimpit, ataupun sama sekali berlawanan. Dalam pengalaman Oxfam, isu keadilan *gender* misalnya merupakan area konflik nilai yang sering dihadapi dalam hubungannya dengan mitra. Bagi Oxfam keadilan *gender* merupakan nilai inti (*core value*) yang tak dapat dikompromikan. Akan tetapi banyak mitra merasakan itu sebagai bentuk pemaksaan kehendak bila dipergunakan sebagai persyaratan bekerjasama. Kita bisa perluas contoh ini dengan penghormatan pada hak azasi manusia, transparansi, kesetaraan, otonomi, dan lain-lain yang selama ini diasumsikan merupakan nilai-nilai inti komunitas Ornop Indonesia. Cara untuk mengatasi ketegangan ini adalah dengan berusaha lebih eksplisit mengenai nilai-nilai inti ini sejak awal menjalin hubungan. Ini berarti perlu periode "pacaran" yang cukup lama untuk saling mengenal, sebelum mengikatkan diri dalam hubungan kerjasama yang lebih formal. Pada masa pacaran ini mungkin saja terjadi proses saling mempengaruhi di antara kedua belah pihak.

Cara Kerja

Agak lain dengan perbenturan nilai, wilayah ketegangan ini ada pada tingkatan strategi dan taktik. Banyak mitra di Selatan meminta Ornop Utara untuk mempercayakan pelaksanaan kerjasama itu kepada mereka. Akan tetapi karena rentang kompetensi dan ketrampilan yang dimiliki oleh Ornop Selatan sangat bervariasi, maka Ornop Utara juga memiliki pilihan keterlibatan (*engagement*) yang berbeda-beda pula. Meminjam ucapan bijak

ki Hajar Dewantara yang sering dikutip oleh Departemen Pendidikan: *Ing ngarso tulodo, ing madyo mbangun karso, lan tut wuri handayani*. Berdasarkan pengalaman Oxfam, semakin operasional Ornop Utara di Selatan, maka semakin besar pula kemungkinan gesekan dengan mitranya. Akan tetapi tanpa keterlibatan, maka Ornop Utara akan kehilangan kesempatan besar untuk belajar dari dan membangun solidaritas dengan mitranya di Selatan.

Akuntabilitas

Karena sebagian besar dari hubungan Ornop Utara-Selatan mengandung unsur kerjasama pendanaan, maka akan selalu ada pertanyaan besar kepada siapa mereka bertanggungjawab: pada donor (mereka yang memberi uang), atau kepada penerima manfaat (yaitu mereka yang dijadikan alasan untuk mendapatkan uang)? Ornop Utara yang menerima bantuan pendanaan dari pemerintah biasanya meneruskan beban pelaporan keuangan kepada mitranya di Selatan. Hal ini sering memberikan beban yang berlebihan kepada Ornop di Selatan. Di lain pihak Ornop di Selatan sendiri sering tidak mampu memberikan alternatif bagi bentuk pertanggungjawaban yang dapat di terima. Sebagian besar Ornop Indonesia berbentuk yayasan yang membuat mereka hanya bertanggungjawab pada dirinya sendiri. Apakah ada jalan lain? Misalnya sebuah hubungan tanpa unsur pendanaan, dan hanya berdasarkan kesamaan nilai dan gagasan? Pilihan yang sampai saat ini belum dapat diterima oleh mayoritas Ornop di Utara dan Selatan karena dalamnya cengkeraman industri pembangunan dalam diri Ornop. Bahkan, boleh dikatakan Ornop merupakan produk dari industri pembangunan tersebut.

Prospek di Masa Depan: Agenda Bersama Utara-Selatan

Saat ini sebetulnya sudah semakin berkembang kesadaran baru akan perlunya agenda bersama Ornop Utara dan Selatan. Agenda bersama ini selama ini belum banyak pergi dari retorika, walaupun sudah mulai ada upaya-upaya eksperimen untuk membangun solidaritas bersama. Beberapa tantangan ke depan yang akan dihadapi oleh Ornop di Utara maupun selatan adalah: liberalisasi perdagangan global, perusakan lingkungan yang masih berlangsung terus, peningkatan kekerasan yang dipicu oleh berlebuhnya pasokan senjata sejak berakhirnya perang dingin, dan berbagai bentuk ketidakadilan yang masih berlangsung di banyak bagian dunia. Bukan tempatnya dalam makalah ini untuk mengulas lebih dalam mengenai agenda global ini. Akan tetapi penulis masih melihat cukup banyak ruang untuk membangun kerjasama Ornop Utara-Selatan. Tantangannya mungkin terletak pada keberanian kita untuk keluar dari jebakan industri pembangunan yang agendanya ditetapkan bukan oleh Ornop.

DISKUSI

Pertanyaan

1. Mochtar Bahar (LPPSE, Jakarta)
 - Agar dapat melakukan *delinking*, ada beberapa LSM yang diajar untuk melakukan *fund-raising*. Saat ini hanya sekitar 10% LSM Jabotabek yang mampu mencari dana sendiri. Selebihnya daripada mencari dana sendiri memilih ikut melakukan proyek-proyek JPS, gender, dan sebagainya. Mengapa isu-isu yang digarap sama warnanya? Apakah LSM tertarik pada isu-isu tersebut karena kemudahan mendapatkan dana?
 - Mungkin diperlukan fasilitator yang dapat mengajak kita memperbaiki diri kita sendiri agar kembali ke fitrahnya (LSM perjuangan versus LSM memikirkan perut sendiri). Apakah SMERU dapat menjadi fasilitator untuk ini?
2. Dewi (JAPORI, Jakarta)

LSM lahir sebagai akibat adanya destruksi sistem bernegara. Dukungan dana diperlukan agar LSM dapat berperan melawan pelaku destruktif ini. Dalam kenyataannya, LSM menggunakan dana dari luar Indonesia yang sengaja membantu dengan alasan “keprihatinan” meskipun sebetulnya ada kepentingan tertentu yang ingin mereka capai.

Sudah ada konsep untuk keluar dari kerumitan kerja LSM saat ini. Namun, sistem lama sudah terlanjur memasyarakat. Ketergantungan LSM pada bantuan dana sudah sangat tinggi. Bagaimana kita melepaskan diri? Perlukah kita merekayasa konflik agar pihak-pihak luar dapat terus menaruh perhatian dan mengucurkan dana?

3. Endang Suhendar (AKATIGA, Bandung)

Delinking yang telah dijabarkan dalam teori sangat berat dilaksanakan karena *link* yang ada sekarang berkaitan dengan pola kekuasaan. Segala sesuatu ditentukan dari pihak utara. LSM di tingkat bawah sebetulnya justru memiliki potensi kuat untuk melakukan *delinking* ini karena mereka mengakar ke bawah. Kesulitan *delinking* justru dirasakan oleh Ornop besar dengan dukungan dana dari luar. Saat ini tidak ada LSM yang secara transparan melaporkan keuangan organisasinya. Sejauh tidak ada yang transparan, *delinking* tidak akan pernah bisa terwujud.

Jawaban

Ornop Utara memang lebih *project-oriented*, tetapi hal ini juga salah satu upaya pemberdayaan mitranya. Semakin operasional Ornop Utara, semakin tinggi gesekan yang terjadi dengan Ornop/LSM di Selatan. Tetapi jika tidak demikian, maka Ornop di Ujuga tidak memperoleh proses pembelajaran. ‘*Engagement*’ antar 2 NGO inilah yang membuka peluang belajar.

Sekali terlibat dalam industri pembangunan maka kedua pihak semakin terikat. Misalnya: program poverty alleviation oleh Oxfam. Program ini diselenggarakan karena di

Indonesia belum banyak organisasi kemanusiaan, kebanyakan organisasi pembangunan. Karena itu Oxfam hadir di Indonesia.

Tentang *fund-raising*, dulu banyak organisasi-organisasi seperti Taman Siswa dan Sarekat Islam yang bisa hidup dari iuran anggotanya sendiri. Tetapi NGO-NGO sekarang kebanyakan sudah biasa mendapat sumber dana secara mudah, sementara yang lain membutuhkan kerja lebih keras untuk menggali dana. *Delinking* semakin memaksa kita melakukan apa yang kita bicarakan sore ini. Simak diskusi dalam Kongres Aliansi Masyarakat Adat.

Pada kenyataannya banyak dana yang diterima digunakan untuk kepentingan Ornop itu sendiri, misalnya: *voter education*. Jika kita ingin melakukan *delinking*, maka kita harus melakukan sesuatu yang lebih terfokus, dengan konstituen yang jelas, dan sebagainya.

Keinginan Pembicara adalah bahwa harus ada pembagian tugas yang lebih jelas diantara Ornop. Ornop Utara sebaiknya mengurus dirinya sendiri, demikian pula Ornop Selatan.

Komentar Moderator (Risman Musa)

Kita memang sering menerima kompromi yang ditawarkan Ornop utara. Barangkali memang ada skenario agar *delinking* tidak terjadi. Dikotomi ini perlu dibahas.

Pertanyaan

4. Tom Malik (Rio Tinto, Jakarta)
Mengenai *delinking*. Kita selalu berhubungan dengan berbagai pihak, karena itu tidak mudah melakukan *delinking* karena masyarakat atau organisasi mempunyai agenda masing-masing. Seandainya 3 lingkaran (pemerintah, swasta, voluntir) melakukan fungsinya sebaik mungkin, saling kontrol, maka akan baik. Nilai sukses suatu NGO adalah bila NGO tersebut sudah tidak dibutuhkan lagi oleh masyarakat. Rio Tinto, misalnya, sebetulnya tidak mau memberikan *public services*, tetapi karena fungsi pemerintah belum berjalan baik, maka karena peduli, Rio Tinto melakukan.
5. Harley (Walhi Sulawesi Tengah, Palu)
 - Profesionalisme tidak perlu diterapkan dalam NGO karena dapat membentuk “kotak-kotak” keahlian tertentu. Permasalahan yang ada justru beragam. Namun, individu di NGO boleh saja profesional.
 - Hal penting yang sebaiknya terintegrasi dalam pembangunan formal adalah “penanggulangan korban bencana”.
 - Kritik Walhi terhadap *funding agencies* yaitu mereka mengejar *target project* yang harus dikerjakan/diselesaikan. NGO tidak perlu meresahkan kekurangan dana karena ideologi sebetulnya bisa membayarnya. Juga, pendanaan tidak selalu harus dari pihak atas dan bukan target yang harus dikejar. Pada kenyataannya, jumlah lembaga pendanaan ini semakin bertambah. Ada NGO yang seolah-olah menyembah lembaga. Apakah kebijakan *funding yang top down* ini dapat diubah?
6. Deny P. Sambodo (IDEA, Yogyakarta)
 - Bila kita mau jujur, ideologi yang ingin dibangun oleh donor adalah bagaimana liberalisasi ekonomi dapat terjadi di negara dunia ketiga.

- Indonesia mempunyai beberapa persoalan, antara lain:
 - NGO Indonesia belum bisa mengantisipasi *bidden agenda* para donor, karena itu tidak mengetahui dampaknya dan belum bisa memposisikan diri.
 - Ideologi diantara NGO belum jelas
 - Hubungan antara NGO utara dan NGO selatan adalah hubungan *dependency*, bukan *interdependency*

Jawaban

Bila kita berbicara mengenai *delinking* tidak berarti bahwa Ornop Indonesia mengisolasi dirinya. Hal yang perlu dilakukan adalah memutuskan hubungan lama, kemudian membuka hubungan baru dengan *terms* yang berbeda. Dulu *terms* Ornop Utara ditentukan oleh ODA karena mereka terikat kontrak dengan ODA.

Berbicara mengenai *funding*, Oxfam bukan *funding agency*. Oleh sebab itu, ketika Oxfam akan bekerja sama dengan Ornop lain, Oxfam akan melihat faktor-faktor berikut ini:

- Apakah ada ideologi yang sama atau berhimpitan?
- Apakah ada persamaan nilai?
- Apakah ada unsur *complementary* diantara organisasi yang bersangkutan (*skills, competency, dan sebagainya*)

Memang Ornop sering tidak bisa memilih, juga dalam sektor atau area kerja. *Strategic planning* bisa dirancang oleh Ornop yang bersangkutan, tetapi ketika berbicara tentang apa yang dilakukan dengan dana yang dimiliki, Ornop tersebut kembali pada *terms* yang harus dipenuhi.

Perdebatannya adalah apakah Ornop itu voluntary atau tidak.

Agenda besar ORNOP (menurut Fowler, 1997) adalah mengembalikan hal-hal berikut ini:

- mengubah dunia yang tidak adil menjadi dunia yang lebih adil;
- mengubah pembangunan yang rakus menjadi yang berkelanjutan (*sustainable development*);
- menciptakan sistem pemerintahan yang lebih *inclusive, accountable*.

Agenda ke tiga bisa dilakukan pada tingkat mikro dan makro. Pada tingkat mikro yaitu dengan merestrukturkan *political economy*, dan mengembalikan *international order*. Proyeksi dilakukan juga pada tingkat negara dan bangsa, tidak selalu di tingkat perdesaan saja, tetapi juga di di negara-negara Utara. Masalah yang ada sangat banyak, harus diyakini bahwa selalu ada tempat bagi NGO untuk melakukan sesuatu. Bila NGO tidak saling berebut, semua bisa melakukan sesuatu. Tetapi, bila segala sesuatu diukur dengan uang, maka semuanya menjadi komoditi. Apakah kita mau keluar dari industri pembangunan, bekerja dengan *terms* kita sendiri, tidak rakus, dan *committed*?

Masalah Ornop Selatan/Indonesia dan Ornop Utara sama saja, masih terjebak dalam hubungan yang telah ada. Jadi kita harus siap bergesekan dengan mitra di Utara atau di Selatan.

Komentar Moderator

Apakah kita mau mandiri? Kita harus bisa *delinking* diri kita.

KELAHIRAN DAN PERKEMBANGAN LSM DI ACEH

XXXXXXXXXXXX ©©© XXXXXXXXXXXXXXX

Tabrani Yunis
CCDE, Aceh

Tabrani Yunis adalah direktur Center for Community Development and Education (CCDE) di Banda Aceh. Tabrani aktif di dunia Ornop sejak tahun 1991 sampai sekarang. Ia menyelesaikan sarjana pendidikannya di Jurusan Bahasa Inggris, pada tahun 1989. Kegiatan CCDE yang dipimpinnya memfokuskan perhatian pada pengembangan masyarakat dan pendidikan & pelatihan bagi kelompok dampingan untuk masalah lingkungan hidup, peningkatan pendapatan dan usaha kecil, pemberdayaan perempuan melalui pembentukan kelompok usaha kecil perempuan, dan penyediaan modal usaha kepada kelompok dampingan.

KELAHIRAN DAN PERKEMBANGAN LSM DI ACEH

Latar Belakang

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), sebutan lunak dari Ornop (organisasi non pemerintah) yang diadopsi dari istilah Internasionalnya Non Governmental Organization (NGO) selama ini semakin populer di tanah air. Lembaga yang menurut Aswab Mahasin (1989) kelahirannya di Indonesia pada tahun 1970 an ini, kini telah merambah ke seluruh pelosok tanah air, sampai ke desa-desa. Di samping karena pertumbuhan dan perkembangannya yang sangat pesat tersebut, pemerintah juga sangat berperan dalam mempopularkan nama institusi ini karena munculnya label Ornop sebagai lembaga yang menjadi lawan pemerintah. Label yang kemudian muncul karena sikap kritis Ornop yang selalu mengkritisi pemerintah dalam melaksanakan pembangunan yang sentralistis, tidak partisipatif (top down) dan terlalu menekankan pada ekonomi dan sebagainya. Sikap kritis ini, kemudian telah menempatkan Ornop pada posisi yang salah satunya sebagai social control yang mengontrol aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah. LSM kemudian semakin populer karena munculnya sentimen negatif antara LSM (Ornop) dengan pemerintah yang akhirnya membuat pemerintah kebakaran jenggot.

Tulisan ini tidak akan melakukan sebuah pengkajian (analisis) yang mendalam dan kritis, karena hanya memaparkan tentang cikal bakal, pertumbuhan dan perkembangan organisasi non pemerintah (Ornop) atau yang sekarang lebih sering disebut dengan nama Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di Aceh. Oleh sebab itu, pemaparan dalam tulisan ini lebih menekankan pada deskripsi historis tentang kelahiran, latar belakang (historical background), program dan kegiatan, tantangan dan prospek Ornop-Ornop di Aceh dalam konteks masa lalu, masa kini dan esok.

Kelahiran dan Perkembangan LSM di Aceh

Berbicara soal kelahiran Ornop di Aceh, pada hakikatnya telah berembrio sejak sebelum tahun 1970 an. Karena pada saat itu di Aceh telah ada organisasi yang dibentuk oleh kalangan orang-orang di luar pemerintahan dalam bentuk yayasan keagamaan seperti halnya dayah. Keberadaan dayah sebagai organisasi di luar pemerintahan yang menangani masalah-masalah yang dihadapi oleh umat dengan menjalankan usaha-usaha pemberdayaan rakyat melalui jalur pendidikan dan peningkatan kualitas serta pendapatan rakyat. Yayasan-yayasan tersebut tidak dikenal sebagai sebuah Ornop atau sebuah lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Kemudian pada tanggal 22 Agustus 1974 sebuah Ornop kelahiran Jakarta, 23 September 1957, datang dan membuka kantornya di Aceh. Lembaga ini bergerak di bidang Keluarga berencana, yakni Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI). Sebelum PKBI Aceh hadir di Banda Aceh, PKBI juga telah lebih dahulu hadir di Aceh Timur pada tahun 1963. Namun kehadiran PKBI di Aceh Timur pada tahun 1963 dan kehadirannya di kota Banda Aceh pada tahun 1974 tersebut, barangkali, tidak dapat kita katakan sebagai sebuah kelahiran, karena Ornop tersebut lahir di luar Aceh dan kemudian didrop ke daerah seperti Aceh. Apalagi secara struktural, PKBI Aceh memiliki sistem kepengurusan yang sangat struktural. Demikian

juga halnya dengan Ornop Save The Children Foundation (SCF) yang hadir ke Aceh pada tahun 1976. Ornop ini adalah sebuah Ornop Amerika yang pada tahun 1976 memulai kegiatannya di Aceh sebagai pelaksana program di daerah Aceh dengan sebutan Aceh program. Sekali lagi bahwa kehadiran kedua Ornop tersebut ke tanah rencong pada saat itu bukanlah sebagai sebuah kelahiran dan belum dapat dikatakan sebagai sebuah gerakan. Hal ini disebabkan oleh arah dan sifat kegiatan yang dilakukan saat itu tampaknya sangat sempit dan berorientasi kepada program (*program oriented*). Masyarakat Aceh sendiri pada saat itu tidak mengenalnya sebagai Ornop (LSM).

Di dalam catatan sejarah kelahiran LSM di Aceh, LSM tersebut baru mulai tumbuh satu persatu sejak tahun 1970an. Hal ini ditandai oleh lahirnya Yayasan Badan Koordinasi Pengembangan Sosial Masyarakat (YAPSM) di kecamatan Tangse, Kabupaten Pidie. Institusi ini tercatat sebagai sebuah Ornop sebagaimana kehadirannya termuat di dalam direktori LSM Aceh. Maka, kehadiran yayasan ini barangkali dapat dikatakan sebagai embrionya Ornop di Aceh yang kelahirannya diprediksikan sebagai dampak dari kehadiran Save The Children di daerah Tangse yang menjadi daerah binaan SCF pada saat itu. Dilihat dari tujuan pendiriannya, yayasan ini bertujuan meningkatkan taraf hidup masyarakat dalam berbagai sektor. Tiga tahun kemudian, pada tanggal 5 Mei 1979 di Aceh Besar, berdiri pula sebuah yayasan badan pengembangan masyarakat (YBPSM) yang memiliki tujuan yang sama yakni meningkatkan taraf hidup masyarakat, dengan daerah binaan berada di daerah Lamteuba, Aceh Besar. Daerah Lamteuba juga desa binaan SCF sejak tahun 1976. Pada tahun 1980 lahir pula sebuah Ornop baru Yayasan Panglima Polem yang membawa misi memajukan pengajaran pendidikan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Akan tetapi kehadiran Ornop ini juga tidak dikenal sebagai sebuah Ornop (LSM). Entah pada saat itu memang belum ada istilah Ornop, entah pula karena istilah LSM sendiri seperti ditulis Sabastian Saragih dalam buku kecilnya Membedah Perut LSM (1993) baru muncul pada tahun 1978 yang nama tersebut diusulkan oleh Dr. Sarino Mangun Pranoto pada pertemuan Ornop yang bergerak di bidang pembangunan Perdesaan di Ungaran 1978.

Dalam perkembangan selanjutnya embrio Ornop di Banda Aceh khususnya dan di Aceh umumnya, mulai membiak satu persatu dengan cara membelah diri pada dekade 1980 an. Sehingga pada dekade ini kelahiran Ornop (LSM) terjadi lebih cepat dibandingkan dengan apa yang terjadi pada tahun 1970 an. Di awal dekade 1980 an, pada tahun 1982 kelahiran Ornop diawali dengan berdirinya Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen (YLPK). Ornop ini didirikan oleh beberapa kaum akademisi yang mengajar di kampus. Ornop bertujuan memberdayakan masyarakat konsumen dengan memberikan bimbingan pada konsumen serta mendorong peningkatan produksi dalam negeri. Kehadiran lembaga ini pada saat itu, belum menunjukkan citra diri Ornop yang kritis. Lalu, setahun kemudian beberapa dosen FKIP pada tanggal 11 Maret 1983 mendirikan Yayasan Kemakmuran Bangsa (YKB) yang diketuai oleh Drs. Abdullah Faridan, juga dalam kepengurusannya termasuk nama Drs. Hasbalah Saad, MS. Gerak pertumbuhan Ornop di Aceh mulai menampakkan tanda-tanda berkembang biak pada tahun 1980an, sehingga dapat dikatakan sebagai tahun perkembangan awal munculnya Ornop-Ornop di Aceh. Karena pada tahun 1980an tersebut, Ornop (LSM) mulai berkembang biak satu persatu di Aceh pada dekade 1980an tersebut. Pada dekade ini inisiatif aktivis kampus mulai tumbuh dan berkembang dengan membangun atau mendirikan Ornop (LSM) melalui sebuah proses perkembangbiakan yang membelah diri. Kelahiran Ornop-Ornop pada saat itu lahir dari sebuah idealisme atau cita-cita untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat di perdesaan yang miskin dan marginal. Dengan demikian secara sederhana kita melihat bahwa arah

perjuangan Ornop pada saat itu adalah pada pemberdayaan rakyat miskin melalui kegiatan-kegiatan yang sifatnya masih sangat karitatif seperti halnya kegiatan income generating, pendidikan ketrampilan dan kegiatan-kegiatan yang sifatnya menjawab persoalan kemiskinan, belum pada advokasi.

Ketika yang namanya pembangunan yang berpola kapitalisme dan sentralistik telah membawa dampak negatif terhadap kehidupan rakyat dengan melebarnya *social gap*, hilangnya partisipasi rakyat pada proses pengambilan keputusan, kerusakan lingkungan hidup yang kian parah, dan hal-hal lain yang merugikan rakyat, kepedulian aktivis di Aceh kian muncul dan meningkat. Maka berawal dari sebuah sikap kepedulian terhadap kehidupan rakyat yang banyak menjadi korban pembangunan yang menyebabkan terjadinya pemiskinan baik secara struktural maupun absolut, maka kepedulian tersebut telah mendorong orang-orang terutama dari kalangan kampus di Aceh mendirikan Ornop- Ornop. Gerak langkah itu semakin terasa dan nyata, pada tahun 1985. Ketika itu sebuah forum studi kependudukan dan lingkungan Hidup yang disingkat dengan sebutan Forsikal, dimotori oleh Atqia Abubakar secara resmi didirikan. Perhatian Ornop ini diarahkan kepada persoalan terhadap masalah kependudukan yang berimplikasi terhadap masalah lingkungan hidup. Ornop ini hadir, mengemban visi dan misi untuk penguatan rakyat. Pasca kelahiran Forsikal, dua tahun kemudian, pada tahun 1987 dengan visi yang semakin berkembang, muncul Yadesa, sebuah Ornop juga didirikan oleh beberapa orang aktivis kampus yang peduli dan *committed* terhadap masyarakat yang rentan. Lalu setahun kemudian, pada tahun 1988 beberapa orang dosen Unsyiah dari kalangan perempuan mendirikan sebuah lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum untuk Wanita dan Keluarga (LKBHuWK).

Tingkat kelahiran Ornop di Aceh pada dekade 1980an mengalami percepatan ketika Yadesa yang dimotori oleh Mansur Muhammad Kiran mulai menarik para aktivis kampus yang memiliki kepedulian dan idealisme untuk pemberdayaan rakyat ke Yadesa. Pendek kata, Mansur M. Kiran yang menjadi direktur Yadesa, pada saat itu mulai membuka wawasan para aktivis kampus untuk terjun dunia Ornop. Mansur Muhammad Kiran yang dosen tersebut mengajak beberapa aktivis kampus bergabung ke Yadesa dengan melibatkan para aktivis kampus tersebut ke dalam kegiatan – kegiatan yang dilaksanakan oleh Yadesa. Para aktivis ini diajak belajar bersama, mengunjungi lapangan dan melakukan kegiatan-kegiatan diskusi. Dari kegiatan-kegiatan ini, para aktivis tersebut kemudian mendapatkan pengalaman dari pelatihan (*training*) baik di dalam Ornop sendiri maupun di luar seperti hal pelatihan yang dilakukan oleh lembaga atau Ornop di luar Aceh. Pengalaman ini menjadi modal bagi para aktivis kampus tersebut untuk terjun ke dalam masyarakat. Apalagi pada saat jumlah mereka kian bertambah, kegiatan Yadesa yang masih terbatas saat itu, membuat para aktivis tersebut, berpikir semakin kritis. Menyadari bahwa apa yang mereka lakukan dengan program yang sedikit dan jumlah aktivis yang banyak, akhirnya dari beberapa diskusi yang mereka lakukan, lahirlah ide-ide untuk menangani masalah masyarakat miskin sesuai dengan isu dan kompetensi yang dimiliki oleh masing-masing aktivis. Mereka mencari wadah alternatif untuk menghubungkan mereka dengan masyarakat di perdesaan. Maka pada saat itu, para aktivis yang memiliki potensi dan keahlian yang berbeda-beda tersebut memutuskan untuk melahirkan wadah baru. Pada tahun 1989 Maimul Fidar, salah satu aktivis kampus yang telah belajar banyak dari Yadesa tersebut mendirikan Ornop baru yakni Citra Desa Indonesia (CDI) yang bergerak di bidang lingkungan. Lalu diikuti kemudian pada tahun yang sama juga, Suraiya Kammaruzaman dan kawan-kawan mendirikan Yayasan Flower Aceh yang khusus menangani isu-isu perempuan. Kelahiran Ornop dari kubu Mansur

tersebut pada saat itu kebetulan mendapat dukungan dari LELI Program (Learning and Linkage Program). Sehingga, mereka dapat memulai program-program keornopon dengan tanpa harus mencari lembaga-lembaga dana untuk memulai program mereka.

Di luar kubu Mansur, pada tahun yang sama juga lahir lembaga-lembaga baru yang lebih concern terhadap persoalan keagamaan. Tercatat pada saat itu ada dua Ornop baru yang lahir yaitu UMMAHAT yang menangani masalah pembinaan ibu balita dan remaja serta Yayasan Pendidikan Islam (YPI) dengan program kerja pengembangan pesantren, pertanian, peternakan dan pengembangan masyarakat.

Mengacu pada tingkat pertumbuhan dan perkembangan Ornop di Aceh pada dekade 1980an, dapat kita simpulkan betapa lambatnya tingkat pertumbuhan dan perkembangan Ornop di Aceh. Dan apabila kita mengikuti daur perkembangan organisasi, maka Ornop-Ornop di Aceh pada tahun 1980an sedang berada pada stadium bayi. Sebagai bayi, Ornop-Ornop di Aceh masih sangat membutuhkan sentuhan tangan-tangan terampil dari Ornop-Ornop lain di luar Aceh. Sehingga pada masa-masa ini kalangan aktivis dan pegiat Ornop/LSM Aceh banyak belajar dari Ornop di luar Aceh baik yang ada di Sumatera, maupun di pulau Jawa.

Satu hal yang menggembirakan di dalam proses perkembangan Ornop di Aceh pada saat itu, walaupun jumlah Ornop masih tergolong kecil, semangat untuk saling berbagi informasi, semangat untuk berjaringan tumbuh dengan baik. Kelahiran Ornop yang satu persatu tersebut menimbulkan niat untuk membentuk jaringan (net working) di kalangan aktivis dan Ornop. Keinginan tersebut ditelusuri dengan melakukan pertemuan-pertemuan informal untuk membahas masalah rencana membangun sikap kebersamaan di kalangan Ornop (LSM) pada tahun 1989-1990. Ide-ide itu muncul dilandasi oleh tampaknya fenomena pertumbuhan Ornop (LSM) pada dekade 1980an dan prediksi ke depan. Kenyataannya memang kelahiran dan pertumbuhan LSM mulai terasa cepat denyutnya, terjadi pada dekade 1990an. Pertumbuhan LSM (Ornop) di Aceh pada dekade ini mulai tampak subur. Hal ini ditandai oleh lahirnya banyak LSM (Ornop) yang bukan saja ada di Banda Aceh, tetapi juga di daerah-daerah. Mulai banyaknya LSM (Ornop) yang lahir, pada tahun 1990 tersebut, kalangan LSM yang telah melakukan pertemuan-pertemuan informal sejak tahun 1989 akhirnya pada tahun 1990 ide-ide akan perlunya mempersatukan gerak langkah LSM di Aceh terrealisasi. Pada tanggal 24 Januari 1990 dibentuk Forum Regional Lembaga Swadaya Masyarakat (FR-LSM) Daerah Istimewa Aceh yang berfungsi sebagai wahana komunikasi dan informasi bagi LSM-LSM yang ada di Aceh. Keberadaan Forum pada saat itu masih sebatas working group, sebagai pusat informasi yang bukan sebagai payung bagi LSM-LSM lain. Fungsinya pada saat itu direncanakan sebagai jembatan yang tidak untuk membesarkan dirinya sendiri, tetapi untuk memperkuat partisipan.

Terbentuknya FR-LSM Daerah Istimewa Aceh pada tahun 1990 sedikit banyaknya ikut mendorong lahirnya Ornop-Ornop atau LSM baru pada dekade 1990an. Hal ini disebabkan oleh semakin banyaknya kalangan yang berminat dan terpenggil untuk mendirikan LSM terutama dari kalangan yang telah memahami ideologi dan pekerjaan-pekerjaan LSM itu sendiri. Sehingga pertumbuhan LSM pada dekade ini tergolong cepat. Berdasarkan data yang dicatat dalam katalog LSM Aceh yang terdaftar sebagai anggota Forum LSM Aceh sebanyak 43 LSM ditambah dengan 11 Dayah atau pesantren. Secara rinci dapat disebutkan sebagai berikut. Tahun 1990 ada dua LSM yang lahir yakni Cordova Banda Aceh yang didirikan oleh Otto Syamsuddin Ishak dan kawan-kawan serta

Satyapitala, Aceh Tenggara. Pada tahun 1991 tercatat 3 LSM, masing-masing BP2SM, UMAHAT, dan LP2SM yang dibidani oleh Mirdas Ismail dkk. Jumlah LSM bertambah dengan lahir 6 LSM pada tahun 1992. Ke enam LSM tersebut adalah Yayasan Pugar yang dimotori Ridwan Anggie Munthei, Yayasan Sinar Desa Indonesia (Yasindo) yang didirikan oleh Mansur Muhammad Kiran, (setelah ia meninggalkan Yadesa), LPSELH, LPLH di Lhok Seumawe, Aceh Utara dan Suara Hati Rakyat (Sahara) di Sawang Aceh Utara. Pertumbuhan LSM pada tahun 1993 ada 6 LSM masing-masing Center for Community Development and Education (CCDE), Forum Aktivitas Ketrampilan dan Teknologi Aceh (FAKTA), The Pamualen Foundation, Teratai Foundation, Yayasan kesejahteraan masyarakat Indonesia (YAKMI), dan YAPDA di Aceh Utara. Sementara pada tahun 1994 hanya dua LSM muncul, yakni Pakat Tabela yang bergerak di bidang pembelaan Hukum dan Yayasan Pengembangan Wanita (YPW) di Takengon, Aceh Tengah. Pada tahun 1995 mengalami tingkat pertumbuhan yang sama dengan tahun 1993 karena adar 6 LSM baru yang lahir dan dengan bidang garapan yang semakin bervariasi. Ke enam Ornop tersebut adalah Yayasan Gardamadina di Kecamatan Manggeng, Aceh Selatan yang lahir dari kelompok basis pondok pesantren, Labinal di Sigli, Pidie yang kelahirannya dibidani oleh aktivis LSM, Medika Indonesia yang bergerak di bidang Kesehatan, Pase dengan program-program lingkungan hidup dan konservasi, Yayasan Anak Bangsa yang menangani isu anak-anak jalanan, dan YaSi yang bergerak di bidang pendidikan agama bagi remaja. LSM kelahiran tahun 1996 masing-masing-masing Rumpun Bambu Indonesia, yayasan Biduk Alam (YBA) Aceh Timur, dan lain-lain.

Angka kelahiran Ornop/LSM di Aceh yang semakin pesat terjadi pada tahun 1996 hingga akhir 1997. Pesatnya pertumbuhan Ornop pada masa 1996/1997, ikut didorong oleh adanya program pengentasan kemiskinan yang dirancang oleh pemerintah Indonesia seperti program IDT, KUT dan yang terakhir program JPS, P3DT dan program PPK yang notabene melibatkan Ornop. Ornop yang lahir dari program ini disinyalir sebagai penghalir LSM untuk mensukseskan program-program pemerintah tersebut. Namun pertumbuhan yang bersifat massive, besar-besaran, seperti jamur yang tumbuh di musim hujan di Aceh adalah ketika negeri yang kata orang sono, miracle economic growth ini dihantam badai krisis moneter. Krisis moneter yang membuat ekonomi Indonesia ambruk tersebut dan menyebabkan runtuhnya lembaga-lembaga ekonomi yang berimplikasi terhadap kehilangan lapangan pekerjaan, mendorong orang-orang yang kehilangan pekerjaan ikut melirik Ornop dan mendirikan Ornop. Di samping itu, terjerembabnya Soeharto dari kursi kekuasaan, ikut mendorong pertumbuhan Ornop (LSM) di Aceh. Jatuhnya rezim Soeharto yang ditandai dengan lengsernya sang Presiden yang terlama berkuasa ini, gerak pertumbuhan LSM di Aceh menjadi semakin kencang. Bahkan dengan momen itu kalangan Ornop (LSM) sekaligus melakukan reposisi.

Dalam konteks Aceh, sebagai daerah yang terseret ke dalam konflik politik yang berkepanjangan dan menyengsarakan rakyat karena tingginya tindak kekerasan negara (state violence), berupa pembunuhan, penghilangan orang dan penyiksaan dan lain-lain yang menyebabkan meningkatnya tingkat pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di tanah rencong ini, menyebabkan munculnya Ornop-Ornop yang memperjuangkan nasib orang-orang tertindas dan korban pelanggaran HAM. Kondisi masyarakat Aceh yang tertindas, bukan saja menyebabkan bermunculannya berbagai macam LSM, tetapi juga gerakan pembela hak azasi dari berbagai pihak terutama mahasiswa. Kini di Aceh telah terjadi yang namanya booming LSM. Karena pertumbuhan dan perkembangan Ornop di Aceh mencapai 3 kali lipat dari jumlah LSM yang ada pada tahun 1996 yang hanya ada sekitar 41 Ornop yang terdaftar sebagai anggota FR-LSM Aceh. Sementara data yang ada di

forum LSM Aceh saat ini jumlah anggota tetap Forum LSM Aceh yang mendaftar sebagai anggota berjumlah 104 NGO ditambah dengan 25 calon anggota. Sementara yang tidak terdaftar masih sangat banyak dan kini terus bertambah jumlahnya. Diperkirakan saat ini jumlahnya sudah melebihi 200 Ornop.

Munculnya Aliansi Baru

a. Walhi

Di samping pertumbuhan Ornop yang semakin cepat, di Aceh dalam waktu yang tidak begitu lama muncul pula aliansi, koalisi maupun konsorsium Ornop yang baru, pasca pembentukan FR-LSM Daerah Istimewa Aceh pada tahun 1990. Kehadiran jaringan, aliansi, koalisi baru ini mengarahkan Ornop/LSM di Aceh untuk dapat memperkuat perjuangan dan kerja sama melalui jaringan berdasarkan concern lembaga masing-masing. Oleh sebab itu ketika usia Forum regional LSM Aceh baru sekitar 3 tahun. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia yang berkantor pusat di Jakarta, pada tahun 1993 mulai membentuk forum WALHI di Aceh. Pada saat itu disebut dengan Forum Daerah (Forda) yang menjadi wadah bagi Ornop-Ornop yang bergerak di bidang lingkungan hidup. Kehadiran WALHI sebagai forum daerah juga ikut mendorong munculnya Ornop-Ornop baru sejalan dengan semakin mencuatnya persoalan-persoalan lingkungan hidup di Aceh yang meminggirkan dan memiskinkan masyarakat serta menimbulkan masalah-masalah sosial budaya. Banyaknya kasus eksplorasi sumber daya alam yang mengorbankan rakyat, seperti eksploitasi hutan secara membabi buta oleh para pemilik HPH dengan munculnya berbagai kasus perusakan lingkungan seperti kasus perusakan hutan oleh para pengusaha HPH di Aceh. Menurut catatan WALHI Aceh bahwa disamping minimnya kontribusi ekonomi HPH terhadap APBD, Aceh dihadapkan pada kerusakan hutan yang sangat parah. Karena dari tahun 1982 hingga 1993 laju deforestation mencapai 2.4 juta hektar yang jelas-jelas dirusak oleh HPH.

Kini, ketika Forum Daerah Walhi Aceh telah berubah nama menjadi WALHI Aceh, pertumbuhan Ornop atau LSM baru, semakin bertambah. Ornop/LSM tidak saja lahir di kota Banda Aceh, akan tetapi kini merambah ke setiap daerah tingkat II hingga di tingkat kecamatan. Kelahiran Ornop/LSM baru tersebut memilih ruang gerak yang semakin spesifik. Berdasarkan data yang diperoleh dari WALHI Aceh, saat ini jumlah anggota dan calon anggota di Walhi Aceh berjumlah 55 LSM di mana sekitar 30 diantaranya adalah Ornop (LSM) yang baru berdiri, sementara selebihnya adalah Ornop/LSM yang sudah lahir sebelumnya.

b. Kelompok Kerja Transformasi Gender Aceh (KKTGA)

Kelompok ini didirikan pada tanggal 15 Oktober 1995 sebagai tindak lanjut (*follow-up*) dari pelatihan *Gender Sensitivity*. Bentuk organisasinya adalah sebuah jaringan yang beranggotakan lembaga-lembaga (Ornop) dan individu yang memiliki komitmen untuk menegakkan keadilan *gender*. Latar belakang terbentuknya jaringan ini dilandasi pada landasan konstitusi, UUD 1945 yang secara tegas menjamin bahwa perempuan dan laki-laki memiliki hak, kewajiban dan kesempatan yang sama sebagai perencana, pelaksana dan penerima manfaat pembangunan. Kemudian dari realitas empiris dan sosial terjadinya ketimpangan di mana tidak seimbang hubungan antara laki-laki dengan perempuan.

Kenyataan menunjukkan masih kurangnya akses dan aset dan kontrol perempuan terhadap sumber daya yang strategis. Perempuan masih mengalami diskriminasi, subordinasi dan marginalisasi, baik dalam bidang politik, ekonomi, maupun sosial budaya. Di samping itu, masih sangat banyak perempuan yang mengalami tindak kekerasan dan menanggung beban kerja yang berat. Karena di dalam realitas empiris dan kebanyakan kebijakan formal cenderung belum seimbang hubungan antara perempuan dengan laki-laki. Maka untuk mencapai keadilan *gender* yang merupakan suatu konstruksi sosial yang mengatur hak, kewajiban, peranan, tanggung jawab dan harapan antara laki-laki dan perempuan, KKTGA bermaksud untuk meningkatkan kapasitas/kemampuan anggota dalam rangka memperbesar kontribusi dalam mensosialisasikan keadilan *gender*; di samping itu bertujuan untuk mengupayakan perubahan kebijakan ke arah yang lebih mendukung keadilan *gender*.

Sejalan dengan meningkatnya kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan, baik yang dilakukan oleh negara dalam konflik politik di Aceh, maupun kekerasan di dalam rumah tangga (*domestic violence*) di Aceh, KKTGA sebagai sebuah jaringan yang *concern* dengan masalah tersebut, pada tahun 1998 memberikan pelayanan pembelaan (advokasi) dan konseling kepada perempuan-perempuan yang membutuhkannya secara gratis melalui Women Crisis Center. Di samping itu juga melakukan kegiatan-kegiatan pelatihan bagi masyarakat.

c. SULöH (Jaringan Informasi dan Pemberdayaan Rakyat)

Setiap kelahiran atau terbentuknya sebuah jaringan Ornop, biasanya memiliki latar belakang sejarah (*historical background*). Begitu juga halnya dengan kelahiran SULöH yang menjadi jaringan informasi dan pemberdayaan rakyat ini. SULöH yang didirikan oleh 11 Ornop Aceh pada tanggal 12 Desember 1996 ini lahir dilatarbelakangi oleh sebuah kondisi rakyat yang menjadi korban pembangunan. Kondisi rakyat yang kehilangan partisipasi kritis terhadap pembangunan karena dihilangkan untuk alasan stabilitas keamanan. Adanya pelanggaran terhadap hak politik rakyat, hak ekonomi, sosial, budaya serta hak atas persamaan di depan hukum dan akhirnya UU tentang penyeragaman organisasi, kebijakan asas tunggal, UU pemerintahan desa dan lain-lain sebagai bagian dari bentuk-bentuk kebijakan politik yang pada kenyataannya menghegemoni hak-hak politik rakyat, serta adanya monopoli ekonomi, mengutamakan modal besar, dan berorientasi pada industri telah menyebabkan hilangnya akses rakyat terhadap sumber ekonomi dan pasar menjadi latar belakang lahirnya SULöH.

Kelahiran SULöH juga dilatarbelakangi oleh posisi dan kondisi Ornop yang pada saat itu dipandang masih belum mempunyai jati diri yang jelas karena masih ada Ornop yang tidak melakukan pemberdayaan rakyat karena terus selamanya menjaga kemesraan dengan pemerintah untuk menyelamatkan diri, bukan untuk menyelamatkan rakyat. Kemudian pada saat itu, para aktivis pendiri jaringan ini juga merefleksikan bahwa visi keornopan dalam realitasnya masih sangat beragam, sehingga cita-cita kelahirannya dirasakan belum tegas. Padahal cita-cita kelahiran Ornop adalah untuk memperkuat kesadaran politik rakyat sehingga mereka memiliki kesadaran politis dan kekuatan negosiasi untuk melahirkan sebuah keputusan.

Banyaknya muncul kasus-kasus perampasan tanah, pengalihan tata ruang tanah secara sewenang-wenang, eksploitasi sumber daya alam, pelanggaran hak sipil dan politis, *grass violation*, monopoli ekonomi, pelemahan budaya lokal dan lain juga menjadi pertimbangan

untuk melahirkan sebuah jaringan yang disebut SULÖH. Kelahiran SULÖH dijadikan sebagai wadah berjaringan, berkomunikasi, tukar informasi bagi anggota jaringan dan mitra kerja lainnya sebagai sebuah kebutuhan. SULÖH pada saat itu melihat bahwa pola hubungan kekuasaan yang sama sekali tidak memihak kepada rakyat. Karena pola pembangunan yang kapitalistik dan sentralistik dengan penekanan pada pembangunan ekonomi yang telah meningkatkan pertumbuhan ekonomi, telah pula menghilangkan partisipasi rakyat pada setiap proses pengambilan keputusan. Akibatnya pembangunan tersebut kehilangan makna. Kehilangan partisipasi rakyat terhadap pembangunan tersebut memberi makna bahwa rakyat bukan saja akan kehilangan akses untuk mengontrol sumber daya ekonomi, tetapi juga kehilangan akses terhadap kehidupan politik yang demokratis.

Maka kehadiran SULÖH sebagai sebuah jaringan bercita-cita agar terciptanya ruang gerak yang memungkinkan rakyat mampu mengekspresikan dirinya, menentukan nasibnya sendiri dan memiliki akses dan kontrol terhadap sumber daya. Oleh sebab itu SULÖH mengemban misi untuk mendorong tumbuhnya gerakan sosial yang kuat untuk terwujudnya perubahan sosial. Kini SULÖH sebagai sebuah jaringan yang beranggotakan 12 Ornop ini dan bertujuan memperkuat posisi rakyat, bersama anggota jaringannya selama ini memfokuskan kegiatan pada pemberdayaan masyarakat tani melalui wadah Perhimpunan Masyarakat Tani Aceh (PERMATA) yang terbentuk dari himpunan kelompok tani dampingan Ornop anggota jaringan serta pada persoalan-persoalan pertanahan yang dihadapi oleh rakyat kecil.

d. Koalisi NGO-HAM

Koalisi NGO HAM adalah lembaga advokasi HAM yang bersifat nirlaba, non partisan serta memiliki mandat untuk membangun aliansi dengan NGO regional, nasional dan internasional. Koalisi NGO HAM sendiri merupakan kumpulan beberapa Ornop yang peduli (*concern*) terhadap penegakkan HAM di Aceh. Koalisi ini didirikan pada tanggal 3 September 1998 yang dilatarbelakangi oleh sikap kepedulian dan keprihatinan terhadap tindak kekerasan dan pelanggaran HAM di Aceh. Dari sikap kepedulian dan keprihatinan tersebut aktivis dan NGO yang *concern* dengan penegakan HAM terpanggil untuk mengungkapkan kasus-kasus pelanggaran HAM di Aceh selama daerah ini dijadikan sebagai daerah Operasi Militer (DOM). Di samping itu, lengsernya Presiden Soeharto pada tanggal 21 Mei 1998 menjadi momentum yang tepat bagi koalisi NGO HAM Aceh untuk mengungkapkan semua tragedi pelanggaran HAM di Aceh selama berlangsungnya operasi militer 1989-1998. Oleh sebab itu, para aktivis dan NGO peduli HAM Aceh menyatukan langkah dalam melakukan advokasi bersama terhadap korban pelanggaran HAM di Aceh. Untuk mengungkapkan fakta-fakta di lapangan, koalisi ini melakukan pendataan korban dan mengkampanyekannya melalui berbagai media massa dan internet.

Sebagai sebuah jaringan yang tergolong baru, Koalisi NGO HAM menginginkan terwujudnya tatanan masyarakat madani yang menghormati nilai-nilai kemanusiaan, berkeadilan sosial, berperspektif *gender* dan demokratis. Adapun misi yang diemban oleh lembaga ini adalah sebagai lembaga advokasi HAM dengan tugas menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk menegakkan HAM di Aceh. Ada 3 isu strategis yang akan dicapai oleh lembaga ini. Ketiga isu strategis tersebut adalah (1) bagaimana agar pemerintah dan lembaga militer bertanggung jawab atas pelanggaran HAM di Aceh. (2) perubahan tatanan politik di Aceh dan isu ketiga (3) agar perjuangan HAM di Aceh menjadi agenda dan perhatian (*concern*) masyarakat internasional.

Di samping adanya jaringan atau koalisi dan forum yang disebutkan di atas dan konsorsium yang ada di Aceh, Ornop-Ornop di Aceh selama ini banyak menjalin hubungan kerja sama dan menjadi anggota dari jaringan Ornop di tingkat regional, nasional dan internasional. Hubungan kerja sama dan jaringan yang terbanguna di tingkat regional Sumatera misalnya melalui WIM Sumatera Utara, jaringan Heifer Project International Bukit Tinggi dan lain-lain. Di tingkat nasional antara lain menjadi mitra dan anggota seperti Yasppuk Jakarta, Yappika, LP3ES, ELSAM, Bina Swadaya, Bina Desa, Jari, INPI Pact, Bangun Mitra Sejati dan lain-lain. Sementara untuk Jaringan internasional, masing-masing lembaga biasanya ikut membangun jaringan kerja sama yang erat dalam melakukan kegiatan pemberdayaan rakyat di Aceh saat ini.

Berdasarkan deskripsi di atas, kita dapat melihat bahwa kelahiran Ornop-Ornop di Aceh pada dekade 1970an hingga dekade 1980an mengalami pertumbuhan yang lamban dan evolusif. Latar belakang kelahiran Ornop-Ornop pada masa ini juga lahir dari sebuah keprihatinan dan kepedulian terhadap kehidupan kaum miskin yang tertindas dan marginal sebagai akibat dari pola pembangunan yang tidak memihak kepada rakyat kecil.

Sementara pada dekade 1990an, kelahiran Ornop yang mengalami percepatan, dilatar belakangi oleh berbagai kondisi yang semakin kompleks seperti kemiskinan, eksploitasi sumber daya alam dan hutan, *setting* politik orde baru yang mengekang kebebasan rakyat dengan alasan stabilitas nasional menjadi pemicu muncul tumbuh dan lahirnya Ornop di Aceh pada dekade 1990an hingga tahun 1996 dan pertengahan 1997. Terjadinya booming Ornop di Aceh pada tahun 1997 hingga tahun 2000 mencapai angka 200 lebih, dilatarbelakangi oleh banyak faktor sesuai dengan perkembangan dan perubahan zaman, kondisi ekonomi, sosial politik dan lain-lain. Tidak dapat dipungkiri bahwa krisis moneter yang melanda Indonesia sejak Juli 1997 hingga saat ini telah menyebabkan rusaknya sendi perekonomian Indonesia yang berimplikasi kepada persoalan sosial seperti terjadinya PHK pada perusahaan-perusahaan perbankan dan lain-lain. Kondisi ini telah ikut mendorong orang-orang yang ter PHK atau para kontraktor yang bangkrut semasa krisis berupaya mendirikan NGO. Tahun 1997-2000, sebagai periode krisis moneter, yang membuat pemerintah berhadapan dengan masalah kemiskinan yang meningkat dan harus mencari alternatif usaha pengentasan kemiskinan melalui berbagai program yang dibiayai dengan hutang luar negeri seperti halnya program Jaring Pengaman Sosial (social Saffety Net Program) telah melahirkan Ornop-Ornop yang menjadi *stakeholder* bagi pelaksanaan program tersebut karena program hutang yang menuntut agar dipantau oleh Ornop tersebut, juga menjadi pendorong tingginya tingkat kelahiran Ornop. Runtuhnya kursi kekuasaan Soeharto yang ditandai dengan peristiwa lengser keprabon pada tanggal 21 Mei 1998, dan derasnya arus reformasi telah membuka klep-klep kesadaran masyarakat untuk bangkit dari penindasan yang panjang. Hal ini mendorong semakin banyak tumbuhnya Ornop. Dan secara kontekstual, dalam konteks ke Aceh-an, di mana Aceh yang dalam percaturan politik dijadikan korban sandiwara elit-elit politik, yang menyengsarakan rakyat Aceh, banyaknya kasus pelanggaran HAM, tingginya angka tindak kekerasan yang dilakukan oleh negara melalui kekuatan militernya telah mendorong orang dari berbagai kalangan mendirikan Ornop, yang diharapkan dapat memperjuangkan nasib rakyat Aceh yang tersiksa, tertindas dan diperas oleh pemerintah pusat. Sehingga tidak mengherankan bahwa pertumbuhan Ornop dan aliansi atau jaringan Ornop di Aceh pada era ini lebih dari 3 kali lipat.

Tingginya angka pertumbuhan Ornop di Aceh saat ini menjadi sebuah fenomena yang menarik untuk dicermati. Banyak kalangan yang mempertanyakan soal menjamurnya Ornop di Aceh dewasa ini. Di kalangan Ornop sendiri melihat pertumbuhan Ornop yang sangat pesat tersebut dari dua sisi. Sisi pertama dilihat sebagai sebuah peluang di mana dengan semakin banyaknya jumlah Ornop yang eksis, berarti akan semakin bertambah kekuatan rakyat dan posisi rakyat lebih kuat, sehingga masyarakat madani yang dicita-citakan, dapat dicapai dengan cepat. Namun di pihak lain, pertumbuhan Ornop yang sangat pesat dapat mengancam eksistensi Ornop tersebut. Alasannya adalah saat ini banyak Ornop jadian yang dilahirkan sebagai jembatan untuk mencapai sesuatu atau kehendak seseorang atau bahkan untuk menyelamatkan program-program pemerintah. Dalam realitas yang ada, banyak Ornop yang terlibat di dalam program yang dilaksanakan oleh pemerintah ikut terlibat dalam berbagai kasus penyelewengan, seperti dalam kasus KUT, JPS dan lain-lain.

Di mata masyarakat atau publik, kelahiran Ornop di Aceh dalam jumlah yang besar selama waktu 1997 hingga 2000 ini menimbulkan berbagai persepsi. Banyak kalangan mengatakan bahwa Ornop saat ini sedang naik daun, sedang banyak uang dan sebagainya. Persepsi-persepsi semacam ini secara langsung atau tidak langsung memancing motivasi kalangan kaum oportunistik untuk ikut mendirikan Ornop sebagai kendaraan untuk mencari popularitas dan sebagainya. Sebaliknya, menjamurnya jumlah Ornop di Aceh saat ini dipandang sebagai momentum pembelaan rakyat dan momentum untuk mengungkapkan dosa-dosa pemerintahan pusat terhadap rakyat.

Dari uraian tentang kelahiran dan pertumbuhan Ornop di Aceh sejak dekade 1970an hingga kini, kiranya telah dapat memberikan jawaban kepada kita terhadap pertanyaan mengapa Ornop itu ada. Pertanyaan yang mengarah pada visi dan misi Ornop itu didirikan. Pada hakikatnya, terasa sangat sulit untuk mengatakan dalam artian mengeneralisasikan visi dan misi Ornop di Aceh. Karena apabila kita berbicara soal visi dan misi, akan sangat tergantung kepada Ornop itu sendiri. Karena masing-masing Ornop memiliki visi dan misi yang berbeda sesuai dengan program dan gerakan yang dilakukan, kondisi politik dan sebagainya. Karena selama ini ada dikotomi terhadap gerakan Ornop yang ada di Indonesia. Dikotomi tersebut mengelompokkan Ornop-Ornop tersebut berdasarkan visi-misi dan program dan kegiatan yang dilakukan Ornop. Sebagaimana lazimnya Ornop-Ornop yang ada di Indonesia, untuk daerah Aceh paling kurang ada empat jenis Ornop yang eksis. Keempat jenis Ornop tersebut adalah Ornop yang tergolong kedalam kelompok Ornop developmentalis, Ornop advokatif, reformis dan transformatif. Namun, sesuai dengan kondisi daerah Aceh yang dilanda konflik, kecenderungan gerakan Ornop sekarang berada pada gerakan advokasi dan transformasi yang menginginkan terjadinya perubahan tatanan masyarakat yang memberikan kekuatan kepada rakyat (*people power*).

Terlepas dari dikotomi tersebut, jumlah Ornop di Aceh di masa depan dilihat dari fenomena sosial saat ini, menunjukkan akan semakin tumbuh dan semakin beragam baik dari segi program dan kegiatan maupun dari sudut personalnya. Kaum perempuan di Aceh telah mulai menampilkan partisipasi aktif mereka dengan membuat gerakan-gerakan baru seperti munculnya deklarasi “Serikat Inong Aceh” dan lain-lain. Munculnya gerakan kaum perempuan Aceh kini, karena mereka mulai menyadari posisi mereka. Mereka sadar bahwa untuk mengangkat harkat dan martabat kaum perempuan di Aceh, harus diupayakan pula oleh kaum perempuan bersama-sama kaum laki-laki. Oleh sebab itu mereka perlu merebut peran yang aktif dalam melakukan penguatan rakyat.

Ada pertanyaan yang sering dilontarkan oleh banyak orang terhadap Ornop-Ornop yang ada di Aceh saat ini. Pertanyaan tersebut mempertanyakan dari mana sumber dana Ornop-Ornop tersebut? Dalam pertanyaan yang sederhana adalah “siapa yang mendanai Ornop-Ornop di Aceh selama ini?” Barangkali, pertanyaan ini juga sangat mudah untuk dijawab. Ketika Ornop-Ornop itu mulai dibentuk, sumber dana yang mereka miliki biasanya diawali dengan dana sendiri yang ada pada saat pendirian Ornop tersebut. Artinya menjalankan kegiatan berdasarkan swadana. Namun, dalam perkembangan selanjutnya, Ornop-Ornop tersebut melalui jalinan jaringan kerja yang dibangun di setiap lini, sumber dana tersebut dapat bersumber dari Ornop-Ornop yang ada di Jakarta atau dari lembaga-lembaga dana yang *concern* dengan program yang dijalankan dan bersedia memberikan kontribusinya terhadap kegiatan yang dilakukan oleh Ornop dengan satu prinsip tidak mengikat, hibah (*grants*) yang dijadikan dana bergulir (*revolving fund*), bukan hutang dan sebagainya. Sehingga akuntabilitasnya yang pertama ditujukan kepada lembaga dana melalui audit yang dilakukan oleh lembaga dana maupun akuntan publik independent yang ditunjuk oleh lembaga dana. Dan pertanggung jawaban juga ditujukan kepada masyarakat sendiri sebagai kelompok penerima manfaat dengan cara memberikan akses kontrol kepada mereka untuk mengontrol penggunaan dana dan sebagainya. Dengan cara melibatkan masyarakat sebagai pihak yang mengontrol kegiatan dan penggunaan dana, maka tingkat akuntabilitas Ornop tersebut dapat dipercaya dan dipertanggung jawabkan. Sebagai sebuah ilustrasi saja, ketika Yayasan Program Pemulihan Keberdayaan Masyarakat (PKM) membantu Ornop-Ornop yang ada di Aceh dalam upaya memulihkan keberdayaan masyarakat sebagai dampak dari krisis moneter, menerapkan sistem kontrol yang berlapis dan partisipatif. Ornop yang menerima bantuan dari dana PKM akan mempertanggungjawabkan penggunaan dana yang diperoleh melalui pemeriksaan atau audit keuangan dari lembaga independent. Sementara kontrol sosial akan dilakukan oleh masyarakat yang menerima bantuan secara partisipatif dimana setiap anggota kelompok dampingan terlibat langsung dalam mengontrol setiap pengeluaran yang dilakukan Ornop yang mendampingi mereka. PKM dalam hal ini menjalankan prinsip transparansi dan bertanggung jawab yang harus dijalankan oleh setiap Ornop atau KSM penerima bantuan PKM dan memberikan akses kontrol kepada masyarakat penerima bantuan (*beneficiaries*).

Hubungan Ornop Dengan Negara dan Pemerintah

Keberadaan Ornop sebagai lembaga-lembaga yang melakukan *pressure* terhadap pemerintah selama ini tentu membuat hubungan di antara keduanya menjadi tidak begitu akrab. Masing-masing pihak ingin memosisikan diri pada posisi mereka masing-masing. Maka, berbicara soal bagaimana Ornop di Aceh melihat negara dan pemerintah pada hakikatnya sangat tergantung kepada keberadaan model Ornop yang dibangun. Maksudnya, dalam dunia keornopan sekarang ini, kita harus melihat mana Ornop yang bergerak berdasarkan hati nurani yang memihak kepada rakyat dan mana yang memihak kepada para penguasa (pemerintah). Kalau Ornop yang bergerak berdasarkan hati nurani yang *committed* dengan nasib rakyat, tentu saja dapat diartikan hubungan Ornop tersebut dengan pemerintah di mana Ornop memosisikan dirinya sebagai alat kontrol sosial yang menjalankan fungsi terhadap setiap kebijakan pemerintah yang merugikan rakyat. Bagi Ornop yang radikal di Aceh, memandang negara dalam artian pemerintahan adalah sebuah kekuasaan yang menindas rakyat Aceh, penghisap darah dan sangat kejam terhadap rakyat, tidak berperikemanusiaan dan lain-lain. Namun bagi Ornop yang lahir

dari sebuah komitmen sebagai mediasi, memandang pemerintah adalah mitra kerja yang baik dan perlu menggalang kerja sama yang erat dalam melakukan program-program pembangunan. Di pihak pemerintah sendiri, sebenarnya melihat Ornop dalam kaca mata yang hipokrit. Di satu pihak Ornop dianggap oleh pemerintah sebagai mitra dalam kegiatan pembangunan, seperti apa yang dialami pada saat pemerintah merancang program IDT, KUT dan JPS. Posisi Ornop di sini ditempatkan sebagai mitra yang berfungsi melancarkan program pengentasan kemiskinan saat itu, demikian juga halnya dengan kondisi saat ini. Di pihak lain, karena sikap kritis dan radikalnya, Ornop dianggap sebagai sebuah kekuatan oposan. Sehingga keberadaan Ornop diklaim sebagai pihak-pihak pengkhianat terhadap negara, yang semua pekerjaannya menjelek-jelekkan negara dan sebagainya.

Oleh sebab itu, pertumbuhan dan perkembangan Ornop di Aceh di era reformasi ini menjadi indikator untuk melihat bagaimana hubungan antara Ornop dengan pemerintah dan masyarakat sipil. Ketika kita berbicara tentang masyarakat sipil, kiranya perlu dipertanyakan dahulu masyarakat sipil yang mana. Karena bisa saja sekelompok orang yang berkepentingan mengatasnamakan masyarakat sipil dan sebagainya. Namun dengan lahirnya banyak Ornop di Aceh selama ini dilatarbelakangi oleh lemahnya posisi masyarakat sipil terhadap kekuasaan pemerintah menjadi sebuah indikator bahwa hubungan masyarakat sipil dengan pemerintah kurang harmonis. Kenyataan menunjukkan bahwa hubungan masyarakat sipil dengan pemerintahan di Aceh saat ini memang berada dalam kondisi disharmonis, di mana posisi masyarakat sipil semakin terjepit, tertindas dan teraniaya di tengah konflik politik yang tiada henti. Kondisi masyarakat sipil yang terjepit dan tertindas tersebut telah memicu munculnya perlawanan masyarakat sipil terhadap pemerintah yakni apa yang terjadi dengan aksi mogok makan, mogok kerja secara masal pada 2-4 Agustus 1999 yang melumpuhkan semua aktivitas pemerintahan. Kemudian di Aceh Utara masyarakat sipil juga kembali mogok masal selama satu minggu pada bulan Oktober 1999 dan kemudian bergerak masyarakat sipil pada tanggal 8 Nopember 1999 dalam pawai referendum. Sementara hubungan interaksi Ornop dengan masyarakat sipil selama ini tidak menunjukkan adanya disharmonisasi. Mungkin karena keberpihakan Ornop umumnya jelas dan tetap memihak kepada masyarakat sipil, masyarakat miskin, kecil dan tertindas.

Rekomendasi dan Diskusi

1. Kelahiran dan pertumbuhan Ornop yang semakin pesat di daerah-daerah di satu pihak merupakan sebuah kekuatan bagi eksistensi Ornop dalam memberdayakan rakyat, namun di pihak lain, kehadiran Ornop yang menjamur tersebut perlu dicermati karena akan dapat mengancam eksistensi Ornop secara umum. Oleh sebab itu diperlukan upaya untuk menyatukan visi dan misi yang tepat dalam memperkuat posisi rakyat sipil.
2. Seiring dengan tumbuhnya jaringan dan koalisi antar Ornop di daerah-daerah saat ini dipandang sebagai sebuah gerakan penguatan Ornop dalam memberdayakan anggotanya dalam rangka mempercepat proses demokratisasi yang terwujud dalam konsep masyarakat madani.
3. Ornop perlu memposisikan dirinya sebagai sebuah institusi penguatan rakyat yang lebih kritis dengan tidak melibatkan diri dalam program-program yang dijalankan pemerintah. Posisi Ornop lebih ditekankan pada posisi kontrol.

DISKUSI

Pertanyaan

1. Cami (Bangun Mitra Sejati, Jakarta)
Bagaimana visi Ornop Aceh ke depan, kaitannya dengan kebijakan OTODA di Aceh. Mungkin ada upaya yang dilakukan untuk menyatukan visi untuk membangun Aceh?
2. Kusumastuti (SMERU, Jakarta)
Dorongan apa yang menyebabkan munculnya banyak LSM di Aceh? Apakah dapat digambarkan dengan diskripsi (peta)?
3. Mochtar Abbas (Yayasan Mitra Usaha, Jakarta)
 - Apakah Ornop di Aceh merupakan anak cabang dari Jakarta (misalnya PKBI, Bina Desa, YLKI, dll)?
 - Bagaimana sebenarnya ide GAM dilihat dari perspektif Ornop di Aceh. Bagaimana kontribusi dari Ornop terhadap ide-ide berkaitan dengan GAM (misalnya Referendum)?

Jawaban

1. Perkembangan Ornop di Aceh sangat banyak. Persoalan visi ke depan berkaitan dengan OTODA kelihatannya mengarah pada pemberdayaan masyarakat (masyarakat sipil yang tertindas). Secara pasti LSM menginginkan bahwa masyarakat Aceh terlepas atau keluar dari ketertindasan.

Pembicara tidak yakin apakah benar OTODA ini akan dilaksanakan (kelihatannya pemerintah masih setengah hati), sehingga menjadi sulit untuk melihatnya dari perspektif Ornop. Masalahnya apakah visi ini dapat tercapai? Sangat tergantung dari banyak hal!

2. ORNOP juga dapat dijadikan sebagai kendaraan untuk mencari popularitas, jalan-jalan ke luar negeri. Banyak Ornop yang mempunyai keinginan untuk memberikan bantuan semata (bersifat karitatif). Selain itu, banyak LSM yang lahir karena adanya berbagai program pemerintah (KUT, JPS dll). Pembicara tidak dapat memberi tahu Ornop mana yang termasuk dalam kategori tersebut.
3. Ornop di Aceh lahir dari proses pembelajaran dari pihak-pihak di luar (Bina Desa, PKBI) dan lebih kepada proses pendewasaan Ornop di Aceh.

Ornop-Ornop masih berjalan dalam garis keornop-annya. Tetapi dari pihak militer, Ornop dianggap sebagai pihak yang “berpihak” pada GAM, karena lebih memperhatikan terhadap korban-korban yang diakibatkan oleh kekerasan militer dan tidak sebaliknya. Tidak semua Ornop berpihak pada munculnya Referendum, karena awalnya hanya beberapa (misalnya SIRA)

Komentar Moderator

1. Bagaimana Ornop mempunyai satu perspektif, misalnya dalam melihat partisipasi masyarakat. Dalam kaitan ini, Ornop seharusnya mempunyai agenda yang jelas dan perspektif yang sama dalam melihat partisipasi masyarakat.
2. Dari beberapa contoh terlihat ada kekhawatiran bias aktivitas dari Ornop.

MENCERMATI DINAMIKA PERGERAKAN ORNOP SULSEL

FORUM INFORMASI KOMUNIKASI ORNOP

Pahir Halim
FIK-Ornop Sulsel

Pahir Halim adalah Koordinator Forum Informasi Komunikasi Ornop(FIK-Ornop) Sulsel periode 2000-2003 beranggotakan 38 Ornop. Jabatan lainnya adalah Direktur Advokasi Lingkungan dari Lembaga Pengkajian Perdesaan Pantai dan Masyarakat (LP3M) di Makasar. Aktif di dunia Ornop sejak tahun 1988 dengan kegiatan penelitian, fasilitator training, seminar dan lokakarya, sebagai konsultan, dan pelaksana program. Ia juga aktif menulis di media massa. Pahir Halim lulus sebagai Sarjana Hukum pada tahun 1974.

MENCERMATI DINAMIKA PERGERAKAN ORNOP SULSEL

Pendahuluan

Menjamurnya Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau istilah yang digunakan dalam tulisan ini Organisasi Non Pemerintah (Ornop), sejak tahun 1980an adalah merupakan respon atas lambannya pemerintah dan lembaga-lembaga komersial mengantisipasi dinamika perubahan sosial kemasyarakatan. Kelambanan pemerintah dalam konteks ini, bukanlah disebabkan oleh lemahnya kemampuan teknis dan dana operasional, tetapi lebih pada lemahnya pemihakan negara (pemerintah) terhadap pemenuhan kebutuhan esensial komunitas rakyat.

Tidaklah sulit untuk menjelaskan, mengapa pemerintah terkesan lamban mengantisipasi arah pergerakan kebutuhan rakyatnya. Pertama landasan berpikir pemerintah mengelola negara dan masyarakat terlalu makro, sehingga kebutuhan-kebutuhan mendesak rakyat yang biasanya bersifat mikro luput dari perhatian. Kedua, perumusan pengambilan kebijakan-kebijakan politik, berpijak pada pendekatan yang sentralistik. Akibatnya, realitas sosial di tingkat daerah yang sangat beragam sesuai kondisi masyarakatnya, pada tingkat praktis disamaratakan penentuan antisipasinya. Ketiga, pada tingkat strategi perencanaan, pendekatan top down masih terlalu kuat, sehingga aspirasi daerah tidak pernah menjadi pertimbangan utama dalam proses implementasinya.

Berangkat dari realitas demikian itu, tak pelak lagi rasa ketidakadilan berbagai komunitas rakyat, muncul menjadi sebuah kekecewaan yang pada gilirannya tidak sedikit yang berakhir pada konflik sosial, baik yang bersifat vertikal maupun horisontal. Dalam situasi itulah munculnya Ornop dengan suatu visi yang relatif beragam yakni ingin memberdayakan rakyat sesuai kepentingan praktis seperti kebutuhan makan maupun kebutuhan yang lebih esensial seperti perlunya rasa aman, keadilan dan penghargaan terhadap harkat dan martabat kemanusiaan.

Adalah menarik dan bagaikan gayut bersambut, bahwa kehadiran Ornop ditengah situasi tadi, ternyata pemerintah memberikan respons positif. Hal yang disebut akhir, ditandai dengan pemberian peluang kepada Ornop untuk terlibat atau dilibatkan dalam program-program tertentu yang telah ditetapkan pemerintah. Akan tetapi, fenomena yang lebih menarik lagi adalah, umumnya para donatur luar negeri (non-negara) begitu tertarik memberikan dukungan dana kepada Ornop. Paling tidak donatur tertentu, telah mensyaratkan keterlibatan Ornop dalam pelaksanaan program aksi yang telah disetujui dengan pemerintah Indonesia.

Terlepas dari itu unsur politis, dukungan dana dari lembaga-lembaga internasional terhadap Ornop, adalah merupakan angin segar bagi Ornop untuk melaksanakan berbagai aksi secara merdeka, tanpa harus merasa dikontrol dan diawasi oleh negara. Akan halnya kelompok sasaran (rakyat), paling tidak merasa terwakili kebutuhannya, tanpa mesti memelas dihadapan pemerintah yang biasanya diikuti dengan keharusan politis tertentu.

Fenomena Ornop tersebut, terjadi hampir disemua daerah di Indonesia, terutama di Ibukota Propinsi dan Kotamadya serta beberapa Kabupaten.

Fenomena Ketergantungan

Memasuki tahun 1990an, keberadaan Ornop terkesan mencapai puncak popularitasnya dan bersamaan dengan itu kehadiran lembaga baru yang mengklaim diri sebagai Ornop, telah tiba pada keadaan yang benar-benar sulit lagi dikontrol. Paling tidak ada tiga alasan yang relevan dikemukakan mengapa Ornop demikian laris di tengah-tengah masyarakat. Pertama, Ornop tidak dipersepsi lagi sebagai lembaga oposan yang kerjanya berhadapan dengan pemerintah, tapi justru menjadi mitra. Kedua, terkesan bahwa melalui Ornop, dana-dana luar negeri dapat dengan mudah diperoleh dalam jumlah yang relatif besar. Ketiga, munculnya program pemerintah seperti Jaring Pengaman Sosial (JPS) dan Kredit Usaha Tani (KUT), dimana Ornop diposisikan sebagai lembaga yang harus terlibat atau dilibatkan.

Realitas yang disebut akhir, menjadi angin segar bagi Ornop, karena semakin mendapat peluang dan kepercayaan dalam pengelolaan program pemerintah. Akan tetapi, pada saat yang bersamaan kejadian ini sekaligus menjadi tantangan berat yang jika diantisipasi secara tidak cermat akan menjadi proses pembusukan keberadaan Ornop. Akibat logis dari peluang tersebut, benar-benar dimanfaatkan oleh berbagai segmen masyarakat, umum dan maupun pejabat dan bahkan pengusaha komersial yang terpuruk di era krisis ekonomi. Perjalanan selanjutnya, tak pelak lagi hampir semua daerah di wilayah negara ini, dipenuhi Ornop-Ornop karbitan atau lahir secara prematur. Yang dimaksud dalam hal ini, adalah Ornop yang lahir atas tuntutan seketika dan bukan didasari suatu visi dan misi kerakyatan yang jelas. Keadaan ini semakin diperparah, ketika kelompok mapan (pemerintah dan pengusaha), ikut bermain dalam wilayah ini yang orientasinya semata-mata kepentingan praktis yaitu ekonomi.

Kini, keberadaan Ornop pada umumnya tidak lebih dari sebuah perusahaan komersial yang kerja utamanya adalah mendatangkan dana sebesar-besarnya. Akibatnya, ketika ada satu atau dua Ornop yang masih bersuara nyaring tentang pemihakan kerakyatannya, maka kesan yang muncul adalah, karena Ornop tersebut tidak memperoleh keuntungan ekonomi. Dalam arti kata, kalau ada Ornop yang masih kritis, maka jawabannya adalah "berikan dana dan mereka akan diam".

Adalah ironis, di tengah kesulitan sosial yang semakin menjadi-jadi, justru posisi Ornop semakin rentan disusupi ketergantungan permanen dengan pihak-pihak tertentu (terutama pemerintah). Dalam posisi ketergantungan, lembaga apapun termasuk Ornop, sudah dapat diprediksi betapa tidak merdekanya dalam memperjuangkan visi dan misi kerakyatannya, apalagi bagi Ornop yang memang sejak awal kelahirannya hanya karena motivasi ekonomi semata.

Dinamika Ornop di Sulawesi Selatan

Sulawesi Selatan, yang akrab disebut sebagai pintu gerbang pengembangan kawasan Timur Indonesia secara pembangunan fisik, memang lebih menonjol dibandingkan propinsi lainnya di kawasan ini. Di propinsi ini, sejak tahun 1980an pergerakan Ornopnya

cukup dinamis hingga akhir awal 1990an. Dari segi jumlah lembaga (Ornop) yang ada di Sulawesi Selatan saat ini, secara matematis belum ada angka yang tersedia. Akan tetapi, dari perkiraan kasar Ornop yang ada di Sulawesi Selatan tidak kurang dari 300 lembaga dan sekitar 200 lembaga berkedudukan di kota Makassar. Sekadar informasi bahwa booming Ornop di Sulawesi Selatan ini, terutama terjadi antara 1995 sampai tahun 2000 ini, sekitar 150 Ornop yang memproklamirkan diri. Gambaran ini menjelaskan secara transparan bahwa fenomena menjamurnya Ornop di era program JPS dan KUT, terjadi pula di Sulawesi Selatan, sebagaimana yang terjadi di propinsi lainnya.

Akan tetapi yang ingin dibahas pada bagian tulisan kecil ini lebih difokuskan pada hubungan/jaringan antar Ornop baik di lingkungan Sulawesi Selatan maupun dalam cakupan nasional dan internasional. Pengungkapan situasi ini dipandang mendesak untuk memprediksi arah dan orientasi pergerakan Ornop yang ada di Sulawesi Selatan. Pada akhir tahun 1980 hingga awal tahun 1990, Ornop yang ada di Sulawesi Selatan seolah berlomba mencari jati diri/karakteristik yang dinilai tepat untuk kelompok sasaran yang akan diberdayakan. Pada dimensi ini praktis Ornop yang ada di propinsi ini, sangat rajin memperkuat kelompok-kelompok sesuai karakteristiknya dengan hampir menyentuh semua aspek kehidupan mulai dari urusan ekonomi rakyat, hak azasi manusia, lingkungan hidup, dan kesehatan.

Dalam upaya memperkuat posisi masing-masing Ornop, maka jaringan-jaringan nasional pun mulai dirintis dengan mencari lembaga-lembaga cantolan yang ada di Jakarta. Ternyata, kebutuhan Ornop daerah untuk berjejaring dengan Ornop Jakarta (Jawa umumnya), mendapat sambutan positif. Tersebutlah beberapa jaringan di antaranya WALHI, YAPPIKA, BINA SWADAYA, PKBI, BINA DESA, LP3ES, YLBHI, dan YLKI, dikenal sebagai lembaga-lembaga yang berpusat di Jakarta sebagai cantolan Ornop Sulawesi Selatan.

Keadaan tersebut, tentu saja suatu kondisi yang berjalan alamiah, karena memang menjadi kebutuhan bersama. Akan tetapi, dalam proses berikutnya jaringan-jaringan yang disebut tadi, cenderung berjalan secara sendiri-sendiri sehingga kesan munculnya jamaah-jamaah Ornop tak terhindar lagi. Pada tahapan ini terlihat jelas, fanatisme kelompok mulai menggejala bahkan cenderung berhadapan-hadapan dengan kelompok lainnya. Hingga saat ini, paling tidak terdapat tiga forum Ornop yang ada di Sulawesi Selatan yang cukup besar yaitu: WALHI, FIK-Ornop Sulawesi Selatan dan FORKES (forum kesehatan). Adalah menarik bahwa partisipan ketiga forum tersebut anggotanya adalah Ornop yang sebagian besar sama, dalam arti Ornop yang menjadi partisipan WALHI itu juga yang menjadi partisipan FIK, begitu juga FORKES Khusus untuk jaringan/forum WALHI dan FORKES adalah didasarkan pada kepentingan isu yaitu lingkungan hidup dan kesehatan, sedangkan FIK-Ornop lebih didasarkan pada kondisi geografis/wilayah.

Dengan demikian, keberadaan ketiga forum tersebut tidak perlu terjadi konflik kepentingan karena orientasinya memang berbeda. Namun demikian dalam tahap dinamika perbedaan cara pandang forum tersebut terkadang mengemuka, terutama yang berkaitan masalah etika ber-Ornop.

Pada tingkat yang lebih kecil Ornop anggota forum, membentuk lagi kelompok-kelompok kecil yang akrab disebut konsorsium. Keberadaan konsorsium ini lebih terikat pada kepentingan program, misalnya untuk program kelautan, pegunungan dan perkotaan. Pada tataran program, terbukti dalam banyak hal keberadaan konsorsium ini

lebih lincah dan lebih intens mengadakan komunikasi sesama anggotanya. Hal itu disebabkan oleh jumlah anggotanya yang lebih kecil dan tuntutan program memang seringkali membutuhkan pertemuan-pertemuan berkala.

Rekomendasi untuk Diskusi Lebih Lanjut

Di era reformasi sekarang ini, dimana paradigma pengelolaan negara mengalami pergeseran mendasar dari "Stabilitas untuk Kesejahteraan", berubah ke "Demokrasi untuk Kesejahteraan". Dari perubahan paradigma tersebut, membawa konsekuensi logis kepada fungsi dan peran strategis Ornop di era sekarang ini. Cara pandang demikian itu dianggap *urgent*, demi menjaga citra keberadaan Ornop di tengah-tengah perubahan sosial yang sementara menderas.

Dalam kaitan itu, di bawah ini teridentifikasi beberapa komponen yang dipandang perlu menjadi rekomendasi sekaligus sebagai agenda untuk diskusi lebih lanjut:

1. Strategi peran Ornop dalam konteks pemberdayaan menuju terciptanya masyarakat madani, perlu digagas dan dirumuskan secara terencana dan sistematis sesuai dinamika perubahan sosial kemasyarakatan.
2. Persepsi terhadap partai politik sekarang ini, perlu dikaji ulang peluang dan kemungkinannya untuk diajak berjejaring atau bekerjasama dalam konteks pemberdayaan rakyat.
3. Isu-isu strategis yang selama ini menjadi agenda permanen Ornop (seperti GENDER, Lingkungan Hidup, HAM, Demokratisasi dan Masyarakat Adat) sudah perlu dirancang ulang visi dan misi yang akan diperjuangkan terhadap isu-isu tersebut.
4. Keberadaan jaringan Ornop (terutama antara Ornop daerah dengan Ornop Jakarta), sudah perlu direfleksi urgensinya atau paling tidak sistem dan mekanismenya direaktualisasi, sehingga relevan dengan perubahan seperti konsep desentralisasi (OTODA).
5. Mengingat menjamur keberadaan Ornop akhir-akhir ini telah tiba pada kondisi yang memperhatikan (terutama pada visi dan misi kerakyatannya), maka dipandang perlu dan mendesak merumuskan suatu Kode Etik aktivis Ornop dan lembaganya dalam merefleksikan perilaku aktivis dalam menjalankan program-program aksinya.

GERAKAN LSM DI NUSA TENGGARA BARAT SEBUAH PERBANDINGAN

0000 000 0000

**Ali Dahlan
YSM, NTB**

Mochamad Ali Dahlan adalah direktur dan pendiri Yayasan Swadaya Membangun (YSM) Mataram, yang sudah mulai aktif di Ornop sejak tahun 1982 hingga sekarang. Selain pendiri YSM, Mochamad Ali Dahlan juga mendirikan beberapa lembaga, baik profit maupun non-profit. Lembaga tersebut meliputi Koperasi Annisa di Mataram, Universitas Gunung Rinjani, 5 Bank Perkreditan Rakyat di Lombok dan Sumbawa, Perusahaan Travel Biro, PJTKI, dan Jaringan Pondok Pesantren seluruh NTB. Ia lulus sebagai Sarjana Hukum pada tahun 1972.

GERAKAN LSM DI NUSA TENGGARA BARAT

SEBUAH PERBANDINGAN

Umum

Tanggal 13 Mei 1982 lahirlah sebuah yayasan di Mataram. Yayasan itu diberi nama YSM, singkatan dari Yayasan Swadaya Membangun, didirikan oleh beberapa orang yang waktu itu gelisah dengan keadaan yang menimpa bangsa ini khususnya rakyat NTB. Bahkan hampir 20 tahun setelah YSM berdiri masih saja menjadi daerah yang amat miskin jika dibandingkan dengan daerah manapun di Indonesia ini (bidang Ekonomi, Sosial dan Politik).

Pemerintah NTB waktu itu sangat tidak nyaman dengan lahirnya YSM. Berbagai upaya dilakukan untuk mendiskreditkan YSM baik di kalangan pemerintah maupun masyarakat. LSM YSM adalah organisasi Oposisi, Liberalistik dan berbagai tuduhan lain. Akibatnya ruang gerak YSM pada waktu itu menjadi sangat terganggu.

Untuk memberi gambaran yang lebih baik pada aparat pemerintah dan masyarakat, YSM memelopori seminar Mataram. Saya lupa tanggalnya, tapi pasti tahun 1987. Seminar ini bersifat nasional, karena mengundang berbagai tokoh LSM di Jakarta dan LSM dari berbagai daerah. Saya ingat Adi Sasono dari LSP, Permadi dari YLKI dan lain-lain. Seminar ini sangat berhasil, dimana Gubernur dan Bupati hadir mendengar para pembicara. Ada tanda-tanda kesadaran akan peranan LSM sebagai wujud dari peran serta masyarakat.

Sejak itu bermunculanlah berbagai organisasi yang menyebut dirinya LSM. Sekarang (\pm 20 tahun) setelah YSM berdiri telah terdapat lebih dari 200 LSM di NTB. Terdiri dari berbagai kegiatan, konsentrasi kegiatan, model dan arah gerakannya. Tapi jika disimpulkan hampir semua LSM bertujuan membangun kesadaran masyarakat akan keterbelakangannya dan bersama masyarakat merancang sejak macam kegiatan, kegiatan itu disebut prospek-prospek LSM.

Dengan semakin banyaknya LSM di NTB, terjadi juga pergeseran di antara sesama LSM. Hal itu terkait dengan perebutan lahan dan sumber dana dari para donatur. Lebih-lebih lagi setelah beberapa LSM dari Jakarta melihat daerah sebagai lahan untuk melakukan kegiatan. Bahkan beberapa Organisasi mendirikan Cabang di NTB, tanpa proses yang nyata untuk mengalihkan kegiatannya pada sumber daya lokal.

YSM dan Kegiatannya

Telah terjadi berbagai perkembangan dalam menjalankan tugasnya. Pengembangan ekonomi melalui usaha bersama sejak (7 tahun), gagal dibentuk BPDS (1989-1990) gagal. Dibentuk BPR (1990-sekarang) cukup berhasil. Didirikan pusat latihan yang dimodifikasi, sebagai kritik terhadap kegiatan Bina Swadaya yang hanya mengandalkan keterampilan tekhnis. Tidak mengutamakan idealisme dan pengabdian/memihak.

Hasilnya juga tidak memadai, karena mengubah manusia yang akhirnya kembali pada masyarakatnya dimana pengaruh lingkungannya lebih kuat, tidaklah mudah. LSM ingin perubahan cepat tapi hal itu sangatlah sulit. YSM akhirnya mendirikan universitas. Kita lihat saja hasilnya nanti pasti dievaluasi.

Sumber Dana

Arah YSM adalah mandiri tidak tergantung pada siapapun namun tidak menolak kerjasama dengan siapapun. Dahulu YSM mendapat dana dari berbagai donor. Sekarang ini tidak ada donor yang membantu. Alasannya YSM sudah besar dan kuat. Itu tidak benar. Tapi anggapan tersebut dapat memacu usaha YSM untuk membangun kemandiriannya. Didirikanlah berbagai perusahaan. Banyak kritik seolah-olah YSM berubah orientasi. Ini tidak benar. Alangkah indahnya bila perjuangan ini kita biayai sendiri. Kita akan luput dari tuduhan ditunggangi.

Akuntabilitas

YSM sejak 12 tahun lalu telah menggunakan akuntan publik untuk membuat laporan kekayaan aset serta keuangan. Bukan saja penting untuk donor tapi penting untuk lembaga itu sendiri. Penting untuk masyarakat dan pemerintah. Lapornya dipublikasikan melalui media YSM, buletin YSM.

Bagaimana yang Lain

Adalah sulit untuk mendapatkan gambaran tentang LSM-LSM lainnya. Tapi secara umum LSM belum mengutamakan akuntabilitas baik keuangan maupun hasil. Hal ini terjadi pada banyak LSM-LSM lainnya. Bahkan terjadi juga pada lembaga Donor, suatu hal yang patut disesalkan.

LSM dan Pemerintah (Daerah)

Hubungan dengan pemerintah di masa lalu dan masa kini tidak jauh berbeda. Tidak terlalu dekat dan tidak terlalu jauh. Ada beberapa LSM yang coba jalin kerjasama dengan pemerintah (Daerah) melalui berbagai proyek. Ada positif dan negatifnya, kadang-kadang ada LSM yang diajak bekerjasama dengan pemerintah, lalu melakukan korupsi secara bersama-sama. Ada kasus dalam tender. Dalam hal ini beberapa LSM dari luar NTB sangat agresif untuk merebut kesempatan proyek. Ada beberapa contoh.

Ada yang lebih menarik lagi akhir-akhir ini. Di banyak kegiatan pemerintah, LSM selalu diundang untuk hadir. Sayang sekali hanya untuk hadir saja. Sedikit sekali pikiran LSM yang diadopsi. Kesimpulannya pemerintah sekarang belum banyak berubah. Oleh karena itu LSM sebaiknya tetap menjaga jarak dengan pemerintah. LSM harus tetap kritis terhadap tindak tanduk pemerintah.

Soalnya DPR/DPRD yang diharapkan mewakili masyarakat belum terlihat tandatandanya yang menggembirakan (banyak *Money Politics*).

Pemerintah yang sekarang pada hakekatnya masih merupakan peninggalan rezim terdahulu (Orde Lama II). Personal, perilaku dan cara kerjanya belum berubah banyak. Gerakan LSM, mahasiswa dan kaum pembaharu lainnya tegasnya belumlah selesai. Bahkan ada gejala pemerintah yang sekarang tidak jauh berbeda dengan yang lalu, baik politik, sosial dan ekonomi. Artinya gerakan LSM jauh dari selesai.

Ada peluang yang lebih besar tentang kebebasan, peluang itu harus digunakan oleh LSM untuk berjuang lebih intensif dan strategis agar tujuan yang dicita-citakan dapat tercapai.

Kesimpulan Sementara

1. Di NTB, jumlah LSM cenderung bertambah.
2. Pola gerakannya belum semuanya meningkat sesuai dengan arus perubahan.
3. Ada gesekan antara LSM di NTB disuatu pihak dan LSM daerah dengan LSM yang datang dari luar (Jakarta), terutama dalam hal membuat proyek-proyek.
4. Kedekatan LSM dengan pemerintah, dapat memperluas praktek korupsi. Selain itu ada juga LSM yang memang korupsi.
5. Pemerintah coba menjinakkan LSM untuk mengurangi ketegangan, itu hanya terpaksa akibatnya LSM tersebut tidak jauh berbeda dengan cara kerja pemerintah.
6. LSM harus tetap berada sebagai kekuatan kontrol di luar sistem yang berlaku, baik di bidang Sosial, politik dan ekonomi.

LSM DAN DINAMIKA POLITIK LOKAL BEBERAPA CATATAN LAPANGAN

© 2000

**Johny Simanjuntak
ATMA Solo**

Johny Simanjuntak adalah Direktur Kantor Pelayanan Bantuan Hukum ATMA di Solo. Sejak tahun 1982 hingga sekarang Johny Simanjuntak aktif memberi advokasi dan bantuan hukum kepada masyarakat miskin. Fokus kegiatan ATMA Solo terutama kepada masalah tanah. Ia lulus sebagai Sarjana Hukum pada tahun 1982.

LSM DAN DINAMIKA POLITIK LOKAL

BEBERAPA CATATAN LAPANGAN

Makalah ini merupakan catatan lapangan sekitar kompleksitas masalah yang mengitari kerja LSM. Sebagai catatan lapangan, tentu saja konteksnya sangat terbatas baik konteks obyektif maupun subyektif. Barangkali catatan ini berguna sebagai pengantar diskusi seminar ini.

Pemaknaan tentang Reformasi

Sejak bergulirnya reformasi, masyarakat lokal memberinya nama beragam.

Berikut ini dipaparkan beberapa hal tentang itu.

Reformasi adalah Kebebasan

Kebebasan mencakup kebebasan mengorganisir diri, kebebasan melakukan gerakan massa, kebebasan menyatakan kehendak. Pada tinggal realitas, kebebasan tersebut sangat dinikmati masyarakat. Pembentukan organisasi di tingkat perdesaan dan kabupaten tidak mendapat halangan apapun dari rezim lokal atau aparat keamanan/Polri. Segala macam protes/demonstrasi yang diorganisir rakyat sendiri dapat terselenggara tanpa perlu ada ijin. Bahkan kalau ada teguran dari aparat keamanan, teguran itu disampaikan secara lebih sopan. Dan masyarakat lokal tidak takut dan tidak pusing dengan teguran tersebut. Persoalannya menjadi lain ketika kebebasan tersebut diartikan sebagai tanpa norma/aturan atau aturan yang berlaku adalah aturan yang diciptakan sendiri. Dalam hal ini terjadi pemaksaan kehendak. Kasus semacam ini sering terjadi manakala ada konflik horizontal atau vertikal. Dan acapkali konflik tersebut didasarkan pada prinsip “ Kita harus menang” Dari sudut tertentu misalnya pengorganisasian masyarakat. Prinsip ini dapat dipahami akan tetapi dari sudut membangun demokrasi, prinsip ini bisa menjadi bumerang karena masyarakat dididik menjadi pemegang prinsip kemutlakan.

Reformasi adalah Menuntut Pengembangan Hak-hak Rakyat yang Dirampas oleh Rezim Orde Baru

Sudah menjadi pengetahuan umum bahwa rezim Orde Baru mempraktekkan perampasan hak rakyat, baik kolektif maupun individual. Kasus tanah untuk membangun waduk, jalan tol, sarana pendidikan, kesehatan dan lain-lain sekarang terangkat ke permukaan. Padahal dalam beberapa kasus seringkali data, informasi atau bukti yang dibutuhkan, tidak tersedia atau terbatas bahkan kasus telah berusia puluhan tahun. Akan tetapi memori masyarakat tidak terhapus oleh waktu.

Menangani kasus semacam ini ibarat mengurai benang kusut. Mulai darimana dan berakhir di mana, sangat sulit ditentukan. Harapan masyarakat untuk menyelesaikan kasus tersebut sangat tinggi, bahkan dibarengi dengan emosi yang dapat menimbulkan ketegangan sosial. Pada beberapa kasus, rezim lokal sangat toleran agar masalah yang

diangkat ke permukaan dapat terungkap secara jelas dan memberi kepuasan bagi masyarakat. Akan tetapi banyak rezim lokal yang berusaha menutupi bahkan menghalangi penyelesaian masalah yang diungkap ke permukaan tersebut.

Reformasi adalah Mengungkap Kejahatan Rezim Orba

Selain permapasan hak-hak rakyat, kelakuan buruk lainnya dari rezim Orba ialah praktek penipuan dan penyalahgunaan kekuasaan. Di banyak kawasan perdesaan, rakyat seringkali menjadi korban penipuan kepala desa dalam kasus sertifikasi tanah. Misalnya, atas anjuran kepala desa rakyat memberi sejumlah uang untuk mendapatkan sertifikat tanah. Akan tetapi yang terjadi ialah bahwa sertifikat tidak terbit dan uang rakyat yang diperoleh dengan peluh tidak kembali. Mengangkat masalah ini pada masa rezim Orde Baru merupakan malapetaka bagi warga desa. Kini reformasi meniupkan janji bahwa uang rakyat harus kembali dan pelaku kriminal harus diadili. Masalah yang sering terjadi ialah keinginan masyarakat agar masalah ini segera selesai. Menuntut kesabaran dari rakyat memang agak kurang pas, sebab mereka telah menderita. Sedangkan mengusahakan agar masalah segera selesai juga kurang pas, karena membutuhkan proses dan prosedur. Inilah yang kadang seringkali memicu kebingungan masyarakat.

Reformasi adalah Melampiaskan Ketidakepuasan

Dalam pemilihan kepala desa seringkali terdapat sejumlah warga desa setempat tidak merasa puas dengan yang dihasilkan oleh proses pemilihan tersebut. Mereka mencari berbagai bentuk aktivitas digunakan untuk melampiaskan ketidakpuasan. Bahkan kadang-kadang melumpuhkan aktivitas pemerintahan desa. Jika dicermati, dalam beberapa kasus ketidakpuasan tersebut terkesan dicari-cari atau semata-mata tidak mau menerima kekalahan. Pemerintah daerah tidak mampu mengambil inisiatif dan tidak punya konsep menangani perkara ini. Pada rezim Orba ketidakpuasan seperti itu dipupus habis dengan kekerasan atau teror. Sementara pada rezim reformasi sekarang, pemerintah daerah belum mempunyai referensi pengalaman mempraktekkan resolusi konflik yang berbasis demokrasi.

Berdasarkan catatan di atas, rupanya apapun makna dan agenda reformasi, masyarakat lokal akan terkait dengan dinamika politik lokal. Dan ini berhubungan dengan instansi yang ada di masyarakat lokal (kabupaten dan wilayah perdesaan). Berikut ini akan dipaparkan catatan sekitar DPRD pemerintah daerah, pers, kelompok penekan.

Rakyat dan DPRD

Pada tingkat riil, masih terdapat hal-hal aneh berkaitan dengan hubungan rakyat dengan DPRD. Seringkali terjadi perbedaan bahkan pertentangan antara kepentingan rakyat versus kepentingan DPRD. Kepentingan rakyat daerah/perdesaan misalnya adalah penyelesaian yang adil atas masalah yang mereka hadapi, baik yang terkait dengan kasus maupun yang terkait dengan peningkatan kesejahteraan mereka. Sementara DPRD sibuk dengan masalah tata tertib atau pengaturan fasilitas. Kalau kita mengamati, memang terdapat hal yang mengkhawatirkan yaitu:

Ternyata Sebagian (Bahkan Mungkin Mayoritas) Anggota DPRD Merupakan Politisi Katrolan

Mereka tidak mempunyai kemampuan yang dibutuhkan untuk menjadi seorang anggota parlemen. Misalnya, wawasan politik, perancangan peraturan, menangkap aspirasi rakyat dan lain sebagainya. Celaknya ialah mereka malas dan malu belajar. Akibatnya fungsi perwakilan tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya. Politisi katrolan ini mudah sekali menjual suaranya, terutama dalam hal pengambilan keputusan strategis seperti pemilihan kepala daerah dan sebagainya.

DPRD Masih Kalah Wibawa dengan Pemerintah Daerah

Keperkasaan pemerintah daerah pada era rezim Orde Baru masih saja tampak pada rezim reformasi ini. Hal ini terlihat saat pembahasan peraturan daerah yang berkaitan dengan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Sejauh yang dapat kami amati, belum terdapat perdebatan yang signifikan mengenai RAPBN. Suasannya masih sekitar basa-basi dan formalistik. Demikian pula pembahasan tentang masalah yang penting bagi rakyat, pihak DPRD tidak mampu melakukan tekanan-tekanan pada pemerintah daerah.

Anggota DPRD Tidak Melakukan Pertanggungjawaban Langsung kepada Rakyat

Seharusnya dalam rezim reformasi ini anggota DPRD dapat mengorganisasikan berbagai aktifitas untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya di parlemen lokal. Meskipun secara normatif tidak ada kewajiban semacam itu akan sangat mendorong pertumbuhan demokrasi tingkat lokal. Kenyataannya anggota parlemen hanya merasa bertanggung jawab pada partai yang diwakilinya. Akibatnya semakin terkotak-kotak.

Perilaku Sebagian Anggota DPRD Lebih Diwarnai Pemenuhan Kebutuhan Ekonomi

Kecenderungan yang kini semakin mengecewakan ialah perilaku politik anggota parlemen lokal. Masalah uang politik barangkali sudah menjadi pengetahuan umum. Yang agak lain ialah anggota dewan mendapat uang jasa dari penyelesaian masalah yang diajukan rakyat. Bukan uang jasa sebagai pengacara tetapi sebagai anggota dewan yang mengusahakan agar masalah yang diajukan rakyat diselesaikan. Semangat sebagai anggota DPRD sangat menggebu ketika kepentingan ekonominya terjanjikan. Akibatnya ialah kepedulian parlemen terhadap isu kerakyatan menjadi kurang optimal ketika mengetahui bahwa isu tersebut tak memberi ekonomi bagi mereka.

Rakyat dan Pemerintah Daerah/Desa

Harapan bahwa pemerintah daerah/desa akan semakin menghargai rakyat rupanya masih jauh dari kenyataan. Situasi pemerintahan daerah masih belum mengubah secara substansial. Misalnya mental feodal yang ingin menang sendiri/benar sendiri, tidak mau dikritik dan melindungi kliennya meski bersalah masih saja hidup hingga sekarang. Bahkan di beberapa tempat informasi yang seharusnya diketahui rakyat seperti KUT biaya administrasi nikah dan sebagainya belum sepenuhnya terbuka bagi rakyat. Demikian pula kepedulian pada masalah riil yang dihadapi rakyat seperti perumahan, lahan pertanian dan lapangan kerja, masih rendah.

Pers dan Kepentingan Demokrasi

Sangat tinggi harapan yang ditumpahkan pada pers agar dapat menjadi salah satu penggerak demokrasi. Harapan ini paralel dengan pendapat umum yang mengatakan bahwa pers adalah salah satu lembaga demokrasi. Akan tetapi kenyataan menunjukkan lain, pers sangat tergantung pada orang yang mengendalikan perusahaan, redaktur dan peliputan berita.

Di daerah yang belum memiliki pers lokal atau belum menjadi pasar bagi banyak pers, maka kondisi hal semakin menghantui masyarakat. Hal terjadi manakala wartawan di daerah tersebut menjadi Humas Pemda atau hanya mewakili salah satu kekuatan di daerah tersebut. Kontrol terhadap pemerintah/parlemen lokal tidak dapat berjalan. Protes rakyat tidak terkomunikasikan kepublik. Maka proses demokrasi pun terseok-seok, yang lebih celaka ialah ketika pers memberitakan pandangan yang beebread dengan..... atau menyebar opini sesaat tanpa ada upaya mencek ke orang yang terkait. Kondisi ini benar-benar terjadi dalam era reformasi sekarang.

Kelompok Penekan

Kekuatan intelektual dan ulama kritis merupakan kekuatan amat langka di daerah. Orang cerdas yang sebenarnya sangat diperlukan di daerah ternyata justru menjauh dari daerah. Untuk mendapatkan nara sumber yang kritis dari daerah setempat untuk melakukan kritik terhadap rezim lokal, rasanya sangat sulit bahkan mustahil. Kekosongan ini kemudian diisi oleh birokrat atau pengusaha untuk menguasai pendapat umum di daerah tersebut. Tanpa terasa masyarakat dikondisikan untuk mengikuti pendapat yang belum tentu sesuai dengan demokrasi. Mereka berinisiatif membentuk komite pemantau, seperti pemantau korupsi, pemantau parlemen, komite reformasi dan sebagainya. Tujuan mereka bukan untuk mendorong proses terciptanya pemerintahan yang bersih dan baik atau berjalannya proses demokratisasi melainkan sebagai upaya mereka menghentikan atau setidaknya memperlambat proses tersebut. Kelangkaan atau ketiadaan intelektual dan ulama kritis di daerah jelas sangat merugikan proses demokrasi. Meskipun dapat dipahami bahwa proses demokrasi tidak tergantung dua aktor di atas, sebab kekuatan rakyat sendiri dapat menjadi pengawal demokrasi. Masalah yang dihadapi secara riil ialah bagaimana memulai membangun demokrasi di alam budaya feodal dan mentalitas Orde Baru (curiga, adu-domba, rasis, diskriminatif). Pengalaman lapangan menunjukkan kekuatan intelektual dan ulama kritis akan sangat menolong prakarsa membangun demokrasi pada tingkat lokal.

Posisi dan Peran LSM

Pada dinamika politik seperti yang dicatat di atas muncul pertanyaan tentang posisi dan peranan LSM.

Ketika rezim Orba masih bertengger pada puncak kekuasaan, banyak LSM yang mengambil posisi melawan dengan menggunakan taktik strategi yang bervariasi dan banyak juga yang memilih jalan kooperatif. Pada rezim reformasi sekarang apa pilihan posisi yang pas bagi LSM. Sangat sulit menjawab pertanyaan ini karena kondisi lapangan

tidak memungkinkan melakukan satu pilihan. Dalam beberapa hal kondisi lapangan memang sangat menggembirakan seperti adanya kebebasan, tumbuh berkembangnya sikap berani dan kritis masyarakat, semakin mudahnya mendapat informasi melalui berbagai media. Akan tetapi hal yang menggembirakan ini tidaklah selalu ada pada setiap daerah sehingga diperlukan pengkajian potensi demokrasi tingkat lokal untuk mendorong bergulirnya demokrasi di tingkat lokal.

DISKUSI

(Diskusi Panel: Pahir Halim, Ali Dahlan, Johny Simanjuntak)

Pertanyaan

1. Cami (BMS, Jakarta)

Tentang prospek NGO di masa depan kesiapan Ornop masih diragukan dalam menanggapi isu-isu mendatang, misalnya isu otonomi daerah. Seluruh proyek larinya ke tingkat kabupaten. Bagaimana di Sulsel? Karena pembentukan jaringan tidak bisa lepas dari *stakeholder* yang lain. Pak Ali sangat kontradiktif dengan pembangunan dinas. Pendekatan yang dilakukannya sulit untuk didialogkan, karena cara kerja pemerintah tentu berbeda dengan Ornop, sementara mereka adalah *stakeholder* Ornop. Pertanyaannya, bagaimana misi ke depan untuk menyamakan langkah, karena Ornop akan selalu berdialog dengan *stakeholder*?

2. Saleh (Cita Halmahera, Halmera)

Apa yang dibicarakan Pak Ali sama dengan keinginan Ornop di Maluku Utara, bahwa paradigma pembangunan Ornop tidak harus dari Jakarta. Membangun prospek ke depan tidak harus dari Ornop di Jawa. Pak Ali diminta untuk membangun konsorsium Ornop kawasan timur sehingga peran Ornop Jawa bergeser.

Menanggapi Pak Johny yang sudah lama di Jawa, ternyata beberapa aktivis Ornop pindah ke Jawa untuk merebut kepentingan politik kacang, seperti kasus di Bantul. Mereka memperoleh imbalan milyaran Rupiah, hal demikian juga terjadi di Sleman. Strategi apa agar aktivis Ornop tidak menjadi politisi gentayangan, mengingat Jawa adalah barometer demokratisasi? Sebenarnya di kawasan timur Indonesia bisa lebih demokratis, bagaimana mensosialisasikannya?

3. Wisnu (Lespi, Semarang)

Apa yang membuat Pak Ali sukses? Apakah karena tangannya yang dingin, pendukungnya, atau apa? Apa resepnya? Apakah sudah terpikirkan oleh YSM untuk membangun rumah sakit, atau supermarket yang khas YSM?

4. Krisdiono (Bina Swadaya Boyolali, Boyolali)

Sangat setuju dengan program yang dilakukan oleh YSM. Pertanyaannya, apa kiat suksesnya dalam pelayanan perbankan? Untuk mendirikan satu BPR harus menyetero uang ke BI kurang lebih Rp. 500 juta, bagaimana cara memperoleh dana sebanyak itu? Bagaimana menyikapi/memelihara visi dan programnya, bagaimana kiat agar bisnisnya jalan sementara sebagian keuntungan juga dipakai oleh masyarakat?

Jawaban

Pahir Halim

Kaitan Ornop dengan otonomi daerah bagaikan pisau bermata dua: kegiatan Ornop dapat merupakan harapan, di pihak lain merupakan penindasan terhadap masyarakat. Dengan adanya otonomi daerah, akan ada raja-raja kecil di daerah.

Untuk mengembalikan hak-hak rakyat yang selama ini dirampok harus dengan cara mensosialisasikan hak rakyat ke masyarakat dampingan LP3M. Pernah melakukan pendampingan masyarakat pesisir (hanya dua kabupaten di Sulsel yang tidak mempunyai pantai), sementara belum ada peraturan daerah untuk pengelolaan pesisir pantai. Sebenarnya hal ini bisa dikerjakan LSM. Tugas LSM adalah meneruskan paradigma perubahan.

Tentang membangun kekuatan di kawasan timur. Bila berbicara regional dianggap nepotisme, ini adalah bagian pemberdayaan, logikanya bila negara lemah karena daerah juga lemah. Secara regional bisa membangun NGO di Sulawesi, Irian, dan Kalimantan (kawasan IBT meskipun Kalimantan suka berkiblat ke barat). Bila LSM pusat ikhlas memberdayakan LSM daerah akan tidak ada masalah. Namun hal ini tidak terjadi karena akses informasi masih terpusat di Jakarta. Forum ini masih sulit disosialisasikan, seperti kasus membentuk jaringan Ornop yang ada di forum dalam rangka membangun kekuatan (40 LSM).

Ali Dahlan

Tentang sikap kontradiktif dengan pemerintah, pemerintahan sekarang masih sama dengan orde lama kedua (orde baru) baik orang-orangnya, mentalnya, maupun korupsinya. Kebanyakan anggota DPRD berdagang ayam, tidak siap menjadi anggota DPR. Peranan LSM ke depan seharusnya tidak mengendur melakukan kontrol pada pemerintah dan masih ada peluang. Sangat disayangkan bila LSM masih berpikir tentang 'kecipratan proyek'. Secara pribadi sangat mendukung negara federal, sampai kapanpun akan diperjuangkan meskipun banyak orang sudah tak membicarakannya

Yang membuat dirinya sukses adalah sesuatu dari dalam, bukan sekedar hobi. Mendirikan organisasi dengan niat untuk membangun dan meningkatkan organisasi. Kita tidak perlu menyembah *funding*, tetapi harus mau bekerjasama dengan siapa saja, dan tidak dibenarkan anti lembaga dana. Disamping itu tidak usah harus mengekor dengan kemauan lembaga dana.

YSM belum mempunyai rencana untuk membuat supermarket. Pendirian Rumah Sakit sedang dirancang dan diperkirakan akan dibangun di Lombok Tengah. Rumah Sakit tersebut direncanakan untuk orang-orang miskin.

Pada tahun 1990 untuk mendirikan BPR hanya perlu modal pertama sebanyak Rp. 50 juta. Uang Rp. 50 juta tersebut diperoleh dari patungan dengan dua orang teman ditambah iuran jamaah Bank Syariah, kemudian berkembang menjadi Rp. 500 juta. Asetnya sekarang sudah sekitar Rp. 10 milyar dengan nasabah 62 ribu dari kalangan masyarakat kecil. Kalau sekarang, sulit mendapatkan ijin sekarang karena masalah BLBI.

Sebagian keuntungan bisnis diberikan untuk menopang kegiatan kemanusiaan. Hal ini diterapkan di Universitas Gunung Rinjani, biaya kuliah per semester per mahasiswa hanya Rp. 112 ribu. Biaya operasional pendidikan mendapat subsidi dari keuntungan bisnis.

Johny Simanjuntak

Prinsip membangun demokrasi harus dari bawah bukan dari Jakarta, sehingga masyarakat lokal akan mudah menentukan pilihan-pilihan politik, tidak menciptakan politisi katrolan. Tidak ada rezim tingkat lokal yang sangat toleran. Bila Pemda bisa membuka diri mengapa harus dilawan? LSM adalah suatu komunitas pekerja sosial, memiliki visi yang jelas, yang aktif mendampingi dan membela rakyat.

Mengontrol LSM sebetulnya dapat dilakukan melalui: kontrol ideologis, kontrol, norma atau aturan main yang berlaku, serta, serta kontrol visi.

Kesimpulan Moderator

- Bila kecenderungan politik sudah pindah ke daerah, pola pendekatan harus diubah untuk memberdayakan masyarakat sipil
- Penjajahan ideologi terjadi. Kenyataan, jika LSM tidak mengikuti isu yang ada, tidak perlu ikut memperoleh dana.
- Belum terlihat perlawanan “ideologi kearifan” terhadap “ideologi dominan”
- Dari berbagai presentasi, belum terdengar ada kelompok masyarakat sipil yang kuat. Hingga saat ini, hanya kelompok elit dan politik yang lebih banyak bermain. Pak Johny menyampaikan agenda jangka panjang NGO adalah menjawab tantangan “bagaimana NGO dapat memberikan kontribusi yang adil kepada rakyat dan menawarkan kebijakan alternatif”. Kegiatan advokasi oleh NGO di NTT sudah terlihat berhasil, tetapi belum berani menindaklanjuti hingga tuntas.
- Meningkatkan partisipasi NGO tidak hanya dalam memberdayakan masyarakat, tetapi juga dalam membangun kontrol oleh masyarakat.

PANDANGAN DAN PEMIKIRAN YASIKA TERHADAP KEBERADAAN LSM DAN MASALAH- MASALAH PEMBANGUNAN PERDESAAN*

A. Paradigma Pembangunan Perdesaan dan Masalahnya

Barangkali tidak terlalu berlebihan apabila dikatakan bahwa permasalahan pembangunan perdesaan sangatlah kompleks, untuk itu kami awali dari paradigma pembangunan perdesaan masa lampau. Penekanan prioritas pemerintah terhadap pembangunan perdesaan masa lampau hanya kepada pembangunan pertanian yang goalnya semata-mata hanya menyediakan pangan, sehingga penekanan ini menciptakan banyaknya proyek-proyek seperti; irigasi, gudang-gudang hasil produksi pertanian/saprotan, pencentakan sawah, BIMAS dan KUT-KUT, yang kesemua proyek tersebut diikuti pula oleh kebijakan harga beras yang nilai tukarnya terhadap jenis komoditas lainnya relatif lebih rendah.

Pemerintah tidak mengalami kesulitan untuk menyediakan dana pembiayaan proyek-proyek tersebut, karena saat itu limpahan dollar yang mengalir ke pemerintah begitu dahsyatnya, berasal dari hasil nilai ekspor minyak dan gas bumi yang meningkat tiga kali lipat dari US\$1.708 milyar menjadi US\$5.153 milyar, selain itu adanya kebijaksanaan-kebijaksanaan keuangan negara-negara luar, seperti misalnya penanaman modal asing dan pinjaman hutan luar negeri. Jelas-jelas di depan mata, pemerintah berperan bagaikan “sinterklas” dalam melaksanakan pembangunan.

Hasil yang dicapai pemerintah pada masa itu, negara Indonesia dikenal sebagai negara swasembada beras. Akan tetapi tidak dapat dipungkiri, bahwa apa yang dikenal tersebut membuat banyak pertanyaan yang mendasar: Siapa sebenarnya yang paling diuntungkan dengan GAUNG yang kondang di seantero dunia tersebut? Beberapa banyak masyarakat petani yang mensubsidi pangan kita meningkat kesejahteraannya? Tumbuhkah kemandirian dan partisipasi masyarakat perdesaan untuk keberlanjutan seluruh proyek?

Peluang bagi wilayah non pertanian dalam hal ini wilayah pantai, pada masa lampau juga menerima cipratan-cipratan proyek seperti: Proyek pertambakan, Tempat penampungan ikan, Pengembangan pelabuhan, Air bersih galian bor sekaligus MCKnya, Pengadaan kapal kesehatan masyarakat pulau-pulau kecil, Pengadaan boat dan alat-alat penangkapan ikan.

Proyek-proyek tersebut di atas juga menjadi tanda tanya besar, Jawaban dari kesemua proyek (wilayah pertanian dan wilayah pantai) adalah Proyek hanya menghasilkan fisik bagaikan “BANGKAI” yang terbengkalai. Lebih ironis lagi bagi masyarakat perdesaan, mereka mengalami; keterbatasan kesempatan kerja, disparitas pendapatan, keseluruhan hasil komoditas (pertanian, perikanan, kerajinan) tidak berkembang dan perekonomian lokal tidak tumbuh dan berkembang, dengan demikian gol yang nyata adalah KEMISKINAN DI PERDESAAN.

* Sumbang pikir pada seminar Wawasan Tentang LSM Indonesia: Sejarah, Perkembangan, serta Prospeknya pada tanggal 15 Agustus 2000 di Hotel Cemara Jakarta dilaksanakan oleh SMERU.

** Direktur Yayasan Indonesia Untuk Kemajuan Desa (YASIKA) Sumatera Utara.

Kejadian ini dikarenakan, model pendekatan dan pengelolaan pembangunan perdesaan oleh pihak pemerintah masa itu dilakukan dengan pola; Otoriter instruksi, Dominasi melalui birokrasinya, Orientasi proyek, Tidak “mengotonomikan” masyarakat perdesaan, Tidak memperhatikan kerugian sosial dan Kerugian sumberdaya alam.

Orientasi stabilitas yang dilanjutkan dengan orientasi pertumbuhan dalam pembangunan, dianggap pemerintah sebagai mekanisme pemerataan pendapatan, ternyata tidak berfungsi sama sekali. Peningkatan pendapatan hanya terjadi di lingkungan pemerintah dan swasta pada masyarakat lapisan atas, dengan kata lain nikmat limpahan dollar yang mengalir begitu mengesankan, hanya dapat “dikendurikan” oleh sebagian kecil masyarakat Indonesia, sedangkan sebagian besar lainnya justru menderita proses pemiskinan. Jurang kesejahteraan antara masyarakat lapisan atas dengan masyarakat lapisan bawah jelas-jelas semakin dalam dan melebar.

Salah satu dari banyaknya kompleksitas permasalahan yang menjadi tema sentral adalah kemiskinan struktural. Inti dari suatu struktural adalah relasi antara suatu subyek dengan suatu obyek dan antara subyek dengan subyek yang merupakan bagian dari suatu sistem. Jadi permasalahan struktural adalah masalah kondisi dan posisi subyek – subyek/obyek – obyek dari struktur yang bersangkutan dalam keseluruhan tata susunan/sistem dan fungsi dari komponen tersebut dalam keseluruhan fungsi dari sistem.

Apabila masing-masing subyek dan obyek memiliki posisi dan kondisi yang timpang terwujud dalam pola relasinya, maka struktur tersebut dikatakan tidak adil. Ketidakadilan struktural ini semakin diperkuat lagi oleh sifat kemakmuran yang kumulatif. Artinya kemakmuran akan semakin menumpuk di tangan sekelompok kecil orang yang memiliki otoritas, modal, pengetahuan dan keterampilan, sehingga orang-orang yang tidak memilikinya semakin kehilangan kesempatan untuk menikmati kemakmuran tersebut. Dengan demikian kemiskinan timbul sebagai produk dan ketidakadilan struktur-struktur sosial, ekonomi dan politik yang berlaku. Kemiskinan adalah buatan oleh manusia, dari manusia dan terhadap manusia.

Ketimpangan-ketimpangan struktural tidak hanya menghalangi perkembangan suatu ekonomi nasional saja, tetapi juga akan memantapkan struktur ketidakadilan itu sendiri. Jadi, pembangunan perdesaan yang dilaksanakan oleh pemerintah ternyata hanya bersifat asistensialisme, yaitu lebih merupakan penghapusan gejala-gejala yang diperbanyak dengan show ke seantero dunia, samasekali bukan penanganan sebab-sebab dari problema-problema yang dihadapi masyarakat. Artinya usaha pembangunan yang semata-mata mengutamakan stabilitas dan pertumbuhan ekonomi justru memantapkan, melangsungkan dan mempertajam ketimpangan-ketimpangan struktural yang sudah pasti tidak akan pernah menciptakan partisipasi, bahkan masyarakat menjadi statis, apatis dan nerimo.

B. Paradigma Perkembangan Perdesaan Masa Kini

Gegap gempitanya tuntutan reformasi, ternyata tidak hanya mengubah nama kabinet saja, dari kabinet pembangunan menjadi kabinet persatuan nasional, tetapi dalam konsep pemerintah telah terjadi pula perubahan visi dan misi pengembangan perdesaan, yang sekarang bervisi sebagai berikut, tercapainya kawasan perdesaan yang mandiri berwawasan lingkungan selaras, serasi dan bersinergi dengan kawasan lainnya dengan

memperhatikan hak asal-usul dan adat istiadat desa melalui pembangunan yang holistik dan berkelanjutan untuk terwujudnya masyarakat yang damai, demokratis, berkeadilan, berdaya saing, maju dan sejahtera. Selanjutnya, visi tersebut diikuti pula oleh misi pengembangan perdesaan yang berbunyi sebagai berikut, mempercepat pembangunan perdesaan secara berkelanjutan dalam rangka pemberdayaan masyarakat terutama petanidan nelayan melalui penyediaan prasarana pembangunan sistem argobisnis, industri kecil dan kerajinan rakyat serta pemanfaatan sumberdaya alam untuk mencapai: pengurangan kemiskinan, jaminan ketahanan pangan, pertumbuhan yang luas dan merata, pengelolaan sumberdaya alam berkelanjutan dan mempercepat pelaksanaan otonomi daerah yang kesemuanya berguna untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat perdesaan. Untuk mencapai visi dan misi pengembangan perdesaan ini tidak tanggung-tanggung karena menyangkut tidak kurang dari 11 instansi yang harus bekerja sama sesuai dengan substansi dari masing-masing instansi.

Konsepnya memang sungguh indah, bagaikan gerakan-gerakab ratu adil, persoalannya adalah bagaimana kita semua menyikapi konsep yang begitu indah ini? yang jelas, krisis ekonomi yang luar biasa, mendorong Bank Dunia meluncurkan dana yang membantu program-program pemberdayaan masyarakat dan ekonomi, sekaligus untuk menekan jumlah masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan secara masif. Program-program tersebut berada pada kibaran bendera yang dikenal dengan Jaring Pengaman Sosial dengan dukungan dana sebesar Rp. 8,9 triliun untuk APBN 1989/1999 (IDT 1,3 triliun untuk 3 tahun). Jaring Pengaman Sosial tersebut ditujukan pada 4 bidang pokok yaitu food security, social protection, employment creation dan pengembangan industri kecil dan menengah.

Sementara di Indonesia memiliki lebih kurang 51.000 desa perdesaan dengan jumlah masyarakat yang tergolong miskin sebanyak 10,8 juta orang. Apa yang mereka dapatkan manfaat dari program Jaring Pengaman Nasional? Lagi-lagi muncul kritikan dari berbagai kalangan melalui mas media maupun aksi-aksi, yang isi kritiknya meliputi antara lain: target JPS salah sasaran, JPS tidak mempunyai visi pemberdayaan masyarakat, JPS mematikan swadaya masyarakat, partisipasi masyarakat semu, JPS bermuatan politik status-quo dan JPS membuat departemen-departemen tidak terkoordinasi. Inilah gambaran permasalahan pembangunan perdesaan yang kami buat dengan sangat-sangat sederhana

C. LSM dan Model Pengembangan Alternatif

Dalam konteks situasi, kondisi dan hasil pembangunan perdesaan sebagaimana gambaran tersebut di atas, barangkali eksistensi LSM memiliki relevansi dan urgensi yang cukup mendasar untuk melakukan pengembangan alternatif, sebab berbeda dengan pemerintah dalam: proses, metode, program dan gerakan dalam:

1. Mengidentifikasi kebutuhan kelompok lokal dan taktik-taktik untuk memenuhi kebutuhan hasil identifikasi.
2. Melakukan mobilisasi dan persuasi untuk usaha aktif mengejar kebutuhan-kebutuhan kelompok yang telah diidentifikasi.
3. Merumuskan kegiatan jangka panjang untuk mengejar sasaran-sasaran pembangunan perdesaan yang lebih esensial.

4. Menghasilkan dan memobilisasi sumberdaya lokal atau eksternal untuk kegiatan pembangunan perdesaan.
5. Pengaturan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan-kegiatan pembangunan desa.

Peranan LSM dalam melakukan proses, metode. Program dan gerakan tersebut menekankan persepsi:

1. Bahwa masyarakat perdesaan bukan hanya sekadar sebagai sumber energi, tetapi juga merupakan sumber informasi. Informasi yang dimiliki masyarakat berupa aset mendesak bagi keberhasilan program pengembangan perdesaan, terlebih-lebih pada tahap perencanaan. Persepsi ini dilandaskan pada fakta bahwa hanya masyarakatlah yang paling mengetahui dan kebutuhannya sendiri.
2. Bahwa pengembangan perdesaan tidak hanya berarti mengatur saja, tetapi juga berarti membantu masyarakat untuk memecahkan problema-problema pengembangan perdesaan yang tidak dapat mereka pecahkan sendiri.
3. Bahwa masyarakat perdesaan pada hakekatnya bukanlah sifat statis, apatis dan fatalistis, yang mewujud dalam sistem panutan (paternalisme). Sebab kepaternalisme masyarakat perdesaan muncul karena mereka tidak diberi ruang dan peluang untuk secara otonom dalam menyelesaikan permasalahan yang mereka hadapi. Dengan kata lain, sikap manut adalah akibat keterbelakangan dan kemiskinan struktural yang diciptakan.
4. Bahwa masyarakat perdesaan di Indonesia adalah heterogen, baik dilihat dari segi ekologis, sosiologis maupun dari segi kultural. Dengan demikian; pola, metode dan strategi pengembangan perdesaan yang seragam (uniform) pada akhirnya akan mematikan dinamika, kreativitas dan oleh karena itu daya-daya inovatif masyarakat perdesaan itu sendiri. Uniformitas ini akan mencekik partisipasi dan keswadayaan mereka.
5. Sudah terbukti berdasarkan pengalaman selama ini bahwa persistensi eksistensi masyarakat desa menunjukkan adanya satu kemampuan yang tinggi untuk mempertahankan diri dalam menghadapi dan mengatasi problema-problema mereka sendiri. Oleh karena itu persepsi bahwa masyarakat perdesaan tidak produktif karena miskin materi adalah tidak benar sama sekali.
6. Bahwa sifat hubungan antara LSM dengan masyarakat perdesaan (kelompok mitra kerja) adalah dialogis dan rembug strategis. Artinya, antara pihak-pihak yang berhubungan terdapat kesamaan derajat. LSM yang datang ke perdesaan bukanlah atasan atau pimpinan masyarakat perdesaan (kelompok mitra kerja), demikian pula sebaliknya. Hubungan dialogis dan rembug strategis ini tidak dapat disederhanakan menjadi sekedar tindakan LSM untuk “menabungkan” gagasan-gagasannya kepada masyarakat perdesaan, atau sekedar sebagai sebuah pertukaran gagasan untuk “dikonsumsi” oleh masyarakat perdesaan atau LSM. Sebagai satu hubungan horizontal, maka dialog harus pula didasarkan kepada adanya keyakinan pada fitrahnya untuk menjadi manusia seutuhnya (yang bukan hak istimewa kelompok elit, tetapi hak kelahiran semua insan manusia).

D. Sasaran dan Pencapaian Sasaran LSM

Dengan peranan dan persepsi semacam itu, LSM harus mengubah struktur-struktur sosial, ekonomi, dan politik, struktur-struktur yang membuat masyarakat lapisan bawah harus terus menerus tergantung dari dan dieksploitasi oleh pihak lain. Kesadaran LSM bahwa kebijaksanaan ekonomi saja tidaklah cukup untuk mengatasi ketimpangan dan kemiskinan struktural, berarti bahwa aksi-aksi LSM mestinya tidak hanya berbau *income*

generating saja, atau lebih umum lagi, bagi LSM prioritas pengembangan perdesaan bukan hanya salah satu kebudayaan materil (misalnya sumberdaya alam, benda-benda hasil teknologi, dll.) atau kebudayaan non materil saja (misalnya adat-istiadat, kepercayaan, falsafah, hukum, sikap mental, pemerintahan, dll.), melainkan dilakukan serentak keduanya sekaligus. Oleh karena kemiskinan juga merupakan fenomena organisasional, maka pola-pola organisasi institusional masyarakat perdesaan harus pula ditata ulang sesuai dengan kebutuhan baru. Penata ulangan pola-pola organisasi institusional tersebut hanya mungkin apabila golongan-golongan yang ekonomi dan sosialnya lemah, masyarakat lapisan bawah harus diikutsertakan secara aktif dan sekaligus menumbuhkan modal keswadayaan mereka. Partisipasi aktif ini mau tidak mau harus mengambil bentuk organisasi yang dapat menjadi sarana untuk mengurangi ketimpangan dalam bergaining power antara masyarakat lapisan bawah dan masyarakat lapisan yang lebih tinggi.

Dengan strategi pendekatan yang terpadu ini, kemajuan-kemajuan yang diperoleh diyakini tidak akan mengalami kepincangan-kepincangan. Oleh karena itu aksi-aksi LSM pada wilayah perdesaan harus dilakukan secara intensif (terus-menerus) dan menyentuh langsung masyarakat lapisan bawah.

E. Hubungan Kerjasama dengan Pemerintah

Meskipun terdapat perbedaan menyolok antara pola, metode, pendekatan dan strategi kerja pemerintah dengan LSM, itu tidak berarti bahwa LSM akan menyaingi dan menggantikan peranan pemerintah. Sebab, bila dilihat dari sudut pembiayaan perkembangan perdesaan, hal itu pasti sudah tidak memungkinkan. Tetapi bagi kepentingan-kepentingan masyarakat lapisan bawah, LSM dapat melakukan penguatan dan pembelajaran masyarakat untuk mengatasi kelemahan-kelemahan pemerintah, demikian pula sebaliknya. Oleh karena itu, tuduhan bahwa LSM adalah merupakan perpanjangan tangan pemerintah hanya karena mengadopsi sasaran-sasaran pemerintah atau adanya kesamaan kegiatan, pada hakekatnya tidak memiliki dasar sama sekali. Tuduhan perpanjangan tangan pemerintah akan lebih tepat apabila bertitik tolak dari tingkat kelonggaran atau keketatan LSM untuk mempertahankan eksistensinya dalam berhadapan atau berhubungan dengan pemerintah. Apabila dalam melaksanakan aksi-aksinya LSM dapat didikte oleh pemerintah, maka LSM yang bersangkutan pantas dikatakan perpanjangan tangan pemerintah. Jadi, meskipun kegiatan, sasaran dan tujuannya sama, tetapi LSM dalam mengimplementasikan pendekatan, pola dan metode operasional tetap berbeda, maka kemandirian idealisme LSM yang bersangkutan tidak perlu diragukan lagi.

Adalah wajar apabila LSM menjalin hubungan dan kerjasama dengan pihak pemerintah, baik di tingkat pusat, propinsi, kabupaten, kecamatan maupun di tingkat desa tetapi harus tetap berdasarkan prinsip:

- Saling respek terhadap hakekat keberadaan, potensi dan keterbatasan serta kelemahan masing-masing pihak.
- Kebersamaan dalam pengambilan keputusan dan tanggung jawab sesuai dengan kesepakatan bersama.

Untuk itu, pemerintah dan seluruh birokrasinya tampaknya harus belajar untuk hidup bersama dan saling menunjang dengan LSM. Dengan cara mendukung dan merangsang

perkembangannya, tanpa merusaknya dengan pengaturan-pengaturan yang mengekang sebagaimana rencana keppres 1994 tentang dunia per LSM.

F. Jaringan Kerjasama LSM

Sebagian orang berpendapat bahwa komunikasi dan kerjasama di antara LSM Indonesia sangat jarang terjadi. Hal ini dapat mengakibatkan pertikaian dan persaingan dengan mengutamakan kepentingannya masing-masing. Kalaupun ada terjadi hubungan dan kerjasama, maka itu lebih mungkin terjadi di antara LSM yang sejenis, seukuran dan selembaga bantuan asing (*Foreign Aid Agency*). Tetapi apabila disadari bahwa sebagai suatu lembaga yang sangat bervariasi, baik dilihat dari segi ukuran, jenis, skala, kelompok sasaran, motivasi, visi, misi, metode, strategi dan pendekatan yang dipakai dengan segala kelebihan dan keterbatasan masing-masing, maka LSM mutlak perlu menjalin hubungan dan kerjasama dalam bentuk jaringan kerja di antara LSM untuk saling berbagi rasa dan pengalaman serta efisiensi tenaga, pikiran

Syukur sejak dekade 80an dunia LSM telah banyak berjaringan antara satu lembaga dengan lembaga lainnya.

Kami yakin paparan sumbang pikir ini belum dapat dikatakan sempurna dan utuh, untuk itu mari bersama-sama kita cermati seluruh makalah dan sajian para penyaji pada seminar ini, agar dapat kita rumuskan bersama dalam pencapaian tujuan konkrit dari seminar yang bertemakan **“WAWASAN TENTANG LSM INDONESIA: SEJARAH, PERKEMBANGAN DAN PROSPEKNYA”**.

Salam hangat

Yayasan Indonesia Untuk Kemajuan Desa

Jl. Airlangga No. 16B, Medan 20112

Telp. : (061) 4516338, 4535016

Faks. : (061) 4564794

DAFTAR PESERTA SEMINAR

Wawasan Tentang LSM Indonesia: Sejarah, Perkembangan, serta Prospeknya

Selasa, 15 Agustus 2000

Hotel Cemara, Jakarta

No	Nama	Institusi
1.	Harley	Walhi Sulteng Jl. KS Tubun no.28 A Bumi Sagu Kelurahan Besusu Tengah Kecamatan Palu Timur, Palu 94112 Walhi@palu.wasantara.net.id
2.	Pius	CRS Jl. Wijaya I/35 Kebayoran Baru Jakarta siska@crs.or.id
3.	Chamiyatur S.	Bangun Mitra Sejati (BMS) Jl. Kelurahan No. 4-5 Kel. Rambutan Ciracas Jakarta 13830 Ph./fax: 8404159 ybms@dnet.net.id
4.	Deny P. Sambodo	IDEA Jl. Kaliurang Km. 5 Gg. Tejomoyo Ct III / 3 Yogyakarta Ph.: 0271-717869 idea@yogya.wasantara.net.id
5.	Tumiriyanto	Yayasan Krida Paramita Jl. Samudra Pasai No. 14 Combong Rt. 009/01 Kaporido Surakarta 57136 Ykpsolo@indo.net.id
6.	Tabrani Yunis	CCDE Banda Aceh Jl. K. Amin No. 28 lt. 11 Kel. Beurawe Banda Aceh 23124 Ccde@aceh.wasantara.net.id
7.	Risman Musa	BKKBN Jl. Permata 1 Halim Perdana Kusuma Jakarta 13650 Risman@siduga.bkkbn.go.id
8.	Wisnu T. Hanggoro	LeSPI – Semarang Jl. Tri Lomba Juang 24A Semarang Ph.: 024-448986 Lespi@indo.net.id With_rr@yahoo.com

9.	Krisdiono	Bina Swadaya Boyolali Jl. Raya Salatiga-Solo, km 14 No. 49. Mekarsari Kaligentong Ampel Salatiga, Boyolali 57352 Fax: 0298-23525 Swadaya@indo.net.id
10.	Deni Suharyono	Konphalindo Ph./fax: 7821877/7804158 konphal@rad.net.id
11.	Bambang Ris	BKKBN Jakarta Utara Jl. Agung Utara Raya Blok A No. 46 Sunter Podomoro, Jakarta Ph.: 687458
12.	J. Suharyanti	Lembaga Dana Atmaja Jl. Tulang Bawang 18 Bandar Lampung Fax: 0721-251767
13.	Gina	KUF/GTZ Departemen Pertanian Gedung A Lt. VI Ruang 637 Jl. Harsono R M No. 3 Ragunan Pasar Minggu, Jakarta Ph.: 021-78832999
14.	Tom Malik	Rio Tinto Menara Kadin Indonesia 28th flr. Jl.HR. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 02-03 Jakarta 12950 Ph./fax: 5274208/5274228 tom.malik@riotinto.co.id
15.	Novita Ikasari	GTZ Skyline Bld. 8F Jl. MH. Thamrin No. 9, Jakarta Ph./fax: 324007/324070
16.	Nishida	JICA Plaza BII, Tower II, 27th flr. Jl. MH. Thamrin No. 51, Jakarta 10350 Ph.: 3907533
17.	Muchtar Bahar	LPPSE Jl. Jati Padang No. 19 Pasar Minggu Jakarta 12540 Ph./fax: 7827139 akppijbtb@pu.go.id
18.	Paulan Aji	World Vision Indonesia Jl. Wahid Hasyim 33, Jakarta Ph./fax: 327467/3107846
19.	Marcel Latuihamallo	Yayasan Mitra Indonesia Jl. Kebon Kacang IX/78 Jakarta 10240 Ph./fax: 3100855/3921608

20.	Muchtar Abbas	Yayasan Mitra Usaha Jl. Kalibata Utara V No. 23A, Jakarta Ph./fax: 9163364 ymu@indo.net.id
21.	Kumala Sari	Bappenas-AHT Konsultan Support Staff to Survey Design and Implementation Consultant Jl. Kelud No. 24 Guntur, Jakarta Ph./fax: 8294258/8371167 Icsp-aht@centrin.net.id
22.	Eka Budianta	Yayasan Sahabat Aqua Jl. Pulau Lentut No. 3 Kawasan Industri Pulo Gadung, Jakarta Fax: 021-4609177
23.	Rifai Apin	Yayasan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Jl. Cikini Raya 91 F lt. 2, Jakarta Pusat Ph./fax: 31904780/31906689
24.	Endang Suhendar	AKATIGA Jl. Cilamaya No.7, Bandung 40115 Ph./fax: 4235526/4260875 akatiga@indosat.net.id
25.	Dina Tri S.	Jari Indonesia Jl. Pejompongan V No. 140 Jakarta 10210 Ph./fax: 5735316/ 5707904
26.	Taufik Hidayat	Jari Indonesia Jl. Pejompongan V No. 140 Jakarta 10210 Ph./fax: 5735316/5707904
27.	Nur Indra S.	Meneg Pemberdayaan Perempuan Jl. Merdeka Barat 15, Jakarta
28.	Toni Krisanto	Tandhu Pertiwi Magetan
29.	Suzanty Sitorus	Kehati Gd. Patra Jasa lt. 2 R. IE Jl. Gatot Subroto Kav. 32-34, Jakarta 12950 Ph./fax: 5228031 suzanty@kehati.or.id
30.	Dian Kristiani	Harapan Anak Negri Magetan
31.	Gino Latief Sn	Yayasan Mitra Mandiri Gd. Graha Aktifa, lt. 2 Jl. HR. Rasuna Said, Kav. 03, Blok X/I Jakarta 10240 Ph.: 5203600
32.	Damianus Susanto	Yayasan Petra Taman Modern Blok D5/21 Cakung, Jakarta Timur 13960 Ph./fax: 4612127, ph.: 4802320

33.	Tri Budiardjo	CCF Jl. Cempaka Putih Tengah I/5 Jakarta 10510 Ph./fax: 4247292/ 4722751 ccfina@pacific.net.id
34.	Chitra Buchori	The World Bank BEJ Tower II, 12 th flr. Jl. Jend. Sudirman, Jakarta
35.	Pheni Chalid	TP-JPS Gd. Dept. keuangan RI, lt. 3 Jl. Lap. Banteng, Jakarta
36.	Efri S. Bahri	Kabisat Indonesia Jl. Koto Panjang I/I no. 7 Koto Tengah, Padang 25175 Ph.: 0751-443413
37.	Dewi Tunjung Sari	Ditjen Bangda, Depdagri Jakarta
38.	A. Damenta	Ditjen Bangda, Depdagri Jakarta
39.	Anton Pasaribu	UADS Bekasi Central Niaga Kalimalang Blok B-1 No. 15 Jl. A. Yani, Bekasi Ph./fax: 8853540
40.	Ali B. dahlan	YSM Jl. Dr. Sutomo 19, Mataram 83123 Ph./fax: 0370-623880
41.	Irfan	FKWKM Jakarta Utara
42.	Nando	Bulletin Kamal Muara Jakarta Utara
43.	M. Najib	Clean Urban Jl. Sutan Syahrir 21, Jakarta najib@indo.net.id
44.	A. Purnomo	UPM PDM DKE – Pusat Jl. Sumbing No. 42, Jakarta Selatan Ph./fax: 8303846
45.	Ratih	PPSW Duren Sawit Asri Kav. 4 No. 1A Jl. Swadaya Raya, Rawa Domba Duren Sawit Jakarta 13440 Ph.: 86603788
46.	Lena Mukti	Parmusi Jakarta muktilm@rad.net.id
47.	Nieke DK	WALHI Jl. Tegal Parang Utara No. 14, Mampang Prapatan Jakarta 12790 Nieke@walhi.or.id

48.	Debby	Japori (URM-I) Jl. Cempaka Putih Timur XI/26 Jakarta 10510
49.	Elizabeth	YAPPIKA Jl. Pedati Raya 20 Rt. 007/09 Jakarta 13350
50.	Johny Simanjuntak	ATMA Solo/Pati Jl. Dr. Sutami No. 88, Surakarta Atma@indo.net.id
51.	Budhi	
52.	Rizal Malik	Oxfam GB Jl. Suhartono 2 Kotabaru Yogyakarta 55281 Oxfarm-uki@yogya.wasantara.net.id
53.	Amalia Pulungan	PEC Jakarta
54.	Arimbi HP	Elaw Indonesia Jakarta
55.	Pahir Halim	FIK-Orno Sulsel, Makasar Jl. Hertasning III No. 2 Ujung Pandang Fikornop@indosat.net.id
56.	Wilopo	P3MM Jl. Bungur 25 Malang 65141 Fax: 0341-498180
57.	Bambang Sumantri	Bismi Jakarta
58.	Chairul Anwar Tanjung	Yayasan "BMS" Jl. H.M. Fudhali No 49 Kaum Utara, Cikarang, Bekasi 17530 Ph./fax: 9166675/8901700 Binasentra@excite.com
59.	Surya Dharma	Yasika Jl. Airlangga No. 16 B Medan 20112 Ph.: 061-4535016
60.	M, Syahadat	ACF BTN Wirabuana Blok L2/5, Kendari Fax: 0401-390495 Leppsek@kendari.wasantara.net.id
61.	Ribut Susanto	Riau Mandiri Jl. Amir Hamzah No. 19 Gobah, Pekanbaru 28131 Ph.: 0761-36349 Rmandiri@indo.net.id
62.	Peter Hagul	CIMU Scholarship, Gd. Depdiknas Jl. Jend. Sudirman lt. 2, Jakarta

63.	Lery Mboik	PIAR Jl. Lalamentik no.75 Kupang 85227 Fax: 0380-827917 Piar@kupang.wasantara.net.id
64.	Karin Oswald	SFGG-GT'Z Skyline Bld. 8F, Jl. M.H. Thamrin No. 9 Jakarta
65.	Saleh Tjan	Cita Halmahera Ternate, Maluku Utara
66.	Prindahono	Mitra Insani Jl. Pahlawan No. 58 Buntok, Palangkaraya 73711 Fax: 0536-20162
67.	Hendro Suwito	World Vision Jl. Wahid Hasyim 33, Jakarta Ph.: 327467
68.	Suharyono	YBMI Jl. Surabaya No. 60 Jakarta Ph.: 3155221
69.	Arbanto	JPS-BK Jakarta
70.	Robert B.T.	Plan International Jl. HR. Mohammad No. 340, Surabaya
71.	M. Isa Al Anshari	TKPP-JPS Jl. Cicurug No. 1, Jakarta 10310
72.	Rustika Thamrin	Buah Hati Jl. Tanjung Barat No. 81 D, Jakarta
73.	Sri Wahyuningsih	Yayasan Pelita Ilmu Jl. Tebet Timur Dalam VIII, Blok Q No. 6 Jakarta 12820
74.	Herman Y	Yayasan Petra Taman Modern Blok D5/21 Cakung Jakarta 13960
75.	Bambang Sulaksono	OTI/USAID Embassy of The United States of America Jakarta
76.	Setiabudhi	CRP Jl. Tebet Barat Dalam No. 38 Jakarta
77.	Machsana Asnawi	PP Muslimat NU Jl. Taman Amir Hamzah No. 5, Jakarta
78.	Tina R. Soedarno	Puslitkes Atmajaya Komp. RS Atma Jaya, Gedung F, lt. 1 Jl. Pluit Raya No. 2, Jakarta
79.	Murtiningsih	Yayasan Sambang Diri Jl. Usaha No. 21 Rt. 05/12, Cawang II Jakarta

80.	MM. Billah	CPSM Jakarta
81.	Haryo Harbirono	FPPM Taman Duren Sawit Blok A 1 No. 09 Jl. Rawa Domba Kalimalang Jakarta
82.	Pipin	Buletin FKW Kamal Muara Jakarta
83.	A. Syehbubakar	Bureau of Economic and Functional Cooperation The ASEAN Secretariat 70A Jl. Sisingamangaraja, Jakarta
84.	Anita	CPDS Jakarta
85.	Biny Buchori	Infid Jl. Mampang Prapatan XI/23, Jakarta 12790
86.	Amril	PDM-DKE Jl. Sumbing No. 42, Jakarta Selatan
87.	Mien Rianingsih	PPSW Duren Sawit Asri Kav. 4 No. 1A Jl. Swadaya Raya, Rawa Domba Duren Sawit Jakarta 13440
88.	Dr. Felix Gunawan	Perdhaki Jl. Kramat 6 No. 7, Jakarta
89.	Jarot	Bina Swadaya Jl. Gunung Sahari III/7, Jakarta
90.	Musriyanto	Cita Halmahera
91.	Ayuk	Suara Ibu Peduli Jl. Melawai VII/1, Jakarta
92.	Puji	Suara Ibu Peduli Jl. Melawai VII/1, Jakarta
93.	Didik F	P2KP Regional Koordinator I Konsultan Manajemen Pusat Jl. Lamandau IV No. 9, Kebayoran Baru Jakarta
94.	Iqbal	Kita dan Buah Hati Jl. Tanjung Barat No. 81 D Jakarta Selatan
95.	Fakhrul	Jari Indonesia Jl. Pejompongan V No. 140 Jakarta
96.	Gde	Bappenas Jl. Taman Suropati No. 1, Jakarta 10310
97.	Farida R.	Bismi Kalibaru, Jakarta
98.	Indar Parawansa	Ditjen Bangda Depdagri Jakarta

99.	<p>John Maxwell Sri Kusumastuti Rahayu Bambang Soelaksono Akhmadi Hastuti Musriyadi Nabiu Pamadi Wibowo Sri Budiayati Wawan Munawar Alexander Irwan Dodo Juliman Widiyanto Ismah Afwan Budhi Ganefi Kartini Surati Suwiryo Ifan Haryanto Agustiawan Syahputra Mulya Amri Hudi Sartono Hariyanti Sadaly Samekto Irma Habie Sudarno Sumarto Syaikhu Usman M. Sulton Mawardi Nina Toyamah Asep Suryahadi Yusuf Suharso Vita Febriany Mirna Wildani Nuning Akhmadi Hesti Marsono Katarina B. Hardono Bambang C. Hadi Sandra Usmany Mardiani Julianti Hesty Supriyanto</p>	<p>SMERU (Social Monitoring and Early Response Unit)</p> <p>Jl. Subang No. 22 Menteng, Jakarta 10310</p> <p>Jl. Kusumaatmaja No. 69 Menteng, Jakarta 10350</p>
-----	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



PERKEMBANGAN ORNOP DI INDONESIA¹

Latar Belakang

- Setidaknya ada dua kecenderungan perkembangan pembangunan yang terjadi pada awal dua-dasawarsa terakhir abad ini, yakni tetap meluasnya kemiskinan sampai ke derajat yang sangat tidak manusiawi dan tidak lagi bisa diterima²; dan semakin menurunnya ketersediaan sumber-sumber keuangan untuk membiayai pemberantasan kemiskinan itu³. Praktek-praktek pembangunan selama ini selalu menekankan pengalihan modal, perencanaan formal, spesialisasi, dan pengendalian oleh pemerintah pusat. Teori-teori pembangunan *konvensional* yang dijadikan dasar sangat menekankan pentingnya meletakkan tanggung-jawab pengendalian dan pengalokasian sumber-sumber pembangunan pada pemerintahan terpusat, karena dengan demikian dianggap akan dapat dihasilkan pengambilan keputusan yang optimal tentang investasi. Pendekatan sistem komando atas pengelolaan sumber-sumber ini lebih sering menghasilkan pemantapan *sistem patronase* dan membangun proyek-proyek ekonomi yang lembek, mengabaikan disiplin ekonomi, meningkatkan ketergantungan pada sumber-sumber luar, dan menggusur prakarsa lokal. Selain itu, pendekatan semacam ini cenderung mendorong ke arah *otoritarianisme*, dan pemusatan kekayaan dan kekuasaan politik⁴.
- Sebagai tanggapan terhadap kecenderungan itu, kemudian muncullah suatu tuntutan agar pembangunan lebih berkiblat pada rakyat yang menekankan pentingnya penguatan kapasitas kelembagaan dan sosial yang mendukung pengembangan pengendalian, pertanggung-gugatan (*accountability*), prakarsa, dan kemandirian lokal. Pengalihan modal dilihat sebagai bukan masalah yang paling utama, dan sebaliknya prioritas diutamakan pada proses demokratisasi. Rakyat didorong untuk memobilisasikan dan mengelola sumber-sumber mereka sendiri. Dengan pendekatan yang terdesentralisasikan dan penekanan pada kemampuan mengorganisasikan-diri untuk mengelola sumber-sumber pembangunan seperti itu, pada umumnya akan dihasilkan

¹ Pokok-pokok pikiran yang disajikan pada seminar '*Wawasan tentang LSM Indonesia: Sejarah, Perkembangan dan Prospeknya*' yang diselenggarakan oleh SMERU di Jakarta, 15 Agustus 2000. Terima kasih saya tujukan kepada Hariyanti S. Samekto yang memberi kesempatan kepada saya untuk terlibat di dalam seminar ini.

² Simbol dan sekaligus realitas kemiskinan itu seringkali ditayangkan oleh CNN berupa gambar 'mayat hidup' anak-anak, yang merintih dan kemudian disuapi makanan bubur, di negeri miskin Afrika Hitam, atau sekelompok orang tua lelaki dan perempuan serta anak-anak yang mengais-ngais gunung sampah di lokasi pembuangan sampah Bantar Gebang Bekasi yang ditayangkan televisi.

³ Indonesia, misalnya, mencari berbagai sumber dana luar negeri, baik berupa hibah maupun pinjaman, untuk menanggulangi kemiskinan yang semakin meluas dan mendalam sejak krisis ekonomi dua tahun terakhir, karena sumber-sumber dalam negeri yang langka dan jauh dari cukup. Bahkan di dalam praktek, dana penanggulangan kemiskinan (antara lain lewat program *JPS = Jaring Pengaman Sosial*) itupun masih dianggap perlu dikorup oleh aparat birokrasi dan pejabat negara (di dalam program *JPS* ini juga terlibat beberapa Ornop, yang seringkali menutup mata terhadap praktek korupsi yang dilakukan birokrasi, atau bahkan bias jadi ikut menikmati praktek korupsi itu).

⁴ Kombinasi dari teori-teori dan praktek pembangunan seperti itu di dalam kenyataannya bahkan berkembang menjadi doktrin dan dogma yang diberi nama 'pembangunanisme' (*'developmentalism'*) [Lihat misalnya Sach, Wolfgang, '*The Development Dictionary: A Guide to Knowledge as Power*', London, Zed Books, 1992. Buku ini sudah diterbitkan di dalam bahasa Indonesia oleh CPSM pada tahun 1995 dengan judul '*Kritik atas Pembangunanisme: telaah Pengetahuan sebagai Alat Penguasaan*']. Doktrin dan dogma semacam itulah yang juga menjadi 'ideologi' rezim Suharto di Indonesia selama tiga-dasawarsa di penghujung abad 20. Banyak Ornop di Indonesia yang juga terhegemoni secara ideologis oleh doktrin semacam itu, dan secara sukarela menjadikannya sebagai landasan kegiatan mereka selama ini. [lihat misalnya hasil penelitian yang dilakukan oleh CPSM tahun 1994].

suatu pengelolaan sumber-sumber yang lebih efisien dan produktif, peningkatan prakarsa dan pertanggung-gugatan lokal, dan penguatan disiplin ekonomi⁵. Pendekatan seperti yang disebut terakhir ini seringkali didaku digunakan oleh Ornop yang pada prakteknya cenderung memiliki minat yang kuat dalam demokratisasi [Korten, 1987]⁶.

Ornop atau LSM?

- Panitia secara sengaja dan tegar menggunakan istilah 'LSM' untuk menyebutkan suatu organisasi yang di kalangan luas dikategorikan sebagai organisasi non-pemerintah, meskipun ada juga berbagai istilah lain⁷. Bagi mereka yang yakin menggunakan istilah itu dan yang secara sengaja mempertahankannya, serta bagi para pengikutnya, istilah (LSM) itu bukanlah dipilih secara serampangan, jika saja dilihat dari teori yang menyatakan bahwa tindakan sosial selalu bersifat '*intensional*'. Setidaknya ada dua maksud, terkatakan atau tidak, di belakang penggunaan istilah itu. Istilah itu dipilih karena dianggap pas mewakili semangat dan kehendak '*depolitisasi rakyat*'⁸ serta secara nyata mengejawantahkan tindakan nyata dari slogan '*politik no, pembangunan yes*' yang dipropagandakan secara gencar oleh Orde Baru. Celaknya propaganda Orde Baru itu diterima dengan sukacita dan penuh keyakinan oleh berbagai kalangan, termasuk sebagian dari komunitas Ornop. Istilah itu juga dipilih dengan maksud untuk mengaburkan dan bahkan menafikan posisi konfliktual antara organisasi itu dengan pemerintah, karena sesungguhnya, menurut keyakinan politis dan ideologis kalangan ini, organisasi seperti itu adalah 'mitra pemerintah' atau bahkan juga merupakan bagian integral dari pemerintah (negara). Dengan kata lain, pemilihan istilah itu disesuaikan dengan pandangan integralistik mereka mengenai negara, yang dikenal dengan paham negara integralistik atau '*organic statism*'. Di dalam paham ini memang tidak dikenal istilah oposisi, dan bahkan cenderung 'mengharamkan' oposisi. Perbedaan pendapat dan kritik selalu ditafsirkan sebagai '*mbalelo*' atau '*makar*', sehingga oleh karena itu dianggap sah untuk dipangkas dan ditindas atau perlu 'digebug'⁹. Pendek kata penggunaan istilah (LSM) itu mencerminkan kuatnya

⁵ Dasar-dasar dan akibat dari aliran yang kontras ini dikembangkan secara substansial dan rinci oleh Chambers [1986]; D. Korten [1987], dan Korten dan Klaus [1984].

⁶ Oleh karena itulah Ornop, baik di negara-negara maju dan terutama di negara-negara berkembang, kemudian menjadi bagian penting dari proses perubahan yang terjadi di penghujung abad ini. Jaringan Ornop pada tingkat lokal maupun pada tingkat internasional memiliki peluang yang cukup luas untuk ikut mengambil peran di dalam proses pengelolaan sumber-sumber, proses pengambilan keputusan, dan proses demokratisasi. Meskipun demikian, di Indonesia terdapat juga Ornop yang menggunakan gagasan ini hanya sebagai 'retorika', karena di dalam prakteknya Ornop seperti ini masih memperlihatkan secara kuat perilaku yang justru melawan gagasan dasarnya.

⁷ Misalnya saja dikenal juga istilah NGO (*non-governmental organization*), PVO (*privat voluntary organization*).

⁸ '*Depolitisasi rakyat*' ini adalah program politik elite Orde Baru yang berintikan militer, terutama 'militer pragmatis', yang beranggapan bahwa rakyat tidak perlu dilibatkan di dalam proses politik, karena dianggap masih bodoh dan tidak siap. Oleh karena itu elite politik ini yakin bahwa negara ini haruslah mereka pimpin. Strategi yang ditempuh oleh elite ini adalah 'dominasi' dan 'hegemoni', dan banyak unsur masyarakat sipil yang ternyata terhegemoni secara kuat.

⁹ Istilah yang bernuansa kekerasan ini populer dan dipopulerkan oleh rezim represif-otoritarian Orde Baru, yang pada mulanya dikenalkan oleh Suharto untuk menanggapi kritikan beberapa perwira senior TNI atas pidatonya di Pekanbaru pada bulan 27 Maret 1980. Bahasa kekerasan seperti itu memang nyata pada pidato itu, misalnya Suharto menyatakan: '*...dua pertiga anggota (dari MPR) dapat, bila mereka menginginkan, mengubah Undang-undang Dasar (1945). (Tetapi) ABRI tidak ingin ada satu perubahanpun, dan bila ada perubahan, adalah tugas (ABRI) untuk menggunakan senjata...Daripada menggunakan senjata di dalam menghadapi perubahan dari UUD '45 dan Pancasila, kita lebih baik menculik satu diantara dua pertiga yang ingin melakukan perubahan, karena dua pertiga kurang satu tidak sah menurut UUD '45*' [Lihat Jenkins, David, *Suharto and His Generals: Indonesia Military Politics 1975-1983*, New York, Cornell Modern Indonesia Project, 1984, p.157; juga *Tempo*, 14 Juni 1980]

'hegemoni' negara atas unsur-unsur masyarakat sipil. Sebaliknya, istilah Ornop (organisasi non-pemerintah) merupakan wacana-tanding (*counter discourse*) yang sengaja dipergunakan sebagai upaya dekonstruksi wacana hegemonis yang sampai saat ini pengaruhnya terasa masih sangat kuat, bahkan di dalam komunitas Ornop sendiri.

Spektrum Ornop di Indonesia

- Dalam dasawarsa-dasawarsa terakhir ini, ketika pembangunan di berbagai negara-berkembang mulai dan terus digalakkan, peran Ornop dilihat semakin meningkat [Drabek, 1987], dan bahkan Chambers mengenalkan konsep '*additionality*' untuk menggambarkan sumbangan potensial dari Ornop bagi proses pembangunan¹⁰. Pada mulanya Ornop dilihat sebagai organisasi yang bergerak secara eksklusif pada tingkat lokal dengan tujuan '*memenuhi kebutuhan kelompok miskin tanpa mempertimbangkan dampak yang luas*'; akan tetapi kemudian terjadi pergeseran yang mendasar yakni bahwa Ornop tidak lagi hanya berupaya '*memenuhi kebutuhan kelompok miskin*' melainkan juga membantu mereka untuk mengartikulasikan kebutuhan mereka dan memberikan kemampuan kepada mereka untuk mengontrol proses pengambilan keputusan yang dapat mempengaruhi kehidupan mereka [Drabek, 1987].
- Meskipun tujuan dan kegiatan serta pengalaman Ornop sangat beranekaragam, sehingga terasa sangat sulit untuk diklasifikasikan [Korten, 1987], akan tetapi Ornop Indonesia, menurut Eldridge [1990], memiliki ciri-ciri umum yang kurang lebih sama, yakni antara lain: (1) orientasi mereka kepada penguatan kelompok-kelompok komunitas sebagai basis dari masyarakat dan sebagai pengimbang bagi pemerintah; (2) pada umumnya ada komitmen yang kuat terhadap cita-cita partisipasi rakyat di dalam pengambilan keputusan; (3) adanya satu komunitas Ornop di Indonesia, dengan banyak hubungan-silang antar pribadi dan kelembagaan, yang saling mendukung, terdapat pertukaran gagasan dan sumber-daya, yang memberikan potensi pada satu *front* bersama pada berbagai tingkat. Hubungan-silang itu dilatar belakangi oleh bentuk dan skala organisasi serta keaneka-ragaman kegiatan Ornop. Hal yang disebut terakhir ini seringkali dianggap sebagai kekuatan komunitas Ornop, tetapi sekaligus juga kelemahannya [Eldridge, 1990]. Hasil utama yang dicapai oleh Ornop pada tingkat makro adalah pemunculan *issues* dari pengalaman lapangan mereka menjadi agenda politik nasional. Ornop juga menyampaikan refleksi dan lebih mengartikulasikan kepedulian umum pada lingkungan hidup, hak-azasi dan demokratisasi. Dampak¹¹ dari kegiatan Ornop yang mempunyai makna politis terlihat pada keseluruhan keseimbangan kekuatan antara kelompok-kelompok sosial dan ekonomi, pemerintah Indonesia dan berbagai agen-agennya. Sampai derajat tertentu Ornop menunjukkan kapasitasnya dalam meningkatkan kemandirian pengelolaan organisasi berbagai kelompok yang kurang beruntung, dan memberikan kemampuan kepada kelompok-

¹⁰ Konsep '*additionality*' itu dimaksudkan sebagai upaya membuat sesuatu lebih baik daripada yang sebelumnya, yang memberi kemungkinan baik maupun buruk. Upaya mencari '*additionality*' yang tinggi memerlukan empat unsur: mengidentifikasi dan mempertemukan kebutuhan dan peluang; menilai manfaat terbandingkan (*comparative advantage*) – yaitu melihat apa yang dikerjakan oleh satu Ornop dibandingkan dengan yang dikerjakan Ornop lain --; belajar dan menerima lewat aksi; dan mencapai dampak yang luas. Satu Ornop dapat mencapai dampak yang luas dalam banyak cara termasuk memperluas kegiatannya; mengenalkan dan mengembangkan teknologi hingga semakin luas; mengembangkan dan menggunakan pendekatan yang kemudian diadopsi oleh Ornop lain ataupun oleh pemerintah; mempengaruhi perubahan kebijakan dan tindakan donor; mengambil manfaat dan menebarkan pemahaman tentang pembangunan [Robert Chambers dalam '*Thinking about NGO Priorities*', sebagaimana dikutip Drabek, 1987].

¹¹ Dampak itu bisa jadi tak-langsung dan dalam jangka panjang dan dapat pula langsung dan segera.

kelompok itu untuk menghadapi aparat pemerintah dan kekuatan lain yang sangat kuat dalam kedudukan sederajat; singkat kata mereka melayani kepentingan untuk memperkuat masyarakat.

- Beberapa kajian tentang Ornop di Indonesia telah dilakukan¹² oleh beberapa peneliti, dan berbagai kategorisasi juga telah dilakukan. Korten [1987] menggunakan 7 variabel¹³ untuk membuat kategorisasi Ornop di Indonesia, dan hasilnya menunjukkan tiga generasi Ornop. CPSM [1994] dan Fakhri [1996] cenderung menggunakan pembeda yang kurang lebih sama, yakni segi-segi 'ideologis', sehingga menghasilkan Ornop 'developmentalis',¹⁴ Ornop 'reformis', dan Ornop 'transformatoris'¹⁵. Villegas [1987] mengkategorikan Ornop ke dalam ornop *parastatal*, Ornop *professional*, dan (c) Ornop *progressif* secara politik¹⁶. Eldridge, dengan menggunakan empat kriteria¹⁷, mengemukakan tiga kategori pokok Ornop dan satu kategori tambahan berdasarkan perkembangan mutakhir. Tiga kategori pokok itu adalah (a) 'High level Cooperation-Grass-roots Development', (b) 'High level Politics-Grass-roots Mobilization', (c) 'Empowerment from below', dan (d) yang lebih 'radikal' [Eldridge, 1996:35-38]. Sedangkan Uhlin [1997] mengidentifikasi empat ciri ideologi dasar, yaitu *radikal*, *liberal*, *konservatif*, dan *Islam*¹⁸. Drabek [1989]¹⁹ dan CPSM [1993] melihat posisi Ornop *vis-a-vis* negara²⁰.

¹² Untuk menyebut beberapa contoh kajian mutakhir mengenai Ornop di Indonesia, misalnya adalah: Korten, *Third Generation NGO Strategies: A Key to People-Centered Development, World Development*, September 1987; Indeco de Unie, *Laporan Studi tentang LSM*, 1993; beberapa laporan CPSM/PERAN: 'Gerakan Transformasi Sosial Untuk Menegakkan Kedaulatan Rakyat di dalam Masyarakat Sipil yang Kokoh: Fajar Baru bagi Ornop', Januari 1994; Ornop Mencari Format Baru: Laporan Pertemuan Cisarua', Juli 1993; 'Laporan Kunjungan Dialog tentang Visi, Masalah, Posisi dan Paradigma Ornop di Indonesia serta Upaya untuk mengatasinya', 1993; Eldridge, *Non-Government Organization and Democratic Participation in Indonesia*, Kuala Lumpur, Oxford University Press, 1995; Fakhri, *Masyarakat Sipil untuk Transformasi Sosial: Pergolakan Ideologi LSM Indonesia*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 1996; Setiawan, *Organisasi Non-Pemerintah dan Masyarakat Sipil*, PRISMA, No.7 Tahun XXV, Juli 1996; Uhlin, *Oposisi Berserak: Arus Deras Demokratisasi Gelombang Ketiga di Indonesia*, Bandung, Penerbit Mizan, 1998; Setiawan, *Ornop dalam Gerakan Masyarakat Sipil: Analisis terhadap Reposisi Ornop Pasca Orde Baru*, INFID, Jakarta, 1998 (tidak dipublikasikan)

¹³ Ke 7 variabel itu adalah: (1) ciri-ciri masalah/isu yang didefinisikan; (2) masalah yang didefinisikan untuk ditanggulangi; (3) kerangka-waktu; (4) lingkup khusus; (5) aktor utama; (6) pendidikan pembangunan; dan (7) kiblat pengelolaan. Ketiga generasi Ornop itu adalah: generasi pertama yang bersifat 'bantuan dan kesejahteraan', Ornop generasi kedua yang bersifat 'pembangunan swadaya lokal berskala kecil', dan generasi ketiga yang bersifat 'pembangunan berkelanjutan'. Lihat Korten, *Third Generation NGO Strategies*, op.cit.

¹⁴ Fakhri menggunakan istilah 'konformis' untuk Ornop 'developmentalis' ini. Lihat Fakhri, Dr. Mansour, *Masyarakat Sipil untuk Transformasi Sosial: Pergolakan Ideologi LSM di Indonesia*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 1996

¹⁵ Variabel yang digunakan antara lain adalah: (1) pandangan terhadap struktur sosial; (2) cara memandang masalah; (3) penyebab masalah; (4) cita-cita atau tujuan; (5) program/cara pemecahan masalah; (6) jenis cara perubahan yang diinginkan; (7) jenis kepemimpinan yang ditekankan; (8) Jasa pelayanan yang diberikan; dan (9) ideologi yang mengilhaminya.

¹⁶ Ornop *parastatal* adalah Ornop yang mengidentifikasi diri secara utuh dengan model pembangunan dan misi pemerintah; Ornop *professional*, yang menggambarkan diri sendiri sebagai a-politis yang secara sosial progressif dan kritis terhadap negara dan partai oposisi; dan Ornop *progressif* secara politik melakukan kegiatan oposisi terhadap negara, dan beraliansi secara politik dengan aliran kiri.

¹⁷ Kriteria itu adalah: kedudukannya dalam program resmi pembangunan, hubungan Ornop dengan pemerintah, konsep tentang demokrasi, dan pendekatannya untuk mobilisasi rakyat.

¹⁸ Empat kategori dasar itu dikembangkannya menjadi 10 wacana demokrasi yang berbeda-beda, yakni: Marxisme, populisme kiri, feminisme, demokrasi sosial, liberalisme politik, liberalisme ekonomi, konservatisme, modernisme Islam, neo-modernisme Islam, dan transformisme Islam. Lihat Uhlin, *Oposisi Berserak: Arus Demokratisasi Gelombang Ketiga di Indonesia*, Bandung, Mizan, 1997.

¹⁹ Drabek [1987] juga mengemukakan bahwa Ornop di India pada umumnya menerima dukungan dan dorongan dari pemerintah, cenderung bekerja sama secara erat dengan pemerintah; dan Ornop Afrika cenderung bekerja sama dengan pemerintah dan menghindari antagonisme; sedangkan Ornop Amerika Latin secara historis berfungsi sebagai oposisi.

²⁰ CPSM [1993] di dalam penelitiannya menemukan 'persepsi diri Ornop' sebagai berikut: (a) Ornop sebagai bagian integral dari pemerintah (istilah yang digunakan adalah '*mitra pemerintah*', atau '*sekutu bukan seteru, dan kawan bukan lawan*'); (b) Ornop sebagai mediator antara pemerintah dengan masyarakat (istilah yang digunakan adalah '*jembatan antara pemerintah dengan masyarakat*'); (c) Ornop yang secara tegas menyatakan memihak rakyat dalam

Ornop dan Negara

- Negara bukanlah hanya sekedar 'pemerintah' tetapi sebagai satu sistem administratif, legal, birokratik dan paksaan yang berkesinambungan. Satu negara tidak selalu *unitary* atau *monolitik*. Setiap negara terdiri dari berbagai bagian, seperti eksekutif, administrasi yang permanen, peradilan (*judisiari*), aparat pemaksa (*coersive*). Elite strategis yang ditugasi sebagai aparat negara pada kenyataannya mengontrol semua bagian komponen dari negara secara bervariasi²¹ [Stepan, 1978]. Pada dasarnya, ada dua pandangan dikotomis Ornop tentang negara, yaitu: (a) '*organic stateism*', menyatakan bahwa negara otonom (atau hampir sepenuhnya otonom) yang memiliki peran sentral di dalam '*polity*' (masyarakat politik), bahwa negara mengatur masyarakat²²; dan (b) pandangan '*liberalist pluralist*', dan pandangan *Marxist* di mana negara diperlakukan sebagai '*dependent variable*' sehingga negara hanya sedikit memiliki kebebasan dan peran di dalam politik, karena masyarakatlah yang memiliki kekuasaan untuk mengatur negara²³.

Pandangan Ornop terhadap Negara

- Meskipun belum ada kajian khusus dan mendalam tentang bagaimana pandangan Ornop terhadap negara, akan tetapi ada tanda-tanda awal yang dapat dijadikan petunjuk sementara adanya tiga cara bagaimana Ornop memandang negara. Ornop yang menganut '*organic stateism*' dan/atau '*corporate stateism*' adalah, menurut 'kategorisasi CPSM', (1) Ornop yang menganggap dirinya sebagai bagian integral dari pemerintah dan (2) Ornop yang menganggap dirinya sebagai mediator antara pemerintah dan masyarakat. Kelompok Ornop ini tidak memberi perhatian pada demokrasi, karena '*kesengsem*' (*ideologically occupied*) oleh '*developmentalisme*', dan tetap percaya pada '*bureaucratic polity*', serta tidak memiliki wawasan perubahan struktural dan bahkan juga pergeseran kontrol dari sistem yang ada [Eldrige, 1990]²⁴.

berhadapan dengan negara (istilah yang digunakan adalah '*pendamping rakyat*'); (d) Ornop yang melebur dan menyatu dengan rakyat (istilah yang digunakan adalah '*menyatu dalam organisasi kelompok basis*').

²¹ Kontrol nyata atas aparat negara bervariasi pada kesatuan (*unity*) atau keretakan (*disunity*) dari elite strategis [lihat Stepan, Alfred, *The State and Society: Peru in Comparative Perspective*, Princeton, New Jersey, Princeton University Press, 1978]

²² Paham 'negara integralistik' yang diintroduksikan oleh Soepomo untuk menyebut bentuk negara Indonesia adalah contoh nyata dari pandangan 'organic stateism' ini [lihat Simanjuntak, *Pandangan Negara Integralistik*, Jakarta, Grafiti, 1991].

²³ Stepan mengemukakan tiga kemungkinan hubungan antara negara dan masyarakat sipil, yaitu: (a) bahwa negara bersifat netral secara prosedur dan mengizinkan proses yang otonom dan kompetitif dari agregasi kepentingan dan tuntutan kelompok-kelompok di dalam masyarakat sipil; (b) bahwa negara adalah alat kelas di mana kekuasaan memaksa (*coersive*), administratif, dan legal digunakan untuk mendominasi beberapa fraksi kelas yang di perintah dan melindungi yang lain yaitu kelas yang berkuasa; (c) bahwa negara adalah otonom terhadap masyarakat sipil dan menentukan dirinya sendiri [Stepan, 1978].

²⁴ Pendirian kelompok Ornop ini tercermin di dalam sikap dan tingkah laku mereka terhadap isu yang berkaitan dengan dua kondisi demokrasi yang disebut oleh Dahl ('kebebasan berserikat dan kebebasan berpendapat') yaitu 'rancangan Keppres LSM'. 'Rancangan Keppres LSM' yang sedang ramai dibicarakan parohan terakhir tahun 1994 bermaksud mengontrol Ornop, baik secara politis, organisatoris, maupun finansial. Maksud ini mencerminkan ideologi dan praktek 'korporatisme' negara. Terhadap rancangan 'regulasi' itu, kelompok ini mengakui bahwa negara memang berhak mengatur kehidupan Ornop lewat undang-undang dan sebagai imbalan pengakuan itu 'LSM' hendaknya diikut sertakan sebagai subyek. Basis analisisnya untuk menelaah 'rancangan Keppres' itu adalah 'itikad baik pemerintah', atau sebagaimana yang dikatakan Eldrige 'tetap percaya pada *bureaucratic polity* dan tidak memiliki wawasan struktural'. Dengan demikian, kelompok ini juga hanya menggunakan peluang partisipasi insitusional yang 'negara korporatis' yang bersifat '*compulsary, state directed and non-conflictual*'. Oleh karena itu, hambatan paling besar yang dihadapi oleh kelompok ini dalam proses 'demokratisasi yang berkedaulatan rakyat' sesungguhnya bersifat internal, karena terletak di dalam darah-dagingnya sendiri, dan bersifat mendasar, karena berupa hambatan 'ideologis' yakni kepercayaan pada konsep '*organic stateism*' dan/atau '*state corporatism*'. Dengan kata lain, selama Ornop kelompok ini tidak mengganti ideologi

- Ornop yang menganut paham '*liberalist-pluralist*' pada intinya berpendapat bahwa masyarakat dibentuk oleh individu-individu yang mengejar kepentingan ekonomi (pertumbuhan modal), sosial (*status*), dan politik (*power*) mereka sendiri-sendiri²⁵. Negara diberi tugas berbeda, yaitu: (a) melindungi masyarakat dari kekerasan dan serbuan dari masyarakat lain, (b) melindungi setiap anggota masyarakat dari ketidakadilan dan penindasan dari anggota lain, (c) melakukan dan memelihara pekerjaan dan lembaga-lembaga publik yang tidak dilakukan oleh orang karena tidak '*profitable*' [Stepan, 1978]²⁶.
- Kelompok Ornop *radikal* menyatakan bahwa negara adalah alat kekuasaan dari kelas dominan untuk menindas, atau negara adalah alat pemaksa (*coercive instrument*) dari kelas dominan. Negara pada awalnya muncul sebagai satu alat paksaan yang diperlukan (*a necessary means of coercion*) ketika terjadi pembagian kerja, dan pada gilirannya menjadi alat penindasan (*instrument of oppression*) sampai dengan terbentuknya masyarakat nir-kelas. Setelah pemilikan pribadi dihapus, dan perbedaan kelas hilang, kebutuhan akan negara sebagai alat penindasan sudah tidak ada lagi, sehingga pada tingkat ini negara tidak lagi diperlukan karena pada dasarnya secara internal masyarakat bisa mengatur dirinya sendiri²⁷.
- Ruang politik antara Ornop dengan pemerintah dibayangi oleh empat hal [Rikker, 1993], yaitu: (a) azas dan ideologi, di mana pemerintah mencari kompatibilitas, kalau

mereka, selama itu pula mustahil mengharapkan mereka terlibat secara aktif dan konstruktif terhadap proses 'demokratisasi yang berkedaulatan rakyat', setidaknya secara teoritis. Meskipun demikian, harapan terjadinya perubahan wawasan ideologis itu bukan sama sekali tertutup oleh karena, menurut penelitian CPSM, ternyata Ornop tidak selalu unitary dan monolitik, sebaliknya seringkali terdapat elemen-elemen pro-demokrasi yang progressif di dalam kebanyakan Ornop model ini, walaupun posisi di dalamnya masih marginal dan kekuatannya belum terlalu besar.

²⁵ Secara implisit teori ini memiliki pra-anggapan yang sama dengan liberalisme klasik bahwa masyarakat pada dasarnya 'mengatur dirinya sendiri' (*self-regulating*). Persaingan antar individu untuk mengejar kepentingan sendiri diatur oleh '*the invisible hand*' lewat mekanisme pasar. Masyarakat adalah sistem *homeostatis* yang hanya mempunyai kebutuhan minimal atas peran negara, atau bahkan sebenarnya tidak ada satupun upaya yang harus dilakukan oleh negara.

²⁶ Ornop ini menyebut dirinya sebagai 'pendamping rakyat' *vis-a-vis* negara. Kelompok Ornop ini berusaha mencari dan menciptakan ruang bagi 'penyadaran sosial dan politik, analisa struktural dan kepedulian tentang hak-hak dasar (HAM), dan demokrasi, serta berinteraksi secara keras dengan pemerintah untuk mempengaruhi, membujuk, dan bilamana perlu menantang dan melawan. Kelompok ini menganggap dirinya mengemban misi untuk: (a) membela rakyat yang memperoleh perlakuan sewenang-wenang dan tidak adil dari negara, (b) melakukan kontrol terhadap tindakan negara yang a-demokratis, melecehkan dan melanggar HAM, atau mendesak negara sampai ke titik di mana '*negara hanya berperan sejauh perlu, dan tidak berperan sejauh mungkin*'; (c) melakukan proses pemberdayaan masyarakat agar mampu melindungi diri dari tindak kesewenang-wenangan negara, atau mendorong (memfasilitasi, menyediakan peralatan bagi) rakyat untuk mengambil peran (partisipasi) sejauh mungkin, dan memiliki akses terhadap sumber-daya dan proses pengambilan keputusan sejauh mungkin. Dalam kasus 'rancangan Keppres LSM' seperti yang disebut di atas, kelompok Ornop ini berpandangan bahwa 'regulasi' seperti 'rancangan Keppres' itu dianggap tidak perlu, karena pada dasarnya Ornop (atau masyarakat) adalah 'mengatur diri sendiri' (*self-regulating*). Ornop ini secara tegas menentang 'rancangan Keppres' itu, dan akan menyerukan atau melakukan aksi '*civil disobedience*' bilamana rancangan itu benar-benar direalisasikan. Kelemahan Ornop ini, seperti yang dikhawatirkan oleh kubu Gramscian, adalah bahwa demokratisasi yang dilakukan dapat terjerumus ke dalam 'bias ideologi' karena perjuangannya tidak diletakkan dalam perspektif perjuangan kelas tertindas, dan 'bias kelas menengah' karena tidak menempatkan kelompok akar-rumput sebagai basis gerakannya.

²⁷ Masyarakat teremansipasi sehingga memiliki kapasitas otonom dan manajemen yang *non-coercive* untuk mengatur dirinya pandangan ini, sebagaimana telah disebutkan, mengatakan bahwa negara dan masyarakat sipil adalah segi-segi dari supra-struktur, sehingga saling berhadapan dalam kontradiksi. Menurut kubu ini, Ornop haruslah 'menyatu dengan kelompok basis' dan melakukan model pendekatan '*empowerment at the grass-roots*'. Kelompok ini sangat menekankan 'peningkatan kesadaran' dan 'kepedulian akan hak', melakukan kegiatan tatap muka secara informal mendorong gerakan rakyat, dan kurang menggantungkan pada perubahan kebijaksanaan pemerintah. Demokratisasi, dalam pandangan Ornop ini, bukanlah dilakukan dengan memperkuat masyarakat sipil, melainkan haruslah secara tegas diletakkan di dalam perjuangan kelas yang tertindas (*mustadza'fin*) untuk membebaskannya. Sikap kelompok Ornop ini terhadap 'rancangan Keppres LSM' adalah bahwa 'regulasi' itu 'dianggap tidak ada' karena tidak relevan bagi 'gerakan rakyat' di tingkat akar-rumput.

bukannya konformitas; (b) sumber dana; (c) organisasi, termasuk manajemen teknis dan sumber-daya manusia; dan (d) partisipasi di dalam debat kebijakan dan masukan untuk mengambil kebijakan. Oleh karena itu terdapat berbagai kemungkinan hubungan antara Ornop dengan pemerintah: (a) 'pembiaran' karena azas otonomi Ornop diterima pemerintah; (b) promosi dan fasilitasi aktif kegiatan Ornop; (c) kolaborasi dan kooperasi; (d) kooptasi dan inkorporasi; (e) penahanan dan penghancuran. Rikker [1993] melihat bahwa pola kolaborasi dan koooperasi, serta kooptasi dan inkorporasi paling banyak terjadi. Jadi pada umumnya Ornop menerima hegemoni negara secara sukarela atau 'menginternalisasikan negara ke dalam dirinya'²⁸

Ornop dan Masyarakat Sipil?

Masyarakat

- Konsep mengenai 'masyarakat' seringkali di dianggap salah satu konsep yang nampaknya berarti apa saja dan bukan apapun [Brittan, 1985], atau 'masyarakat' seringkali dianggap memiliki batas-batas sama dengan negara-bangsa [Kuper & Kuper, 1985]²⁹. Untuk menghindari kesulitan seperti ini, beberapa ahli Marxis, telah mengganti istilah 'masyarakat' dengan istilah 'formasi sosial' (*'social formation'*), tetapi pada prakteknya dua istilah ini sama [Abercrombie et.al, 1984].
- Di dalam sosiologi³⁰, 'masyarakat' dilihat secara luas dan sempit. Di dalam arti yang luas, masyarakat dilihat sebagai satu kerangka atau keseluruhan di mana di dalamnya manusia terikat di dalam hubungan-hubungan sosial. Masyarakat sebagai satu keseluruhan lebih dari sekedar 'latar-belakang', ia dilihat sebagai pembentuk dari semua perilaku orang (*human conduct*). Masyarakat, dari sudut pandang ini, nampaknya bertindak sebagai satu kekuatan menentukan yang luar biasa. Manusia dilahirkan ke dalam satu rangkaian hubungan sosial yang telah ada (*a ready made set of social relationships*) yang mendominasi kehidupan mereka secara menyeluruh³¹. Dalam artinya yang paling lemah dan sempit, 'masyarakat' dianggap sebagai semacam 'setting' bagi satu pertunjukan di mana pusat perhatiannya pada tujuan (*intension*) dan tindakan dari pelaku (aktor). Dengan kata lain, masyarakat dianggap sebagai satu lingkungan sosial yang meliputi *agregasi* dari seluruh orang sebegitu rupa sehingga mereka mempengaruhi dan membentuk tingkah laku tertentu dari orang.
- Konsep 'masyarakat' sulit dirumuskan dan biasanya yang ada adalah rumusan yang kabur. Sejarah sosiologi dipenuhi oleh berbagai ragam upaya untuk mencapai satu

²⁸ 'Internalisasi ke dalam negara' ini dilakukan lewat lewat (a) penamaan dirinya dengan sebutan LSM, (b) memperlakukan diri sebagai perpanjangan tangan pemerintah (negara korporatis), dan (c) penerimaan 'ideologi developmentalisme' yang dianut negara [CPSM,1993].

²⁹ Para ahli sosiologi pada prakteknya sering menggunakan istilah sehari-hari ini, padahal pendapat seperti itu dianggap tidak memadai, karena masyarakat tidak selalu berhubungan dengan batas-batas politik (sebagaimana terjadi di dalam 'masyarakat Palestina') [lihat Abercrombie et.al, 1984: 231-232].

³⁰ Sosiologi diharapkan menjadi 'kajian mengenai masyarakat' [Kuper & Kuper,1985] dan menganalisis masyarakat yang dapat diperlakukan pada setiap tingkat (misalnya, interaksi diadik, kelompok sosial, organisasi luas atau keseluruhan masyarakat). [Abercrombie et.al., *Dictionary of Sociology*, London, Penguin Books, 1984, pp. 231-232].

³¹ Sejak dari bayi yang baru lahir sampai ke liang kubur orang disosialisasikan oleh masyarakat, atau, lebih tepatnya, oleh agen-agen di dalam masyarakat. Sudah barang tentu, definisi yang kuat ini biasanya dikualifikasikan oleh pengangkatan konteks sosial tertentu. Meskipun kita berbicara tentang dunia atau masyarakat internasional, para ahli ilmu-ilmu sosial cenderung memusatkan pada masyarakat tertentu. Jadi, misalnya, masyarakat Inggris adalah satu totalitas (keseluruhan) yang relevan bagi ahli sosiologi Inggris. Dengan demikian, adalah masyarakat tertentu yang biasanya diberi penjelasan utama di dalam analisis social [Brittan, 1985].

rumusan yang memuaskan³². Ahli-ahli teori sosial telah berupaya untuk mengkonseptualisasikan ‘masyarakat’³³, sebagai berikut:

- (1) *Masyarakat sebagai struktur (society as structure)*³⁴.
- (2) *Masyarakat sebagai yang selalu berulang terjadi (society as recurrence)*³⁵.
- (3) *Masyarakat sebagai kontradiksi (society as contradiction)*³⁶.
- (4) *Masyarakat sebagai kebudayaan (society as culture)*³⁷.
- (5) *Masyarakat sebagai proses (society as process)*³⁸.

- Pada satu setengah dasawarsa terakhir abad 20, beberapa ahli mengenai ‘Teori yang Membebaskan’ (*Liberating Theory*) mencoba mengembangkan satu perspektif baru tentang ‘masyarakat’, yaitu yang mereka sebut sebagai perspektif yang bersifat *monistis, pluralis, dan holistis* (Albert et.al., 1986).

³² Diskusi klasik Durkheim atas ‘masyarakat’ sebagai satu keberadaan yang bersifat eksternal terhadap individu telah memiliki pengaruh lama dan kuat pada banyak ahli sosiologi. Pendakuannya bahwa pengetahuan dan individualitas secara fundamental berasal dari sosial masih tetap cenderung mendominasi pemikiran sosial. Lebih dari itu, di dalam diskusi-diskusi mutakhir subyektivitas dan intensionalitas telah diperlakukan sebagaimana hal itu keseluruhannya bersifat sosial. Masalahnya dengan cara berpikir seperti ini adalah bahwa hal itu cenderung menjadikan ‘masyarakat’ sebagai satu benda (*a thing*) yang merejifikasikan proses dengan mengisinya dengan satu kehidupan mereka sendiri [lihat Brittan, 1985].

³³ Semua strategi ini secara implisit atau eksplisit mengandung anggapan (asumsi) tentang sifat-sifat manusia dan individu. Beberapa teori mutakhir telah menolak secara penuh individu sebagai satu datum bagi analisis sosial [Althusser, 1969; Foucault, 1972]. Meskipun demikian, oposisi antara individu dengan masyarakat tetap menjadi satu tema kesadaran populer dan akademis, khususnya di dalam konteks dari kepedulian kontemporer mengenai serangan dadakan bahwa birokrasi dan negara telah masuk ke dalam sphere individu. Perbedaan lama antara ‘negara’ dan ‘masyarakat’ sulit dipelihara di dalam satu periode di mana negara kelihatannya masuk ke dalam setiap segi kehidupan sosial [Brittan, 1985].

³⁴ Ahli sosiologi arus utama cenderung untuk mentakrifkan ‘masyarakat’ sebagai struktur, yaitu, satu jejaring yang dapat dikenal dari lembaga-lembaga (*institutions*) yang saling berhubungan. Kata ‘dapat dikenal’ (*recognizable*) adalah krusial di dalam konteks ini, karena hal itu menyarankan bahwa cara di mana masyarakat berbeda satu dengan lainnya tergantung pada kebiasaan (*manner*) di mana lembaga-lembaganya yang tertentu saling berhubungan (*interconnected*) [Brittan, 1985].

³⁵ Pemikiran bahwa masyarakat distrukturkan tergantung pada reproduksinya sepanjang waktu. Di dalam hal ini istilah ‘lembaga’ (*institution*) adalah krusial. Bentuk ‘terlembagakan’ (*institutionalized*) dari perilaku sosial (*social conduct*) mengacu ke cara-cara kepercayaan (*modes of belief*) dan tingkah laku yang terjadi dan terjadi-ulang (*recur*) atau ... yang diproduksi-ulang secara sosial (*socially reproduced*) [Giddens, 1982]. Oleh karenanya, meskipun masyarakat Inggris terus-menerus berubah, misalnya, dapat dikenali ciri-ciri utamanya karena hal itu diproduksi-ulang di dalam bentuk yang terlembagakan (*institutionalized*).

³⁶ Dalam pandangan bahwa ‘masyarakat’ distrukturkan dan diproduksi-ulang tidak digambarkan mengapa dan bagaimana distrukturkan dan direproduksi. Pandangan Marxis mencoba memberikan satu basis untuk memahami bagaimana formasi tertentu muncul dan berkaitan dengan cara produksi tertentu (*particular modes of production*). Dalam hal ini, masyarakat bukanlah satu struktur yang statis dan berkembang damai secara gradual, melainkan dilihat sebagai pemecahan sementara (*tentative solution*) atas konflik yang muncul dari hubungan sosial antagonistik dari produksi. Jadi masyarakat kapitalis selalu merupakan proses yang ditransformasikan oleh ketegangan dan kontradiksi yang secara implisit ada di dalam cara produksi [Marx, 1913].

³⁷ Seringkali, ahli-ahli ilmu-ilmu sosial menekankan segi-segi budaya dari hubungan sosial. Dalam melakukan hal itu, dilihat bahwa masyarakat dimungkinkan oleh adanya pemahaman yang sama (*shared understanding*) dari anggota-anggotanya. Manusia berada di dalam satu universe linguistik dan simbolik yang telah mereka bangun sendiri, sehingga ‘masyarakat’ diperlakukan sebagai satu sistem simbolik dan komunikasi yang amat kompleks. Penekanan pada kebudayaan ini terkait dengan pemikiran bahwa masyarakat adalah didukung oleh gagasan (*ideas*) dan nilai-nilai [Weber, 1930; Parsons, 1968]. Ada satu masalah yang terus-menerus terjadi (*perennial*) dari analisis sosial ini yaitu pembedaan analitis antara kebudayaan dengan masyarakat.

³⁸ Pandangan ini menekankan terus-menerus berlangsungnya interaksi orang yang satu dengan yang lainnya. Istilah kuncinya adalah ‘perundingan’ (*negotiation*), ‘diri – yang lain’ (*self-other*), ‘reflexivity’. Implikasinya adalah bahwa ‘masyarakat’ dinyatakan dan dinyatakan-ulang (*constitute and reconstitute*) di dalam interaksi sosial. Masyarakat tidaklah dipaksakan pada orang di dalam definisi prosessual; melainkan masyarakat harus diterima dan dikonfirmasi oleh partisipannya. Setiap episode interaksi di dalamnya berisi kemungkinan inovasi dan perubahan. Jadi berlawanan dengan pandangan masyarakat yang dilihat sebagai satu ‘struktur’, pandangan proses mendesak (*assert*) bahwa orang ‘membuat’ struktur (Mead, 1934; Goffman, 1959; Garfinkel, 1967). Gagasan ini bisa mengaitkan pandangan proses atas masyarakat dengan pandangan Marxisme yang humanistik.

- (1) Perspektif monistis pada dasarnya bersifat *reduksionis* karena beranggapan bahwa hubungan-hubungan sosial yang penting berakar pada satu determinan (misalnya ekonomi, negara atau politik, kebudayaan, atau *gender*) yang merupakan kekuatan penggerak sejarah. Marxist idealis ortodoks melihat bahwa ekonomi dan hubungan-hubungan kelas sebagai alat untuk menjelaskan semua bentuk dominasi, tidak saja dominasi ekonomi, akan tetapi juga dominasi seksual, rasial, politik. Demikian feminis idealis, yang hanya melihat pada *gender*, sedangkan nasionalis idealis melihat pada kebudayaan, dan anarkis idealis melihat pada negara (Albert et.al., 1986:6).
- (2) Perspektif pluralis menolak monistis yang reduksionitis dan terlalu berlebihan menekankan hanya pada satu faktor determinan tunggal seraya mengabaikan dinamika faktor-faktor yang lain. Misalnya dengan hanya menggunakan konsep kelas saja akan mengalami banyak kesulitan untuk menjelaskan kehidupan pabrik sehari-hari, dan bahkan hanya dengan menggunakan konsep itu saja akan sulit memahami sistem ekonomi, dan sistem masyarakat. Para penganut faham pluralis ini mencoba menghindari distorsi seperti itu.
- (3) Perspektif holistik memandang bahwa bagian-bagian dari realitas bekerja bersama untuk membentuk anyaman keseluruhan. Dalam terminologi ahli ilmu alam David Bohm, semua gejala 'seharusnya dipahami tidak sebagai bagian-bagian yang bebas dan keberadaannya tetap... melainkan sebagai hasil yang telah dibentuk didalam keseluruhan gerak dan yang pada akhirnya mencari kembali menjadi gerakan'.

Masyarakat Sipil

- Di dalam ilmu-ilmu sosial, tidak ada kesepakatan pemisahan teoritis dan empiris antara hubungan politik, ekonomis dan sosial [Abercrombie et.al.,1984]. 'Masyarakat sipil' sebagai istilah dan konsep teoritik masih terus berkembang, dan paling tidak istilah atau konsep itu dipergunakan dalam berbagai pengertian³⁹. Pada abad 18, A. Ferguson (1767) memperlakukan 'masyarakat sipil' sebagai masalah '*civility*' dan sebagai akibat dari '*civilisasi*', dan juga memperlakukan 'masyarakat sipil' sebagai istilah politik, yang mengkontraskan pemerintahan Barat dengan despotisme Timur (*oriental despotism*). Istilah itu juga mempunyai konotasi ekonomi dalam arti '*civilisasi*' dikontraskan dengan masyarakat (negara barbarik) di mana kepemilikan pribadi (*private property*) tidak ada⁴⁰. Istilah 'masyarakat sipil' akhirnya sampai ke dalam ilmu sosiologi⁴¹ lewat analisis dari G. Hegel dan K. Marx.

³⁹ Pergeseran makna dari konsep 'masyarakat sipil' menunjukkan perubahan sikap teoritis terhadap hubungan antara ekonomi, masyarakat dan negara.

⁴⁰ Ferguson (1767) memahami 'masyarakat sipil' sebagai 'suatu visi etis dalam kehidupan bermasyarakat' untuk melihat perubahan sosial yang diakibatkan oleh revolusi industri dan berkembangnya kapitalisme. Ekonomi pasar telah menggusur tanggung jawab sosial seraya mengejar pemuasan kepentingan pribadi. Oleh karena itu 'masyarakat sipil' mencoba mengembalikan semangat publik dan solidaritas sosial seraya menangkak munculnya kembali *despotisme*.

⁴¹ Sosiologi muncul dari ekonomi politik, filsafat sosial dan 'statistik moral', maka ia menjelajah wilayah fenomena interaksi sosial, simbolik dan normatif yang terjadi di dalam 'masyarakat'/'*society*', sementara itu hubungan politis (negara, kekuasaan, pemerintahan, partai politik, dsb.) dibiarkan tetap menjadi ranah ilmu politik, dan ekonomi menjadi ilmu pengetahuan tentang produksi dan distribusi sumber-sumber ekonomi. Berlawanan dengan kecenderungan perbedaan intelektual ini, sosiologi juga dapat diperlakukan sebagai satu sintesis yang mencoba mengintegrasikan gejala politik, ekonomi, dan sosial (sebagaimana dikemukakan oleh A. Comte). Di dalam Marxisme juga ada ambivalensi yang sama. Di dalam metafora basis dan superstruktur, basis ekonomi dikontraskan dengan superstruktur hukum, hubungan politik dan sosial. Sebaliknya, diargumentasikan

- Hobbes dan Locke menggunakan istilah itu sebagai satu tahapan evolusioner dari masyarakat alamiah (*natural society*), di mana ‘masyarakat sipil’ dianggap sama dengan negara yang berfungsi sebagai pelindung kebebasan dan hak warga negara, karena manusia terlibat di dalam konflik terus-menerus (*homo homini lupus*). Bagi Hobbes, negara harus mempunyai kekuasaan mutlak untuk melakukan kontrol atas warga negara; sedangkan Locke menolak pandangan itu, karena warga negara memiliki hak untuk menolak kekuasaan negara, jika negara tidak menjamin kebebasan dan tidak melindungi hak warga negara. Hegel [1873] melihat ‘masyarakat sipil’ sebagai ‘*buergerliche gesellschaft*’, yaitu ranah individual dan kepentingan pribadi, yang dipergunakan untuk memenuhi kepentingan individu dan kelompok, sehingga kemakmuran masyarakat secara keseluruhan diabaikan. ‘Masyarakat sipil’ menjadi satu lembaga perantara (*intermediate institution*) antara keluarga dan hubungan politik di dalam negara. Sebaliknya negara memiliki pandangan meliputi yang akan membawa manusia menuju kemakmuran bersama. Oleh karenanya negara mewakili kepentingan umum dan berada di atas masyarakat, di mana individu harus tunduk.
- Marx, sekalipun tetap mempertahankan pandangan Hegel mengenai masyarakat sipil, membalikkan pandangan Hegel tentang negara karena. Di dalam *The German Ideology* [1845b], Marx dan Engels⁴² berpendapat bahwa ‘masyarakat sipil adalah sumber-sumber yang sebenarnya dan drama dari semua sejarah’, yaitu, penjelasan mengenai peristiwa politik, perubahan legal dan perkembangan kebudayaan yang dilihat di dalam perkembangan struktur dari masyarakat sipil. Bagi Marx, negara tidaklah berada di atas masyarakat melainkan merupakan perwujudan dari struktur masyarakat, karena negara dianggap sebagai pelaksana dari kelas (borjuis) yang memerintah.
- Konsepsi Marxis diadopsi oleh Gramsci (1971) yang berpendapat bahwa ‘masyarakat sipil’ merupakan wilayah dari kehidupan sosial yang muncul sebagai ranah warga negara pribadi dan kerelaan (*consent*) individual, yang terletak diantara *sphere* hubungan memaksa (*coercive relation*) dari negara dengan *sphere* produksi ekonomi. ‘Masyarakat sipil’ dan negara adalah segi-segi dari supra-struktur yang keduanya tidak saling bertentangan (negara merupakan segi kekuasaan, masyarakat sipil mencerminkan segi kebudayaan di mana hegemoni kelas penguasa ditanamkan)⁴³. Pandangan lain adalah bahwa ‘masyarakat sipil’ sebagai kekuatan penyeimbang dari kekuatan negara, sebagaimana yang dikemukakan oleh Alexis de Tocqueville. ‘Masyarakat sipil’ dilihat sebagai ranah kehidupan sosial yang terorganisasikan yang bercirikan kesukarelaan, keswasembadaan, keswadayaan, kemandirian dalam berhadapan dengan negara [Hikam, 1996].
- Belum ada kajian yang luas ataupun mendalam mengenai bagaimana pandangan Ornop terhadap masyarakat dan masyarakat sipil. Akan tetapi di dalam berbagai diskusi para aktivis dan ahli seringkali muncul tanda yang kuat menonjolnya pandangan Hegelian (Budiman, 1990), dalam arti ada kecenderungan kuat bahwa

bahwa, misalnya, hubungan produksi secara serentak bersifat hubungan sosial, ekonomi dan legal [Abercrombie et. al., 1984]

⁴² Di dalam karya Marx dan Engels, jarang dapat ditemukan istilah ‘masyarakat sipil’. Mereka berpendapat bahwa ada dikotomi yang lebih mendasar antara ‘masyarakat sipil’ (hubungan sosio-ekonomis secara menyeluruh dan kekuatan-kekuatan produksi) dengan negara sebagai perwujudan superstruktur dari hubungan kelas di dalam masyarakat sipil [Abercrombie et. al., 1984].

⁴³ Rumusan Gramsci mengenai hubungan antara ekonomi, masyarakat dan negara dalam arti dua yang kontras antara kehidupan pribadi dan publik, kerelaan (*consent*) dan paksaan (*coercion*) telah memainkan peran yang fundamental di dalam analisis Marxis kontemporer mengenai ideologi dan kekuasaan (*power*). Pengaruh ini khususnya terlihat di dalam kontras antara ‘*ideological state apparatus*’ dan ‘*repressive state apparatus*’ di dalam karya L. Althusser [lihat Althusser, Louis, *Ideology and Ideological State Apparatus (Notes Towards an Investigation)* dalam Hanhardt, John G., *Video Culture: A Critical Investigation*, New York, Visual Studies Workshop Press, 1986, pp.56-95].

negara dihadap-mukakan kepada masyarakat sipil sebagai dua instansi yang saling berlawanan. Implikasi dari padangan seperti itu adalah bahwa, misalnya, demokrasi akan terwujud bilamana masyarakat sipil diperkuat.

Ornop dan Demokrasi

Demokrasi

- Pembahasan tentang demokrasi pada umumnya selalu cenderung diletakkan di dalam konteks interaksi antara negara dan masyarakat sipil⁴⁴, sehingga demokratisasi dimengerti sebagai satu proses memperkuat masyarakat sipil. Pandangan ini benar dalam konteks definisi masyarakat sipil sebagai masyarakat dengan hak-hak dasarnya; tetapi bilamana diletakkan dalam interpretasi Gramscian, maka upaya memperkuat masyarakat sipil tidak serta merta sama dengan demokratisasi yang berpihak pada rakyat tertindas di mana kedaulatan rakyat benar-benar menjadi kenyataan. 'Demokrasi yang berkedaulatan rakyat' memang terdengar agak 'redundant', akan tetapi istilah itu menjadi bermakna bilamana istilah itu dipergunakan untuk menyebut proses demokratisasi yang berpihak pada dan datang dari rakyat lapis bawah sekaligus membedakannya dengan demokrasi yang telah dinikmati oleh lapisan menengah dan datang dari atas (cf. Wiradi, 1994).
- Robert Dahl merumuskan tatanan politik demokrasi⁴⁵ dengan menggunakan dua dimensi, yaitu: (1) seberapa tinggi tingkat kontestasi, kompetisi atau oposisi yang dimungkinkan; dan (2) seberapa banyak warga negara memperoleh kesempatan berpartisipasi dalam kompetisi politik itu. Sistem demokrasi mencerminkan mekanisme politik yang dianggap bisa menjamin adanya pemerintah yang tanggap terhadap preferensi dan keinginan warga negaranya. Untuk itu rakyat harus diberi kesempatan untuk: (1) merumus preferensinya atau kepentingannya sendiri; (2) memberitahukan preferensinya itu kepada sesama warga negara dan kepada pemerintah melalui tindakan individual maupun kolektif; dan (3) mengusahakan agar kepentingan itu dipertimbangkan secara setara dalam proses pembuatan keputusan pemerintah, artinya tidak didiskriminasikan berdasar isi atau asal-usulnya. Kesempatan (bagi rakyat) hanya mungkin tersedia kalau lembaga-lembaga dalam masyarakat menjamin adanya berbagai kondisi⁴⁶. Dengan kata singkat demokrasi adalah masalah

⁴⁴ Dengan anggapan bahwa bilamana masyarakat sipil nisbiah kuat *vis-a-vis* negara, maka demokrasi dianggap menang; demikian juga sebaliknya bilamana negara kuat dan masyarakat sipil lemah, maka dianggap demokrasi kalah.

⁴⁵ Dahl menggunakan istilah 'poliarki'; sedangkan demokrasi didefinisikan sebagai: 'suatu sistem pemerintahan yang memenuhi tiga sarat pokok: kompetisi yang sungguh-sungguh dan meluas diantara individu-individu dan kelompok-kelompok organisasi (terutama partai politik) untuk memperebutkan jabatan-jabatan pemerintahan yang memilik kekuasaan eksekutif, pada jangka waktu yang reguler dan tidak melibatkan penggunaan daya paksa; partisipasi politik yang melibatkan sebanyak mungkin warga negara dalam pemilihan pemimpin atau kebijakan, paling tidak melalui pemilihan umum yang diselenggarakan secara reguler dan adil, sedemikian rupa sehingga tidak satupun kelompok sosial (warga negara dewasa) yang dikecualikan; dan satu tingkat kebebasan sipil dan politik, yaitu kebebasan berbicara, kebebasan pers, kebebasan untuk membentuk dan bergabung ke dalam organisasi, yang cukup untuk menjamin integritas kompetisi dan partisipasi politik' (Diamond, et.al., 1990: 6-7; dikutip dari Mas'ood, 1994)".

⁴⁶ Kondisi itu adalah: (1) kebebasan untuk membentuk dan bergabung dalam organisasi; (2) kebebasan mengungkapkan pendapat; (3) hak untuk memilih dalam pemilihan umum; (4) hak untuk menduduki jabatan publik; (5) hak para pemimpin untuk bersaing memperoleh dukungan suara; (6) tersedianya sumber-sumber informasi alternatif; (7) terselenggaranya pemilihan umum yang bebas dan jujur; (8) adanya lembaga-lembaga

pengendalian atas asets politik dan ekonomi, yang didistribusikan secara luas, dan arus informasi yang terbuka, sehingga ada kemajuan yang merata dan berkesinambungan (Korten, 1987). Oleh karenanya proses 'demokratisasi' memerlukan 'pengembangan organisasi bebas (independen) dan saling terkait dalam satu mozaik yang kompleks di mana orang mendefinisikan dan mengejar kepentingan individu dan kolektif di dalam kerangka kebijakan nasional.

- Di Indonesia dapat dilihat tiga perspektif tentang demokrasi, yaitu:
 - (1) Demokrasi perwakilan atau konstitusional dalam konteks Barat (atau yang disebut dengan 'demokrasi liberal'), yang didasarkan pada pemilihan kompetitif dan terbuka yang menghasilkan pilihan perwakilan/wakil-wakil yang bertanggung jawab kepada rakyat pemilih (paling tidak di dalam prinsip);
 - (2) Demokrasi Pancasila, yang bertumpu pada proses musyawarah dan mufakat (paling tidak demikianlah yang selalu diklaim); dan
 - (3) Demokrasi Kedaulatan Rakyat, yang sering dikaitkan dengan kubu kiri⁴⁷.

Pandangan Ornop terhadap Demokrasi

- Pandangan Ornop dalam proses 'demokratisasi yang berkedaulatan rakyat' itu akan bergantung pada definisi mereka tentang masyarakat, yaitu apakah didasarkan pada pandangan konsensus⁴⁸ dan pandangan konflik⁴⁹, meski sebenarnya terdapat berbagai varian, misalnya saja model konsensus memiliki varian-varian antara lain model 'karitatif', model 'developmentalistik', dan model 'reformistis'. Sehubungan dengan perspektif demokrasi yang terdapat di Indonesia, Ornop bersikap ambivalen terhadap perspektif demokrasi perwakilan (atau demokrasi 'liberal'). Pada umumnya Ornop merasa kurang 'sreg' (kurang pas) dengan sisi individualistik yang ditonjolkan di dalam ideologi demokrasi liberal ini. Disamping itu nampak tidak ada legitimasi kultural bagi model politik yang diberi cap liberal atau barat ini. Ornop cenderung memilih perspektif 'demokrasi Pancasila' yang bertumpu pada azas musyawarah dan

yang menjamin agar kebijaksanaan publik tergantung pada suara dalam pemilihan umum dan pada cara-cara penyampaian preferensi yang lain (Dahl, 1973--dikutip dari Mas'ood, 1994).

⁴⁷ Berkaitan dengan perspektif demokrasi yang terakhir ini terdapat dua model. Pertama, model Hatta, yaitu demokrasi kedaulatan rakyat dalam arti bahwa pemerintah bertanggung jawab lewat legislatif yang dipilih (sistem perwakilan); dan kedua model Tan Malaka, yang bertumpu pada aksi massa langsung (di Barat disebut dengan *anarcho-syndicalist*), di mana pengambilan keputusan dilakukan lewat aksi atau partisipasi langsung massa. 'Demokrasi kedaulatan rakyat', meski sudah ada sejak lama tetapi kemudian mati terlihat mulai muncul di beberapa Ornop radikal dewasa ini. Berkaitan dengan ini nampak ada konvergensi antara Ornop yang radikal dan Ornop arus utama pada tuntutan 'hak berorganisasi' sesuai dengan Ps. 28 UUD'45 [Eldridge, 1995].

⁴⁸ Pandangan konsensus pada dasarnya menganggap bahwa struktur sosial itu merupakan hasil konsensus (kesepakatan) bersama dari anggota masyarakat. Setiap masyarakat pada hakekatnya teratur dan stabil, karena adanya kebudayaan bersama (yakni nilai-nilai, norma-norma, dan tujuan bersama) yang dianut dan dihayati oleh anggota masyarakat. Masalah yang muncul dinilai sebagai penyimpangan dari nilai dan norma bersama, sehingga dianggap membahayakan stabilitas sosial. Dengan demikian pemecahannya selalu diusahakan dalam kerangka tatanan sosial yang ada oleh karena tatanan sosial yang ada harus dipertahankan dan dijunjung tinggi. Model ini menjadi pangkal tolak dari ideologi konservatif, ideologi developmentalisme, dan ideologi liberalisme.

⁴⁹ Berbeda dengan model konsensus, pandangan konflik memandang struktur sosial yang ada sebagai hasil pemaksaan sekelompok kecil anggota masyarakat terhadap mayoritas warga masyarakat, bukannya sebagai hasil kesepakatan bersama. Norma, hukum, dan undang-undang dalam masyarakat adalah ciptaan kelompok elite yang berkuasa untuk mempertahankan kekuasaan, kepentingan dan milik mereka. Model ini selalu mempertanyakan tatanan yang sudah ada dan mapan, dan memandang perubahan sosial dan konflik sebagai positif. Praktek dan tindakan a-demokratis, misalnya, dipandang sebagai akibat dari struktur yang tidak adil, sebagaimana tercermin dari praktek dominasi, penindasan dan eksploitasi, bukannya sebagai akibat dari unsur-unsur internal seperti nilai dan mentalitas. Oleh karenanya program aksi demokratisasi adalah menggalang solidaritas kelompok yang terhegemoni atau tertindas untuk mewujudkan satu tatanan politik, ekonomi, sosial dan budaya yang lebih manusiawi, adil, dan merata lewat pendidikan penyadaran.

mufakat, karena dua alasan, yaitu: demokrasi ini dianggap cocok dengan retorika mereka, dan juga cocok dengan kehidupan sehari-hari mereka. Demokrasi Pancasila diberi makna sesuai dengan pandangan mereka sendiri: tujuan/cita-cita akhir adalah mencari pemecahan bagi kelompok secara keseluruhan daripada bagi segelintir orang/individu.

- Satu hal lagi yang perlu dikemukakan sehubungan dengan persoalan demokrasi dan masyarakat sipil. Tafsiran Gramscian yang menyatakan bahwa negara (masyarakat politik) dan masyarakat sipil adalah bagian dari supra-struktur sehingga keduanya tidaklah berhadapan-hadapan, maka perjuangan demokratisasi bukanlah dicapai melalui upaya memperkuat masyarakat sipil, karena masyarakat sipil tidaklah berada di dalam kontradiksi dengan negara. Masyarakat sipil bekerja bergandengan tangan dengan negara untuk memperkuat sistem sosial yang dominan yang ada (yakni '*mode of production*'). Di dalam kerangka pikir ini, demokrasi dapat berkembang bilamana kelas penguasa yang sedang berkuasa berpikir perlunya mendemokratisasi sistem politik untuk memperkuat hegemoninya. Demokrasi adalah satu fungsi dari perkembangan sejarah sistem sosial yang dominan, bukannya dinamisasi dari masyarakat sipil. Demokrasi tidak selalu berarti adanya kemajuan sejarah atas pembebasan kelas tertindas, karena demokrasi dapat pula berarti hanya berpihak kepada kelas penindas, untuk memperkuat hegemoni dari kelas ini dan negara atas kelas yang tertindas. Oleh karena itu, bagi Gramsci, proses demokratisasi haruslah diletakkan di dalam perspektif perjuangan kelas ini yaitu apakah ia berpihak kepada kelas tertindas atau kelas penindas.

Ornop dan Advokasi

- Di kalangan Ornop di Indonesia, kata *advokasi* itu sering dilekatkan pada satu jenis Ornop yang dianggap banyak melakukan kritik dan bahkan oposisi terhadap pemerintah atau negara, sehingga banyak pula Ornop yang cenderung 'alergi' terhadap kata itu, khususnya pada masa jaya rezim Orde Baru. Sedangkan di kalangan Ornop yang tidak 'alergi' terhadap kata itu, seringkali juga terdapat perbedaan penafsiran yang tajam, di satu pihak kata itu digunakan untuk menunjuk hanya pada berbagai kegiatan yang ditujukan untuk mendorong perubahan kebijakan publik (pemerintah) saja, sehingga upaya pemberdayaan rakyat tidaklah termasuk di dalam pengertian itu; di lain pihak tafsiran lain mengatakan bahwa dalam kata itu tersirat juga adanya kegiatan pemberdayaan.
- Ornop 'developmentalistik'⁵⁰ yang terlibat di dalam 'gerakan kesejarahan' [Touraine, 1985]⁵¹ yang dipimpin oleh rezim 'developmentalis-modernis' yang dikemudikan oleh militer [Hadiz, 1992] secara eksplisit menganggap dirinya sebagai 'mitra pemerintah' atau bahkan 'kepanjangan tangan pemerintah' [CPSM, 1994]. Ornop **ini tidak**

⁵⁰ Fakih [1996] menyebutnya dengan Ornop 'konformistis'. Ornop yang disindir dengan sebutan 'BINGO' yang berdomisili di Jakarta, dengan amat sedikit perkecualian, kebanyakan masuk di dalam kategori Ornop ini

⁵¹ 'Gerakan kesejarahan' (*historical movement*) adalah gerakan yang dilakukan oleh negara sebagai aktor utama dalam perubahan sosial, baik atas nama borjuasi nasional ataupun borjuasi asing, maupun atas nama negara nasional atau negara asing, sehingga peran campur-tangan negara menjadi lebih besar daripada peran prakarsa masyarakat. Gerakan kesejarahan ini, oleh Touraine, dibedakan dengan 'gerakan sosial' dan 'gerakan kebudayaan' di mana pelaku utamanya adalah kelas-kelas atau kelompok-kelompok sosial di dalam masyarakat [lihat Touraine, A., *Social Movement and Social Change*, dalam Orlando False (ed.), *The Challenge of Social Change*, London, Sage, 1985]

mengenal konsep dan oleh karena itu menolak kegiatan advokasi, yang diberi arti sangat sempit dan negatif sebagai tindakan-politis oposisi terhadap negara.⁵²

- Ornop 'reformatoris' pada umumnya memberi tafsiran atas advokasi sebagaimana tafsir aliran liberal⁵³. Inti dari tafsir ini adalah bahwa tatanan politik, ekonomi, dan sosial yang ada dianggap sudah layak dan benar, dan masalah yang ada adalah masalah penyimpangan dari pelaksanaan aturan-aturan yang telah ada. Lembaga-lembaga politik yang ada sudah layak, hanya tidak berfungsi, pelaksanaan perekonomian menyimpang dari prinsip-prinsip ekonomi pasar persaingan bebas, dan praktek sosial tidak dilandasi oleh aturan hukum yang disepakati bersama. Oleh karena itu advokasi, antara lain, adalah 'penegakan hukum' (*law enforcement*).
- Ornop 'transformatoris' memberi takrif 'advokasi' lebih radikal, karena menganggap bahwa tatanan sosial dan politik itu diciptakan oleh kelas yang berkuasa sehingga tidak adil bagi rakyat. 'Advokasi' bagi Ornop ini adalah kegiatan oleh-kekuasaan yang ditujukan pada penyelenggara kekuasaan negara, pemegang kekuasaan ekonomi, dan tatanan masyarakat sipil dengan tujuan agar terjadi perubahan pada tataran '*infrastruktur*', '*struktur sosial*', dan '*suprastruktur ideologis*' sehingga tercipta '*global good governance*'. Ornop jenis ini jumlahnya tidak terlalu banyak.

Ornop dan Pemberdayaan Rakyat

- Upaya melawan perampasan daya masyarakat yang dilakukan secara sistematis⁵⁴ pada skala lokal dilakukan oleh Ornop, meskipun tidak berarti bahwa Ornop adalah satu-satunya pelaku yang melakukan hal itu. Upaya itu meliputi suatu pentakrifan-ulang peran antara negara dan masyarakat sipil, dan antara masyarakat sipil dengan korporasi ekonomi, dengan perhatian khusus diberikan pada bentuk partisipasi politik yang baru di dalam perencanaan, tindakan komunal, organisasi ekonomi, dan hubungan *gender* di dalam rumah tangga dan di dalam komunitas politik. Ada tiga dimensi pemberdayaan, menurut Friedmann (1992), yakni masing-masing berkaitan dengan kekuasaan sosial, politik, dan psikologis.
- **Kekuasaan sosial** (*social power*) berkaitan dengan akses kelompok-kelompok basis (antara lain rumah tangga, serikat buruh, koperasi rakyat) kepada informasi, pengetahuan dan ketrampilan, partisipasi di dalam organisasi sosial, dan sumber keuangan. Jika kelompok-kelompok basis itu meningkatkan aksesnya pada berbagai hal itu, maka kemampuannya untuk merancang dan mencapai tujuan juga meningkat.

⁵² Sebagai contoh nyata adalah sikap Ornop jenis ini pada masa jaya Suharto ketika pemerintah pada tahun 1994 berkeinginan menerbitkan 'Keppres untuk mengatur LSM'. Ornop jenis ini menentang rencana aksi advokasi yang akan digelar oleh komunitas Ornop, dengan alasan bahwa: (a) 'rancangan Keppres' itu adalah 'itikad baik pemerintah', (b) negara memang berhak mengatur kehidupan Ornop lewat undang-undang, (c) kegiatan advokasi semacam itu bersifat politis, padahal Ornop seharusnya tidak berpolitik, (d) kegiatan advokasi itu bersifat oposisional terhadap negara dan pemerintah, padahal seharusnya Ornop berfungsi sebagai 'mitra pemerintah' di dalam pembangunan, dan (e) Ornop bahkan seharusnya ikut di dalam proses penyusunan aturan itu supaya diperlakukan sebagai subyek. Sebagaimana yang dikatakan Eldrige [1990] 'tetap percaya pada *bureaucratic polity* dan tidak memiliki wawasan struktural'. Dengan demikian, kelompok ini juga hanya menggunakan peluang partisipasi insitusional yang 'negara korporatis' yang bersifat '*compulsary, state directed and non-conflictual*'.

⁵³ Lihat takrif 'advokasi' yang dikemukakan oleh pakar advokasi Cohen [1995] dari negara demokrat liberal seperti AS, sebagaimana yang dikemukakan di halaman 2.

⁵⁴ Friedman [1992] menyatakan bahwa globalisasi kapital telah secara nyata meningkatkan pertumbuhan ekonomi dunia, akan tetapi disamping itu disertai oleh tiga proses penghilangan daya rakyat secara sistematis (*systematic process of disempowerment*), yaitu penghilangan daya politik, sosial, dan psikologis [lihat Friedmann, John, *Empowerment: The Politics of Alternative Development*, Cambridge – Oxford, Blackwell Publisher, 1992]

Peningkatan kekuasaan sosial oleh karenanya juga dapat dimengerti sebagai peningkatan akses kelompok-kelompok basis pada kekayaan produktifnya.

- **Kekuasaan politik** (*political power*) berkaitan dengan akses kelompok-kelompok basis dan anggota-anggota individual rumah tangga ke proses di mana keputusan diambil, khususnya keputusan yang mempengaruhi masa depan mereka sendiri⁵⁵. Kekuasaan politik oleh karena itu bukan hanya kekuasaan untuk memilih; akan tetapi juga merupakan kekuasaan berbicara dan bertindak secara kolektif⁵⁶. Meskipun individu dapat berpartisipasi di dalam politik secara pribadi, suara mereka meningkat tetapi juga dapat lebih efektif jika suara itu bergabung dengan banyak suara lain di dalam perserikatan politik yang lebih luas, yakni partai, gerakan sosial, atau satu kelompok kepentingan seperti serikat buruh atau tani⁵⁷.
- Adapun **kekuatan psikologis** (*psychological power*) sangat berkaitan dengan kesadaran akan potensi individual. Kesadaran akan potensi individual ini terlihat di dalam tingkah laku yang lebih percaya-diri. Oleh karena itu ada dua dimensi pemberdayaan psikologis yaitu yang berkenaan dengan kebebasan-batiniah (*inner freedom*)⁵⁸ dan kebebasan-lahiriah (*outer-freedom*)⁵⁹. Upaya pemberdayaan psikologis pertama-tama diarahkan untuk menguak kesadaran-batiniah yang terdalam untuk mengikis kekuatan

⁵⁵ Di dalam politik-mikro rumah tangga, orang dapat berbicara tentang kekuasaan politik dari anggota-anggota individual, tentang perempuan dan laki-laki, anak-anak, dan orang yang lebih tua.

⁵⁶ Hal ini sebenarnya juga merupakan pengejawantahan dari hak-hak sipil dan politik yang merupakan bagian dari hak azasi manusia. Hak-hak sipil adalah hak kebebasan berpikir dan beragama, hak kebebasan menyatakan pikiran dan pendapat, termasuk akses pada informasi, hak kebebasan berserikat dan berkumpul. Sedangkan hak politik adalah hak untuk ikut dalam proses pemerintahan, hak atas kesempatan yang sama dalam memperoleh pelayanan publik, dan hak untuk ikut serta dalam pemilihan umum.

⁵⁷ Proses pemberdayaan sosial politik memiliki tujuan jangka panjang untuk menyeimbangkan kembali struktur kekuasaan di dalam masyarakat dengan cara membuat tindakan negara lebih dapat dipertanggung-gugat (*accountable*), penguatan kekuatan masyarakat sipil di dalam manajemen atas urusannya sendiri, dan membuat perusahaan ekonomi menjadi lebih bertanggung-jawab secara sosial. Pemberdayaan terutama berupaya secara politik untuk memberikan perlindungan atas kepentingan rakyat, khususnya sektor yang tak-berdaya, perempuan, dan generasi penerus; dan tuntutan itu diletakkan pada berbagai ruang kehidupan baik di tingkat lokal, regional, maupun bangsa. Oleh karena itu, meskipun pemberdayaan itu pada mulanya didasarkan khususnya pada lokalitas, tujuan jangka panjangnya adalah keseluruhan masyarakat lewat tindakan politik pada tingkat nasional dan internasional. Tanpa lompatan kuantum dari lokal ke global ini, pemberdayaan tetap berada di dalam kotak sempit satu sistem kekuasaan yang bersifat sangat membatasi (*restriktif*), dan tidak akan mampu menerobos pembangunan murni yang dicarinya.

⁵⁸ Kebebasan-batiniah berkaitan dengan kebebasan dari segala ketakutan atau kebebasan dari anggapan, kesimpulan, dan kepercayaan, serta konsep yang telah ditakrifkan terlebih dulu dari luar dan oleh orang luar. Kebebasan-batiniah merupakan persoalan pribadi yang penting, dan bahkan dapat tetap terpelihara meski orang terpenjara secara fisik, atau yang berada dalam kondisi yang paling menindas sekalipun. Akan tetapi kebebasan-batiniah ini memberi kemungkinan kepada seseorang untuk memperoleh sebuah kekuatan hidup yang luar biasa bagi pengembangan kehidupan orang itu sendiri, tetapi juga dapat memberikan sumbangan kepada perjuangan orang lain demi sebuah kehidupan yang lebih baik dengan cara yang bermakna.

⁵⁹ Kebebasan-lahiriah adalah kebebasan yang lahir dari upaya luar untuk melindungi rakyat dari kekerasan dan penyalah-gunaan kekuasaan, yakni kebebasan yang muncul dari upaya advokasi. Kebebasan-lahiriah ini akan tercermin dalam perangkat kelembagaan (kaidah normatif, hukum positif) yang tersedia di dalam masyarakat, seperti misalnya yang diungkapkan di dalam rumusan tentang hak-hak sipil dan politik. Itu berarti bahwa kebebasan-lahiriah itu akan dinikmati secara langsung oleh rakyat dan warga negara (*unsur direct enjoyment of rights*), bilamana masyarakat memberikan jaminan atas hak-hak sipil dan politik. Sebaliknya jikalau jaminan semacam itu belum tersedia, maka akan terjadi tuntutan untuk atas hak semacam itu (*assertive exercise of a rights*), sebagaimana yang tercermin dari kegiatan advokasi yang dilakukan oleh banyak Ornop. Tetapi kebebasan-lahiriah ini tidak pernah dapat membantu orang-orang yang terasingkan (*teralienasi*) untuk berkembang dalam kebaikan, atau hidup dalam kebijaksanaan dan keindahan. Dengan kata lain kebebasan-lahiriah tidaklah menyentuh ranah kebebasan-batiniah. Sebaliknya kebebasan batiniah dapat memberikan kehidupan pada kebebasan-lahiriah, dan membuat kedua kebebasan dapat dicapai dan penuh makna.

hegemonis negara atas rakyat⁶⁰. Massa rakyat perlu memiliki kesadaran kritis dalam ‘perang budaya maupun ideologis’ (*cultural and ideological war*) di berbagai tingkatan untuk merebut ‘kepemimpinan moral dan intelektual’ (*moral and intellectual leadership*) dengan menundukkan satu demi satu unsur-unsur masyarakat sipil seperti lembaga pendidikan, media massa, lembaga keagamaan dan sebagainya; dan kedua untuk melawan proses perampasan daya secara sistematis (*systematic process of disempowerment*).

Ornop dan Gerakan Perempuan

Dalam dua dasawarsa terakhir mobilisasi sosial dan politik perempuan mencapai titik zenit dalam sejarah dunia terutama di Amerika Serikat, sehingga gerakan perempuan ini disebut sebagai ‘gelombang kedua’ yang ditandai oleh banyaknya penelitian mengenai kehidupan perempuan⁶¹, atau yang oleh Jessie Bernard disebut sebagai ‘Pencerahan Perempuan’ (*the Feminist Enlightenment*). Teori-teori tentang perempuan yang mencerminkan suatu sistem gagasan umum dan luas mengenai dunia dari satu sudut pandang yang terpusat-pada-perempuan (*a women-centered perspective*) berkembang lewat tiga tahapan (Lengerman & Brantley, 1990):

pertama, perempuan sebagai sasaran kajian, yang memberi tekanan bahwa bersama dengan laki-laki, perempuan secara aktif memproduksi dunia – baik dunia ekonomi, ilmu pengetahuan, seni, agama, dan sebagainya. Pengenalan terhadap rangkaian pelaku secara keseluruhan ini menuntut peninjauan-ulang atas gambaran dan penjelasan mengenai situasi sosial. Pada ujungnya, kesadaran itu memunculkan pertanyaan lanjutan mengenai organisasi dunia sosial, khususnya tentang cara bekerjanya jenjang dominasi.

Kedua, teori mengenai perempuan berkembang menjadi teori yang terpusatkan-pada-perempuan dalam arti perempuan menjadi subyek utama, yang mengarahkan pada *subyektivitas* untuk memandang dunia. Para ahli tentang perempuan tidak lagi hanya meletakkan perempuan di dalam kehidupan sosial, akan tetapi juga – yang paling penting – bagaimana kehidupan itu terlihat oleh perempuan. Bagi para ahli tentang perempuan ‘pengetahuan mutlak’ yang dikenal selama ini sesungguhnya merupakan satu hasil yang *partikularistik* yang dikembangkan secara luas oleh laki-laki dan yang selalu di seputar wacana yang didominasi oleh laki-laki yang telah menggeneralisasikan atas dasar pengalaman mereka tentang *gender* dan kekuasaan. Tahap ketiga adalah teori perempuan yang terpusatkan-pada-perempuan dalam arti kritis dan aktivis atas nama perempuan, di mana persoalan yang diketengahkan adalah: *‘bagaimana mengubah dan memperbaiki dunia menjadi lebih adil dan manusiawi, bukan hanya buat perempuan akan tetapi juga bagi kemanusiaan’*⁶². Oleh karena itulah Chafetz berpendapat bahwa teori feminis dapat digunakan untuk menantang, melakukan aksi-tandingan, atau mengubah satu keadaan status-quo yang merugikan dan melecehkan perempuan. Chafetz, sebagaimana dikutip oleh Wallace, menekankan tiga unsur di dalam teori feminis:

⁶⁰ Kekuatan hegemonis ini telah mengasingkan dan membelenggu serta menina-bobokkan rakyat ke dalam kesadaran yang terhegemoni (atau kesadaran palsu), sehingga rakyat tidak lagi memiliki kesadaran kritis atau kebebasan-batiniah

⁶¹ Misalnya saja yang diberi predikat sebagai ‘Kajian Perempuan’ dan ‘*the new scholarship on women*’ (lihat Lengerman & Brantley, dalam Ritzer (ed.), George, *Frontiers of Social Theory: The New Synthesis*, New York, Columbia University Press, 1990

⁶² Pengaruh tahap-tahap gerakan perempuan itu pada sosiologi feminis terlihat pada tiga segi: (1) organisasi sosiologi sebagai profesi; (2) hubungan antara teori sosiologi feminis dengan feminisme; dan (3) masalah perbedaan di dalam kosa-kata dan nuansa antara sosiologi dan feminisme (lebih lanjut lihat Lengerman & Brantley, *Feminist Sociological Theory: The Near Future Prospect*, dalam Ritzer, op.cit.

Pertama, *gender* mengandung satu titik-pusat atau subyek dari teori. Teori feminis pada ujungnya berupaya memahami sifat-sifat *gender* dari semua hubungan sosial, lembaga, dan proses yang nampak. *Kedua*, hubungan *gender* dipandang sebagai satu masalah teori berupaya memahami bagaimana *gender* berkaitan dengan ketimpangan, ketegangan dan kontra-diksi sosial. Terakhir, hubungan *gender* tidaklah dipandang sebagai yang wajar saja, melainkan hubungan *gender* yang berkaitan dengan *status quo* dilihat sebagai suatu produk dari kekuatan sosio-budaya dan historis yang telah diciptakan, dan secara terus-menerus dicipta-ulang oleh manusia, dan oleh karenanya secara potensial dapat dirubah oleh manusia sebagai pelaku.

Ornop dan Masa Transisi

Tafsiran atas 'Masa Transisi'

- Kata 'transisi' selalu dikaitkan dengan perubahan yang sedang terjadi, sehingga pada masa transisi keadaan pada umumnya dianggap belum mantap (stabil)⁶³. Di dalam kamus sosiologi dapat ditemukan konsep 'transisi demografis'⁶⁴ dan 'zona transisi'⁶⁵, selain itu pada tataran makro-historis dikenal 'transisi feodalisme ke kapitalisme', dan 'transisi kapitalisme ke sosialisme' dalam sosiologi Marxis, dan pada tataran empiris-politis dapat ditemukan konsep 'transisi ke demokrasi'.
- '*Transisi dari feodalisme ke kapitalisme*'.
 - Konsep ini seringkali dikaitkan dengan gagasan-gagasan Marx dan Engels, meski sebenarnya tidak pernah menjadi pemikiran yang utama melainkan selalu dikaitkan dengan gagasan tentang *metode materialis-historis* [Bottomore, 1985]⁶⁶.

⁶³ Secara leksikal 'transisi' sedang berubah, perubahan, dari satu kondisi atau rangkaian keadaan ke (kondisi) yang lain: misalnya, 'periode transisi di Afrika', ketika negara-negara kolonial menjadi negara yang memerintah-diri sendiri (Hornby, AS., *Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English*, London, Oxford University Press, 1982, p.919). Atau 'transisi' adalah peralihan dari keadaan (tempat, tindakan, dsb.) kepada yang lain; masa transisi, masa peralihan; masa pancaroba: pada masa transisi, pada umumnya keadaan belum stabil (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (edisi kedua), Jakarta, Balai Pustaka, 1996, p.1070).

⁶⁴ Transisi demografis: satu proses di mana ada perubahan-perubahan di dalam tingkat pertumbuhan penduduk yang mencerminkan kecepatan yang tak-sama dengan mana terjadi perubahan tingkat kelahiran dan tingkat kematian (sebagai hasil dari industrialisasi atau modernisasi). Secara teoritis, ada tiga fase di dalam proses ini. Di dalam periode pra-industri tingkat kelahiran dan tingkat kematian keduanya tinggi, yang menghasilkan tingkat pertumbuhan penduduk yang rendah. Dengan dikenalkannya industrialisasi yang dibarengi kesehatan lingkungan (sanitasi) dan obat-obat modern, tingkat kematian menurun. Tetapi, dalam periode ini tingkat kelahiran masih tetap tinggi, yang menghasilkan tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi. Di dalam periode yang ketiga tingkat kematian yang rendah diimbangi oleh tingkat kelahiran yang rendah dan pertumbuhan penduduk sekali lagi menjadi rendah (Theodorson & Theodorson, *A Modern Dictionary of Sociology*, New York, Thomas Y. Crowell Company, 1970).

⁶⁵ Zona dalam Transisi adalah zona yang kedua dari lima wilayah (*zone*) transisi dari E.W.Burgess: satu wilayah yang berada di sekitar dekat Daerah Pusat Bisnis (Central Business District) dari satu kota besar yang telah diserbu (diinvasi) oleh perluasan bisnis dan industri. Harga tanah sangat tinggi dan diharapkan menjadi lenih tinggi lagi ketika wilayah itu pada akhirnya menjadi bagian dari daerah pusat bisnis. Oleh karena hal itu ada spekulasi *real estate* yang berderajat tinggi (*intense*) Bangunan sangat tua dan buruk, dan tuan tanah, yang seringkali adalah para spekulan tanah, hanya memiliki rangsangan kecil untuk memperbaiki atau mendandaniya. Wilayah ini adalah daerah '*slums*' (kumuh), dan di dalam hipotesis wilayah terpusat (*concentric zone*) keberadaan daerah kumuh dijelaskan terutama dalam arti adanya proses transisi tata-guna tanah (Theodorson & Theodorson, 1970: 469).

⁶⁶ Bottomore [1985] berpendapat bahwa gagasan 'transisi dari feodalisme ke kapitalisme' merupakan gagasan yang diungkap secara berulang-ulang di dalam diskusi dari tema yang lebih sentral seperti metode materialis historis (*historical materialist method*), cara-cara produksi kapitalis (*capitalist mode of production*), atau konflik kelas di dalam sejarah. Oleh karena itu perhatian kepada 'transisi' bersifat *episodic*, sebagaimana terlihat di dalam sketsa yang suggestif dari *German Ideology*, proposisi yang jelas dari *Communist Manifesto*, dan catatan-catatan Marx yang kompleks dan kaya yang diterbitkan dalam *Pre-Capitalist Economic Formations*, serta diskusi yang berkelanjutan atas *Primitive Accumulation* dan *Marxist Capital* di dalam *Capital*. Transisi ke kapitalisme

Tafsiran substantif Marx atas ‘transisi dari feodalisme ke kapitalisme’, menurut Bottomore, tetap ambivalen, karena Marx melihatnya dari dua perspektif, yakni pertama, menurunnya feodalisme karena didesak oleh pertumbuhan kegiatan perdagangan, pasar dunia, dan kota-kota industri; dan kedua, meningkatnya pergeseran produsen menjadi kapitalis⁶⁷.

- o Ambivalensi teoritis dan ketidak-memadaian empiris ini, menurut Bottomore [1985] tetap menjadi topik perdebatan yang terus-menerus (*perennial*)⁶⁸. Ada tiga pendekatan yang sangat tersebar yang muncul di dalam awal tahun 1950an⁶⁹, yakni perspektif ‘hubungan pertukaran’, perspektif ‘hubungan kepemilikan’, dan sintesis antara pendekatan Marxian dan neo-Malthusian.
 - Perspektif ‘hubungan pertukaran’ (*exchange relations*) [Sweeny, 1976; Wallerstein, 1974]⁷⁰ berpendapat bahwa kapitalisme muncul lewat kekuatan-kekuatan seperti perdagangan dan pembagian pekerjaan internasional (*international division of labor*) yang dilihat sebagai eksternal terhadap feodalisme.
 - Perspektif ‘hubungan kepemilikan’ (*property relations*) [Dobb, 1946; Hilton, 1973; Brenner, 1976], berpendapat bahwa feodalisme⁷¹ pecah berantakan lewat kontradiksi internal, sebagaimana terwujud di dalam konflik kelas, yang cenderung merusak perbudakan dan menciptakan langkah maju ke arah penggarap tanah pertanian (*agrarian tenure*) yang lebih bebas. ‘Transisi

dideduksikan dari beberapa rumus umum tentang perubahan sosial. Hal ini kelihatan nyata di dalam pergeseran penekanan utama Marx pada determinasi ‘kekuatan produksi’ (*production forces determination*) yang kadangkala dipotret sebagai satu ‘determinasi teknologis’ (*technological determinism*) (pada tahun 1840-an) [*Poverty of Philosophy*, ch. II, sect. 1]. Secara kontras, di dalam *Pre-Capitalist Economic Formation*, Marx menggunakan satu rangkaian konsep-konsep formal (misalnya *mode of production*, *property*, dsb.) tetapi yang diterapkan secara berbeda pada instansi tertentu dari perubahan sosial. Dengan kata lain, tidak ada teori generik atas ‘transisi’.

⁶⁷ Perspektif pertama itu muncul secara nyata pada tahun 1840-an dan 1850-an, ketika Marx menekankan efek korosif atas sistem feodalisme sebagai akibat dari kegiatan merkantil (perdagangan), pertumbuhan dari pasar dunia, dan kota-kota baru yang berkembang. Kapitalisme perdagangan (*Mercantile capitalism*) menimbulkan dinamika dalam kapitalisme. Perspektif kedua, muncul secara jelas khususnya di dalam *Capital*. Perspektif ini memusatkan pada ‘produsen’ (*producers*) dan proses di mana ‘produsen’ menjadi pedagang dan kapitalis (yang disebut oleh Marx sebagai ‘lorong revolusioner yang senyatanya’ [*the really revolutionary path*]). Analisis sebab-akibat kemudian diarahkan pada pra-kondisi yang memungkinkan beberapa produsen menjadi kapitalis, terlihat dari pemisahan mayoritas produsen yang amat banyak dari kepemilikan (*ownership*) atas alat-alat produksi (*the means of production*) dan penciptaan buruh-upahan yang tak mempunyai kepemilikan. Di dalam *Capital*, Marx berbicara tentang varian ini sebagai dua cara dari pertumbuhan kapitalis. Kegiatan perdagangan dapat mengubah produksi menjadi semakin bersifat komoditi. Tetapi, menurut Bottomore, hal itu tidak menjelaskan bagaimana dan mengapa kekuatan buruh itu sendiri harus menjadi komoditi. Oleh karena itu hal itu tidak dapat menjelaskan transisi. Sebab yang utama, oleh karenanya, tidaklah terletak di dalam hubungan pertukaran (*exchange relation*), melainkan lebih di dalam hubungan sosial dari produksi. Oleh karena itu, di dalam *Capital*, perhatian kurang diarahkan pada dinamika dari pasar dunia atau kota yang terus meluas, melainkan lebih kepada perubahan di dalam hubungan kepemilikan yang terwujudkan di dalam perjuangan kelas, sebagaimana di Tudor Inggris, di mana orang-orang tani kehilangan tanah mereka dan proletariat tuna-kisma secara gradual diciptakan. Dalam hal ini Marx sebenarnya lebih berusaha untuk membangun satu pra-kondisi bagi munculnya kapitalisme, daripada mekanisme sebab-akibat yang rinci di mana pra-kondisi direalisasikan [Bottomore, 1985].

⁶⁸ Di dalam masa pasca perang dan Marxisme Pasca-Stalinis, perhatian lebih besar telah ditujukan analisis atas transisi dari feodalisme ke kapitalisme di Eropa Barat, daripada ke pertanyaan yang lebih kontroversial apakah transisi ini dapat diingat sebagai satu tahap universal dari evolusi sosial lewat mana semua masyarakat harus melaluinya [Bottomore, 1985].

⁶⁹ Perdebatan dimunculkan antara lain oleh Sweezy dan Dobb (lihat Dobb, 1946; Hilton, 1976).

⁷⁰ Sweeny [1976] dan Wallerstein [1974] mendefinisikan kapitalisme dalam arti produksi untuk laba lewat pertukaran pasar yang dikontraskan dengan ekonomi feodalisme yang mendekati subsistensi.

⁷¹ Kapitalisme, dalam hal ini didefinisikan sebagai hubungan sosial dari produksi yang ditemukan di dalam buruh-upahan yang bebas, yang melakukan desakan struktural pada akumulasi kapital yang terus-menerus. Sebaliknya, secara kontras dikemukakan bahwa feodalisme didasarkan pada hubungan ketergantungan pribadi (*relations of personal dependence*), kewajiban bersama (*mutual obligation*) dan pengambilan (ekstraksi) surplus yang didesakkan secara hukum (*juridically-enforced*), di dalam lembaga seperti perbudakan (*serfdom*) dan *vassalage* (system menjadi vassal: menyediakan tenaga untuk tentara sebagai imbalan dari menggunakan tanah).

feodalisme ke kapitalisme' ini menghasilkan satu struktur sosial yang didasarkan pada petani kapitalis dan buruh yang tuna-kisma⁷².

- 'Pendekatan sintesis' Anderson (1974a, 1974b)⁷³ yakin bahwa perubahan di dalam hubungan sosial mendahului perkembangan ciri-ciri kekuatan produksi dari kapitalisme.
- '*Transisi kapitalisme ke sosialisme*'. Konsep Marxis mengenai revolusi sosialis menyiratkan bahwa harus ada satu periode transisi dari kapitalisme ke sosialisme. Kontras dengan revolusi borjuis yang merupakan pemakzulan atas kekuasaan politik dari aristokrasi (pemerintahan bangsawan) pada titik akhir dari satu proses panjang pertumbuhan ekonomi kapitalis dan kebudayaan borjuis di dalam kerangka masyarakat feodal, pengambil-alihan kekuasaan politik dari borjuasi adalah, menurut Marx, hanya 'satu episode pertama' dari transformasi revolusioner dari kapitalisme ke sosialisme⁷⁴. Beberapa langkah perlu diambil menuju sosialisme⁷⁵:
 - Langkah pertama adalah 'memenangkan pertarungan demokrasi' (*winning the battle of democracy*), 'meningkatkan proletariat ke posisi kelas yang memerintah' (*raising the proletariat to the position of ruling class*), 'mengambil-alih kekuasaan politik' (*seizing political power*)⁷⁶.
 - Membentuk 'negara diktator proletariat'⁷⁷ yang bersifat transisional untuk memusatkan semua instrumen produksi di tangan negara dan meningkatkan keseluruhan kekuatan produktif secepat mungkin⁷⁸.

⁷² Pandangan seperti itu membantu menjelaskan masalah yang ada di dalam perspektif 'hubungan pertukaran' seperti kurangnya korelasi antara menurunnya perbudakan dan hadirnya kekuatan pasar. Tetapi, dalam pandangan ini tetap belum jelas bagaimana perjuangan kelas antara tuan tanah (*lords*) dan budak yang bebas harus ditempatkan tertentu mengarahkan ke kapillais agrarian, dan di tempat lain ke arah tani pertanian (*peasant agriculture*) [Bottomore,1985].

⁷³ Pendekatan Anderson ini merupakan sintesis dari tema non-Marxis, seperti demografi neo-Malthusian, dengan penekanan Marxis yang lebih konvensional. Anderson menolak setiap teori sederhana dari perubahan di mana perjuangan kelas di dalam feodalisme memainkan peran yang menentukan di dalam melahirkan 'krisis feodalisme'. Keyakinan Anderson searah dengan Dobb et.al. Seperti Sweezy dan Wallerstein, ia menekankan pentingnya kota-kota dan perdagangan internasional. Tetapi dinamisme budaya kota dilihat sebagai satu warisan dari dunia klasik Yunani dan Roma. Di sini Anderson sependapat dengan Max Weber tentang satu pemikiran atas pentingnya warisan bagi pembentukan kapitalisme. Anderson secara tersirat membaca sejarah manusia sebagai munculnya tatanan material (*material order*) yang mampu menguniversalkan warisan budaya dan politik kota dari masyarakat klasik yang didasarkan pada perbudakan. Hal ini kontras dengan pandangan Smithian atas manusia yang tersirat di dalam Sweezy dan Wallerstein, dan juga penggantian-pelaku (*recast*) teleology Marxis tradisional di mana sejarah dikuak sebagai hasil dari dorongan kemanusiaan untuk merealisasikan kekuasaannya yang esensial dari praksis kreatif lewat penguasaan alam dan pemecahan alienasi hubungan sosial [Bottomore,1985].

⁷⁴ Marx (*Critique of the Gotha Programme*, sect.3) membedakan antara *fase lebih rendah* dari komunisme (satu masyarakat campuran yang tetap kekurangan dasar-dasar/fondasinya) dan *fase yang lebih tinggi* (setelah munculnya 'pembukuan subordinasi dari individu pada pembagian kerja' dan 'antitesis antara buruh mental dan fisik', ketika keberlimpahan akan dicapai bahwa barang-barang dapat didistribusikan kepada setiap orang 'menurut kebutuhannya'). Kebanyakan Marxis mengidentifikasi fase yang lebih rendah sebagai 'sosialisme' dan fase yang lebih tinggi sebagai 'komunisme'. Di dalam Sosialisme tetap ada kelas, pembagian kerja okupasional, unsur dari ekonomi pasar dan hak-hak borjuasi, yang dicontohkan di dalam azas-azas distribusi barang-barang menurut jumlah tenaga yang diberikan kepada masyarakat) [Bottomore,1985].

⁷⁵ Program asli dari Marx dan Engels, yang dirumuskan di dalam *Communist Manifesto*, sangat luwes dan memberi kemungkinan transisi ke Komunisme sebagai satu rangkaian langkah-langkah yang pada akhirnya merevolusionerkan keseluruhan cara-cara produksi [Bottomore,1985].

⁷⁶ Marx sadar bahwa kekuasaan politik sesungguhnya merupakan kekuasaan yang terorganisasikan dari satu kelas untuk menindas kelas yang lain, akan tetapi di dalam pandangannya proletariat 'dipaksa oleh kekuatan keadaan' (*is compelled by force of circumstances*) untuk menggunakannya agar melenyapkan dengan kekuatan kondisi-kondisi produksi yang lama, umumnya kelas-kelas, dan supremasinya sendiri sebagai satu kelas [Bottomore,1985].

⁷⁷ Marx menggunakan istilah '*Dictatorship of Proletariat*' ('diktator proletariat') untuk menspesifikasikan ciri-ciri dari negara buruh, yang sangat kontroversial. Adalah menjadi bagian dari ideologi Marxis di semua negara dari 'sosialisme yang sesungguhnya' bahwa pembentukan satu diktator proletariat, khususnya, bentuk yang sangat sentralistis. Gagasan ditantang oleh banyak sosialis demokrat masa kini. Para 'anarkis' (khususnya Bakunin) keberatan bahwa idea (gagasan) itu akan membantu melahirkan negara otoritarian dan birokrat tiranikal dari elite yang memerintah. Di pihak lain, 'reformis' (misalnya Bernstein) menolak gagasan mengenai revolusi politik itu

- Program ekonomi nasionalisasi atas alat-alat produksi: kepemilikan tanah dan hak-hak warisan akan dihapuskan, kepemilikan dari semua emigran dan pemberontak akan dirampas, perusahaan lain hanyalah secara gradual akan beralih ke tangan negara.
- Menegakkan tatanan sosial-politik sosialisme untuk memecahkan kontradiksi internal di dalam ‘negara diktator proletariat’⁷⁹.
- ‘*Transisi ke demokrasi*’. Transisi dari satu rezim otoritarian otokratik ke suatu rezim demokratis pluralistik lahir akibat krisis⁸⁰ yang dialami rezim pertama. Transisi dimulai oleh krisis dari rezim yang ada dan berakhir dengan terbentuknya rezim baru, mengakhiri tahap perantara berupa pemerintahan-pemerintahan sementara, azas-azas dan peraturan-peraturan yang tumpang tindih dan berlawanan, dan ketidak-pastian

karena mereka pikir proses ekonomi dari kapitalisme mengarahkan secara spontan ke sosialisme [Bottomore,1985].

⁷⁸ Ketika Bolshevik berkuasa pada tahun 1917, mereka menasionalisasikan keseluruhan ekonomi (di luar pertanian) dalam satu kali tindakan dan arah ini diikuti di dalam revolusi sosialis di abad 20 yang lainnya. Pengalaman telah menunjukkan bahwa negara baru yang diciptakan dengan cara ini secara beragam lari dari kontrol kelas dan menjadi instrumen dominasi dari partai pelopor. Setelah serangkaian pembersihan pelopor revolusioner tumbuh menjadi satu birokrasi yang kokoh yang mengandaikan adanya kontrol yang kurang lebih menyeluruh terhadap semua *sphere* kehidupan publik, politik, ekonomi, dan kebudayaan. Perencanaan administrasi yang kaku memantapkan pertumbuhan umum yang *ajeg* tetapi prakarsa dan inovasi terhempas, dan hal itu telah mendatangkan efek yang buruk pada semua cabang ekonomi yang sebenarnya memerlukan pengambilan keputusan yang terdesentralisasikan secara luwes (pertanian, produksi skala kecil, perdagangan, jasa). Sekali satu pusat kekuasaan yang baru terasingkan (*teralienasi*) diciptakan perkembangan lebih jauh ke arah sosialisme gagal terjadi. Negara dengan organ-organ paksaannya dan apparatnya yang profesional cenderung menjadi semakin kuat daripada ‘hancur’ (*whiter-away*). Panitia-panitia buruh (*soviet*) kehilangan artinya. Kebudayaan yang diharapkan mekar secara bebas tidak terjadi, dan malahan ada satu pertumbuhan kuantitatif secara spektakuler dari kebudayaan yang didominasi oleh ideologi resmi. Perkembangan dari satu ‘kesejahteraan dari kebutuhan’ secara luas diganti oleh upaya untuk mengejar kesejahteraan material [Bottomore,1985].

⁷⁹ Supremasi politik dari kekuatan sosialis radikal dapat terjadi pada saat mendekati akhir dari proses ini. Sekali mereka memenangkan kekuatan-kekuatan ini mereka akan mampu membalikkan negara ke dalam yang memerintah diri-sendiri (*self-governing*) daripada struktur yang otoritarian. Satu tentara yang profesional akan diganti oleh yang non-profesional, organisasi bela-diri. Kelompok-kelompok sosial yang tak-diuntungkan (*under-privilege*) [perempuan, bangsa atau ras yang ditindas] akan memiliki, persamaan hak (*equality of rights*), dan kemudian juga persamaan kondisi (*equality of condition*). Alat-alat produksi akan disosialisasikan dan diletakkan di bawah kontrol badan yang mengatur dirinya-sendiri (*self governing bodies*). Pasar untuk modal dan buruh akan musnah, upah buruh menjadi diganti oleh satu bagian di dalam pendapatan bersih dari organisasi yang bekerja, yang berkaitan dengan jumlah, intensitas dan mutu dari kerja mereka. Pasar dari komoditi akan tetap menjadi indikator dari kebutuhan sosial untuk waktu yang lama, akan tetapi semakin banyak barang-barang akan kehilangan ciri-ciri komoditi, karena diproduksi untuk memenuhi kebutuhan manusia dan kurang atau lebih disubsidi oleh masyarakat (obat-obatan medis, barang dan jasa pendidikan dan kebudayaan, perumahan/ papan, pangan pokok). Peningkatan produktivitas buruh akan tetap menjadi kebijakan yang terakhir, akan tetapi tujuannya bukan lagi peningkatan output material melainkan pembebasan dari kerja yang panjang, pengurangan jam kerja. Kebutuhan budaya, spiritual, komunal yang lebih tinggi berkembang menjadi penting. Kerja secara gradual akan kehilangan ciri yang terasing, dengan partisipasi buruh di dalam pengambilan keputusan, pilihan bebas diantara berbagai alternatif teknologi, dan satu reorganisasi atas proses produksi untuk menekankan otonomi dan pengendalian-diri (*self-control*) buruh dan juga satu koordinasi rasional diantara mereka. Azas federalisme akan menjadi organisasi sosial pada semua tingkat. Di dalam sosialisasi individu, persiapan untuk kerja akan kehilangan sangat pentingnya hari-ini, dan juga menjadi jauh lebih luwes dengan pilihan bebas atas kerja, dan akses pada kerja tanpa memandang jenis kelamin, ras, kebangsaan atau usia. Pembagian kerja tidak akan lagi begitu diprofesionalkan secara kaku dan akan ada peluang yang luas bagi buruh untuk mengubah peran kerjanya ketika tambahan pengetahuan dan ketrampilan mengualifikasikan mereka bagi pekerjaan baru. Lebih jauh, kegiatan yang paling penting akan terbuka bagi mereka di mana kapasitas prakarsa individual menemukan pengungkapan, apakah hal itu kerja yang produktif atau di luarnya [Bottomore,1985].

⁸⁰ Krisis ini mungkin berasal dari ketidak-mampuannya menyelesaikan masalah estafet kepemimpinannya sendiri, atau dari ketidak-mampuannya menyesuaikan diri dengan keadaan-keadaan yang berubah cepat tak terduga. Biasanya krisis itu terungkap dalam melemahnya kohesi internal rezim itu dan/atau lenyapnya kemampuan untuk menekan konflik dan menghalangi munculnya sebuah cara pemerintahan alternatif [Phillippe C. Schmitter, ‘*Speculation about Possible Demise of Authoritarian Regimes and Its Possible Consequences*’ (Woodrow Wilson Center Latin America Working Papers, no.60, Washington D.C., 1980)]

politik dan hukum. Akhir dari transisi⁸¹ itu biasanya ditandai oleh diterimanya suatu konstitusi baru yang dirancang oleh majelis yang dipilih, atau dengan pemilihan parlemen begitu konstitusi telah dipulihkan. Dengan perkataan lain, konsolidasi dimulai begitu lembaga-lembaga dasar tata-politik yang baru sudah diorganisir dan mulai bekerja dan berinteraksi menurut aturan-aturan permainan yang baru. Karena itu transisi rezim diakhiri oleh pelebagaan secara legal-formal. Konsolidasi adalah proses yang, pada akhirnya, akan membawa pada *pelebagaan politik-material*⁸². Secara singkat, bisa didefinisikan bahwa konsolidasi mencakup proses-proses yang dipakai oleh rezim yang baru muncul itu untuk melenyapkan, mengurangi sampai minimum, atau menyerap inkonsistensi-inkonsistensi ideologis dan institusional awal; menegakkan otonominya dalam menghadapi kekuatan-kekuatan mapan yang sudah ada di negara itu, terutama angkatan bersenjata; memobilisasi masyarakat sipil ke dalam bentuk-bentuk ekspresi politik; dan mengembangkan serta memelihara suatu sistem partai yang berstruktur dan relatif stabil, yang mampu menjamin pemerintahan yang bertanggung-jawab kepada rakyat [Maravall & Santamaria, 1992]. Ada tiga pendekatan atas kajian transisi ke demokratisasi:

- (1) pendekatan (*paradigma*) fungsionalis⁸³, menyatakan: bahwa rangkaian variable yang berkaitan dengan negara demokrasi yang sudah ada dianggap sebagai pra-kondisi bagi kelayakan demokrasi di mana-mana. Variabel itu antara lain: pembangunan ekonomi dan modernisasi social yang tinggi, pemerintah berdasarkan kesepakatan rakyat, budaya masyarakat atau koherensi antara model-model otoritas dan system politik yang ada dengan model-model dominan di dalam kelompok-kelompok social lainnya.
 - (2) Pendekatan genetik terhadap kajian atas transisi (Dankwart Rustow)⁸⁴: pengkajian atas berbagai proses perubahan rezim dan pengaruh masing-masing perubahan atas fase berikutnya.
 - (3) Pendekatan probabilistik (Robert Dahl)⁸⁵: menetapkan kombinasi-kombinasi khusus variable-variabel sosio-ekonomik dan politik yang dapat memungkinkan dimulainya satu transisi dan variable-variabel yang mungkin mendukung konsolidasi satu rezim demokratik baru.
- ‘*Transisi*’ dalam ‘*skenario Indonesia masa depan*’⁸⁶. Ada tiga kekuatan pembelok (*driving forces*) yang kritikal yang dianggap dapat membelokkan arah perkembangan masa

⁸¹ Dalam proses transisi juga terjadi konsolidasi. Di satu pihak, melalui proses substitusi, rezim sebelumnya dibubarkan dan sebuah rangkaian lain perangkat kekuatan politik menggantikannya. Di pihak lain, melalui proses pengembangan, rezim baru mengambil jalan yang berbeda dari rezim lama dan mengentalkan (mengkritisalisasi) struktur institusionalnya [Maravall & Santamaria, 1992].

⁸² Istilah ‘pelebagaan politik-material’ ini dipinjam dari istilah yang pengertiannya diajukan oleh Samuel P. Huntington dalam ‘*Political Order in Changing Societies*’ [New Haven: Yale University Press, 1968]

⁸³ Pendekatan ini dominan pada tahun 1950-an dan 1960-an. Lihat: Daniel Lerner, *The Passing of Traditional Society* (New York, Free Press, 1958); S.M.Lipset, ‘*Some Social Requisites of Democracy: Economic Development and Political Legitimacy*’, *American Political Science Review* 53, no.1 (1959): 69-105; Phillips Cutright, ‘*National Political Development: Measurement and Analysis*’, *American Sociological Review* 28 (1963): 253-64; D. Jaros and L.V.Verba, *The Civic Culture* (Princeton: Princeton University Press, 1963); Harry Eickstein, *Division and Cohesion in a Democracy* (Princeton: Princeton University, 1966)

⁸⁴ Dankwart A, Rustow, ‘*Transition to Democracy*’, *Comparative Politics* 2, no.3 (April, 1970): 337-63

⁸⁵ Robert A. Dahl, *Polyarchy* (New Haven: Yale University Press, 1971)

⁸⁶ ‘Skenario Indonesia Masa Depan’ adalah 4 skenario yang dihasilkan oleh satu rangkaian dialog dan lokakarya sejak setahun yang lalu di sejumlah (14) kota yang diikuti sekitar 600-700 orang dari berbagai latar belakang. Dialog dan lokakarya ini menggunakan ‘metode perencanaan skenario’, yang pada awalnya diterapkan dalam bidang militer oleh Herman Kahn, seorang perwira Angkatan Udara AS, dan dikembangkan oleh Pierre Wack, seorang ahli perencanaan pada Royal Dutch/Shell, pada tahun 1970-an di dalam tataran perusahaan (bidang bisnis). Pada tataran negara, metode ini mula-mula diterapkan di Afrika Selatan [lihat Schwartz, *The Art of the Long view*, ABN, 1988].

depan Indonesia, yaitu: (a) **tatanan politik**⁸⁷ (lebih demokratik atau lebih otoritarian); (b) **kebijakan ekonomi**⁸⁸ (lebih pro-pemerataan vs. lebih pro-pertumbuhan) dan (c) **tingkat kekuatan masyarakat sipil**⁸⁹ (masyarakat sipil kuat vs. lemah)⁹⁰. Kombinasi dari tiga kekuatan pembelok ini menghasilkan 4 skenario Indonesia masa depan⁹¹, yakni:

1. tatanan politik demokratis, kebijakan ekonomi lebih pro-pemerataan (tingkat pertumbuhan ekonomi rendah), masyarakat sipil kuat (metafora: '*Lambat Tapi Selamat*')⁹²;
2. tatanan politik demokratis, kebijakan ekonomi lebih pro-pertumbuhan (tingkat pemerataan rendah), masyarakat sipil kuat (metafora: '*Mengayuh Biduk Retak*')⁹³;

⁸⁷ Dalam tatanan politik ini termasuk: sistem politik; hukum ('*supremasi hukum*') digerogoti oleh: lemahnya *law enforcement*, reduksi hukum menjadi alat kekuasaan, ketidak-pastian hukum, ketak-taat-azasan hukum, '*impunity*', dan pelanggaran hak azasi manusia. Tiga persoalan mengemuka dalam hal supremasi hukum dan HAM: (1) bagaimana *law enforcement* mangantisipasi dan mempersiapkan masa depan, (2) bagaimana masyarakat mengetahui lingkungannya dan perlakuan macam apa yang diberlakukan terhadap lingkungan dalam arti yang seluas-luasnya, (3) karena sumber-daya dan anggaran terbatas, apa strategi yang diperlukan untuk mengetahui bahwa masyarakat telah memperlakukan sumber-daya yang tersedia dengan sebaik-baiknya [Roger,1996]; perimbangan kekuasaan antara 'pusat dan daerah'; peran militer dalam bidang non-militer; sikap negara terhadap agama. Tatanan politik ini dihadapkan pada '*ungovernability*' [Dorff,1996], yakni: merosotnya kemampuan melaksanakan berbagai tanggung jawab pengelolaan negara modern dalam lingkungan yang semakin kompleks (gejala perang saudara, bentrok antar etnis, kekacauan dan anarki, tampilnya penguasa militer, dan putus-asa massal). '*Ungovernability*' itu membawa akibat merosotnya efektivitas pemerintah, dan lunturnya kepercayaan publik. Ancaman '*ungovernability*' itu akan semakin nyata jika elite politik memanipulasi keanekaragaman masyarakat demi kepentingan sendiri dengan cara mengerahkan massa dalam konflik horisontal lewat sentimen primordial.

⁸⁸ Dalam pasang surut '*demokrasi ekonomi*' terlihat: enam dikotomi (Jawa-luar Jawa; Jakarta-non Jakarta; Pusat-Daerah; Indonesia Barat-non Barat; Muslim-non Muslim; pribumi-nonpribumi), konflik antara modal dan buruh, kebijakan atau sistem ekonomi (ekonomi pasar yang kapitalistik, ekonomi kerakyatan, ekonomi kesejahteraan).

⁸⁹ Termasuk di dalamnya sikap masyarakat terhadap pluralisme, sikap terhadap ideologi gender, respons masyarakat terhadap globalisasi, praktek demokrasi masyarakat, posisi tawar masyarakat terhadap negara, orientasi sistem pendidikan. '*Interplay*' antara kekuatan penindas '*daulat penguasa*' (yakni '*negara*' / '*state*') dengan kekuatan unsur-unsur '*daulat rakyat*' masyarakat sipil akan memberi warna pada wajah Indonesia masa depan. Unsur-unsur masyarakat sipil yang mengemuka adalah: organisasi rakyat akar-rumput, kelompok penekan (termasuk Ornop) yang mempunyai beragam kiblat (pro-*status-quo*, sosial-demokratik, atau radikal), kelompok kepentingan, 'masyarakat adat', cendekiawan, 'kesadaran politik rakyat, '*people power*'.

⁹⁰ Ketiga kekuatan pembelok yang kritikal (*critical driving forces*) ini dihasilkan dari analisis 12 kekuatan pembelok yang diidentifikasi di dalam dialog, yakni: sistem politik, hokum, orientasi kebijakan ekonomi, sikap masyarakat terhadap pluralisme, perimbangan kekuasaan antara 'pusat dan daerah', peran militer dalam bidang non-militer, orientasi sistem pendidikan, sikap terhadap ideologi gender, respons masyarakat terhadap globalisasi, sikap negara terhadap agama, praktek demokrasi masyarakat, posisi tawar masyarakat terhadap negara [lihat laporan Dialog Indonesia Masa Depan,2000].

⁹¹ Sebenarnya secara teoritis ada 8 kombinasi yang mungkin, yaitu: (1) tatanan politik demokratis, kebijakan ekonomi lebih pro-pemerataan (tingkat pertumbuhan ekonomi rendah), masyarakat sipil kuat (contoh Perancis); (2) tatanan politik demokratis, kebijakan ekonomi lebih pro-pertumbuhan (tingkat pemerataan rendah), masyarakat sipil kuat (Taiwan); (3) tatanan politik otoritarian, kebijakan ekonomi lebih pro-pemerataan (tingkat pertumbuhan ekonomi rendah), masyarakat sipil lemah (Burma); (4) tatanan politik otoritarian, kebijakan ekonomi lebih pro-pertumbuhan (tingkat pemerataan rendah), masyarakat sipil lemah (contoh Singapura); (5) tatanan politik otoritarian, kebijakan ekonomi lebih pro-pertumbuhan (tingkat pemerataan rendah), masyarakat sipil kuat (tidak ada contoh); (6) tatanan politik demokratis, kebijakan ekonomi pro-pertumbuhan (tingkat pemerataan rendah), masyarakat sipil lemah (tidak ada contoh); (7) tatanan politik otoritarian, kebijakan ekonomi pro-pemerataan (tingkat pertumbuhan ekonomi rendah), masyarakat sipil kuat (tidak ada contoh); (8) tatanan politik otoritarian, kebijaksanaan ekonomi pro-pertumbuhan (tingkat pemerataan rendah), masyarakat sipil kuat (tidak ada contoh). Akan tetapi diantara yang 8 itu hanya 4 yang dianggap sangat mungkin terjadi.

⁹² Dalam skenario ini Indonesia Masa Depan digambarkan sebagai berikut: Penerapan otonomi daerah dan desentralisasi menyelamatkan Indonesia dari kehancuran. Dan, kehidupan demokratis dipertahankan setelah Orde Baru runtuh. Investor asing kembali masuk, dan kepercayaan dunia internasional memulih. Kekerasan mereda. Keadilan mejadi landasan untuk menyelesaikan konflik. Pertumbuhan ekonomi tak mencolok, namun pemerataan berlangsung sampai ke daerah-daerah [lihat Skenario Indonesia 2010]

⁹³ Indonesia memasuki kehidupan demokratis. Kemerdekaan pers dijamin, dan supremasi hokum ditegakkan. Otonomi daerah diberikan seluas-luasnya. Masalah ekonomi diselesaikan dengan memacu pertumbuhan, bukan hanya dengan mengundang investasi baru, tapi juga mendorong pemanfaatan aset yang sudah ada [lihat Skenario Indonesia 2010].

- (4) tatanan politik otoritarian, kebijakan ekonomi lebih pro-pertumbuhan (tingkat pemerataan rendah), masyarakat sipil lemah (metafora: *'Di Ujung Tanduk'*)⁹⁴;
- (5) tatanan politik otoritarian, kebijakan ekonomi lebih pro-pemerataan (tingkat pertumbuhan ekonomi rendah), masyarakat sipil lemah (metafora: *'Masuk ke Rabang Buaya'*)⁹⁵.

Masa transisi di sini berarti masa peralihan antara situasi dan kondisi politik, ekonomi, dan masyarakat sipil dewasa ini (tahun 2000) ke 4 skenario masa depan tersebut di atas.

Masalah Strategi Advokasi pada Masa Transisi.

- Strategi advokasi Ornop pada masa transisi akan ditentukan oleh berbagai hal, yakni:
 - (1) Bagaimana Ornop memahami dirinya sendiri;
 - (2) bagaimana Ornop meletakkan diri di dalam ranah dan ruang kehidupan (negara atau masyarakat politik, korporasi ekonomi atau masyarakat ekonomi, dan masyarakat sipil)⁹⁶;
 - (3) bagaimana Ornop memberi takrif terhadap strategi advokasi;
 - (4) bagaimana Ornop memahami 'masa transisi'.

Kemungkinan Peran Ornop

- Dengan menyilangkan keempat skenario Indonesia Masa Depan dan ragam Ornop akan diperoleh sketsa berbagai kemungkinan peran yang bisa dimainkan oleh Ornop. Secara teoritis akan diperoleh 12 kemungkinan peran Ornop di masa datang.

Ragam Ornop Skenario	'Developmentalis' ('konformis')	'Reformis'	'Transformatoris'
Skenario 1	1	2	3
Skenario 2	4	5	6
Skenario 3	7	8	9
Skenario 4	10	11	12

- (a) Pada skenario 1 di mana terjadi demokrasi politik (pemilu yang teratur, oposisi yang sejati, kebebasan berpendapat dijamin, partisipasi rakyat tinggi, peran negara kecil), demokrasi ekonomi (kebijakan ekonomi yang berkiblat pada kepentingan rakyat, upah dan kesejahteraan buruh memadai, terjadi persaingan sehat, pajak progresif, ada subsidi, tumbuh industri kecil), terjadi supremasi hukum (hukum jelas dan adil, *law*

⁹⁴ Gerakan separatisme mengakibatkan Indonesia mengalami disintegrasi. Konflik antar daerah dan pusat melebar menjadi konflik antar agama, suku, buruh-majikan, bahkan antar pribumi-keturunan. Pembangunan sipil meningkat. Pendidikan dan agama digunakan untuk menyeragamkan cara berpikir. Pertumbuhan ekonomi diterapkan dengan mendorong industri berteknologi tinggi dan bermodal besar. Setelah Aceh dan Papua, Riau ikut melepaskan diri dari Indonesia [lihat Skenario Indonesia 2010].

⁹⁵ Skenario ini mengungkapkan kondisi Indonesia yang berubah menjadi negara otoriter akibat kebijakan ekonomi tertutup. Untuk mensubsidi rakyat, pemerintah menguras sumber-daya alam. Tak banyak pabrik beroperasi, karena bahan baku sulit diperoleh. Kebijakan Cultur Stelsel seperti masa penjajahan Belanda kembali diberlakukan. Setiap perlawanan rakyat dibungkam lewat kekerasan dan terror. Kelompok militer professional-nasionalis bergabung dengan kekuatan nasionalis-kerakyatan, dan melakukan kudeta [lihat Skenario Indonesia 2010].

⁹⁶ Friedman membagi ruang kehidupan (territori) ke dalam: Negara (kekuasaan negara, eksekutif, dan cabang-cabang yudikatif); masyarakat politik (kekuasaan politik, gerakan sosial, dan organisasi politik); korporat ekonomi (masyarakat ekonomi: kekuasaan ekonomi, perusahaan dan lembaga keuangan); masyarakat sipil (kekuasaan sosial: orang, rumah tangga, dan perkumpulan sipil, yaitu ranah kebudayaan dan struktur sosial) [lihat Friedmann, John, Empowerment: The Politics of Alternative Development, Cambridge & Oxford, Blackwell, 1992]

enforcement baik, HAM ditegakkan), masyarakat sipil berdaulat, pendidikan kreatif-innovatif, suburnya komunalisme komunitarian, tumbuh pemimpin lokal, maka peran yang mungkin dimainkan Ornop adalah:

- (1) Ornop '*developmentalis*'/*konformis* (atau Ornop *parastatal*) akan terbawa oleh berbagai perubahan yang terjadi dan menyesuaikan diri dengan perubahan itu, karena kalau tidak Ornop jenis ini justru akan menjadi beban dan penghalang bagi perkembangan masyarakat sipil yang telah mulai menguat dan berdaya kembali. Penyesuaian itu akan terjadi baik pada tataran ideologis dan nilai-nilai (*culture structure*) maupun pada tataran organisasi dan program-programnya (*social structure*). Pendek kata Ornop ini didorong untuk mentransformasikan dirinya, paling tidak menjadi Ornop '*reformatoris*' atau '*professional*', atau mereka akan mengkombinasikan berbagai kegiatan pembangunan (*development*) dengan upaya reformasi.
 - (2) Ornop '*reformatoris*' (atau Ornop '*professional*') akan mengukuhkan dirinya dan memperoleh tambahan 'jumlah anggota' (yaitu Ornop '*developmentalis*' atau '*parastatal*' yang telah mentransformasikan dirinya), sehingga persaingan akan semakin ketat meskipun tetap sehat, dan sekaligus akan terbuka jalinan kerja sama professional yang semakin kokoh. Dengan demikian pelayanan jasa kepada masyarakat sipil *akan meningkat mutu dan jumlahnya*. Ada peluang bagi Ornop '*reformatoris*' ini untuk merefleksi dan mentransformasikan diri menjadi Ornop yang '*transformatoris*'.
 - (3) Ornop '*transformatoris*' menuai apa yang selama ini diperjuangkannya, sehingga luasnya peran akan menyusut karena lembaga-lembaga demokrasi bekerja sesuai dengan fungsinya, serta lembaga ekonomi dan mekanisme pasar tidak lagi terdistorsi, meskipun mutu perannya sebagai lembaga kontrol kehidupan demokrasi dan ekonomi akan bertambah tinggi. Ornop ini akan mengubah dirinya menjadi pemantau, dan sesekali melakukan tekanan (seperti ditandai oleh munculnya ICW, ParWi, Human Rights Watch dan sebagainya).
- (b) Dalam skenario 2 terjadi pertarungan kekuasaan terus-menerus antara penguasa/pemerintah, yang mendasarkan kebijakan dan perilakunya pada 'teori negara kekuasaan' yang cenderung otoriter dan repressif, dengan berbagai kelompok dalam masyarakat yang kesadaran dan partisipasi politiknya tinggi dan semakin bertambah kuat. Pemerintah semakin repressif, tetapi sebaliknya masyarakat sipil semakin menentang repressi pemerintah. Dalam situasi seperti itu peran yang mungkin dipilih Ornop adalah:
- (4) Ornop '*developmentalisme*'/'*konformis*' (atau *parastatal*) memainkan peran 'konvensionalnya' sesuai dengan ideologi dan nilai-nilai yang dianut oleh negara, menjadi 'mitra' (satu istilah yang dengan bangga dipertahankan dan diyakininya) dalam melaksanakan program pembangunan pemerintah yang merupakan wujud dari negara kekuasaan (akan tetapi juga sekaligus mendominasi rakyat);
 - (5) Ornop '*reformatoris*' (*professional*) akan berusaha menghindari keterlibatan dalam program pembangunan sentralistik yang dilakukan oleh pemerintah negara kekuasaan, atau bilamana harus bekerja-sama dengan pemerintah Ornop ini tetap bersikap kritis (memelihara jarak dengan struktur negara), seraya melakukan advokasi hak-hak politik dan ekonomi rakyat, serta berusaha untuk melakukan proses penyadaran dan penguatan kelompok-kelompok kecil dalam masyarakat sipil dan mendorong prakarsa pada tingkat akar rumput.

- (6) Ornop '*transformatoris*' mengambil posisi menentang dan menantang program-program pembangunan pemerintah negara kekuasaan, menentang struktur negara, dan menggalakkan advokasi hak-hak sipil dan politik, serta mendorong, mengorganisasikan dan melakukan aksi massa dan demonstrasi untuk menentang dominasi dan hegemoni negara.
- (a) Pada Skenario 3 yang menggambarkan keadaan kacau yang ditandai oleh '*ungovernability*' yang tinggi, aparat pemerintah sangat repressif dan melakukan pelanggaran HAM, serta penegakan hukum lemah, kelompok-kelompok di dalam masyarakat sipil yang cenderung apatis dan a-politis, sehingga kontrol masyarakat tidak berfungsi; Peran yang mungkin diambil Ornop adalah:
- (7) Ornop '*developmentalistik*'/'*konformistik*' (*parastatal*) berperan sebagai bagian dari negara (terkooptasi dan terhegemoni) atau sebagai kepanjangan tangan negara untuk melaksanakan program pembangunan pemerintah, seraya menikmati kucuran dana dan bahkan terlibat KKN, atau setidaknya 'menutup mata' terhadap praktek korupsi. Ornop ini juga dengan senang hati menjadi kepanjangan tangan pemerintah untuk menghegemoni rakyat lewat kegiatan pembentukan kelompok-kelompok kecil, yang dilaksanakan oleh apa yang mereka sebut sebagai 'CO' (*community organizers*) untuk melaksanakan program pemerintah (misalnya program JPS).
- (8) Ornop '*reformasionis*' cenderung terbelah menjadi dua. Kelompok pertama berupaya menjalin kerjasama dengan pemerintah meskipun dengan susah payah berusaha tetap kritis, atau bahkan karena repressi pemerintah kelompok ini mengaku sebagai Ornop '*developmentalis*'. Kelompok kedua berusaha menghindari keterlibatan dalam program pemerintah, tetap memelihara jarak, meningkatkan prakarsa rakyat pada tingkat akar-rumput, dan memberdayakan rakyat kecil. Kelompok ini juga berupaya menjalin solidaritas dengan Ornop '*transformatoris*'.
- (9) Ornop '*transformatoris*', karena tekanan-tekanan aparat repressi negara, cenderung melakukan gerakan terselubung menentang negara, dan sejauh ada peluang tetap berupaya melakukan aksi massa dan demonstrasi. Sekelompok Ornop ini akan didesak untuk meradikalisasi-diri, dan sekelompok lain berusaha melunakkan perlawanan terbuka terhadap negara repressif dengan cara mengubah sifat radikal ke sifat reformatoris.
- (b) Skenario 4 di mana masyarakat sipil terhegemoni oleh negara dan pemerintah yang cenderung melakukan manipulasi terhadap hukum dan mengabaikan aspirasi rakyat, maka peran yang mungkin dilakukan Ornop adalah:
- (10) Ornop '*developmentalistik*'/'*konformistik*' menggalang kerjasama dengan pemerintah lokal oleh karena undang-undang otonomi daerah dan perimbangan keuangan pusat-daerah dilaksanakan, dengan demikian Ornop ini berupaya mengakomodasikan struktur negara, dan memecahkan masalah secara partisipatori, pendekatan dari bawah ke atas (*bottom up*) dengan membentuk kelompok-kelompok kecil di dalam masyarakat.
- (11) Ornop '*reformatoris*' menggalakkan advokasi hak-hak ekonomi dan politik seraya melakukan program ekonomi untuk rakyat kecil dan peningkatan kesadaran masyarakat lewat kelompok-kelompok kecil di dalam masyarakat yang dibentuknya.
- (12) Ornop '*transformatoris*' memelopori kampanye ekonomi kerakyatan dan redistribusi aset ekonomi (mempromosikan *land reform*), terutama aset yang dikuasai negara seperti tanah perkebunan.

Lampiran

1

Model Sosiologis Analisis Masalah Demokrasi dan Perubahan Sosial

Model	Konsensus		Konflik
	Developmentalis	Reformis	
Madzhab	Developmentalis	Reformis	Transformatoris
Struktur Sosial	Hasil kesepakatan sosial, tidak dipermasalahkan, bahkan dipertahankan	Hasil kesepakatan sosial, tidak dipermasalahkan, cenderung dipertahankan	Hasil pemaksaan kelompok/kelas sosial dominan; selalu dipermasalahkan/dipertanyakan
Penyebab masalah Demokrasi	Faktor endogen/ internal: pelaku/agen; misalnya: kebodohan, kemiskinan, keterbelakangan, keterpencilan	Tatanan sosial-politik tidak berfungsi dengan baik; kurangnya kesempatan partisipasi dan akses pada sumber-sumber	Faktor eksogen/eksternal: tatanan/struktur sosial politik yang tidak adil, menindas dan dipaksakan oleh kelompok/kelas dominan
Pemecahan masalah	Mengubah faktor endo-gen/internal: nilai budaya, mentalitas	Memfungsikan/memperluas peluang partisipasi dan akses pada sumber-sumber	Mengubah tatanan/struktur yang tidak adil, tidak demokratis; kekuasaan di tangan rakyat
Model Perubahan	Perubahan mentalitas & budaya ←----- Mengindari	Perubahan fungsional (dalam struktur) -----→ konflik	Perubahan structural (tatanan) ←-----→ Mengelola konflik
Motivasi	Menjalankan tugas/karitatif	Menegakkan aturan main / hukum	Visi Transformatoris
Pelaku / agensi	Pemerintah, Elite	Pemerintah, Elite	Rakyat sendiri
Gaya Kepemimpinan	Birokratik, paternalistik	Birokratik, teknokratik	Partisipatori, demokratis

Source: Anne Hope & Sally Himmel, 1984 (dimodifikasi oleh MMB)

2

Paradigma dan Pendekatan

Kategori Orientasi	Tiga Model Ornop			Radikal Baru
	1	2	3	4
Sikap terhadap Program pembangunan resmi	Bekerja sama; memelihara pengembangan partisipasi komunitas	Kolaborasi/ kerjasama kritis	Menghindari keterlibatan	Menentang dan menantang
Orientasi terhadap Struktur Negara	Mengakomodasi	Memperbaharui	Memelihara jarak	Menentang
Konsep tentang Demokrasi	Pemecahan masalah secara partisipatori	Menyeimbangkan hak-hak politik dan hak ekonomi	Prakarsa tingkat akar rumput	Pengambilan keputusan langsung
Mobilisasi populer	Pembentukan kelompok-kelompok kecil	Program ekonomi; menggalakan kesadaran	Pemberdayaan kelompok kecil	Aksi masa dan demonstrasi

Source: Eldrige,1995

3

The Four Dimensions of Social Practice

STATE: State power: executive and judicial branches

CIVIL SOCIETY: Social Power: natural persons, households, and civil association (the domain of cultural and social structure)

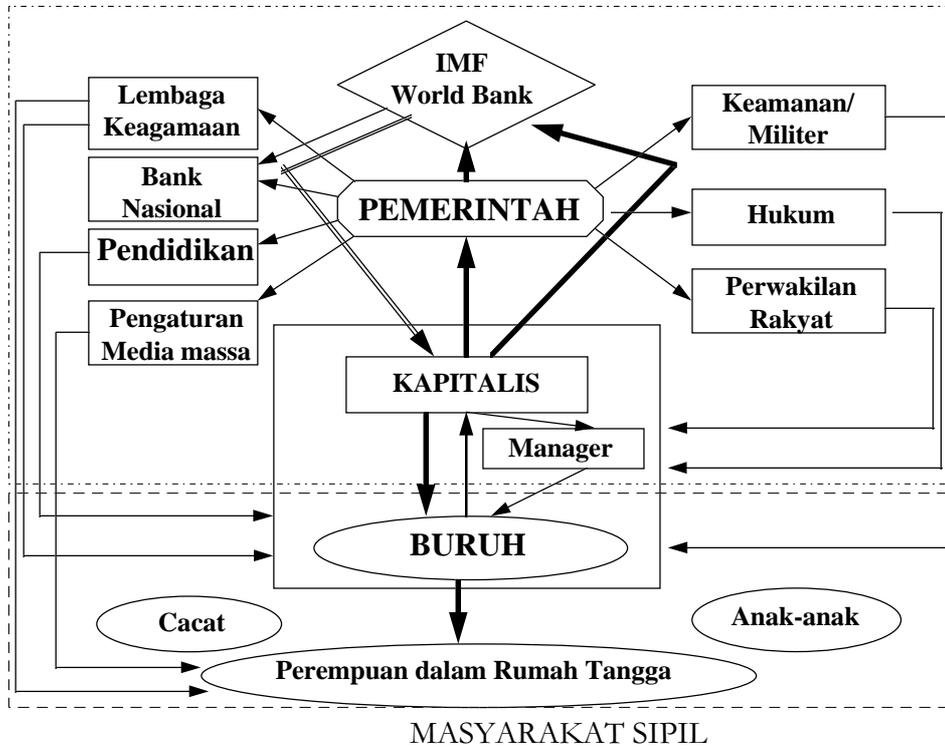
CORPORATE ECONOMY: economic power, corporations and financial institutions (i.e. judicial persons)

POLITICAL COMMUNITY: political power, social movements and political organizations.

Source: Friedmann,1992:27

Analisis Struktural Developmentalisme (Negara dan Masyarakat Sipil)

NEGARA



Sumber: Fakhri, 1996:80

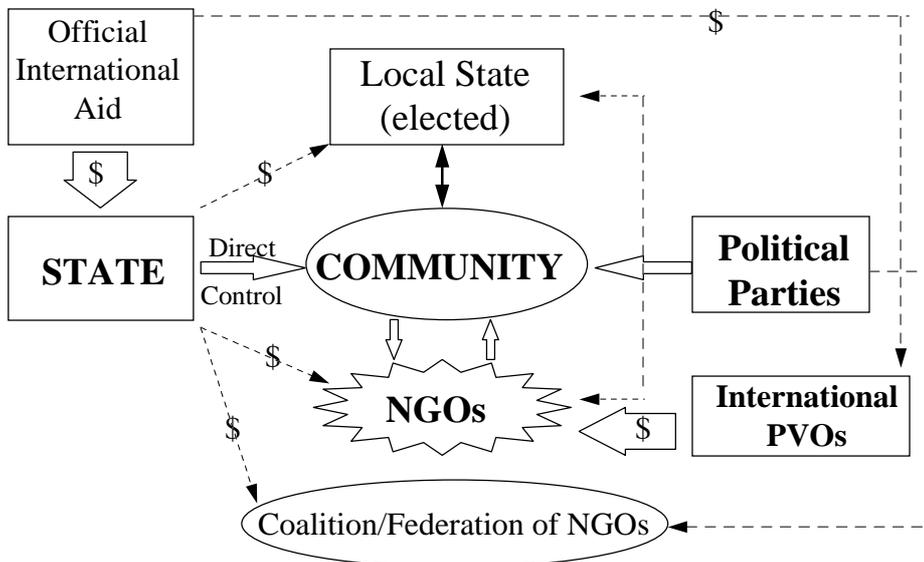
5

Model of State - NGOs relation : A. Authoritarian Regime



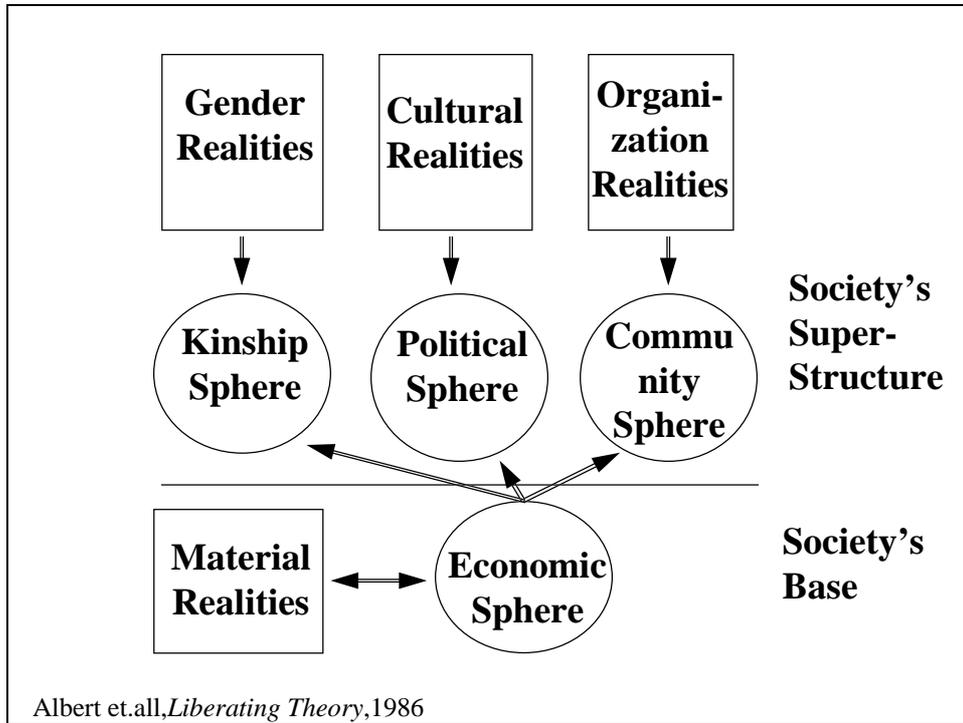
6

Model of State-NGOs Relation : B. Democratic Transition Regime



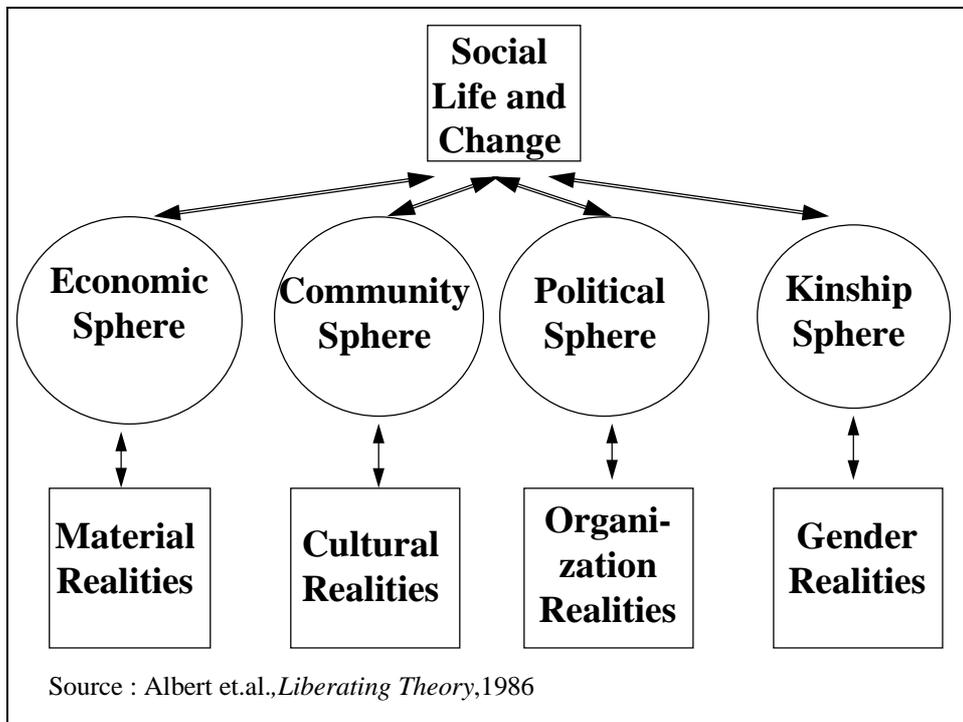
7

Subtle Monist Conceptualisation Economic Version

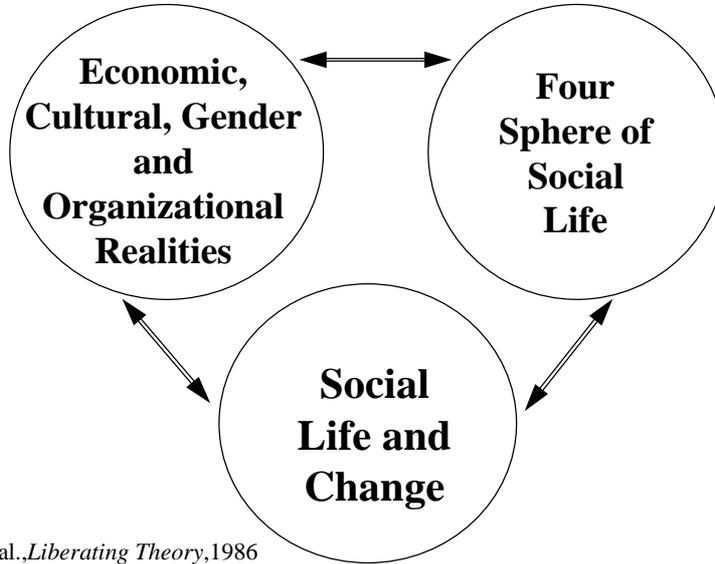


8

A Pluralist Conceptualisation

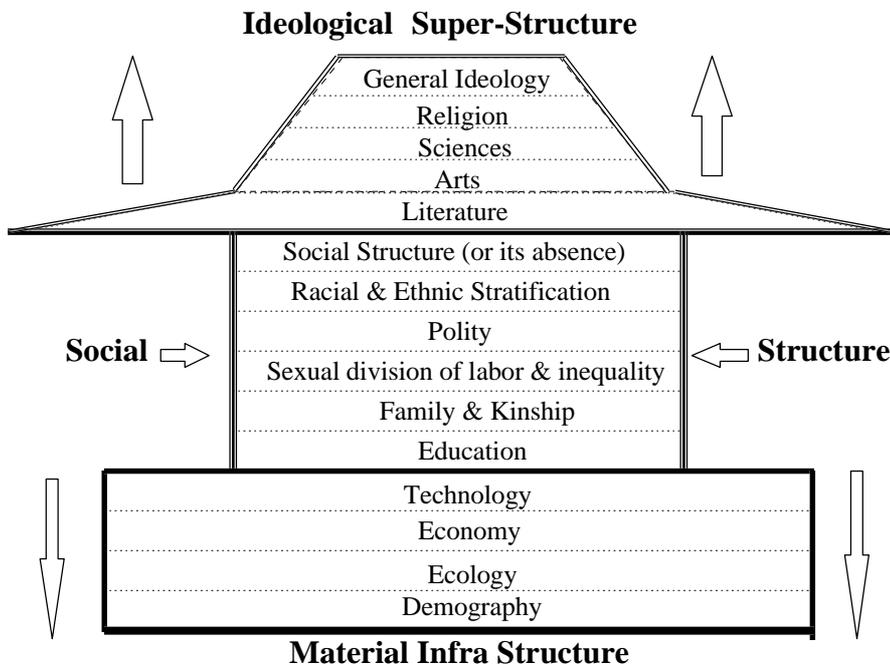


**A COMPLEMENTARY HOLIST
CONCEPTUALIZATION**



Source:
Albertet.al., *Liberating Theory*, 1986

The Basic Components of Socio-Cultural Systems



Source:
Sanderson, *Macro Sociology: An Introduction to Human Society*

DISKUSI

Pertanyaan

1. Mahsanah Asnawi (Muslimat NU, Jakarta)
Di samping ada LSM ada juga organisasi-organisasi kemasyarakatan seperti Ormas Keagamaan. Apakah dalam framework ini disebut LSM juga? Bagaimana hubungannya selama ini? Apakah NGO mempunyai grassroots? Muslimat NU mengakui bahwa tujuan LSM selaras dengan Ormas Keagamaan. Untuk yang akan datang, apakah program-program LSM bisa dipadukan (kerjasama) dengan ormas-ormas? Misalnya di Aceh ada LSM yang ingin membantu, tetapi tidak diterima oleh masyarakat setempat.
2. Pahir Halim (FIK-Ornop Sulsel, Makasar)
 - Ada kesan dari Billah bahwa yang Ornop developmentalis tidak benar. Menurut saya semua bermanfaat sepanjang bisa saling mengisi dalam perannya masing-masing. Semua LSM baik karena bermanfaat bagi masyarakat.
 - Saat ini isu Masyarakat Sipil sedang banyak dibicarakan orang. Bila Masyarakat Sipil terbentuk apakah negara/pemerintah masih diperlukan?
 - Makalah Pak Billah (Perkembangan Ornop di Indonesia) ini bagus, apakah tidak lebih baik dibentuk dalam sebuah buku karena sangat bermanfaat?
3. Abdurrahman (ASEAN Secretariat, Jakarta)
 - Mengenai klasifikasi Ornop/LSM tidak perlu ada dikotomi yang tajam antara yang developmentalis dan yang transformatif (strukturalis). Ada yang menggunakan kedua peran tersebut. Pandangan yang didasari Teori Dependensi Gunder Frank ini perlu dikaji secara lebih terpadu.
 - Aktivistis LSM harus bersikap kritis pada tempat dan posisi yang tepat, tidak sepotong-sepotong.
 - Good Governance merupakan korelasi dari 3 komponen yaitu negara, masyarakat (termasuk LSM), dan pasar. Perlu ada hubungan yang kritis dari 3 komponen tersebut dan masing-masing harus memahami fungsinya masing-masing. Yang paling penting adalah komunikasi dari ketiga elemen ini. Selama ini LSM Strukturalis sering menganggap yang bekerja di lapangan itu kacangan. Sebaliknya LSM yang di lapangan menyebut yang strukturalis hanya bicara saja.
4. Peni Chalid (Tim Pengendali JPS, Jakarta)
 - Beberapa pengalaman menunjukkan bahwa perlu adanya kerjasama antar NGO, karena satu dengan lainnya meng-*claim* masing-masing. Kalau NGO bertemu, sulit untuk menyatukan visi. Dari sekian rumitnya hubungan antar NGO itu pada sisi mana NGO bisa ketemu? NGO tidak bisa bekerja sendiri, perlu ada mitra yang lain.
 - Jika NGO meng-*claim* sebagai agen transparansi, demokrasi. Mungkinkah transparansi dan akuntabilitas diterapkan di dalam NGO sendiri?
 - Ada *flash back* dari Teori Neo Klasik, Teori Kritis dan Teori Dependensi. Jadi sebenarnya tidak ada batas yang tegas antara NGO developmentalis, reformis dan transformatoris.

5. Farida (Bina Sumber Daya Mitra, Jakarta)
Bila kita bernostalgia tentang LSM, dulu bila mendengar LSM adalah sama dengan berbicara tentang aktivis-aktivis yang heroik, sangat idealis, dan fundamental. Aktivis-aktivis banyak yang menjadi pelatih partisipatif, menjadi *agent of change*. Kemudian dalam proses perkembangannya, aktivis-aktivis ini 'sakit hati' menjadi LSM, karena kalau mereka turun ke lapangan banyak masyarakat tidak suka kepada LSM karena LSM suka menipu. Misalnya dengan adanya P3T banyak LSM-LSM yang di bawah orang-orang Depnaker. Kegiatannya bersifat '*project-oriented*'. Apakah ada krisis idealisme sehingga LSM menjadi oportunist? Peran LSM sebagai peneliti, advokasi, community development, penerbitan ini menjadi bagaimana?
6. Ribut Susanto (Riau Mandiri, Riau)
Dengan adanya *booming* LSM, apa yang harus dilakukan ke depan? Dengan *booming* LSM ini, mereka mengejar profit. Ada kemungkinan LSM terpuruk oleh kelakuan yang berlangsung di kalangannya. Yang kita takutkan adalah di dalam LSM terjadi perubahan-perubahan yang luar biasa, Apakah perlu melahirkan suatu kode etik, misalnya dengan persyaratan yang ketat, membangun jaringan yang mampu menjaga moral gerakan? Banyak LSM di Riau berkantor di Dinas PU, Bappeda dan sebagainya. Bahkan ada kantor LSM yang dilempari masyarakat.

Jawaban

Terima kasih atas komentar-komentarnya. Jangan memperlakukan saya sebagai dokter dan anda sebagai pasien.

1. Konteks Ormas sebenarnya masuk ke dalam kategori Ornop, tetapi dalam pelaksanaannya jaringan-jaringan NGO tidak memasukkan ormas, karena Ormas berpijak pada kekuatan massa (*mass-oriented*), sedangkan NGO berpijak pada isu (*issue-oriented*). Ornop tidak pernah mengklaim mewakili masyarakat, tetapi bisa ikut memperjuangkan kepentingan masyarakat. Ada dua kemungkinan interaksi: kerjasama dan konflik. Seringkali kepentingan Ornop dan Ormas tidak sama. Tidak selamanya ormas mengambil keputusan secara demokratis, sesuai dengan aspirasi anggotanya. Pengambilan keputusannya oligarkis. Pada ormas terjadi hegemoni pengurus terhadap anggota-anggotanya. Misalnya dalam Konggres atau Mukhtamar, keputusan-keputusan dilakukan oleh pengurus-pengurus cabang, bukan oleh anggota. Sedangkan Ornop bersifat kritis dan ada yang mempraktekkan, yang sifatnya partisipatoris.

Apakah perbedaan ideologis menutup kemungkinan kerja sama? Tentu tidak. Ideologi berbeda tetapi tetap dapat bekerja sama (kolaborasi). Misalnya PKI yang memiliki organ sampai ke bawah dan Perhimpunan Indonesia. Keduanya walaupun mempunyai ideologi berbeda tetapi bisa bekerja sama dalam penanganan isu. Bisakah Ornop bekerja sama dengan Ormas? Tentunya bisa, karena kedua-duanya memiliki pendapat yang sama, misalnya soal kemiskinan, dan sudah banyak yang melakukan hal itu.

2. Ornop developmentalis.
Pembagian NGO bisa dari kegiatannya (penelitian, advokasi, dsb.), orientasi ideologisnya, atau teoritisnya. Perbedaan kategori berdasarkan pada sifat-sifat ini juga tidak menutup kemungkinan kerja sama asal tidak pada tataran ideologi. Pada tataran ideologis atau teori, ada asumsi: masyarakat terjadi karena adanya proses negosiasi ---

menimbulkan kaidah-kaidah, tatanan yang disepakati untuk dilaksanakan sehari-hari. Di masyarakat, tatanan tidak ditanyakan, tetapi bagaimana diterapkan dalam masyarakat. Sedangkan konflik timbul bila ada yang mendominasi dan yang didominasi, antara harmonisme dan perebutan kepentingan.

3. Masyarakat sipil.

Di kalangan Islam sudah dipertanyakan: Mungkinkah masyarakat sipil tanpa negara? Apakah negara masih dibutuhkan? Mungkinkah kita bermasyarakat tanpa negara atau mendekonstruksikan negara.

Negara adalah bentuk sementara, sebelum terbentuk masyarakat nirnegara. Ada kelompok yang menerapkan pemilikan kolektif untuk komunitasnya. Negara semula diciptakan oleh manusia, namun kemudian (seperti robot yang) menguasai manusia.

4. Klasifikasi Ornop.

NGO bisa dipandang dari berbagai sudut pandang. Ketika kita memandang dari sudut pandang ideologis, banyak hal sulit dilakukan bersama. Ideologi dipakai sebagai alat pembeda.

5. *Good governance*

Good governance juga berlaku bagi NGO. NGO yang maling juga ada, NGO yang muncul kalau ada proyek. NGO ini menyebut dirinya NGO tetapi menipu rakyat. Penerapan transparansi dan akuntabilitas publik dari NGO menjadi agenda yang sangat kritis, tetapi sangat perlu secara terus menerus dipaksakan.

6. Pembelajaran NGO satu dengan yang lain.

NGO tetap menjadi non partisan dan kelompok penekan. Ada yang menjadi konsultan pembangunan: menjadi konsultan berbagai lembaga dunia maupun negara.

7. Teori Kritis dan Teori Dependensi

Ketika anda menghadapi dilema, akan terlihat apakah anda oportunistis atau idealis. NGO sebagai *training ground* untuk pengembangan cara pandang kritis. Teori Dependensi dikenalkan oleh LSP-nya Adi Sasono. Pada tahun 1980an pemerintah memotong kegiatan-kegiatan mahasiswa dengan konsep NKK/BKK. Pada saat itu, mahasiswa perlu mengaktualisasikan kegiatannya. Kemudian mereka masuk/bergabung dengan NGO, melakukan inovasi, dan akhirnya NGO menjadi kritis.

8. Kecenderungan yang sudah terjadi

Peran NGO tetap non partisan dan kelompok penekan. Ketika partai politik lumpuh, masyarakat membelokkan ke NGO. NGO tetap melakukan tekanan-tekanan. NGO (terutama yang developmentalis) memetaformasikan ke konsultasi, tenaga-tenaga terampil ke masyarakat. Misalnya LP3ES yang mengambil bentuk konsultasi (untuk Bappenas, Bank Dunia, dsb.). Namun pada saat menghadapi dilema, akan kelihatan apakah tersebut NGO oportunistis atau tidak. Banyak NGO besar yang menghadapi dilema. Misalnya pada saat membuat proposal dibuat *mark-up*. Setelah negosiasi, dilakukan pemotongan atau pemberian kepada pihak tertentu, dan pada saat tanda tangan kontrak dana sebesar 30% dipotong, misalnya untuk panitia pelaksana dari orang Depdagri yang dibayar tanpa kerja. NGO yang bekerja sama dengan pemerintah yang korup akan terbawa kepada masyarakat.

DINAMIKA ORNOP UTARA-SELATAN

PENGALAMAN OXFAM GB DI INDONESIA

Pendahuluan

Kerjasama antara Ornop Utara-Selatan telah menjadi pokok perdebatan dalam komunitas Ornop Indonesia paling tidak sejak awal tahun 70an. Isu yang menjadi bahan perdebatan berubah-ubah sesuai dengan perkembangan jaman. Pada tahun 70an yang menjadi pokok perdebatan adalah ideologi. Kata kuncinya adalah: sosialisme, liberalisme, dan berbagai jenis isme yang lain. Tahun 80an perdebatan lebih banyak terpusat pada mekanisme pengelolaan dana. Kata kunci pada dasawarsa ini adalah: *direct funding*, *North-South Forum*, *gate keeper*, dan lain sebagainya. Tahun 90an perdebatan kembali lagi kepada gagasan besar: neo-liberalisme, globalisasi, dan masyarakat sipil (*civil society*). Secara amat disederhanakan, hubungan antara Ornop utara-selatan dapat disebut sebagai sebuah ketegangan (*tension*) terus-menerus. Bila dikelola dengan baik, ia akan dapat menjadi sumber energi untuk perubahan. Akan tetapi dia juga bisa menjadi sumber "pembusukan" komunitas Ornop.

Makalah ringkas ini berusaha untuk mengenali sumber-sumber ketegangan itu dengan mengupas motivasi masing-masing pihak melakukan hubungan, serta bagaimana hubungan itu diwujudkan selama ini. Pada bagian akhir coba dilihat isu-isu penting yang perlu dikenali agar tidak menjadi ganjalan. Untuk memperjelas maksud yang hendak disampaikan, contoh dari hubungan Oxfam dengan mitranya akan dikemukakan bilamana diperlukan.

Batasan

Ornop

Organisasi Non-Pemerintah (Ornop) merupakan entitas yang sangat beragam. Sebuah daftar yang dikeluarkan oleh PBB, misalnya, mencantumkan lembaga penelitian, organisasi profesi, serikat buruh, kamar dagang dan industri, organisasi pemuda, organisasi keagamaan, perkumpulan orang lanjut usia, lembaga promosi pariwisata, yayasan swasta, partai politik, dan lain sebagainya sebagai Ornop. Apa yang akan kita diskusikan di sini adalah satu jenis Ornop yang pada masa lalu dikenal sebagai Lembaga Pengembangan Swadaya Masyarakat (LPSM). Yaitu organisasi yang didirikan untuk kepentingan orang lain, bukan kepentingan pendiri atau anggotanya, dengan misi yang biasanya berhubungan dengan pengurangan kemiskinan, pembangunan, atau pemberdayaan masyarakat.

Dalam konteks industri pembangunan (*aid industry*), Ornop jenis ini merupakan lembaga perantara yang penting dalam menyalurkan dana dari negara-negara kaya (=utara) ke negara-negara miskin (=selatan). Dalam diskusi ini, istilah-istilah yang mengaburkan arti seperti negara yang sedang berkembang, atau dunia ketiga, sengaja tidak dipergunakan untuk memudahkan rujukan bersama. Selain itu, setelah berakhirnya perang dingin

penggunaan istilah timur-barat, dan dunia ketiga semakin kekurangan angin dalam perdebatan-perdebatan di kalangan Ornop.

Utara

Yang dimaksud Utara di sini adalah negara-negara kaya anggota OECD yaitu negara-negara di Eropa Barat, Amerika Utara, ditambah dengan Jepang dan Australia. Tentu saja batasannya, dengan demikian juga keanggotaannya, dapat selalu diperdebatkan.

Selatan

Tentu saja tidak semua negara-negara "Selatan" berada di belahan selatan bumi. Sejak runtuhnya tembok Berlin, dan bangkrutnya imperium Uni Soviet, negara-negara yang dikategorikan miskin dan mendapat bantuan pembangunan dari negara-negara OECD menjadi semakin bertambah. Pemakaian istilah Selatan untuk negara-negara non-OECD semakin diterima dalam perdebatan-perdebatan internasional, misalnya dengan kerjasama Selatan-Selatan, atau Kelompok Selatan (G-77).

Alasan

Pertanyaan yang sering ditanyakan oleh Ornop Indonesia kepada Oxfam adalah apa motivasi kami bekerja di Indonesia. Melihat pada perjalanan sejarah Oxfam, paling tidak ada empat alasan yang dapat dicatat:

Derma (Charity)

Oxfam lahir di tengah-tengah berkecamuknya perang dunia ke dua, ketika tentara sekutu memblokir Yunani yang tengah diduduki oleh tentara Jerman. Pada saat itu, banyak warga sipil Yunani yang menjadi korban karena kelaparan. Warga Inggris kemudian melakukan pengumpulan dana, makanan dan pakaian untuk dikirimkan kepada warga Yunani dengan menembus blokade tentara sekutu. Motivasi membantu mereka yang membutuhkan mendapatkan dorongan dari ajaran agama-agama besar di dunia. Orang-orang Samaria merupakan model yang ditunjukkan oleh kitab Injil. Dalam agama Islam hal itu dilembagakan melalui zakat. Derma juga merupakan ajaran penting bagi agama-agama yang lahir di India. *Charity* sampai saat ini merupakan motivasi penting bagi masyarakat Inggris untuk memberikan sumbangannya kepada Oxfam. Saat ini ada kurang lebih 200,000 orang yang secara teratur memberikan sumbangan kepada Oxfam. Sumbangan ini merupakan hampir seperempat dari seluruh pemasukan Oxfam, yang memungkinkan Oxfam dapat lebih fleksibel dalam menyusun prioritas-prioritasnya.

Tanggung Jawab Etis

Setelah perang dunia ke dua, Inggris memulai proses dekolonisasi negara-negara jajahannya. Bersamaan dengan itu, kembali pula serombongan besar pejabat-pejabat kolonial, dan imigran dari negara-negara bekas jajahan. Orang-orang ini membawa dimensi baru dalam dunia Ornop di Inggris yaitu informasi mengenai negara-negara di seberang lautan, dan juga kekayaan yang dapat disumbangkan pada kegiatan-kegiatan charity. Mereka juga memperkuat perasaan bertanggungjawab masyarakat Inggris

terhadap kerusakan yang dialami oleh negara-negara bekas jajahannya. Satu motivasi yang merupakan lanjutan dari "Tanggungjawab orang putih untuk membangun peradaban" yang kental pada awal kolonisasi dan misionari. Dalam bentuknya yang baru, tanggungjawab ini dibungkus dalam bentuk tanggungjawab masyarakat Inggris sebagai warganegara dunia.

Solidaritas

Setelah periode radikalisme di akhir tahun 60an yang ditandai dengan protes anti-nuklir dan anti perang Vietnam, kesadaran baru akan saling ketergantungan antar manusia yang hidup dalam "kapal ruang angkasa bumi" semakin mendapatkan momentum. Gerakan lingkungan hidup, feminisme, hak asasi manusia dan sejenisnya lahir pada masa-masa ini. Kesadaran baru ini, tentu saja, juga mempengaruhi Ornop-Ornop yang sudah mapan seperti Oxfam. Pada saat itu juga mulai bermunculan organisasi baru yang mengadopsi falsafah Oxfam yang lahir di Inggris, seperti Oxfam-solidarite di Belgia, Oxfam Jerman, Oxfam Canada, Oxfam Amerika, Oxfam Hongkong dan Oxfam New Zealand. Kemudian, beberapa organisasi lain yang memiliki sejarah yang berbeda akan tetapi memiliki orientasi nilai yang sama seperti NOVIB (Belanda), INTERMON (Spanyol) dan CAA (Australia), bergabung untuk membentuk persekutuan Oxfam Internasional. Persekutuan ini dibangun untuk memberi dampak yang lebih besar terhadap perubahan tata dunia yang lebih adil untuk semua orang yang hidup di Utara dan Selatan, tanpa membedakan keturunan dan status sosial, laki-laki dan perempuan, anak-anak dan orang tua, generasi sekarang dan generasi yang akan datang.

Dana

Tahun 80an memperlihatkan tumbuh-kembangnya komunitas Ornop di dunia. Pada saat itu, sejalan dengan dominannya paradigma neo-liberalisme yang disponsori oleh duet Ronald Reagan dan Margareth Thatcher, Ornop Utara dilihat sebagai saluran yang efektif untuk menyalurkan bantuan. Bantuan resmi pemerintah (*official development aid*) menjadi sumber pembiayaan yang terbesar dari Ornop-Ornop utara. Oxfam, misalnya menetapkan batas maksimum sepertiga dari pemasukannya dari bantuan pemerintah untuk menjaga independensinya. Akan tetapi banyak Ornop di negara-negara utara yang hampir seratus persen dari pemasukannya berasal dari bantuan resmi pemerintah.

Sukar bagi kita untuk dapat menggeneralisasikan motivasi Ornop Selatan untuk mau melakukan hubungan dengan Ornop Utara. Akan tetapi dari pengalaman berhubungan dengan mitra Oxfam selama ini, paling tidak ada 3 hal yang menonjol:

Inspirasi

Sebagian besar dari Ornop Indonesia lahir pada tahun 70an dan 80an. Pada saat itu bentuk pengorganisasian Ornop merupakan ruang yang terbuka sejak dimulainya konsolidasi politik rezim orde baru. Banyak Ornop mendapatkan inspirasi dari bacaan-bacaan yang populer di kalangan mahasiswa dan kelas menengah terdidik saat itu: perdebatan mengenai teori ketergantungan, gerakan lingkungan hidup, feminisme, dan lain sebagainya. Ada juga yang berdiri karena termotivasi dengan hadirnya Ornop internasional yang diijinkan masuk ke Indonesia setelah tahun 1968.

Persekutuan

Dalam situasi politik yang semakin pengap pada akhir tahun 80an, maka banyak agenda perubahan Ornop Indonesia hanya mungkin dilaksanakan dengan membangun persekutuan dengan Ornop-Ornop lain di luar Indonesia. Pembentukan forum-forum Ornop Indonesia-Canada, Indonesia-Australia, dan pendirian INGI (kemudian berubah menjadi INFID) di paruh kedua tahun 80an merupakan bentuk persekutuan yang efektif memperkuat posisi tawar Ornop Indonesia di dalam maupun di luar negeri.

Bantuan

Tak dapat diingkari, bantuan keuangan dan bantuan teknis merupakan alasan banyak Ornop Indonesia membangun kontak dan hubungan dengan Ornop dari Utara. Sampai saat ini, bantuan dana masih tetap merupakan alasan yang penting dalam mengikat hubungan ke dua belah pihak, dan mungkin pula merupakan sumber ketegangan yang utama dalam hubungan ini.

Bentuk Kerjasama

Proyek

"Proyek" telah mendapat nama begitu buruk selama ini di Indonesia. Akan tetapi proyek masihlah merupakan bentuk kerjasama yang utama dalam industri pembangunan, termasuk dalam hubungan Ornop Utara dan Selatan. Kerjasama proyek biasanya tujuannya sangat spesifik, dengan jangka waktu dan pendanaan yang terbatas. Bentuk kerjasama ini bisa berupa penanaman jagung di satu lokasi tertentu, sampai dengan upaya perubahan undang-undang agraria. Bisa dalam bentuk lokakarya, atau berupa pembelian barang-barang modal. Rentangnya luas sekali.

Kerjasama proyek, karena waktunya terbatas, sering menimbulkan banyak permasalahan. Yang pertama adalah tidak ada jaminan bahwa ada hubungan yang berlanjut setelah proyek selesai, padahal upaya perubahan yang ingin dilakukan oleh Ornop biasanya berjangka menengah atau panjang. Yang kedua, jarang sekali ada lembaga pemberi dana untuk bersedia memberikan bantuan dalam pengembangan kemampuan Ornop, atau barang-barang modal, dalam bentuk proyek. Padahal hal inilah merupakan kebutuhan utama Ornop yang baru mulai.

Program

Untuk mengatasi kelemahan-kelemahan pendekatan proyek, maka banyak Ornop mulai membangun kerjasama atas dasar program. Hubungan ini biasanya berjangka lebih panjang 3-5 tahun, dengan komponen yang lebih terintegrasi, misalnya: peningkatan produksi pertanian, penyediaan modal, advokasi, dan pengembangan kelembagaan. Untuk mendapatkan dampak yang lebih besar, kerjasama program juga biasanya melibatkan lebih banyak Ornop yang memiliki keahlian atau minat yang komplementer. Sejak tahun 1995, sembilan puluh persen dari kerja Oxfam di Indonesia merupakan kerjasama program. Dalam tahun terakhir ini, proporsi ini agak bergeser dengan banyaknya proyek bantuan kemanusiaan di lokasi-lokasi yang dilanda konflik.

Pendekatan program, sesungguhnya banyak lebih mempermudah administrasi Ornop Utara, karena memindahkan beban itu kepada sekretariat bersama yang dibentuk oleh mitra. Selain itu, komponen pengembangan kelembagaan yang dirancang untuk menjamin keberlanjutan kegiatan setelah program berakhir dapat dengan mudah "disusupkan" ke dalam rancangan program. Akan tetapi hal ini juga akan membuat Ornop menjadi kurang lentur dalam menanggapi perubahan-perubahan yang terjadi secara cepat. Pengalaman Oxfam di Maluku, misalnya, menunjukkan bahwa komitmen program jangka panjang dengan mitra membuat Oxfam tidak dapat dengan cepat menyesuaikan diri dengan perubahan karena banyaknya pihak-pihak yang terlibat dan harus diajak berkonsultasi. Masalah juga bisa muncul bila mitra-mitra yang bergabung dalam kerjasama program masih belum selesai dengan usaha membangun visi bersama, dan tidak memiliki mekanisme pengambilan keputusan yang dapat diterima oleh semua pihak.

Aksi Solidaritas

Pada masa-masa terakhir ini mulai tumbuh satu bentuk kerjasama baru, yaitu aksi solidaritas. Salah satu bentuk dari kerjasama ini adalah tidak ada, atau minimalnya, transfer dana dari Utara ke Selatan, maupun sebaliknya. Yang dipertukarkan adalah informasi, yang kemudian dipergunakan di kedua belahan bumi untuk melakukan perubahan kebijakan negara. Contoh yang paling mutakhir adalah gerakan Jubilee 2000 yang bertujuan untuk menghapuskan hutang negara-negara paling miskin di dunia.

Wilayah Ketegangan

Nilai

Ornop merupakan cerminan dari masyarakat tempat ia lahir dan tumbuh. Oleh karena itu tak dapat dihindarkan nilai-nilai Ornop Utara dan Selatan ada yang berimpit, ataupun sama sekali berlawanan. Dalam pengalaman Oxfam, isu keadilan *gender* misalnya merupakan area konflik nilai yang sering dihadapi dalam hubungannya dengan mitra. Bagi Oxfam keadilan *gender* merupakan nilai inti (*core value*) yang tak dapat dikompromikan. Akan tetapi banyak mitra merasakan itu sebagai bentuk pemaksaan kehendak bila dipergunakan sebagai persyaratan bekerjasama. Kita bisa perluas contoh ini dengan penghormatan pada hak azasi manusia, transparansi, kesetaraan, otonomi, dan lain-lain yang selama ini diasumsikan merupakan nilai-nilai inti komunitas Ornop Indonesia. Cara untuk mengatasi ketegangan ini adalah dengan berusaha lebih eksplisit mengenai nilai-nilai inti ini sejak awal menjalin hubungan. Ini berarti perlu periode "pacaran" yang cukup lama untuk saling mengenal, sebelum mengikatkan diri dalam hubungan kerjasama yang lebih formal. Pada masa pacaran ini mungkin saja terjadi proses saling mempengaruhi di antara kedua belah pihak.

Cara Kerja

Agak lain dengan perbenturan nilai, wilayah ketegangan ini ada pada tingkatan strategi dan taktik. Banyak mitra di Selatan meminta Ornop Utara untuk mempercayakan pelaksanaan kerjasama itu kepada mereka. Akan tetapi karena rentang kompetensi dan ketrampilan yang dimiliki oleh Ornop Selatan sangat bervariasi, maka Ornop Utara juga memiliki pilihan keterlibatan (*engagement*) yang berbeda-beda pula. Meminjam ucapan bijak

ki Hajar Dewantara yang sering dikutip oleh Departemen Pendidikan: *Ing ngarso tulodo, ing madyo mbangun karso, lan tut wuri handayani*. Berdasarkan pengalaman Oxfam, semakin operasional Ornop Utara di Selatan, maka semakin besar pula kemungkinan gesekan dengan mitranya. Akan tetapi tanpa keterlibatan, maka Ornop Utara akan kehilangan kesempatan besar untuk belajar dari dan membangun solidaritas dengan mitranya di Selatan.

Akuntabilitas

Karena sebagian besar dari hubungan Ornop Utara-Selatan mengandung unsur kerjasama pendanaan, maka akan selalu ada pertanyaan besar kepada siapa mereka bertanggungjawab: pada donor (mereka yang memberi uang), atau kepada penerima manfaat (yaitu mereka yang dijadikan alasan untuk mendapatkan uang)? Ornop Utara yang menerima bantuan pendanaan dari pemerintah biasanya meneruskan beban pelaporan keuangan kepada mitranya di Selatan. Hal ini sering memberikan beban yang berlebihan kepada Ornop di Selatan. Di lain pihak Ornop di Selatan sendiri sering tidak mampu memberikan alternatif bagi bentuk pertanggungjawaban yang dapat di terima. Sebagian besar Ornop Indonesia berbentuk yayasan yang membuat mereka hanya bertanggungjawab pada dirinya sendiri. Apakah ada jalan lain? Misalnya sebuah hubungan tanpa unsur pendanaan, dan hanya berdasarkan kesamaan nilai dan gagasan? Pilihan yang sampai saat ini belum dapat diterima oleh mayoritas Ornop di Utara dan Selatan karena dalamnya cengkeraman industri pembangunan dalam diri Ornop. Bahkan, boleh dikatakan Ornop merupakan produk dari industri pembangunan tersebut.

Prospek di Masa Depan: Agenda Bersama Utara-Selatan

Saat ini sebetulnya sudah semakin berkembang kesadaran baru akan perlunya agenda bersama Ornop Utara dan Selatan. Agenda bersama ini selama ini belum banyak pergi dari retorika, walaupun sudah mulai ada upaya-upaya eksperimen untuk membangun solidaritas bersama. Beberapa tantangan ke depan yang akan dihadapi oleh Ornop di Utara maupun selatan adalah: liberalisasi perdagangan global, perusakan lingkungan yang masih berlangsung terus, peningkatan kekerasan yang dipicu oleh berlebuhnya pasokan senjata sejak berakhirnya perang dingin, dan berbagai bentuk ketidakadilan yang masih berlangsung di banyak bagian dunia. Bukan tempatnya dalam makalah ini untuk mengulas lebih dalam mengenai agenda global ini. Akan tetapi penulis masih melihat cukup banyak ruang untuk membangun kerjasama Ornop Utara-Selatan. Tantangannya mungkin terletak pada keberanian kita untuk keluar dari jebakan industri pembangunan yang agendanya ditetapkan bukan oleh Ornop.

DISKUSI

Pertanyaan

1. Mochtar Bahar (LPPSE, Jakarta)
 - Agar dapat melakukan *delinking*, ada beberapa LSM yang diajar untuk melakukan *fund-raising*. Saat ini hanya sekitar 10% LSM Jabotabek yang mampu mencari dana sendiri. Selebihnya daripada mencari dana sendiri memilih ikut melakukan proyek-proyek JPS, gender, dan sebagainya. Mengapa isu-isu yang digarap sama warnanya? Apakah LSM tertarik pada isu-isu tersebut karena kemudahan mendapatkan dana?
 - Mungkin diperlukan fasilitator yang dapat mengajak kita memperbaiki diri kita sendiri agar kembali ke fitrahnya (LSM perjuangan versus LSM memikirkan perut sendiri). Apakah SMERU dapat menjadi fasilitator untuk ini?
2. Dewi (JAPORI, Jakarta)

LSM lahir sebagai akibat adanya destruksi sistem bernegara. Dukungan dana diperlukan agar LSM dapat berperan melawan pelaku destruktif ini. Dalam kenyataannya, LSM menggunakan dana dari luar Indonesia yang sengaja membantu dengan alasan “keprihatinan” meskipun sebetulnya ada kepentingan tertentu yang ingin mereka capai.

Sudah ada konsep untuk keluar dari kerumitan kerja LSM saat ini. Namun, sistem lama sudah terlanjur memasyarakat. Ketergantungan LSM pada bantuan dana sudah sangat tinggi. Bagaimana kita melepaskan diri? Perlukah kita merekayasa konflik agar pihak-pihak luar dapat terus menaruh perhatian dan mengucurkan dana?

3. Endang Suhendar (AKATIGA, Bandung)

Delinking yang telah dijabarkan dalam teori sangat berat dilaksanakan karena *link* yang ada sekarang berkaitan dengan pola kekuasaan. Segala sesuatu ditentukan dari pihak utara. LSM di tingkat bawah sebetulnya justru memiliki potensi kuat untuk melakukan *delinking* ini karena mereka mengakar ke bawah. Kesulitan *delinking* justru dirasakan oleh Ornop besar dengan dukungan dana dari luar. Saat ini tidak ada LSM yang secara transparan melaporkan keuangan organisasinya. Sejauh tidak ada yang transparan, *delinking* tidak akan pernah bisa terwujud.

Jawaban

Ornop Utara memang lebih *project-oriented*, tetapi hal ini juga salah satu upaya pemberdayaan mitranya. Semakin operasional Ornop Utara, semakin tinggi gesekan yang terjadi dengan Ornop/LSM di Selatan. Tetapi jika tidak demikian, maka Ornop di Ujuga tidak memperoleh proses pembelajaran. ‘*Engagement*’ antar 2 NGO inilah yang membuka peluang belajar.

Sekali terlibat dalam industri pembangunan maka kedua pihak semakin terikat. Misalnya: program poverty alleviation oleh Oxfam. Program ini diselenggarakan karena di

Indonesia belum banyak organisasi kemanusiaan, kebanyakan organisasi pembangunan. Karena itu Oxfam hadir di Indonesia.

Tentang *fund-raising*, dulu banyak organisasi-organisasi seperti Taman Siswa dan Sarekat Islam yang bisa hidup dari iuran anggotanya sendiri. Tetapi NGO-NGO sekarang kebanyakan sudah biasa mendapat sumber dana secara mudah, sementara yang lain membutuhkan kerja lebih keras untuk menggali dana. *Delinking* semakin memaksa kita melakukan apa yang kita bicarakan sore ini. Simak diskusi dalam Kongres Aliansi Masyarakat Adat.

Pada kenyataannya banyak dana yang diterima digunakan untuk kepentingan Ornop itu sendiri, misalnya: *voter education*. Jika kita ingin melakukan *delinking*, maka kita harus melakukan sesuatu yang lebih terfokus, dengan konstituen yang jelas, dan sebagainya.

Keinginan Pembicara adalah bahwa harus ada pembagian tugas yang lebih jelas diantara Ornop. Ornop Utara sebaiknya mengurus dirinya sendiri, demikian pula Ornop Selatan.

Komentar Moderator (Risman Musa)

Kita memang sering menerima kompromi yang ditawarkan Ornop utara. Barangkali memang ada skenario agar *delinking* tidak terjadi. Dikotomi ini perlu dibahas.

Pertanyaan

4. Tom Malik (Rio Tinto, Jakarta)
Mengenai *delinking*. Kita selalu berhubungan dengan berbagai pihak, karena itu tidak mudah melakukan *delinking* karena masyarakat atau organisasi mempunyai agenda masing-masing. Seandainya 3 lingkaran (pemerintah, swasta, voluntir) melakukan fungsinya sebaik mungkin, saling kontrol, maka akan baik. Nilai sukses suatu NGO adalah bila NGO tersebut sudah tidak dibutuhkan lagi oleh masyarakat. Rio Tinto, misalnya, sebetulnya tidak mau memberikan *public services*, tetapi karena fungsi pemerintah belum berjalan baik, maka karena peduli, Rio Tinto melakukan.
5. Harley (Walhi Sulawesi Tengah, Palu)
 - Profesionalisme tidak perlu diterapkan dalam NGO karena dapat membentuk “kotak-kotak” keahlian tertentu. Permasalahan yang ada justru beragam. Namun, individu di NGO boleh saja profesional.
 - Hal penting yang sebaiknya terintegrasi dalam pembangunan formal adalah “penanggulangan korban bencana”.
 - Kritik Walhi terhadap *funding agencies* yaitu mereka mengejar *target project* yang harus dikerjakan/diselesaikan. NGO tidak perlu meresahkan kekurangan dana karena ideologi sebetulnya bisa membayarnya. Juga, pendanaan tidak selalu harus dari pihak atas dan bukan target yang harus dikejar. Pada kenyataannya, jumlah lembaga pendanaan ini semakin bertambah. Ada NGO yang seolah-olah menyembah lembaga. Apakah kebijakan *funding yang top down* ini dapat diubah?
6. Deny P. Sambodo (IDEA, Yogyakarta)
 - Bila kita mau jujur, ideologi yang ingin dibangun oleh donor adalah bagaimana liberalisasi ekonomi dapat terjadi di negara dunia ketiga.

- Indonesia mempunyai beberapa persoalan, antara lain:
 - NGO Indonesia belum bisa mengantisipasi *bidden agenda* para donor, karena itu tidak mengetahui dampaknya dan belum bisa memposisikan diri.
 - Ideologi diantara NGO belum jelas
 - Hubungan antara NGO utara dan NGO selatan adalah hubungan *dependency*, bukan *interdependency*

Jawaban

Bila kita berbicara mengenai *delinking* tidak berarti bahwa Ornop Indonesia mengisolasi dirinya. Hal yang perlu dilakukan adalah memutuskan hubungan lama, kemudian membuka hubungan baru dengan *terms* yang berbeda. Dulu *terms* Ornop Utara ditentukan oleh ODA karena mereka terikat kontrak dengan ODA.

Berbicara mengenai *funding*, Oxfam bukan *funding agency*. Oleh sebab itu, ketika Oxfam akan bekerja sama dengan Ornop lain, Oxfam akan melihat faktor-faktor berikut ini:

- Apakah ada ideologi yang sama atau berhimpitan?
- Apakah ada persamaan nilai?
- Apakah ada unsur *complementary* diantara organisasi yang bersangkutan (*skills, competency*, dan sebagainya)

Memang Ornop sering tidak bisa memilih, juga dalam sektor atau area kerja. *Strategic planning* bisa dirancang oleh Ornop yang bersangkutan, tetapi ketika berbicara tentang apa yang dilakukan dengan dana yang dimiliki, Ornop tersebut kembali pada *terms* yang harus dipenuhi.

Perdebatannya adalah apakah Ornop itu voluntary atau tidak.

Agenda besar ORNOP (menurut Fowler, 1997) adalah mengembalikan hal-hal berikut ini:

- mengubah dunia yang tidak adil menjadi dunia yang lebih adil;
- mengubah pembangunan yang rakus menjadi yang berkelanjutan (*sustainable development*);
- menciptakan sistem pemerintahan yang lebih *inclusive, accountable*.

Agenda ke tiga bisa dilakukan pada tingkat mikro dan makro. Pada tingkat mikro yaitu dengan merestrukturkan *political economy*, dan mengembalikan *international order*. Proyeksi dilakukan juga pada tingkat negara dan bangsa, tidak selalu di tingkat perdesaan saja, tetapi juga di di negara-negara Utara. Masalah yang ada sangat banyak, harus diyakini bahwa selalu ada tempat bagi NGO untuk melakukan sesuatu. Bila NGO tidak saling berebut, semua bisa melakukan sesuatu. Tetapi, bila segala sesuatu diukur dengan uang, maka semuanya menjadi komoditi. Apakah kita mau keluar dari industri pembangunan, bekerja dengan *terms* kita sendiri, tidak rakus, dan *committed*?

Masalah Ornop Selatan/Indonesia dan Ornop Utara sama saja, masih terjebak dalam hubungan yang telah ada. Jadi kita harus siap bergesekan dengan mitra di Utara atau di Selatan.

Komentar Moderator

Apakah kita mau mandiri? Kita harus bisa *delinking* diri kita.

KELAHIRAN DAN PERKEMBANGAN LSM DI ACEH

XXXXXXXXXXXX ©©© XXXXXXXXXXXXXXX

Tabrani Yunis
CCDE, Aceh

Tabrani Yunis adalah direktur Center for Community Development and Education (CCDE) di Banda Aceh. Tabrani aktif di dunia Ornop sejak tahun 1991 sampai sekarang. Ia menyelesaikan sarjana pendidikannya di Jurusan Bahasa Inggris, pada tahun 1989. Kegiatan CCDE yang dipimpinnya memfokuskan perhatian pada pengembangan masyarakat dan pendidikan & pelatihan bagi kelompok dampingan untuk masalah lingkungan hidup, peningkatan pendapatan dan usaha kecil, pemberdayaan perempuan melalui pembentukan kelompok usaha kecil perempuan, dan penyediaan modal usaha kepada kelompok dampingan.

KELAHIRAN DAN PERKEMBANGAN LSM DI ACEH

Latar Belakang

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), sebutan lunak dari Ornop (organisasi non pemerintah) yang diadopsi dari istilah Internasionalnya Non Governmental Organization (NGO) selama ini semakin populer di tanah air. Lembaga yang menurut Aswab Mahasin (1989) kelahirannya di Indonesia pada tahun 1970 an ini, kini telah merambah ke seluruh pelosok tanah air, sampai ke desa-desa. Di samping karena pertumbuhan dan perkembangannya yang sangat pesat tersebut, pemerintah juga sangat berperan dalam mempopularkan nama institusi ini karena munculnya label Ornop sebagai lembaga yang menjadi lawan pemerintah. Label yang kemudian muncul karena sikap kritis Ornop yang selalu mengkritisi pemerintah dalam melaksanakan pembangunan yang sentralistis, tidak partisipatif (top down) dan terlalu menekankan pada ekonomi dan sebagainya. Sikap kritis ini, kemudian telah menempatkan Ornop pada posisi yang salah satunya sebagai social control yang mengontrol aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah. LSM kemudian semakin populer karena munculnya sentimen negatif antara LSM (Ornop) dengan pemerintah yang akhirnya membuat pemerintah kebakaran jenggot.

Tulisan ini tidak akan melakukan sebuah pengkajian (analisis) yang mendalam dan kritis, karena hanya memaparkan tentang cikal bakal, pertumbuhan dan perkembangan organisasi non pemerintah (Ornop) atau yang sekarang lebih sering disebut dengan nama Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di Aceh. Oleh sebab itu, pemaparan dalam tulisan ini lebih menekankan pada deskripsi historis tentang kelahiran, latar belakang (historical background), program dan kegiatan, tantangan dan prospek Ornop-Ornop di Aceh dalam konteks masa lalu, masa kini dan esok.

Kelahiran dan Perkembangan LSM di Aceh

Berbicara soal kelahiran Ornop di Aceh, pada hakikatnya telah berembrio sejak sebelum tahun 1970 an. Karena pada saat itu di Aceh telah ada organisasi yang dibentuk oleh kalangan orang-orang di luar pemerintahan dalam bentuk yayasan keagamaan seperti halnya dayah. Keberadaan dayah sebagai organisasi di luar pemerintahan yang menangani masalah-masalah yang dihadapi oleh umat dengan menjalankan usaha-usaha pemberdayaan rakyat melalui jalur pendidikan dan peningkatan kualitas serta pendapatan rakyat. Yayasan-yayasan tersebut tidak dikenal sebagai sebuah Ornop atau sebuah lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Kemudian pada tanggal 22 Agustus 1974 sebuah Ornop kelahiran Jakarta, 23 September 1957, datang dan membuka kantornya di Aceh. Lembaga ini bergerak di bidang Keluarga berencana, yakni Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI). Sebelum PKBI Aceh hadir di Banda Aceh, PKBI juga telah lebih dahulu hadir di Aceh Timur pada tahun 1963. Namun kehadiran PKBI di Aceh Timur pada tahun 1963 dan kehadirannya di kota Banda Aceh pada tahun 1974 tersebut, barangkali, tidak dapat kita katakan sebagai sebuah kelahiran, karena Ornop tersebut lahir di luar Aceh dan kemudian didrop ke daerah seperti Aceh. Apalagi secara struktural, PKBI Aceh memiliki sistem kepengurusan yang sangat struktural. Demikian

juga halnya dengan Ornop Save The Children Foundation (SCF) yang hadir ke Aceh pada tahun 1976. Ornop ini adalah sebuah Ornop Amerika yang pada tahun 1976 memulai kegiatannya di Aceh sebagai pelaksana program di daerah Aceh dengan sebutan Aceh program. Sekali lagi bahwa kehadiran kedua Ornop tersebut ke tanah rencong pada saat itu bukanlah sebagai sebuah kelahiran dan belum dapat dikatakan sebagai sebuah gerakan. Hal ini disebabkan oleh arah dan sifat kegiatan yang dilakukan saat itu tampaknya sangat sempit dan berorientasi kepada program (*program oriented*). Masyarakat Aceh sendiri pada saat itu tidak mengenalnya sebagai Ornop (LSM).

Di dalam catatan sejarah kelahiran LSM di Aceh, LSM tersebut baru mulai tumbuh satu persatu sejak tahun 1970an. Hal ini ditandai oleh lahirnya Yayasan Badan Koordinasi Pengembangan Sosial Masyarakat (YAPSM) di kecamatan Tangse, Kabupaten Pidie. Institusi ini tercatat sebagai sebuah Ornop sebagaimana kehadirannya termuat di dalam direktori LSM Aceh. Maka, kehadiran yayasan ini barangkali dapat dikatakan sebagai embrionya Ornop di Aceh yang kelahirannya diprediksikan sebagai dampak dari kehadiran Save The Children di daerah Tangse yang menjadi daerah binaan SCF pada saat itu. Dilihat dari tujuan pendiriannya, yayasan ini bertujuan meningkatkan taraf hidup masyarakat dalam berbagai sektor. Tiga tahun kemudian, pada tanggal 5 Mei 1979 di Aceh Besar, berdiri pula sebuah yayasan badan pengembangan masyarakat (YBPSM) yang memiliki tujuan yang sama yakni meningkatkan taraf hidup masyarakat, dengan daerah binaan berada di daerah Lamteuba, Aceh Besar. Daerah Lamteuba juga desa binaan SCF sejak tahun 1976. Pada tahun 1980 lahir pula sebuah Ornop baru Yayasan Panglima Polem yang membawa misi memajukan pengajaran pendidikan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Akan tetapi kehadiran Ornop ini juga tidak dikenal sebagai sebuah Ornop (LSM). Entah pada saat itu memang belum ada istilah Ornop, entah pula karena istilah LSM sendiri seperti ditulis Sabastian Saragih dalam buku kecilnya Membedah Perut LSM (1993) baru muncul pada tahun 1978 yang nama tersebut diusulkan oleh Dr. Sarino Mangun Pranoto pada pertemuan Ornop yang bergerak di bidang pembangunan Perdesaan di Ungaran 1978.

Dalam perkembangan selanjutnya embrio Ornop di Banda Aceh khususnya dan di Aceh umumnya, mulai membiak satu persatu dengan cara membelah diri pada dekade 1980 an. Sehingga pada dekade ini kelahiran Ornop (LSM) terjadi lebih cepat dibandingkan dengan apa yang terjadi pada tahun 1970 an. Di awal dekade 1980 an, pada tahun 1982 kelahiran Ornop diawali dengan berdirinya Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen (YLPK). Ornop ini didirikan oleh beberapa kaum akademisi yang mengajar di kampus. Ornop bertujuan memberdayakan masyarakat konsumen dengan memberikan bimbingan pada konsumen serta mendorong peningkatan produksi dalam negeri. Kehadiran lembaga ini pada saat itu, belum menunjukkan citra diri Ornop yang kritis. Lalu, setahun kemudian beberapa dosen FKIP pada tanggal 11 Maret 1983 mendirikan Yayasan Kemakmuran Bangsa (YKB) yang diketuai oleh Drs. Abdullah Faridan, juga dalam kepengurusannya termasuk nama Drs. Hasbalah Saad, MS. Gerak pertumbuhan Ornop di Aceh mulai menampakkan tanda-tanda berkembang biak pada tahun 1980an, sehingga dapat dikatakan sebagai tahun perkembangan awal munculnya Ornop-Ornop di Aceh. Karena pada tahun 1980an tersebut, Ornop (LSM) mulai berkembang biak satu persatu di Aceh pada dekade 1980an tersebut. Pada dekade ini inisiatif aktivis kampus mulai tumbuh dan berkembang dengan membangun atau mendirikan Ornop (LSM) melalui sebuah proses perkembangbiakan yang membelah diri. Kelahiran Ornop-Ornop pada saat itu lahir dari sebuah idealisme atau cita-cita untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat di perdesaan yang miskin dan marginal. Dengan demikian secara sederhana kita melihat bahwa arah

perjuangan Ornop pada saat itu adalah pada pemberdayaan rakyat miskin melalui kegiatan-kegiatan yang sifatnya masih sangat karitatif seperti halnya kegiatan income generating, pendidikan ketrampilan dan kegiatan-kegiatan yang sifatnya menjawab persoalan kemiskinan, belum pada advokasi.

Ketika yang namanya pembangunan yang berpola kapitalisme dan sentralistik telah membawa dampak negatif terhadap kehidupan rakyat dengan melebarnya *social gap*, hilangnya partisipasi rakyat pada proses pengambilan keputusan, kerusakan lingkungan hidup yang kian parah, dan hal-hal lain yang merugikan rakyat, kepedulian aktivis di Aceh kian muncul dan meningkat. Maka berawal dari sebuah sikap kepedulian terhadap kehidupan rakyat yang banyak menjadi korban pembangunan yang menyebabkan terjadinya pemiskinan baik secara struktural maupun absolut, maka kepedulian tersebut telah mendorong orang-orang terutama dari kalangan kampus di Aceh mendirikan Ornop- Ornop. Gerak langkah itu semakin terasa dan nyata, pada tahun 1985. Ketika itu sebuah forum studi kependudukan dan lingkungan Hidup yang disingkat dengan sebutan Forsikal, dimotori oleh Atqia Abubakar secara resmi didirikan. Perhatian Ornop ini diarahkan kepada persoalan terhadap masalah kependudukan yang berimplikasi terhadap masalah lingkungan hidup. Ornop ini hadir, mengemban visi dan misi untuk penguatan rakyat. Pasca kelahiran Forsikal, dua tahun kemudian, pada tahun 1987 dengan visi yang semakin berkembang, muncul Yadesa, sebuah Ornop juga didirikan oleh beberapa orang aktivis kampus yang peduli dan *committed* terhadap masyarakat yang rentan. Lalu setahun kemudian, pada tahun 1988 beberapa orang dosen Unsyiah dari kalangan perempuan mendirikan sebuah lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum untuk Wanita dan Keluarga (LKBHuWK).

Tingkat kelahiran Ornop di Aceh pada dekade 1980an mengalami percepatan ketika Yadesa yang dimotori oleh Mansur Muhammad Kiran mulai menarik para aktivis kampus yang memiliki kepedulian dan idealisme untuk pemberdayaan rakyat ke Yadesa. Pendek kata, Mansur M. Kiran yang menjadi direktur Yadesa, pada saat itu mulai membuka wawasan para aktivis kampus untuk terjun dunia Ornop. Mansur Muhammad Kiran yang dosen tersebut mengajak beberapa aktivis kampus bergabung ke Yadesa dengan melibatkan para aktivis kampus tersebut ke dalam kegiatan – kegiatan yang dilaksanakan oleh Yadesa. Para aktivis ini diajak belajar bersama, mengunjungi lapangan dan melakukan kegiatan-kegiatan diskusi. Dari kegiatan-kegiatan ini, para aktivis tersebut kemudian mendapatkan pengalaman dari pelatihan (*training*) baik di dalam Ornop sendiri maupun di luar seperti hal pelatihan yang dilakukan oleh lembaga atau Ornop di luar Aceh. Pengalaman ini menjadi modal bagi para aktivis kampus tersebut untuk terjun ke dalam masyarakat. Apalagi pada saat jumlah mereka kian bertambah, kegiatan Yadesa yang masih terbatas saat itu, membuat para aktivis tersebut, berpikir semakin kritis. Menyadari bahwa apa yang mereka lakukan dengan program yang sedikit dan jumlah aktivis yang banyak, akhirnya dari beberapa diskusi yang mereka lakukan, lahirlah ide-ide untuk menangani masalah masyarakat miskin sesuai dengan isu dan kompetensi yang dimiliki oleh masing-masing aktivis. Mereka mencari wadah alternatif untuk menghubungkan mereka dengan masyarakat di perdesaan. Maka pada saat itu, para aktivis yang memiliki potensi dan keahlian yang berbeda-beda tersebut memutuskan untuk melahirkan wadah baru. Pada tahun 1989 Maimul Fidar, salah satu aktivis kampus yang telah belajar banyak dari Yadesa tersebut mendirikan Ornop baru yakni Citra Desa Indonesia (CDI) yang bergerak di bidang lingkungan. Lalu diikuti kemudian pada tahun yang sama juga, Suraiya Kammaruzaman dan kawan-kawan mendirikan Yayasan Flower Aceh yang khusus menangani isu-isu perempuan. Kelahiran Ornop dari kubu Mansur

tersebut pada saat itu kebetulan mendapat dukungan dari LELI Program (Learning and Linkage Program). Sehingga, mereka dapat memulai program-program keornopon dengan tanpa harus mencari lembaga-lembaga dana untuk memulai program mereka.

Di luar kubu Mansur, pada tahun yang sama juga lahir lembaga-lembaga baru yang lebih concern terhadap persoalan keagamaan. Tercatat pada saat itu ada dua Ornop baru yang lahir yaitu UMMAHAT yang menangani masalah pembinaan ibu balita dan remaja serta Yayasan Pendidikan Islam (YPI) dengan program kerja pengembangan pesantren, pertanian, peternakan dan pengembangan masyarakat.

Mengacu pada tingkat pertumbuhan dan perkembangan Ornop di Aceh pada dekade 1980an, dapat kita simpulkan betapa lambatnya tingkat pertumbuhan dan perkembangan Ornop di Aceh. Dan apabila kita mengikuti daur perkembangan organisasi, maka Ornop-Ornop di Aceh pada tahun 1980an sedang berada pada stadium bayi. Sebagai bayi, Ornop-Ornop di Aceh masih sangat membutuhkan sentuhan tangan-tangan terampil dari Ornop-Ornop lain di luar Aceh. Sehingga pada masa-masa ini kalangan aktivis dan pegiat Ornop/LSM Aceh banyak belajar dari Ornop di luar Aceh baik yang ada di Sumatera, maupun di pulau Jawa.

Satu hal yang menggembirakan di dalam proses perkembangan Ornop di Aceh pada saat itu, walaupun jumlah Ornop masih tergolong kecil, semangat untuk saling berbagi informasi, semangat untuk berjaringan tumbuh dengan baik. Kelahiran Ornop yang satu persatu tersebut menimbulkan niat untuk membentuk jaringan (net working) di kalangan aktivis dan Ornop. Keinginan tersebut ditelusuri dengan melakukan pertemuan-pertemuan informal untuk membahas masalah rencana membangun sikap kebersamaan di kalangan Ornop (LSM) pada tahun 1989-1990. Ide-ide itu muncul dilandasi oleh tampaknya fenomena pertumbuhan Ornop (LSM) pada dekade 1980an dan prediksi ke depan. Kenyataannya memang kelahiran dan pertumbuhan LSM mulai terasa cepat denyutnya, terjadi pada dekade 1990an. Pertumbuhan LSM (Ornop) di Aceh pada dekade ini mulai tampak subur. Hal ini ditandai oleh lahirnya banyak LSM (Ornop) yang bukan saja ada di Banda Aceh, tetapi juga di daerah-daerah. Mulai banyaknya LSM (Ornop) yang lahir, pada tahun 1990 tersebut, kalangan LSM yang telah melakukan pertemuan-pertemuan informal sejak tahun 1989 akhirnya pada tahun 1990 ide-ide akan perlunya mempersatukan gerak langkah LSM di Aceh terrealisasi. Pada tanggal 24 Januari 1990 dibentuk Forum Regional Lembaga Swadaya Masyarakat (FR-LSM) Daerah Istimewa Aceh yang berfungsi sebagai wahana komunikasi dan informasi bagi LSM-LSM yang ada di Aceh. Keberadaan Forum pada saat itu masih sebatas working group, sebagai pusat informasi yang bukan sebagai payung bagi LSM-LSM lain. Fungsinya pada saat itu direncanakan sebagai jembatan yang tidak untuk membesarkan dirinya sendiri, tetapi untuk memperkuat partisipan.

Terbentuknya FR-LSM Daerah Istimewa Aceh pada tahun 1990 sedikit banyaknya ikut mendorong lahirnya Ornop-Ornop atau LSM baru pada dekade 1990an. Hal ini disebabkan oleh semakin banyaknya kalangan yang berminat dan terpenggil untuk mendirikan LSM terutama dari kalangan yang telah memahami ideologi dan pekerjaan-pekerjaan LSM itu sendiri. Sehingga pertumbuhan LSM pada dekade ini tergolong cepat. Berdasarkan data yang dicatat dalam katalog LSM Aceh yang terdaftar sebagai anggota Forum LSM Aceh sebanyak 43 LSM ditambah dengan 11 Dayah atau pesantren. Secara rinci dapat disebutkan sebagai berikut. Tahun 1990 ada dua LSM yang lahir yakni Cordova Banda Aceh yang didirikan oleh Otto Syamsuddin Ishak dan kawan-kawan serta

Satyapitala, Aceh Tenggara. Pada tahun 1991 tercatat 3 LSM, masing-masing BP2SM, UMAHAT, dan LP2SM yang dibidani oleh Mirdas Ismail dkk. Jumlah LSM bertambah dengan lahir 6 LSM pada tahun 1992. Ke enam LSM tersebut adalah Yayasan Pugar yang dimotori Ridwan Anggie Munthei, Yayasan Sinar Desa Indonesia (Yasindo) yang didirikan oleh Mansur Muhammad Kiran, (setelah ia meninggalkan Yadesa), LPSELH, LPLH di Lhok Seumawe, Aceh Utara dan Suara Hati Rakyat (Sahara) di Sawang Aceh Utara. Pertumbuhan LSM pada tahun 1993 ada 6 LSM masing-masing Center for Community Development and Education (CCDE), Forum Aktivitas Ketrampilan dan Teknologi Aceh (FAKTA), The Pamualen Foundation, Teratai Foundation, Yayasan kesejahteraan masyarakat Indonesia (YAKMI), dan YAPDA di Aceh Utara. Sementara pada tahun 1994 hanya dua LSM muncul, yakni Pakat Tabela yang bergerak di bidang pembelaan Hukum dan Yayasan Pengembangan Wanita (YPW) di Takengon, Aceh Tengah. Pada tahun 1995 mengalami tingkat pertumbuhan yang sama dengan tahun 1993 karena adar 6 LSM baru yang lahir dan dengan bidang garapan yang semakin bervariasi. Ke enam Ornop tersebut adalah Yayasan Gardamadina di Kecamatan Manggeng, Aceh Selatan yang lahir dari kelompok basis pondok pesantren, Labinal di Sigli, Pidie yang kelahirannya dibidani oleh aktivis LSM, Medika Indonesia yang bergerak di bidang Kesehatan, Pase dengan program-program lingkungan hidup dan konservasi, Yayasan Anak Bangsa yang menangani isu anak-anak jalanan, dan YaSi yang bergerak di bidang pendidikan agama bagi remaja. LSM kelahiran tahun 1996 masing-masing-masing Rumpun Bambu Indonesia, yayasan Biduk Alam (YBA) Aceh Timur, dan lain-lain.

Angka kelahiran Ornop/LSM di Aceh yang semakin pesat terjadi pada tahun 1996 hingga akhir 1997. Pesatnya pertumbuhan Ornop pada masa 1996/1997, ikut didorong oleh adanya program pengentasan kemiskinan yang dirancang oleh pemerintah Indonesia seperti program IDT, KUT dan yang terakhir program JPS, P3DT dan program PPK yang notabene melibatkan Ornop. Ornop yang lahir dari program ini disinyalir sebagai pengalihan LSM untuk mensukseskan program-program pemerintah tersebut. Namun pertumbuhan yang bersifat massive, besar-besaran, seperti jamur yang tumbuh di musim hujan di Aceh adalah ketika negeri yang kata orang sono, miracle economic growth ini dihantam badai krisis moneter. Krisis moneter yang membuat ekonomi Indonesia ambruk tersebut dan menyebabkan runtuhnya lembaga-lembaga ekonomi yang berimplikasi terhadap kehilangan lapangan pekerjaan, mendorong orang-orang yang kehilangan pekerjaan ikut melirik Ornop dan mendirikan Ornop. Di samping itu, terjerembabnya Soeharto dari kursi kekuasaan, ikut mendorong pertumbuhan Ornop (LSM) di Aceh. Jatuhnya rezim Soeharto yang ditandai dengan lengsernya sang Presiden yang terlalu berkuasa ini, gerak pertumbuhan LSM di Aceh menjadi semakin kencang. Bahkan dengan momen itu kalangan Ornop (LSM) sekaligus melakukan reposisi.

Dalam konteks Aceh, sebagai daerah yang terseret ke dalam konflik politik yang berkepanjangan dan menyengsarakan rakyat karena tingginya tindak kekerasan negara (state violence), berupa pembunuhan, penghilangan orang dan penyiksaan dan lain-lain yang menyebabkan meningkatnya tingkat pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di tanah rencong ini, menyebabkan munculnya Ornop-Ornop yang memperjuangkan nasib orang-orang tertindas dan korban pelanggaran HAM. Kondisi masyarakat Aceh yang tertindas, bukan saja menyebabkan bermunculannya berbagai macam LSM, tetapi juga gerakan pembela hak azasi dari berbagai pihak terutama mahasiswa. Kini di Aceh telah terjadi yang namanya booming LSM. Karena pertumbuhan dan perkembangan Ornop di Aceh mencapai 3 kali lipat dari jumlah LSM yang ada pada tahun 1996 yang hanya ada sekitar 41 Ornop yang terdaftar sebagai anggota FR-LSM Aceh. Sementara data yang ada di

forum LSM Aceh saat ini jumlah anggota tetap Forum LSM Aceh yang mendaftar sebagai anggota berjumlah 104 NGO ditambah dengan 25 calon anggota. Sementara yang tidak terdaftar masih sangat banyak dan kini terus bertambah jumlahnya. Diperkirakan saat ini jumlahnya sudah melebihi 200 Ornop.

Munculnya Aliansi Baru

a. Walhi

Di samping pertumbuhan Ornop yang semakin cepat, di Aceh dalam waktu yang tidak begitu lama muncul pula aliansi, koalisi maupun konsorsium Ornop yang baru, pasca pembentukan FR-LSM Daerah Istimewa Aceh pada tahun 1990. Kehadiran jaringan, aliansi, koalisi baru ini mengarahkan Ornop/LSM di Aceh untuk dapat memperkuat perjuangan dan kerja sama melalui jaringan berdasarkan concern lembaga masing-masing. Oleh sebab itu ketika usia Forum regional LSM Aceh baru sekitar 3 tahun. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia yang berkantor pusat di Jakarta, pada tahun 1993 mulai membentuk forum WALHI di Aceh. Pada saat itu disebut dengan Forum Daerah (Forda) yang menjadi wadah bagi Ornop-Ornop yang bergerak di bidang lingkungan hidup. Kehadiran WALHI sebagai forum daerah juga ikut mendorong munculnya Ornop-Ornop baru sejalan dengan semakin mencuatnya persoalan-persoalan lingkungan hidup di Aceh yang meminggirkan dan memiskinkan masyarakat serta menimbulkan masalah-masalah sosial budaya. Banyaknya kasus eksplorasi sumber daya alam yang mengorbankan rakyat, seperti eksploitasi hutan secara membabi buta oleh para pemilik HPH dengan munculnya berbagai kasus perusakan lingkungan seperti kasus perusakan hutan oleh para pengusaha HPH di Aceh. Menurut catatan WALHI Aceh bahwa disamping minimnya kontribusi ekonomi HPH terhadap APBD, Aceh dihadapkan pada kerusakan hutan yang sangat parah. Karena dari tahun 1982 hingga 1993 laju deforestation mencapai 2.4 juta hektar yang jelas-jelas dirusak oleh HPH.

Kini, ketika Forum Daerah Walhi Aceh telah berubah nama menjadi WALHI Aceh, pertumbuhan Ornop atau LSM baru, semakin bertambah. Ornop/LSM tidak saja lahir di kota Banda Aceh, akan tetapi kini merambah ke setiap daerah tingkat II hingga di tingkat kecamatan. Kelahiran Ornop/LSM baru tersebut memilih ruang gerak yang semakin spesifik. Berdasarkan data yang diperoleh dari WALHI Aceh, saat ini jumlah anggota dan calon anggota di Walhi Aceh berjumlah 55 LSM di mana sekitar 30 diantaranya adalah Ornop (LSM) yang baru berdiri, sementara selebihnya adalah Ornop/LSM yang sudah lahir sebelumnya.

b. Kelompok Kerja Transformasi Gender Aceh (KKTGA)

Kelompok ini didirikan pada tanggal 15 Oktober 1995 sebagai tindak lanjut (*follow-up*) dari pelatihan *Gender Sensitivity*. Bentuk organisasinya adalah sebuah jaringan yang beranggotakan lembaga-lembaga (Ornop) dan individu yang memiliki komitmen untuk menegakkan keadilan *gender*. Latar belakang terbentuknya jaringan ini dilandasi pada landasan konstitusi, UUD 1945 yang secara tegas menjamin bahwa perempuan dan laki-laki memiliki hak, kewajiban dan kesempatan yang sama sebagai perencana, pelaksana dan penerima manfaat pembangunan. Kemudian dari realitas empiris dan sosial terjadinya ketimpangan di mana tidak seimbang hubungan antara laki-laki dengan perempuan.

Kenyataan menunjukkan masih kurangnya akses dan aset dan kontrol perempuan terhadap sumber daya yang strategis. Perempuan masih mengalami diskriminasi, subordinasi dan marginalisasi, baik dalam bidang politik, ekonomi, maupun sosial budaya. Di samping itu, masih sangat banyak perempuan yang mengalami tindak kekerasan dan menanggung beban kerja yang berat. Karena di dalam realitas empiris dan kebanyakan kebijakan formal cenderung belum seimbang hubungannya antara perempuan dengan laki-laki. Maka untuk mencapai keadilan *gender* yang merupakan suatu konstruksi sosial yang mengatur hak, kewajiban, peranan, tanggung jawab dan harapan antara laki-laki dan perempuan, KKTGA bermaksud untuk meningkatkan kapasitas/kemampuan anggota dalam rangka memperbesar kontribusi dalam mensosialisasikan keadilan *gender*, di samping itu bertujuan untuk mengupayakan perubahan kebijakan ke arah yang lebih mendukung keadilan *gender*.

Sejalan dengan meningkatnya kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan, baik yang dilakukan oleh negara dalam konflik politik di Aceh, maupun kekerasan di dalam rumah tangga (*domestic violence*) di Aceh, KKTGA sebagai sebuah jaringan yang *concern* dengan masalah tersebut, pada tahun 1998 memberikan pelayanan pembelaan (advokasi) dan konseling kepada perempuan-perempuan yang membutuhkannya secara gratis melalui Women Crisis Center. Di samping itu juga melakukan kegiatan-kegiatan pelatihan bagi masyarakat.

c. SULöH (Jaringan Informasi dan Pemberdayaan Rakyat)

Setiap kelahiran atau terbentuknya sebuah jaringan Ornop, biasanya memiliki latar belakang sejarah (*historical background*). Begitu juga halnya dengan kelahiran SULöH yang menjadi jaringan informasi dan pemberdayaan rakyat ini. SULöH yang didirikan oleh 11 Ornop Aceh pada tanggal 12 Desember 1996 ini lahir dilatarbelakangi oleh sebuah kondisi rakyat yang menjadi korban pembangunan. Kondisi rakyat yang kehilangan partisipasi kritis terhadap pembangunan karena dihilangkan untuk alasan stabilitas keamanan. Adanya pelanggaran terhadap hak politik rakyat, hak ekonomi, sosial, budaya serta hak atas persamaan di depan hukum dan akhirnya UU tentang penyeragaman organisasi, kebijakan asas tunggal, UU pemerintahan desa dan lain-lain sebagai bagian dari bentuk-bentuk kebijakan politik yang pada kenyataannya menghegemoni hak-hak politik rakyat, serta adanya monopoli ekonomi, mengutamakan modal besar, dan berorientasi pada industri telah menyebabkan hilangnya akses rakyat terhadap sumber ekonomi dan pasar menjadi latar belakang lahirnya SULöH.

Kelahiran SULöH juga dilatarbelakangi oleh posisi dan kondisi Ornop yang pada saat itu dipandang masih belum mempunyai jati diri yang jelas karena masih ada Ornop yang tidak melakukan pemberdayaan rakyat karena terus selamanya menjaga kemesraan dengan pemerintah untuk menyelamatkan diri, bukan untuk menyelamatkan rakyat. Kemudian pada saat itu, para aktivis pendiri jaringan ini juga merefleksikan bahwa visi keornopan dalam realitasnya masih sangat beragam, sehingga cita-cita kelahirannya dirasakan belum tegas. Padahal cita-cita kelahiran Ornop adalah untuk memperkuat kesadaran politik rakyat sehingga mereka memiliki kesadaran politis dan kekuatan negosiasi untuk melahirkan sebuah keputusan.

Banyaknya muncul kasus-kasus perampasan tanah, pengalihan tata ruang tanah secara sewenang-wenang, eksploitasi sumber daya alam, pelanggaran hak sipil dan politis, *grass violation*, monopoli ekonomi, pelemahan budaya lokal dan lain juga menjadi pertimbangan

untuk melahirkan sebuah jaringan yang disebut SULÖH. Kelahiran SULÖH dijadikan sebagai wadah berjaringan, berkomunikasi, tukar informasi bagi anggota jaringan dan mitra kerja lainnya sebagai sebuah kebutuhan. SULÖH pada saat itu melihat bahwa pola hubungan kekuasaan yang sama sekali tidak memihak kepada rakyat. Karena pola pembangunan yang kapitalistik dan sentralistik dengan penekanan pada pembangunan ekonomi yang telah meningkatkan pertumbuhan ekonomi, telah pula menghilangkan partisipasi rakyat pada setiap proses pengambilan keputusan. Akibatnya pembangunan tersebut kehilangan makna. Kehilangan partisipasi rakyat terhadap pembangunan tersebut memberi makna bahwa rakyat bukan saja akan kehilangan akses untuk mengontrol sumber daya ekonomi, tetapi juga kehilangan akses terhadap kehidupan politik yang demokratis.

Maka kehadiran SULÖH sebagai sebuah jaringan bercita-cita agar terciptanya ruang gerak yang memungkinkan rakyat mampu mengekspresikan dirinya, menentukan nasibnya sendiri dan memiliki akses dan kontrol terhadap sumber daya. Oleh sebab itu SULÖH mengemban misi untuk mendorong tumbuhnya gerakan sosial yang kuat untuk terwujudnya perubahan sosial. Kini SULÖH sebagai sebuah jaringan yang beranggotakan 12 Ornop ini dan bertujuan memperkuat posisi rakyat, bersama anggota jaringannya selama ini memfokuskan kegiatan pada pemberdayaan masyarakat tani melalui wadah Perhimpunan Masyarakat Tani Aceh (PERMATA) yang terbentuk dari himpunan kelompok tani dampingan Ornop anggota jaringan serta pada persoalan-persoalan pertanahan yang dihadapi oleh rakyat kecil.

d. Koalisi NGO-HAM

Koalisi NGO HAM adalah lembaga advokasi HAM yang bersifat nirlaba, non partisan serta memiliki mandat untuk membangun aliansi dengan NGO regional, nasional dan internasional. Koalisi NGO HAM sendiri merupakan kumpulan beberapa Ornop yang peduli (*concern*) terhadap penegakkan HAM di Aceh. Koalisi ini didirikan pada tanggal 3 September 1998 yang dilatarbelakangi oleh sikap kepedulian dan keprihatinan terhadap tindak kekerasan dan pelanggaran HAM di Aceh. Dari sikap kepedulian dan keprihatinan tersebut aktivis dan NGO yang *concern* dengan penegakan HAM terpanggil untuk mengungkapkan kasus-kasus pelanggaran HAM di Aceh selama daerah ini dijadikan sebagai daerah Operasi Militer (DOM). Di samping itu, lengsernya Presiden Soeharto pada tanggal 21 Mei 1998 menjadi momentum yang tepat bagi koalisi NGO HAM Aceh untuk mengungkapkan semua tragedi pelanggaran HAM di Aceh selama berlangsungnya operasi militer 1989-1998. Oleh sebab itu, para aktivis dan NGO peduli HAM Aceh menyatukan langkah dalam melakukan advokasi bersama terhadap korban pelanggaran HAM di Aceh. Untuk mengungkapkan fakta-fakta di lapangan, koalisi ini melakukan pendataan korban dan mengkampanyekannya melalui berbagai media massa dan internet.

Sebagai sebuah jaringan yang tergolong baru, Koalisi NGO HAM menginginkan terwujudnya tatanan masyarakat madani yang menghormati nilai-nilai kemanusiaan, berkeadilan sosial, berperspektif *gender* dan demokratis. Adapun misi yang diemban oleh lembaga ini adalah sebagai lembaga advokasi HAM dengan tugas menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk menegakkan HAM di Aceh. Ada 3 isu strategis yang akan dicapai oleh lembaga ini. Ketiga isu strategis tersebut adalah (1) bagaimana agar pemerintah dan lembaga militer bertanggung jawab atas pelanggaran HAM di Aceh. (2) perubahan tatanan politik di Aceh dan isu ketiga (3) agar perjuangan HAM di Aceh menjadi agenda dan perhatian (*concern*) masyarakat internasional.

Di samping adanya jaringan atau koalisi dan forum yang disebutkan di atas dan konsorsium yang ada di Aceh, Ornop-Ornop di Aceh selama ini banyak menjalin hubungan kerja sama dan menjadi anggota dari jaringan Ornop di tingkat regional, nasional dan internasional. Hubungan kerja sama dan jaringan yang terbanguna di tingkat regional Sumatera misalnya melalui WIM Sumatera Utara, jaringan Heifer Project International Bukit Tinggi dan lain-lain. Di tingkat nasional antara lain menjadi mitra dan anggota seperti Yasppuk Jakarta, Yappika, LP3ES, ELSAM, Bina Swadaya, Bina Desa, Jari, INPI Pact, Bangun Mitra Sejati dan lain-lain. Sementara untuk Jaringan internasional, masing-masing lembaga biasanya ikut membangun jaringan kerja sama yang erat dalam melakukan kegiatan pemberdayaan rakyat di Aceh saat ini.

Berdasarkan deskripsi di atas, kita dapat melihat bahwa kelahiran Ornop-Ornop di Aceh pada dekade 1970an hingga dekade 1980an mengalami pertumbuhan yang lamban dan evolusif. Latar belakang kelahiran Ornop-Ornop pada masa ini juga lahir dari sebuah keprihatinan dan kepedulian terhadap kehidupan kaum miskin yang tertindas dan marginal sebagai akibat dari pola pembangunan yang tidak memihak kepada rakyat kecil.

Sementara pada dekade 1990an, kelahiran Ornop yang mengalami percepatan, dilatar belakangi oleh berbagai kondisi yang semakin kompleks seperti kemiskinan, eksploitasi sumber daya alam dan hutan, *setting* politik orde baru yang mengekang kebebasan rakyat dengan alasan stabilitas nasional menjadi pemicu muncul tumbuh dan lahirnya Ornop di Aceh pada dekade 1990an hingga tahun 1996 dan pertengahan 1997. Terjadinya booming Ornop di Aceh pada tahun 1997 hingga tahun 2000 mencapai angka 200 lebih, dilatarbelakangi oleh banyak faktor sesuai dengan perkembangan dan perubahan zaman, kondisi ekonomi, sosial politik dan lain-lain. Tidak dapat dipungkiri bahwa krisis moneter yang melanda Indonesia sejak Juli 1997 hingga saat ini telah menyebabkan rusaknya sendi perekonomian Indonesia yang berimplikasi kepada persoalan sosial seperti terjadinya PHK pada perusahaan-perusahaan perbankan dan lain-lain. Kondisi ini telah ikut mendorong orang-orang yang ter PHK atau para kontraktor yang bangkrut semasa krisis berupaya mendirikan NGO. Tahun 1997-2000, sebagai periode krisis moneter, yang membuat pemerintah berhadapan dengan masalah kemiskinan yang meningkat dan harus mencari alternatif usaha pengentasan kemiskinan melalui berbagai program yang dibiayai dengan hutang luar negeri seperti halnya program Jaring Pengaman Sosial (social Saffety Net Program) telah melahirkan Ornop-Ornop yang menjadi *stakeholder* bagi pelaksanaan program tersebut karena program hutang yang menuntut agar dipantau oleh Ornop tersebut, juga menjadi pendorong tingginya tingkat kelahiran Ornop. Runtuhnya kursi kekuasaan Soeharto yang ditandai dengan peristiwa lengser keprabon pada tanggal 21 Mei 1998, dan derasnya arus reformasi telah membuka klep-klep kesadaran masyarakat untuk bangkit dari penindasan yang panjang. Hal ini mendorong semakin banyak tumbuhnya Ornop. Dan secara kontekstual, dalam konteks ke Aceh-an, di mana Aceh yang dalam percaturan politik dijadikan korban sandiwara elit-elit politik, yang menyengsarakan rakyat Aceh, banyaknya kasus pelanggaran HAM, tingginya angka tindak kekerasan yang dilakukan oleh negara melalui kekuatan militernya telah mendorong orang dari berbagai kalangan mendirikan Ornop, yang diharapkan dapat memperjuangkan nasib rakyat Aceh yang tersiksa, tertindas dan diperas oleh pemerintah pusat. Sehingga tidak mengherankan bahwa pertumbuhan Ornop dan aliansi atau jaringan Ornop di Aceh pada era ini lebih dari 3 kali lipat.

Tingginya angka pertumbuhan Ornop di Aceh saat ini menjadi sebuah fenomena yang menarik untuk dicermati. Banyak kalangan yang mempertanyakan soal menjamurnya Ornop di Aceh dewasa ini. Di kalangan Ornop sendiri melihat pertumbuhan Ornop yang sangat pesat tersebut dari dua sisi. Sisi pertama dilihat sebagai sebuah peluang di mana dengan semakin banyaknya jumlah Ornop yang eksis, berarti akan semakin bertambah kekuatan rakyat dan posisi rakyat lebih kuat, sehingga masyarakat madani yang dicita-citakan, dapat dicapai dengan cepat. Namun di pihak lain, pertumbuhan Ornop yang sangat pesat dapat mengancam eksistensi Ornop tersebut. Alasannya adalah saat ini banyak Ornop jadian yang dilahirkan sebagai jembatan untuk mencapai sesuatu atau kehendak seseorang atau bahkan untuk menyelamatkan program-program pemerintah. Dalam realitas yang ada, banyak Ornop yang terlibat di dalam program yang dilaksanakan oleh pemerintah ikut terlibat dalam berbagai kasus penyelewengan, seperti dalam kasus KUT, JPS dan lain-lain.

Di mata masyarakat atau publik, kelahiran Ornop di Aceh dalam jumlah yang besar selama waktu 1997 hingga 2000 ini menimbulkan berbagai persepsi. Banyak kalangan mengatakan bahwa Ornop saat ini sedang naik daun, sedang banyak uang dan sebagainya. Persepsi-persepsi semacam ini secara langsung atau tidak langsung memancing motivasi kalangan kaum oportunistik untuk ikut mendirikan Ornop sebagai kendaraan untuk mencari popularitas dan sebagainya. Sebaliknya, menjamurnya jumlah Ornop di Aceh saat ini dipandang sebagai momentum pembelaan rakyat dan momentum untuk mengungkapkan dosa-dosa pemerintahan pusat terhadap rakyat.

Dari uraian tentang kelahiran dan pertumbuhan Ornop di Aceh sejak dekade 1970an hingga kini, kiranya telah dapat memberikan jawaban kepada kita terhadap pertanyaan mengapa Ornop itu ada. Pertanyaan yang mengarah pada visi dan misi Ornop itu didirikan. Pada hakikatnya, terasa sangat sulit untuk mengatakan dalam artian mengeneralisasikan visi dan misi Ornop di Aceh. Karena apabila kita berbicara soal visi dan misi, akan sangat tergantung kepada Ornop itu sendiri. Karena masing-masing Ornop memiliki visi dan misi yang berbeda sesuai dengan program dan gerakan yang dilakukan, kondisi politik dan sebagainya. Karena selama ini ada dikotomi terhadap gerakan Ornop yang ada di Indonesia. Dikotomi tersebut mengelompokkan Ornop-Ornop tersebut berdasarkan visi-misi dan program dan kegiatan yang dilakukan Ornop. Sebagaimana lazimnya Ornop-Ornop yang ada di Indonesia, untuk daerah Aceh paling kurang ada empat jenis Ornop yang eksis. Keempat jenis Ornop tersebut adalah Ornop yang tergolong kedalam kelompok Ornop developmentalis, Ornop advokatif, reformis dan transformatif. Namun, sesuai dengan kondisi daerah Aceh yang dilanda konflik, kecenderungan gerakan Ornop sekarang berada pada gerakan advokasi dan transformasi yang menginginkan terjadinya perubahan tatanan masyarakat yang memberikan kekuatan kepada rakyat (*people power*).

Terlepas dari dikotomi tersebut, jumlah Ornop di Aceh di masa depan dilihat dari fenomena sosial saat ini, menunjukkan akan semakin tumbuh dan semakin beragam baik dari segi program dan kegiatan maupun dari sudut personalnya. Kaum perempuan di Aceh telah mulai menampilkan partisipasi aktif mereka dengan membuat gerakan-gerakan baru seperti munculnya deklarasi “Serikat Inong Aceh” dan lain-lain. Munculnya gerakan kaum perempuan Aceh kini, karena mereka mulai menyadari posisi mereka. Mereka sadar bahwa untuk mengangkat harkat dan martabat kaum perempuan di Aceh, harus diupayakan pula oleh kaum perempuan bersama-sama kaum laki-laki. Oleh sebab itu mereka perlu merebut peran yang aktif dalam melakukan penguatan rakyat.

Ada pertanyaan yang sering dilontarkan oleh banyak orang terhadap Ornop-Ornop yang ada di Aceh saat ini. Pertanyaan tersebut mempertanyakan dari mana sumber dana Ornop-Ornop tersebut? Dalam pertanyaan yang sederhana adalah “siapa yang mendanai Ornop-Ornop di Aceh selama ini?” Barangkali, pertanyaan ini juga sangat mudah untuk dijawab. Ketika Ornop-Ornop itu mulai dibentuk, sumber dana yang mereka miliki biasanya diawali dengan dana sendiri yang ada pada saat pendirian Ornop tersebut. Artinya menjalankan kegiatan berdasarkan swadana. Namun, dalam perkembangan selanjutnya, Ornop-Ornop tersebut melalui jalinan jaringan kerja yang dibangun di setiap lini, sumber dana tersebut dapat bersumber dari Ornop-Ornop yang ada di Jakarta atau dari lembaga-lembaga dana yang *concern* dengan program yang dijalankan dan bersedia memberikan kontribusinya terhadap kegiatan yang dilakukan oleh Ornop dengan satu prinsip tidak mengikat, hibah (*grants*) yang dijadikan dana bergulir (*revolving fund*), bukan hutang dan sebagainya. Sehingga akuntabilitasnya yang pertama ditujukan kepada lembaga dana melalui audit yang dilakukan oleh lembaga dana maupun akuntan publik independent yang ditunjuk oleh lembaga dana. Dan pertanggung jawaban juga ditujukan kepada masyarakat sendiri sebagai kelompok penerima manfaat dengan cara memberikan akses kontrol kepada mereka untuk mengontrol penggunaan dana dan sebagainya. Dengan cara melibatkan masyarakat sebagai pihak yang mengontrol kegiatan dan penggunaan dana, maka tingkat akuntabilitas Ornop tersebut dapat dipercaya dan dipertanggung jawabkan. Sebagai sebuah ilustrasi saja, ketika Yayasan Program Pemulihan Keberdayaan Masyarakat (PKM) membantu Ornop-Ornop yang ada di Aceh dalam upaya memulihkan keberdayaan masyarakat sebagai dampak dari krisis moneter, menerapkan sistem kontrol yang berlapis dan partisipatif. Ornop yang menerima bantuan dari dana PKM akan mempertanggungjawabkan penggunaan dana yang diperoleh melalui pemeriksaan atau audit keuangan dari lembaga independent. Sementara kontrol sosial akan dilakukan oleh masyarakat yang menerima bantuan secara partisipatif dimana setiap anggota kelompok dampingan terlibat langsung dalam mengontrol setiap pengeluaran yang dilakukan Ornop yang mendampingi mereka. PKM dalam hal ini menjalankan prinsip transparansi dan bertanggung jawab yang harus dijalankan oleh setiap Ornop atau KSM penerima bantuan PKM dan memberikan akses kontrol kepada masyarakat penerima bantuan (*beneficiaries*).

Hubungan Ornop Dengan Negara dan Pemerintah

Keberadaan Ornop sebagai lembaga-lembaga yang melakukan *pressure* terhadap pemerintah selama ini tentu membuat hubungan di antara keduanya menjadi tidak begitu akrab. Masing-masing pihak ingin memosisikan diri pada posisi mereka masing-masing. Maka, berbicara soal bagaimana Ornop di Aceh melihat negara dan pemerintah pada hakikatnya sangat tergantung kepada keberadaan model Ornop yang dibangun. Maksudnya, dalam dunia keornopan sekarang ini, kita harus melihat mana Ornop yang bergerak berdasarkan hati nurani yang memihak kepada rakyat dan mana yang memihak kepada para penguasa (pemerintah). Kalau Ornop yang bergerak berdasarkan hati nurani yang *committed* dengan nasib rakyat, tentu saja dapat diartikan hubungan Ornop tersebut dengan pemerintah di mana Ornop memosisikan dirinya sebagai alat kontrol sosial yang menjalankan fungsi terhadap setiap kebijakan pemerintah yang merugikan rakyat. Bagi Ornop yang radikal di Aceh, memandang negara dalam artian pemerintahan adalah sebuah kekuasaan yang menindas rakyat Aceh, penghisap darah dan sangat kejam terhadap rakyat, tidak berperikemanusiaan dan lain-lain. Namun bagi Ornop yang lahir

dari sebuah komitmen sebagai mediasi, memandang pemerintah adalah mitra kerja yang baik dan perlu menggalang kerja sama yang erat dalam melakukan program-program pembangunan. Di pihak pemerintah sendiri, sebenarnya melihat Ornop dalam kaca mata yang hipokrit. Di satu pihak Ornop dianggap oleh pemerintah sebagai mitra dalam kegiatan pembangunan, seperti apa yang dialami pada saat pemerintah merancang program IDT, KUT dan JPS. Posisi Ornop di sini ditempatkan sebagai mitra yang berfungsi melancarkan program pengentasan kemiskinan saat itu, demikian juga halnya dengan kondisi saat ini. Di pihak lain, karena sikap kritis dan radikalnya, Ornop dianggap sebagai sebuah kekuatan oposan. Sehingga keberadaan Ornop diklaim sebagai pihak-pihak pengkhianat terhadap negara, yang semua pekerjaannya menjelek-jelekkan negara dan sebagainya.

Oleh sebab itu, pertumbuhan dan perkembangan Ornop di Aceh di era reformasi ini menjadi indikator untuk melihat bagaimana hubungan antara Ornop dengan pemerintah dan masyarakat sipil. Ketika kita berbicara tentang masyarakat sipil, kiranya perlu dipertanyakan dahulu masyarakat sipil yang mana. Karena bisa saja sekelompok orang yang berkepentingan mengatasnamakan masyarakat sipil dan sebagainya. Namun dengan lahirnya banyak Ornop di Aceh selama ini dilatarbelakangi oleh lemahnya posisi masyarakat sipil terhadap kekuasaan pemerintah menjadi sebuah indikator bahwa hubungan masyarakat sipil dengan pemerintah kurang harmonis. Kenyataan menunjukkan bahwa hubungan masyarakat sipil dengan pemerintahan di Aceh saat ini memang berada dalam kondisi disharmonis, di mana posisi masyarakat sipil semakin terjepit, tertindas dan teraniaya di tengah konflik politik yang tiada henti. Kondisi masyarakat sipil yang terjepit dan tertindas tersebut telah memicu munculnya perlawanan masyarakat sipil terhadap pemerintah yakni apa yang terjadi dengan aksi mogok makan, mogok kerja secara masal pada 2-4 Agustus 1999 yang melumpuhkan semua aktivitas pemerintahan. Kemudian di Aceh Utara masyarakat sipil juga kembali mogok masal selama satu minggu pada bulan Oktober 1999 dan kemudian bergeraknya masyarakat sipil pada tanggal 8 Nopember 1999 dalam pawai referendum. Sementara hubungan interaksi Ornop dengan masyarakat sipil selama ini tidak menunjukkan adanya disharmonisasi. Mungkin karena keberpihakan Ornop umumnya jelas dan tetap memihak kepada masyarakat sipil, masyarakat miskin, kecil dan tertindas.

Rekomendasi dan Diskusi

1. Kelahiran dan pertumbuhan Ornop yang semakin pesat di daerah-daerah di satu pihak merupakan sebuah kekuatan bagi eksistensi Ornop dalam memberdayakan rakyat, namun di pihak lain, kehadiran Ornop yang menjamur tersebut perlu dicermati karena akan dapat mengancam eksistensi Ornop secara umum. Oleh sebab itu diperlukan upaya untuk menyatukan visi dan misi yang tepat dalam memperkuat posisi rakyat sipil.
2. Seiring dengan tumbuhnya jaringan dan koalisi antar Ornop di daerah-daerah saat ini dipandang sebagai sebuah gerakan penguatan Ornop dalam memberdayakan anggotanya dalam rangka mempercepat proses demokratisasi yang terwujud dalam konsep masyarakat madani.
3. Ornop perlu memposisikan dirinya sebagai sebuah institusi penguatan rakyat yang lebih kritis dengan tidak melibatkan diri dalam program-program yang dijalankan pemerintah. Posisi Ornop lebih ditekankan pada posisi kontrol.

DISKUSI

Pertanyaan

1. Cami (Bangun Mitra Sejati, Jakarta)
Bagaimana visi Ornop Aceh ke depan, kaitannya dengan kebijakan OTODA di Aceh. Mungkin ada upaya yang dilakukan untuk menyatukan visi untuk membangun Aceh?
2. Kusumastuti (SMERU, Jakarta)
Dorongan apa yang menyebabkan munculnya banyak LSM di Aceh? Apakah dapat digambarkan dengan diskripsi (peta)?
3. Mochtar Abbas (Yayasan Mitra Usaha, Jakarta)
 - Apakah Ornop di Aceh merupakan anak cabang dari Jakarta (misalnya PKBI, Bina Desa, YLKI, dll)?
 - Bagaimana sebenarnya ide GAM dilihat dari perspektif Ornop di Aceh. Bagaimana kontribusi dari Ornop terhadap ide-ide berkaitan dengan GAM (misalnya Referendum)?

Jawaban

1. Perkembangan Ornop di Aceh sangat banyak. Persoalan visi ke depan berkaitan dengan OTODA kelihatannya mengarah pada pemberdayaan masyarakat (masyarakat sipil yang tertindas). Secara pasti LSM menginginkan bahwa masyarakat Aceh terlepas atau keluar dari ketertindasan.

Pembicara tidak yakin apakah benar OTODA ini akan dilaksanakan (kelihatannya pemerintah masih setengah hati), sehingga menjadi sulit untuk melihatnya dari perspektif Ornop. Masalahnya apakah visi ini dapat tercapai? Sangat tergantung dari banyak hal!

2. ORNOP juga dapat dijadikan sebagai kendaraan untuk mencari popularitas, jalan-jalan ke luar negeri. Banyak Ornop yang mempunyai keinginan untuk memberikan bantuan semata (bersifat karitatif). Selain itu, banyak LSM yang lahir karena adanya berbagai program pemerintah (KUT, JPS dll). Pembicara tidak dapat memberi tahu Ornop mana yang termasuk dalam kategori tersebut.
3. Ornop di Aceh lahir dari proses pembelajaran dari pihak-pihak di luar (Bina Desa, PKBI) dan lebih kepada proses pendewasaan Ornop di Aceh.

Ornop-Ornop masih berjalan dalam garis keornop-annya. Tetapi dari pihak militer, Ornop dianggap sebagai pihak yang “berpihak” pada GAM, karena lebih memperhatikan terhadap korban-korban yang diakibatkan oleh kekerasan militer dan tidak sebaliknya. Tidak semua Ornop berpihak pada munculnya Referendum, karena awalnya hanya beberapa (misalnya SIRA)

Komentar Moderator

1. Bagaimana Ornop mempunyai satu perspektif, misalnya dalam melihat partisipasi masyarakat. Dalam kaitan ini, Ornop seharusnya mempunyai agenda yang jelas dan perspektif yang sama dalam melihat partisipasi masyarakat.
2. Dari beberapa contoh terlihat ada kekhawatiran bias aktivitas dari Ornop.

MENCERMATI DINAMIKA PERGERAKAN ORNOP SULSEL

FORUM INFORMASI KOMUNIKASI ORNOP

Pahir Halim
FIK-Ornop Sulsel

Pahir Halim adalah Koordinator Forum Informasi Komunikasi Ornop(FIK-Ornop) Sulsel periode 2000-2003 beranggotakan 38 Ornop. Jabatan lainnya adalah Direktur Advokasi Lingkungan dari Lembaga Pengkajian Perdesaan Pantai dan Masyarakat (LP3M) di Makasar. Aktif di dunia Ornop sejak tahun 1988 dengan kegiatan penelitian, fasilitator training, seminar dan lokakarya, sebagai konsultan, dan pelaksana program. Ia juga aktif menulis di media massa. Pahir Halim lulus sebagai Sarjana Hukum pada tahun 1974.

MENCERMATI DINAMIKA PERGERAKAN ORNOP SULSEL

Pendahuluan

Menjamurnya Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau istilah yang digunakan dalam tulisan ini Organisasi Non Pemerintah (Ornop), sejak tahun 1980an adalah merupakan respon atas lambannya pemerintah dan lembaga-lembaga komersial mengantisipasi dinamika perubahan sosial kemasyarakatan. Kelambanan pemerintah dalam konteks ini, bukanlah disebabkan oleh lemahnya kemampuan teknis dan dana operasional, tetapi lebih pada lemahnya pemihakan negara (pemerintah) terhadap pemenuhan kebutuhan esensial komunitas rakyat.

Tidaklah sulit untuk menjelaskan, mengapa pemerintah terkesan lamban mengantisipasi arah pergerakan kebutuhan rakyatnya. Pertama landasan berpikir pemerintah mengelola negara dan masyarakat terlalu makro, sehingga kebutuhan-kebutuhan mendesak rakyat yang biasanya bersifat mikro luput dari perhatian. Kedua, perumusan pengambilan kebijakan-kebijakan politik, berpijak pada pendekatan yang sentralistik. Akibatnya, realitas sosial di tingkat daerah yang sangat beragam sesuai kondisi masyarakatnya, pada tingkat praktis disamaratakan penentuan antisipasinya. Ketiga, pada tingkat strategi perencanaan, pendekatan top down masih terlalu kuat, sehingga aspirasi daerah tidak pernah menjadi pertimbangan utama dalam proses implementasinya.

Berangkat dari realitas demikian itu, tak pelak lagi rasa ketidakadilan berbagai komunitas rakyat, muncul menjadi sebuah kekecewaan yang pada gilirannya tidak sedikit yang berakhir pada konflik sosial, baik yang bersifat vertikal maupun horisontal. Dalam situasi itulah munculnya Ornop dengan suatu visi yang relatif beragam yakni ingin memberdayakan rakyat sesuai kepentingan praktis seperti kebutuhan makan maupun kebutuhan yang lebih esensial seperti perlunya rasa aman, keadilan dan penghargaan terhadap harkat dan martabat kemanusiaan.

Adalah menarik dan bagaikan gayut bersambut, bahwa kehadiran Ornop ditengah situasi tadi, ternyata pemerintah memberikan respons positif. Hal yang disebut akhir, ditandai dengan pemberian peluang kepada Ornop untuk terlibat atau dilibatkan dalam program-program tertentu yang telah ditetapkan pemerintah. Akan tetapi, fenomena yang lebih menarik lagi adalah, umumnya para donatur luar negeri (non-negara) begitu tertarik memberikan dukungan dana kepada Ornop. Paling tidak donatur tertentu, telah mensyaratkan keterlibatan Ornop dalam pelaksanaan program aksi yang telah disetujui dengan pemerintah Indonesia.

Terlepas dari itu unsur politis, dukungan dana dari lembaga-lembaga internasional terhadap Ornop, adalah merupakan angin segar bagi Ornop untuk melaksanakan berbagai aksi secara merdeka, tanpa harus merasa dikontrol dan diawasi oleh negara. Akan halnya kelompok sasaran (rakyat), paling tidak merasa terwakili kebutuhannya, tanpa mesti memelas dihadapan pemerintah yang biasanya diikuti dengan keharusan politis tertentu.

Fenomena Ornop tersebut, terjadi hampir disemua daerah di Indonesia, terutama di Ibukota Propinsi dan Kotamadya serta beberapa Kabupaten.

Fenomena Ketergantungan

Memasuki tahun 1990an, keberadaan Ornop terkesan mencapai puncak popularitasnya dan bersamaan dengan itu kehadiran lembaga baru yang mengklaim diri sebagai Ornop, telah tiba pada keadaan yang benar-benar sulit lagi dikontrol. Paling tidak ada tiga alasan yang relevan dikemukakan mengapa Ornop demikian laris di tengah-tengah masyarakat. Pertama, Ornop tidak dipersepsi lagi sebagai lembaga oposan yang kerjanya berhadapan dengan pemerintah, tapi justru menjadi mitra. Kedua, terkesan bahwa melalui Ornop, dana-dana luar negeri dapat dengan mudah diperoleh dalam jumlah yang relatif besar. Ketiga, munculnya program pemerintah seperti Jaring Pengaman Sosial (JPS) dan Kredit Usaha Tani (KUT), dimana Ornop diposisikan sebagai lembaga yang harus terlibat atau dilibatkan.

Realitas yang disebut akhir, menjadi angin segar bagi Ornop, karena semakin mendapat peluang dan kepercayaan dalam pengelolaan program pemerintah. Akan tetapi, pada saat yang bersamaan kejadian ini sekaligus menjadi tantangan berat yang jika diantisipasi secara tidak cermat akan menjadi proses pembusukan keberadaan Ornop. Akibat logis dari peluang tersebut, benar-benar dimanfaatkan oleh berbagai segmen masyarakat, umum dan maupun pejabat dan bahkan pengusaha komersial yang terpuruk di era krisis ekonomi. Perjalanan selanjutnya, tak pelak lagi hampir semua daerah di wilayah negara ini, dipenuhi Ornop-Ornop karbitan atau lahir secara prematur. Yang dimaksud dalam hal ini, adalah Ornop yang lahir atas tuntutan seketika dan bukan didasari suatu visi dan misi kerakyatan yang jelas. Keadaan ini semakin diperparah, ketika kelompok mapan (pemerintah dan pengusaha), ikut bermain dalam wilayah ini yang orientasinya semata-mata kepentingan praktis yaitu ekonomi.

Kini, keberadaan Ornop pada umumnya tidak lebih dari sebuah perusahaan komersial yang kerja utamanya adalah mendatangkan dana sebesar-besarnya. Akibatnya, ketika ada satu atau dua Ornop yang masih bersuara nyaring tentang pemihakan kerakyatannya, maka kesan yang muncul adalah, karena Ornop tersebut tidak memperoleh keuntungan ekonomi. Dalam arti kata, kalau ada Ornop yang masih kritis, maka jawabannya adalah "berikan dana dan mereka akan diam".

Adalah ironis, di tengah kesulitan sosial yang semakin menjadi-jadi, justru posisi Ornop semakin rentan disusupi ketergantungan permanen dengan pihak-pihak tertentu (terutama pemerintah). Dalam posisi ketergantungan, lembaga apapun termasuk Ornop, sudah dapat diprediksi betapa tidak merdekanya dalam memperjuangkan visi dan misi kerakyatannya, apalagi bagi Ornop yang memang sejak awal kelahirannya hanya karena motivasi ekonomi semata.

Dinamika Ornop di Sulawesi Selatan

Sulawesi Selatan, yang akrab disebut sebagai pintu gerbang pengembangan kawasan Timur Indonesia secara pembangunan fisik, memang lebih menonjol dibandingkan propinsi lainnya di kawasan ini. Di propinsi ini, sejak tahun 1980an pergerakan Ornopnya

cukup dinamis hingga akhir awal 1990an. Dari segi jumlah lembaga (Ornop) yang ada di Sulawesi Selatan saat ini, secara matematis belum ada angka yang tersedia. Akan tetapi, dari perkiraan kasar Ornop yang ada di Sulawesi Selatan tidak kurang dari 300 lembaga dan sekitar 200 lembaga berkedudukan di kota Makassar. Sekadar informasi bahwa booming Ornop di Sulawesi Selatan ini, terutama terjadi antara 1995 sampai tahun 2000 ini, sekitar 150 Ornop yang memproklamkan diri. Gambaran ini menjelaskan secara transparan bahwa fenomena menjamurnya Ornop di era program JPS dan KUT, terjadi pula di Sulawesi Selatan, sebagaimana yang terjadi di propinsi lainnya.

Akan tetapi yang ingin dibahas pada bagian tulisan kecil ini lebih difokuskan pada hubungan/jaringan antar Ornop baik di lingkungan Sulawesi Selatan maupun dalam cakupan nasional dan internasional. Pengungkapan situasi ini dipandang mendesak untuk memprediksi arah dan orientasi pergerakan Ornop yang ada di Sulawesi Selatan. Pada akhir tahun 1980 hingga awal tahun 1990, Ornop yang ada di Sulawesi Selatan seolah berlomba mencari jati diri/karakteristik yang dinilai tepat untuk kelompok sasaran yang akan diberdayakan. Pada dimensi ini praktis Ornop yang ada di propinsi ini, sangat rajin memperkuat kelompok-kelompok sesuai karakteristiknya dengan hampir menyentuh semua aspek kehidupan mulai dari urusan ekonomi rakyat, hak azasi manusia, lingkungan hidup, dan kesehatan.

Dalam upaya memperkuat posisi masing-masing Ornop, maka jaringan-jaringan nasional pun mulai dirintis dengan mencari lembaga-lembaga cantolan yang ada di Jakarta. Ternyata, kebutuhan Ornop daerah untuk berjaringan dengan Ornop Jakarta (Jawa umumnya), mendapat sambutan positif. Tersebutlah beberapa jaringan di antaranya WALHI, YAPPIKA, BINA SWADAYA, PKBI, BINA DESA, LP3ES, YLBHI, dan YLKI, dikenal sebagai lembaga-lembaga yang berpusat di Jakarta sebagai cantolan Ornop Sulawesi Selatan.

Keadaan tersebut, tentu saja suatu kondisi yang berjalan alamiah, karena memang menjadi kebutuhan bersama. Akan tetapi, dalam proses berikutnya jaringan-jaringan yang disebut tadi, cenderung berjalan secara sendiri-sendiri sehingga kesan munculnya jamaah-jamaah Ornop tak terhindar lagi. Pada tahapan ini terlihat jelas, fanatisme kelompok mulai menggejala bahkan cenderung berhadapan-hadapan dengan kelompok lainnya. Hingga saat ini, paling tidak terdapat tiga forum Ornop yang ada di Sulawesi Selatan yang cukup besar yaitu: WALHI, FIK-Ornop Sulawesi Selatan dan FORKES (forum kesehatan). Adalah menarik bahwa partisipan ketiga forum tersebut anggotanya adalah Ornop yang sebagian besar sama, dalam arti Ornop yang menjadi partisipan WALHI itu juga yang menjadi partisipan FIK, begitu juga FORKES Khusus untuk jaringan/forum WALHI dan FORKES adalah didasarkan pada kepentingan isu yaitu lingkungan hidup dan kesehatan, sedangkan FIK-Ornop lebih didasarkan pada kondisi geografis/wilayah.

Dengan demikian, keberadaan ketiga forum tersebut tidak perlu terjadi konflik kepentingan karena orientasinya memang berbeda. Namun demikian dalam tahap dinamika perbedaan cara pandang forum tersebut terkadang mengemuka, terutama yang berkaitan masalah etika ber-Ornop.

Pada tingkat yang lebih kecil Ornop anggota forum, membentuk lagi kelompok-kelompok kecil yang akrab disebut konsorsium. Keberadaan konsorsium ini lebih terikat pada kepentingan program, misalnya untuk program kelautan, pegunungan dan perkotaan. Pada tataran program, terbukti dalam banyak hal keberadaan konsorsium ini

lebih lincah dan lebih intens mengadakan komunikasi sesama anggotanya. Hal itu disebabkan oleh jumlah anggotanya yang lebih kecil dan tuntutan program memang seringkali membutuhkan pertemuan-pertemuan berkala.

Rekomendasi untuk Diskusi Lebih Lanjut

Di era reformasi sekarang ini, dimana paradigma pengelolaan negara mengalami pergeseran mendasar dari "Stabilitas untuk Kesejahteraan", berubah ke "Demokrasi untuk Kesejahteraan". Dari perubahan paradigma tersebut, membawa konsekuensi logis kepada fungsi dan peran strategis Ornop di era sekarang ini. Cara pandang demikian itu dianggap *urgent*, demi menjaga citra keberadaan Ornop di tengah-tengah perubahan sosial yang sementara menderas.

Dalam kaitan itu, di bawah ini teridentifikasi beberapa komponen yang dipandang perlu menjadi rekomendasi sekaligus sebagai agenda untuk diskusi lebih lanjut:

1. Strategi peran Ornop dalam konteks pemberdayaan menuju terciptanya masyarakat madani, perlu digagas dan dirumuskan secara terencana dan sistematis sesuai dinamika perubahan sosial kemasyarakatan.
2. Persepsi terhadap partai politik sekarang ini, perlu dikaji ulang peluang dan kemungkinannya untuk diajak berjejaring atau bekerjasama dalam konteks pemberdayaan rakyat.
3. Isu-isu strategis yang selama ini menjadi agenda permanen Ornop (seperti GENDER, Lingkungan Hidup, HAM, Demokratisasi dan Masyarakat Adat) sudah perlu dirancang ulang visi dan misi yang akan diperjuangkan terhadap isu-isu tersebut.
4. Keberadaan jaringan Ornop (terutama antara Ornop daerah dengan Ornop Jakarta), sudah perlu direfleksi urgensinya atau paling tidak sistem dan mekanismenya direaktualisasi, sehingga relevan dengan perubahan seperti konsep desentralisasi (OTODA).
5. Mengingat menjamur keberadaan Ornop akhir-akhir ini telah tiba pada kondisi yang memperhatikan (terutama pada visi dan misi kerakyatannya), maka dipandang perlu dan mendesak merumuskan suatu Kode Etik aktivis Ornop dan lembaganya dalam merefleksikan perilaku aktivis dalam menjalankan program-program aksinya.

GERAKAN LSM DI NUSA TENGGARA BARAT SEBUAH PERBANDINGAN

© 2000

**Ali Dahlan
YSM, NTB**

Mochamad Ali Dahlan adalah direktur dan pendiri Yayasan Swadaya Membangun (YSM) Mataram, yang sudah mulai aktif di Ornop sejak tahun 1982 hingga sekarang. Selain pendiri YSM, Mochamad Ali Dahlan juga mendirikan beberapa lembaga, baik profit maupun non-profit. Lembaga tersebut meliputi Koperasi Annisa di Mataram, Universitas Gunung Rinjani, 5 Bank Perkreditan Rakyat di Lombok dan Sumbawa, Perusahaan Travel Biro, PJTKI, dan Jaringan Pondok Pesantren seluruh NTB. Ia lulus sebagai Sarjana Hukum pada tahun 1972.

GERAKAN LSM DI NUSA TENGGARA BARAT

SEBUAH PERBANDINGAN

Umum

Tanggal 13 Mei 1982 lahirlah sebuah yayasan di Mataram. Yayasan itu diberi nama YSM, singkatan dari Yayasan Swadaya Membangun, didirikan oleh beberapa orang yang waktu itu gelisah dengan keadaan yang menimpa bangsa ini khususnya rakyat NTB. Bahkan hampir 20 tahun setelah YSM berdiri masih saja menjadi daerah yang amat miskin jika dibandingkan dengan daerah manapun di Indonesia ini (bidang Ekonomi, Sosial dan Politik).

Pemerintah NTB waktu itu sangat tidak nyaman dengan lahirnya YSM. Berbagai upaya dilakukan untuk mendiskreditkan YSM baik di kalangan pemerintah maupun masyarakat. LSM YSM adalah organisasi Oposisi, Liberalistik dan berbagai tuduhan lain. Akibatnya ruang gerak YSM pada waktu itu menjadi sangat terganggu.

Untuk memberi gambaran yang lebih baik pada aparat pemerintah dan masyarakat, YSM memelopori seminar Mataram. Saya lupa tanggalnya, tapi pasti tahun 1987. Seminar ini bersifat nasional, karena mengundang berbagai tokoh LSM di Jakarta dan LSM dari berbagai daerah. Saya ingat Adi Sasono dari LSP, Permadi dari YLKI dan lain-lain. Seminar ini sangat berhasil, dimana Gubernur dan Bupati hadir mendengar para pembicara. Ada tanda-tanda kesadaran akan peranan LSM sebagai wujud dari peran serta masyarakat.

Sejak itu bermunculanlah berbagai organisasi yang menyebut dirinya LSM. Sekarang (\pm 20 tahun) setelah YSM berdiri telah terdapat lebih dari 200 LSM di NTB. Terdiri dari berbagai kegiatan, konsentrasi kegiatan, model dan arah gerakannya. Tapi jika disimpulkan hampir semua LSM bertujuan membangun kesadaran masyarakat akan keterbelakangannya dan bersama masyarakat merancang sejak macam kegiatan, kegiatan itu disebut prospek-prospek LSM.

Dengan semakin banyaknya LSM di NTB, terjadi juga pergeseran di antara sesama LSM. Hal itu terkait dengan perebutan lahan dan sumber dana dari para donatur. Lebih-lebih lagi setelah beberapa LSM dari Jakarta melihat daerah sebagai lahan untuk melakukan kegiatan. Bahkan beberapa Organisasi mendirikan Cabang di NTB, tanpa proses yang nyata untuk mengalihkan kegiatannya pada sumber daya lokal.

YSM dan Kegiatannya

Telah terjadi berbagai perkembangan dalam menjalankan tugasnya. Pengembangan ekonomi melalui usaha bersama sejak (7 tahun), gagal dibentuk BPDS (1989-1990) gagal. Dibentuk BPR (1990-sekarang) cukup berhasil. Didirikan pusat latihan yang dimodifikasi, sebagai kritik terhadap kegiatan Bina Swadaya yang hanya mengandalkan keterampilan tekhnis. Tidak mengutamakan idealisme dan pengabdian/memihak.

Hasilnya juga tidak memadai, karena mengubah manusia yang akhirnya kembali pada masyarakatnya dimana pengaruh lingkungannya lebih kuat, tidaklah mudah. LSM ingin perubahan cepat tapi hal itu sangatlah sulit. YSM akhirnya mendirikan universitas. Kita lihat saja hasilnya nanti pasti dievaluasi.

Sumber Dana

Arah YSM adalah mandiri tidak tergantung pada siapapun namun tidak menolak kerjasama dengan siapapun. Dahulu YSM mendapat dana dari berbagai donor. Sekarang ini tidak ada donor yang membantu. Alasannya YSM sudah besar dan kuat. Itu tidak benar. Tapi anggapan tersebut dapat memacu usaha YSM untuk membangun kemandiriannya. Didirikanlah berbagai perusahaan. Banyak kritik seolah-olah YSM berubah orientasi. Ini tidak benar. Alangkah indahnya bila perjuangan ini kita biayai sendiri. Kita akan luput dari tuduhan ditunggangi.

Akuntabilitas

YSM sejak 12 tahun lalu telah menggunakan akuntan publik untuk membuat laporan kekayaan aset serta keuangan. Bukan saja penting untuk donor tapi penting untuk lembaga itu sendiri. Penting untuk masyarakat dan pemerintah. Lapornya dipublikasikan melalui media YSM, buletin YSM.

Bagaimana yang Lain

Adalah sulit untuk mendapatkan gambaran tentang LSM-LSM lainnya. Tapi secara umum LSM belum mengutamakan akuntabilitas baik keuangan maupun hasil. Hal ini terjadi pada banyak LSM-LSM lainnya. Bahkan terjadi juga pada lembaga Donor, suatu hal yang patut disesalkan.

LSM dan Pemerintah (Daerah)

Hubungan dengan pemerintah di masa lalu dan masa kini tidak jauh berbeda. Tidak terlalu dekat dan tidak terlalu jauh. Ada beberapa LSM yang coba jalin kerjasama dengan pemerintah (Daerah) melalui berbagai proyek. Ada positif dan negatifnya, kadang-kadang ada LSM yang diajak bekerjasama dengan pemerintah, lalu melakukan korupsi secara bersama-sama. Ada kasus dalam tender. Dalam hal ini beberapa LSM dari luar NTB sangat agresif untuk merebut kesempatan proyek. Ada beberapa contoh.

Ada yang lebih menarik lagi akhir-akhir ini. Di banyak kegiatan pemerintah, LSM selalu diundang untuk hadir. Sayang sekali hanya untuk hadir saja. Sedikit sekali pikiran LSM yang diadopsi. Kesimpulannya pemerintah sekarang belum banyak berubah. Oleh karena itu LSM sebaiknya tetap menjaga jarak dengan pemerintah. LSM harus tetap kritis terhadap tindak tanduk pemerintah.

Soalnya DPR/DPRD yang diharapkan mewakili masyarakat belum terlihat tandatandanya yang menggembirakan (banyak *Money Politics*).

Pemerintah yang sekarang pada hakekatnya masih merupakan peninggalan rezim terdahulu (Orde Lama II). Personal, perilaku dan cara kerjanya belum berubah banyak. Gerakan LSM, mahasiswa dan kaum pembaharu lainnya tegasnya belumlah selesai. Bahkan ada gejala pemerintah yang sekarang tidak jauh berbeda dengan yang lalu, baik politik, sosial dan ekonomi. Artinya gerakan LSM jauh dari selesai.

Ada peluang yang lebih besar tentang kebebasan, peluang itu harus digunakan oleh LSM untuk berjuang lebih intensif dan strategis agar tujuan yang dicita-citakan dapat tercapai.

Kesimpulan Sementara

1. Di NTB, jumlah LSM cenderung bertambah.
2. Pola gerakannya belum semuanya meningkat sesuai dengan arus perubahan.
3. Ada gesekan antara LSM di NTB disuatu pihak dan LSM daerah dengan LSM yang datang dari luar (Jakarta), terutama dalam hal membuat proyek-proyek.
4. Kedekatan LSM dengan pemerintah, dapat memperluas praktek korupsi. Selain itu ada juga LSM yang memang korupsi.
5. Pemerintah coba menjinakkan LSM untuk mengurangi ketegangan, itu hanya terpaksa akibatnya LSM tersebut tidak jauh berbeda dengan cara kerja pemerintah.
6. LSM harus tetap berada sebagai kekuatan kontrol di luar sistem yang berlaku, baik di bidang Sosial, politik dan ekonomi.

LSM DAN DINAMIKA POLITIK LOKAL BEBERAPA CATATAN LAPANGAN

© 2000

**Johny Simanjuntak
ATMA Solo**

Johny Simanjuntak adalah Direktur Kantor Pelayanan Bantuan Hukum ATMA di Solo. Sejak tahun 1982 hingga sekarang Johny Simanjuntak aktif memberi advokasi dan bantuan hukum kepada masyarakat miskin. Fokus kegiatan ATMA Solo terutama kepada masalah tanah. Ia lulus sebagai Sarjana Hukum pada tahun 1982.

LSM DAN DINAMIKA POLITIK LOKAL

BEBERAPA CATATAN LAPANGAN

Makalah ini merupakan catatan lapangan sekitar kompleksitas masalah yang mengitari kerja LSM. Sebagai catatan lapangan, tentu saja konteksnya sangat terbatas baik konteks obyektif maupun subyektif. Barangkali catatan ini berguna sebagai pengantar diskusi seminar ini.

Pemaknaan tentang Reformasi

Sejak bergulirnya reformasi, masyarakat lokal memberinya nama beragam.

Berikut ini dipaparkan beberapa hal tentang itu.

Reformasi adalah Kebebasan

Kebebasan mencakup kebebasan mengorganisir diri, kebebasan melakukan gerakan massa, kebebasan menyatakan kehendak. Pada tinggal realitas, kebebasan tersebut sangat dinikmati masyarakat. Pembentukan organisasi di tingkat perdesaan dan kabupaten tidak mendapat halangan apapun dari rezim lokal atau aparat keamanan/Polri. Segala macam protes/demonstrasi yang diorganisir rakyat sendiri dapat terselenggara tanpa perlu ada ijin. Bahkan kalau ada teguran dari aparat keamanan, teguran itu disampaikan secara lebih sopan. Dan masyarakat lokal tidak takut dan tidak pusing dengan teguran tersebut. Persoalannya menjadi lain ketika kebebasan tersebut diartikan sebagai tanpa norma/aturan atau aturan yang berlaku adalah aturan yang diciptakan sendiri. Dalam hal ini terjadi pemaksaan kehendak. Kasus semacam ini sering terjadi manakala ada konflik horizontal atau vertikal. Dan acapkali konflik tersebut didasarkan pada prinsip “ Kita harus menang” Dari sudut tertentu misalnya pengorganisasian masyarakat. Prinsip ini dapat dipahami akan tetapi dari sudut membangun demokrasi, prinsip ini bisa menjadi bumerang karena masyarakat dididik menjadi pemegang prinsip kemutlakan.

Reformasi adalah Menuntut Pengembangan Hak-hak Rakyat yang Dirampas oleh Rezim Orde Baru

Sudah menjadi pengetahuan umum bahwa rezim Orde Baru mempraktekkan perampasan hak rakyat, baik kolektif maupun individual. Kasus tanah untuk membangun waduk, jalan tol, sarana pendidikan, kesehatan dan lain-lain sekarang terangkat ke permukaan. Padahal dalam beberapa kasus seringkali data, informasi atau bukti yang dibutuhkan, tidak tersedia atau terbatas bahkan kasus telah berusia puluhan tahun. Akan tetapi memori masyarakat tidak terhapus oleh waktu.

Menangani kasus semacam ini ibarat mengurai benang kusut. Mulai darimana dan berakhir di mana, sangat sulit ditentukan. Harapan masyarakat untuk menyelesaikan kasus tersebut sangat tinggi, bahkan dibarengi dengan emosi yang dapat menimbulkan ketegangan sosial. Pada beberapa kasus, rezim lokal sangat toleran agar masalah yang

diangkat ke permukaan dapat terungkap secara jelas dan memberi kepuasan bagi masyarakat. Akan tetapi banyak rezim lokal yang berusaha menutupi bahkan menghalangi penyelesaian masalah yang diungkap ke permukaan tersebut.

Reformasi adalah Mengungkap Kejahatan Rezim Orba

Selain permapasan hak-hak rakyat, kelakuan buruk lainnya dari rezim Orba ialah praktek penipuan dan penyalahgunaan kekuasaan. Di banyak kawasan perdesaan, rakyat seringkali menjadi korban penipuan kepala desa dalam kasus sertifikasi tanah. Misalnya, atas anjuran kepala desa rakyat memberi sejumlah uang untuk mendapatkan sertifikat tanah. Akan tetapi yang terjadi ialah bahwa sertifikat tidak terbit dan uang rakyat yang diperoleh dengan peluh tidak kembali. Mengangkat masalah ini pada masa rezim Orde Baru merupakan malapetaka bagi warga desa. Kini reformasi meniupkan janji bahwa uang rakyat harus kembali dan pelaku kriminal harus diadili. Masalah yang sering terjadi ialah keinginan masyarakat agar masalah ini segera selesai. Menuntut kesabaran dari rakyat memang agak kurang pas, sebab mereka telah menderita. Sedangkan mengusahakan agar masalah segera selesai juga kurang pas, karena membutuhkan proses dan prosedur. Inilah yang kadang seringkali memicu kebingungan masyarakat.

Reformasi adalah Melampiasikan Ketidakpuasan

Dalam pemilihan kepala desa seringkali terdapat sejumlah warga desa setempat tidak merasa puas dengan yang dihasilkan oleh proses pemilihan tersebut. Mereka mencari berbagai bentuk aktivitas digunakan untuk melampiaskan ketidakpuasan. Bahkan kadang-kadang melumpuhkan aktivitas pemerintahan desa. Jika dicermati, dalam beberapa kasus ketidakpuasan tersebut terkesan dicari-cari atau semata-mata tidak mau menerima kekalahan. Pemerintah daerah tidak mampu mengambil inisiatif dan tidak punya konsep menangani perkara ini. Pada rezim Orba ketidakpuasan seperti itu dipupus habis dengan kekerasan atau teror. Sementara pada rezim reformasi sekarang, pemerintah daerah belum mempunyai referensi pengalaman mempraktekkan resolusi konflik yang berbasis demokrasi.

Berdasarkan catatan di atas, rupanya apapun makna dan agenda reformasi, masyarakat lokal akan terkait dengan dinamika politik lokal. Dan ini berhubungan dengan instansi yang ada di masyarakat lokal (kabupaten dan wilayah perdesaan). Berikut ini akan dipaparkan catatan sekitar DPRD pemerintah daerah, pers, kelompok penekan.

Rakyat dan DPRD

Pada tingkat riil, masih terdapat hal-hal aneh berkaitan dengan hubungan rakyat dengan DPRD. Seringkali terjadi perbedaan bahkan pertentangan antara kepentingan rakyat versus kepentingan DPRD. Kepentingan rakyat daerah/perdesaan misalnya adalah penyelesaian yang adil atas masalah yang mereka hadapi, baik yang terkait dengan kasus maupun yang terkait dengan peningkatan kesejahteraan mereka. Sementara DPRD sibuk dengan masalah tata tertib atau pengaturan fasilitas. Kalau kita mengamati, memang terdapat hal yang mengkhawatirkan yaitu:

Ternyata Sebagian (Bahkan Mungkin Mayoritas) Anggota DPRD Merupakan Politisi Katrolan

Mereka tidak mempunyai kemampuan yang dibutuhkan untuk menjadi seorang anggota parlemen. Misalnya, wawasan politik, perancangan peraturan, menangkap aspirasi rakyat dan lain sebagainya. Celaknya ialah mereka malas dan malu belajar. Akibatnya fungsi perwakilan tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya. Politisi katrolan ini mudah sekali menjual suaranya, terutama dalam hal pengambilan keputusan strategis seperti pemilihan kepala daerah dan sebagainya.

DPRD Masih Kalah Wibawa dengan Pemerintah Daerah

Keperkasaan pemerintah daerah pada era rezim Orde Baru masih saja tampak pada rezim reformasi ini. Hal ini terlihat saat pembahasan peraturan daerah yang berkaitan dengan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Sejauh yang dapat kami amati, belum terdapat perdebatan yang signifikan mengenai RAPBN. Suasana masih sekitar basa-basi dan formalistik. Demikian pula pembahasan tentang masalah yang penting bagi rakyat, pihak DPRD tidak mampu melakukan tekanan-tekanan pada pemerintah daerah.

Anggota DPRD Tidak Melakukan Pertanggungjawaban Langsung kepada Rakyat

Seharusnya dalam rezim reformasi ini anggota DPRD dapat mengorganisasikan berbagai aktifitas untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya di parlemen lokal. Meskipun secara normatif tidak ada kewajiban semacam itu akan sangat mendorong pertumbuhan demokrasi tingkat lokal. Kenyataannya anggota parlemen hanya merasa bertanggung jawab pada partai yang diwakilinya. Akibatnya semakin terkotak-kotak.

Perilaku Sebagian Anggota DPRD Lebih Diwarnai Pemenuhan Kebutuhan Ekonomi

Kecenderungan yang kini semakin mengecewakan ialah perilaku politik anggota parlemen lokal. Masalah uang politik barangkali sudah menjadi pengetahuan umum. Yang agak lain ialah anggota dewan mendapat uang jasa dari penyelesaian masalah yang diajukan rakyat. Bukan uang jasa sebagai pengacara tetapi sebagai anggota dewan yang mengusahakan agar masalah yang diajukan rakyat diselesaikan. Semangat sebagai anggota DPRD sangat menggebu ketika kepentingan ekonominya terjanjikan. Akibatnya ialah kepedulian parlemen terhadap isu kerakyatan menjadi kurang optimal ketika mengetahui bahwa isu tersebut tak memberi ekonomi bagi mereka.

Rakyat dan Pemerintah Daerah/Desa

Harapan bahwa pemerintah daerah/desa akan semakin menghargai rakyat rupanya masih jauh dari kenyataan. Situasi pemerintahan daerah masih belum mengubah secara substansial. Misalnya mental feodal yang ingin menang sendiri/benar sendiri, tidak mau dikritik dan melindungi kliennya meski bersalah masih saja hidup hingga sekarang. Bahkan di beberapa tempat informasi yang seharusnya diketahui rakyat seperti KUT biaya administrasi nikah dan sebagainya belum sepenuhnya terbuka bagi rakyat. Demikian pula kepedulian pada masalah riil yang dihadapi rakyat seperti perumahan, lahan pertanian dan lapangan kerja, masih rendah.

Pers dan Kepentingan Demokrasi

Sangat tinggi harapan yang ditumpahkan pada pers agar dapat menjadi salah satu penggerak demokrasi. Harapan ini paralel dengan pendapat umum yang mengatakan bahwa pers adalah salah satu lembaga demokrasi. Akan tetapi kenyataan menunjukkan lain, pers sangat tergantung pada orang yang mengendalikan perusahaan, redaktur dan peliputan berita.

Di daerah yang belum memiliki pers lokal atau belum menjadi pasar bagi banyak pers, maka kondisi hal semakin menghantui masyarakat. Hal terjadi manakala wartawan di daerah tersebut menjadi Humas Pemda atau hanya mewakili salah satu kekuatan di daerah tersebut. Kontrol terhadap pemerintah/parlemen lokal tidak dapat berjalan. Protes rakyat tidak terkomunikasikan kepublik. Maka proses demokrasi pun terseok-seok, yang lebih celaka ialah ketika pers memberitakan pandangan yang beebread dengan..... atau menyebar opini sesaat tanpa ada upaya mencek ke orang yang terkait. Kondisi ini benar-benar terjadi dalam era reformasi sekarang.

Kelompok Penekan

Kekuatan intelektual dan ulama kritis merupakan kekuatan amat langka di daerah. Orang cerdas yang sebenarnya sangat diperlukan di daerah ternyata justru menjauh dari daerah. Untuk mendapatkan nara sumber yang kritis dari daerah setempat untuk melakukan kritik terhadap rezim lokal, rasanya sangat sulit bahkan mustahil. Kekosongan ini kemudian diisi oleh birokrat atau pengusaha untuk menguasai pendapat umum di daerah tersebut. Tanpa terasa masyarakat dikondisikan untuk mengikuti pendapat yang belum tentu sesuai dengan demokrasi. Mereka berinisiatif membentuk komite pemantau, seperti pemantau korupsi, pemantau parlemen, komite reformasi dan sebagainya. Tujuan mereka bukan untuk mendorong proses terciptanya pemerintahan yang bersih dan baik atau berjalannya proses demokratisasi melainkan sebagai upaya mereka menghentikan atau setidaknya memperlambat proses tersebut. Kelangkaan atau ketiadaan intelektual dan ulama kritis di daerah jelas sangat merugikan proses demokrasi. Meskipun dapat dipahami bahwa proses demokrasi tidak tergantung dua aktor di atas, sebab kekuatan rakyat sendiri dapat menjadi pengawal demokrasi. Masalah yang dihadapi secara riil ialah bagaimana memulai membangun demokrasi di alam budaya feodal dan mentalitas Orde Baru (curiga, adu-domba, rasis, diskriminatif). Pengalaman lapangan menunjukkan kekuatan intelektual dan ulama kritis akan sangat menolong prakarsa membangun demokrasi pada tingkat lokal.

Posisi dan Peran LSM

Pada dinamika politik seperti yang dicatat di atas muncul pertanyaan tentang posisi dan peranan LSM.

Ketika rezim Orba masih bertengger pada puncak kekuasaan, banyak LSM yang mengambil posisi melawan dengan menggunakan taktik strategi yang bervariasi dan banyak juga yang memilih jalan kooperatif. Pada rezim reformasi sekarang apa pilihan posisi yang pas bagi LSM. Sangat sulit menjawab pertanyaan ini karena kondisi lapangan

tidak memungkinkan melakukan satu pilihan. Dalam beberapa hal kondisi lapangan memang sangat menggembirakan seperti adanya kebebasan, tumbuh berkembangnya sikap berani dan kritis masyarakat, semakin mudahnya mendapat informasi melalui berbagai media. Akan tetapi hal yang menggembirakan ini tidaklah selalu ada pada setiap daerah sehingga diperlukan pengkajian potensi demokrasi tingkat lokal untuk mendorong bergulirnya demokrasi di tingkat lokal.

DISKUSI

(Diskusi Panel: Pahir Halim, Ali Dahlan, Johny Simanjuntak)

Pertanyaan

1. Cami (BMS, Jakarta)

Tentang prospek NGO di masa depan kesiapan Ornop masih diragukan dalam menanggapi isu-isu mendatang, misalnya isu otonomi daerah. Seluruh proyek larinya ke tingkat kabupaten. Bagaimana di Sulsel? Karena pembentukan jaringan tidak bisa lepas dari *stakeholder* yang lain. Pak Ali sangat kontradiktif dengan pembangunan dinas. Pendekatan yang dilakukannya sulit untuk didialogkan, karena cara kerja pemerintah tentu berbeda dengan Ornop, sementara mereka adalah *stakeholder* Ornop. Pertanyaannya, bagaimana misi ke depan untuk menyamakan langkah, karena Ornop akan selalu berdialog dengan *stakeholder*?

2. Saleh (Cita Halmahera, Halmera)

Apa yang dibicarakan Pak Ali sama dengan keinginan Ornop di Maluku Utara, bahwa paradigma pembangunan Ornop tidak harus dari Jakarta. Membangun prospek ke depan tidak harus dari Ornop di Jawa. Pak Ali diminta untuk membangun konsorsium Ornop kawasan timur sehingga peran Ornop Jawa bergeser.

Menanggapi Pak Johny yang sudah lama di Jawa, ternyata beberapa aktivis Ornop pindah ke Jawa untuk merebut kepentingan politik kacang, seperti kasus di Bantul. Mereka memperoleh imbalan milyaran Rupiah, hal demikian juga terjadi di Sleman. Strategi apa agar aktivis Ornop tidak menjadi politisi gentayangan, mengingat Jawa adalah barometer demokratisasi? Sebenarnya di kawasan timur Indonesia bisa lebih demokratis, bagaimana mensosialisasikannya?

3. Wisnu (Lespi, Semarang)

Apa yang membuat Pak Ali sukses? Apakah karena tangannya yang dingin, pendukungnya, atau apa? Apa resepnya? Apakah sudah terpikirkan oleh YSM untuk membangun rumah sakit, atau supermarket yang khas YSM?

4. Krisdiono (Bina Swadaya Boyolali, Boyolali)

Sangat setuju dengan program yang dilakukan oleh YSM. Pertanyaannya, apa kiat suksesnya dalam pelayanan perbankan? Untuk mendirikan satu BPR harus menyetero uang ke BI kurang lebih Rp. 500 juta, bagaimana cara memperoleh dana sebanyak itu? Bagaimana menyikapi/memelihara visi dan programnya, bagaimana kiat agar bisnisnya jalan sementara sebagian keuntungan juga dipakai oleh masyarakat?

Jawaban

Pahir Halim

Kaitan Ornop dengan otonomi daerah bagaikan pisau bermata dua: kegiatan Ornop dapat merupakan harapan, di pihak lain merupakan penindasan terhadap masyarakat. Dengan adanya otonomi daerah, akan ada raja-raja kecil di daerah.

Untuk mengembalikan hak-hak rakyat yang selama ini dirampok harus dengan cara mensosialisasikan hak rakyat ke masyarakat dampingan LP3M. Pernah melakukan pendampingan masyarakat pesisir (hanya dua kabupaten di Sulsel yang tidak mempunyai pantai), sementara belum ada peraturan daerah untuk pengelolaan pesisir pantai. Sebenarnya hal ini bisa dikerjakan LSM. Tugas LSM adalah meneruskan paradigma perubahan.

Tentang membangun kekuatan di kawasan timur. Bila berbicara regional dianggap nepotisme, ini adalah bagian pemberdayaan, logikanya bila negara lemah karena daerah juga lemah. Secara regional bisa membangun NGO di Sulawesi, Irian, dan Kalimantan (kawasan IBT meskipun Kalimantan suka berkiblat ke barat). Bila LSM pusat ikhlas memberdayakan LSM daerah akan tidak ada masalah. Namun hal ini tidak terjadi karena akses informasi masih terpusat di Jakarta. Forum ini masih sulit disosialisasikan, seperti kasus membentuk jaringan Ornop yang ada di forum dalam rangka membangun kekuatan (40 LSM).

Ali Dahlan

Tentang sikap kontradiktif dengan pemerintah, pemerintahan sekarang masih sama dengan orde lama kedua (orde baru) baik orang-orangnya, mentalnya, maupun korupsi. Kebanyakan anggota DPRD berdagang ayam, tidak siap menjadi anggota DPR. Peranan LSM ke depan seharusnya tidak mengendur melakukan kontrol pada pemerintah dan masih ada peluang. Sangat disayangkan bila LSM masih berpikir tentang 'kecipratan proyek'. Secara pribadi sangat mendukung negara federal, sampai kapanpun akan diperjuangkan meskipun banyak orang sudah tak membicarakannya

Yang membuat dirinya sukses adalah sesuatu dari dalam, bukan sekedar hobi. Mendirikan organisasi dengan niat untuk membangun dan meningkatkan organisasi. Kita tidak perlu menyembah *funding*, tetapi harus mau bekerjasama dengan siapa saja, dan tidak dibenarkan anti lembaga dana. Disamping itu tidak usah harus mengekor dengan kemauan lembaga dana.

YSM belum mempunyai rencana untuk membuat supermarket. Pendirian Rumah Sakit sedang dirancang dan diperkirakan akan dibangun di Lombok Tengah. Rumah Sakit tersebut direncanakan untuk orang-orang miskin.

Pada tahun 1990 untuk mendirikan BPR hanya perlu modal pertama sebanyak Rp. 50 juta. Uang Rp. 50 juta tersebut diperoleh dari patungan dengan dua orang teman ditambah iuran jamaah Bank Syariah, kemudian berkembang menjadi Rp. 500 juta. Asetnya sekarang sudah sekitar Rp. 10 milyar dengan nasabah 62 ribu dari kalangan masyarakat kecil. Kalau sekarang, sulit mendapatkan ijin sekarang karena masalah BLBI.

Sebagian keuntungan bisnis diberikan untuk menopang kegiatan kemanusiaan. Hal ini diterapkan di Universitas Gunung Rinjani, biaya kuliah per semester per mahasiswa hanya Rp. 112 ribu. Biaya operasional pendidikan mendapat subsidi dari keuntungan bisnis.

Johny Simanjuntak

Prinsip membangun demokrasi harus dari bawah bukan dari Jakarta, sehingga masyarakat lokal akan mudah menentukan pilihan-pilihan politik, tidak menciptakan politisi katrolan. Tidak ada rezim tingkat lokal yang sangat toleran. Bila Pemda bisa membuka diri mengapa harus dilawan? LSM adalah suatu komunitas pekerja sosial, memiliki visi yang jelas, yang aktif mendampingi dan membela rakyat.

Mengontrol LSM sebetulnya dapat dilakukan melalui: kontrol ideologis, kontrol, norma atau aturan main yang berlaku, serta, serta kontrol visi.

Kesimpulan Moderator

- Bila kecenderungan politik sudah pindah ke daerah, pola pendekatan harus diubah untuk memberdayakan masyarakat sipil
- Penjajahan ideologi terjadi. Kenyataan, jika LSM tidak mengikuti isu yang ada, tidak perlu ikut memperoleh dana.
- Belum terlihat perlawanan “ideologi kearifan” terhadap “ideologi dominan”
- Dari berbagai presentasi, belum terdengar ada kelompok masyarakat sipil yang kuat. Hingga saat ini, hanya kelompok elit dan politik yang lebih banyak bermain. Pak Johny menyampaikan agenda jangka panjang NGO adalah menjawab tantangan “bagaimana NGO dapat memberikan kontribusi yang adil kepada rakyat dan menawarkan kebijakan alternatif”. Kegiatan advokasi oleh NGO di NTT sudah terlihat berhasil, tetapi belum berani menindaklanjuti hingga tuntas.
- Meningkatkan partisipasi NGO tidak hanya dalam memberdayakan masyarakat, tetapi juga dalam membangun kontrol oleh masyarakat.

PANDANGAN DAN PEMIKIRAN YASIKA TERHADAP KEBERADAAN LSM DAN MASALAH- MASALAH PEMBANGUNAN PERDESAAN*

A. Paradigma Pembangunan Perdesaan dan Masalahnya

Barangkali tidak terlalu berlebihan apabila dikatakan bahwa permasalahan pembangunan perdesaan sangatlah kompleks, untuk itu kami awali dari paradigma pembangunan perdesaan masa lampau. Penekanan prioritas pemerintah terhadap pembangunan perdesaan masa lampau hanya kepada pembangunan pertanian yang goalnya semata-mata hanya menyediakan pangan, sehingga penekanan ini menciptakan banyaknya proyek-proyek seperti; irigasi, gudang-gudang hasil produksi pertanian/saprotan, pencentakan sawah, BIMAS dan KUT-KUT, yang kesemua proyek tersebut diikuti pula oleh kebijakan harga beras yang nilai tukarnya terhadap jenis komoditas lainnya relatif lebih rendah.

Pemerintah tidak mengalami kesulitan untuk menyediakan dana pembiayaan proyek-proyek tersebut, karena saat itu limpahan dollar yang mengalir ke pemerintah begitu dahsyatnya, berasal dari hasil nilai ekspor minyak dan gas bumi yang meningkat tiga kali lipat dari US\$1.708 milyar menjadi US\$5.153 milyar, selain itu adanya kebijaksanaan-kebijaksanaan keuangan negara-negara luar, seperti misalnya penanaman modal asing dan pinjaman hutan luar negeri. Jelas-jelas di depan mata, pemerintah berperan bagaikan “sinterklas” dalam melaksanakan pembangunan.

Hasil yang dicapai pemerintah pada masa itu, negara Indonesia dikenal sebagai negara swasembada beras. Akan tetapi tidak dapat dipungkiri, bahwa apa yang dikenal tersebut membuat banyak pertanyaan yang mendasar: Siapa sebenarnya yang paling diuntungkan dengan GAUNG yang kondang di seantero dunia tersebut? Beberapa banyak masyarakat petani yang mensubsidi pangan kita meningkat kesejahteraannya? Tumbuhkah kemandirian dan partisipasi masyarakat perdesaan untuk keberlanjutan seluruh proyek?

Peluang bagi wilayah non pertanian dalam hal ini wilayah pantai, pada masa lampau juga menerima cipratan-cipratan proyek seperti: Proyek pertambakan, Tempat penampungan ikan, Pengembangan pelabuhan, Air bersih galian bor sekaligus MCKnya, Pengadaan kapal kesehatan masyarakat pulau-pulau kecil, Pengadaan boat dan alat-alat penangkapan ikan.

Proyek-proyek tersebut di atas juga menjadi tanda tanya besar, Jawaban dari kesemua proyek (wilayah pertanian dan wilayah pantai) adalah Proyek hanya menghasilkan fisik bagaikan “BANGKAI” yang terbengkalai. Lebih ironis lagi bagi masyarakat perdesaan, mereka mengalami; keterbatasan kesempatan kerja, disparitas pendapatan, keseluruhan hasil komoditas (pertanian, perikanan, kerajinan) tidak berkembang dan perekonomian lokal tidak tumbuh dan berkembang, dengan demikian gol yang nyata adalah KEMISKINAN DI PERDESAAN.

* Sumbang pikir pada seminar Wawasan Tentang LSM Indonesia: Sejarah, Perkembangan, serta Prospeknya pada tanggal 15 Agustus 2000 di Hotel Cemara Jakarta dilaksanakan oleh SMERU.

** Direktur Yayasan Indonesia Untuk Kemajuan Desa (YASIKA) Sumatera Utara.

Kejadian ini dikarenakan, model pendekatan dan pengelolaan pembangunan perdesaan oleh pihak pemerintah masa itu dilakukan dengan pola; Otoriter instruksi, Dominasi melalui birokrasinya, Orientasi proyek, Tidak “mengotonomikan” masyarakat perdesaan, Tidak memperhatikan kerugian sosial dan Kerugian sumberdaya alam.

Orientasi stabilitas yang dilanjutkan dengan orientasi pertumbuhan dalam pembangunan, dianggap pemerintah sebagai mekanisme pemerataan pendapatan, ternyata tidak berfungsi sama sekali. Peningkatan pendapatan hanya terjadi di lingkungan pemerintah dan swasta pada masyarakat lapisan atas, dengan kata lain nikmat limpahan dollar yang mengalir begitu mengesankan, hanya dapat “dikendurikan” oleh sebagian kecil masyarakat Indonesia, sedangkan sebagian besar lainnya justru menderita proses pemiskinan. Jurang kesejahteraan antara masyarakat lapisan atas dengan masyarakat lapisan bawah jelas-jelas semakin dalam dan melebar.

Salah satu dari banyaknya kompleksitas permasalahan yang menjadi tema sentral adalah kemiskinan struktural. Inti dari suatu struktural adalah relasi antara suatu subyek dengan suatu obyek dan antara subyek dengan subyek yang merupakan bagian dari suatu sistem. Jadi permasalahan struktural adalah masalah kondisi dan posisi subyek – subyek/obyek – obyek dari struktur yang bersangkutan dalam keseluruhan tata susunan/sistem dan fungsi dari komponen tersebut dalam keseluruhan fungsi dari sistem.

Apabila masing-masing subyek dan obyek memiliki posisi dan kondisi yang timpang terwujud dalam pola relasinya, maka struktur tersebut dikatakan tidak adil. Ketidakadilan struktural ini semakin diperkuat lagi oleh sifat kemakmuran yang kumulatif. Artinya kemakmuran akan semakin menumpuk di tangan sekelompok kecil orang yang memiliki otoritas, modal, pengetahuan dan keterampilan, sehingga orang-orang yang tidak memilikinya semakin kehilangan kesempatan untuk menikmati kemakmuran tersebut. Dengan demikian kemiskinan timbul sebagai produk dan ketidakadilan struktur-struktur sosial, ekonomi dan politik yang berlaku. Kemiskinan adalah buatan oleh manusia, dari manusia dan terhadap manusia.

Ketimpangan-ketimpangan struktural tidak hanya menghalangi perkembangan suatu ekonomi nasional saja, tetapi juga akan memantapkan struktur ketidakadilan itu sendiri. Jadi, pembangunan perdesaan yang dilaksanakan oleh pemerintah ternyata hanya bersifat asistensialisme, yaitu lebih merupakan penghapusan gejala-gejala yang diperbanyak dengan show ke seantero dunia, samasekali bukan penanganan sebab-sebab dari problema-problema yang dihadapi masyarakat. Artinya usaha pembangunan yang semata-mata mengutamakan stabilitas dan pertumbuhan ekonomi justru memantapkan, melangsungkan dan mempertajam ketimpangan-ketimpangan struktural yang sudah pasti tidak akan pernah menciptakan partisipasi, bahkan masyarakat menjadi statis, apatis dan nerimo.

B. Paradigma Perkembangan Perdesaan Masa Kini

Gegap gempitanya tuntutan reformasi, ternyata tidak hanya mengubah nama kabinet saja, dari kabinet pembangunan menjadi kabinet persatuan nasional, tetapi dalam konsep pemerintah telah terjadi pula perubahan visi dan misi pengembangan perdesaan, yang sekarang bervisi sebagai berikut, tercapainya kawasan perdesaan yang mandiri berwawasan lingkungan selaras, serasi dan bersinergi dengan kawasan lainnya dengan

memperhatikan hak asal-usul dan adat istiadat desa melalui pembangunan yang holistik dan berkelanjutan untuk terwujudnya masyarakat yang damai, demokratis, berkeadilan, berdaya saing, maju dan sejahtera. Selanjutnya, visi tersebut diikuti pula oleh misi pengembangan perdesaan yang berbunyi sebagai berikut, mempercepat pembangunan perdesaan secara berkelanjutan dalam rangka pemberdayaan masyarakat terutama petanidan nelayan melalui penyediaan prasarana pembangunan sistem argobisnis, industri kecil dan kerajinan rakyat serta pemanfaatan sumberdaya alam untuk mencapai: pengurangan kemiskinan, jaminan ketahanan pangan, pertumbuhan yang luas dan merata, pengelolaan sumberdaya alam berkelanjutan dan mempercepat pelaksanaan otonomi daerah yang kesemuanya berguna untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat perdesaan. Untuk mencapai visi dan misi pengembangan perdesaan ini tidak tanggung-tanggung karena menyangkut tidak kurang dari 11 instansi yang harus bekerja sama sesuai dengan substansi dari masing-masing instansi.

Konsepnya memang sungguh indah, bagaikan gerakan-gerakab ratu adil, persoalannya adalah bagaimana kita semua menyikapi konsep yang begitu indah ini? yang jelas, krisis ekonomi yang luar biasa, mendorong Bank Dunia meluncurkan dana yang membantu program-program pemberdayaan masyarakat dan ekonomi, sekaligus untuk menekan jumlah masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan secara masif. Program-program tersebut berada pada kibaran bendera yang dikenal dengan Jaring Pengaman Sosial dengan dukungan dana sebesar Rp. 8,9 triliun untuk APBN 1989/1999 (IDT 1,3 triliun untuk 3 tahun). Jaring Pengaman Sosial tersebut ditujukan pada 4 bidang pokok yaitu food security, social protection, employment creation dan pengembangan industri kecil dan menengah.

Sementara di Indonesia memiliki lebih kurang 51.000 desa perdesaan dengan jumlah masyarakat yang tergolong miskin sebanyak 10,8 juta orang. Apa yang mereka dapatkan manfaat dari program Jaring Pengaman Nasional? Lagi-lagi muncul kritikan dari berbagai kalangan melalui mas media maupun aksi-aksi, yang isi kritikannya meliputi antara lain: target JPS salah sasaran, JPS tidak mempunyai visi pemberdayaan masyarakat, JPS mematikan swadaya masyarakat, partisipasi masyarakat semu, JPS bermuatan politik status-quo dan JPS membuat departemen-departemen tidak terkoordinasi. Inilah gambaran permasalahan pembangunan perdesaan yang kami buat dengan sangat-sangat sederhana

C. LSM dan Model Pengembangan Alternatif

Dalam konteks situasi, kondisi dan hasil pembangunan perdesaan sebagaimana gambaran tersebut di atas, barangkali eksistensi LSM memiliki relevansi dan urgensi yang cukup mendasar untuk melakukan pengembangan alternatif, sebab berbeda dengan pemerintah dalam: proses, metode, program dan gerakan dalam:

1. Mengidentifikasi kebutuhan kelompok lokal dan taktik-taktik untuk memenuhi kebutuhan hasil identifikasi.
2. Melakukan mobilisasi dan persuasi untuk usaha aktif mengejar kebutuhan-kebutuhan kelompok yang telah diidentifikasi.
3. Merumuskan kegiatan jangka panjang untuk mengejar sasaran-sasaran pembangunan perdesaan yang lebih esensial.

4. Menghasilkan dan memobilisasi sumberdaya lokal atau eksternal untuk kegiatan pembangunan perdesaan.
5. Pengaturan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan-kegiatan pembangunan desa.

Peranan LSM dalam melakukan proses, metode. Program dan gerakan tersebut menekankan persepsi:

1. Bahwa masyarakat perdesaan bukan hanya sekadar sebagai sumber energi, tetapi juga merupakan sumber informasi. Informasi yang dimiliki masyarakat berupa aset mendesak bagi keberhasilan program pengembangan perdesaan, terlebih-lebih pada tahap perencanaan. Persepsi ini dilandaskan pada fakta bahwa hanya masyarakatlah yang paling mengetahui dan kebutuhannya sendiri.
2. Bahwa pengembangan perdesaan tidak hanya berarti mengatur saja, tetapi juga berarti membantu masyarakat untuk memecahkan problema-problema pengembangan perdesaan yang tidak dapat mereka pecahkan sendiri.
3. Bahwa masyarakat perdesaan pada hakekatnya bukanlah sifat statis, apatis dan fatalistis, yang mewujud dalam sistem panutan (paternalisme). Sebab kepaternalisme masyarakat perdesaan muncul karena mereka tidak diberi ruang dan peluang untuk secara otonom dalam menyelesaikan permasalahan yang mereka hadapi. Dengan kata lain, sikap manut adalah akibat keterbelakangan dan kemiskinan struktural yang diciptakan.
4. Bahwa masyarakat perdesaan di Indonesia adalah heterogen, baik dilihat dari segi ekologis, sosiologis maupun dari segi kultural. Dengan demikian; pola, metode dan strategi pengembangan perdesaan yang seragam (uniform) pada akhirnya akan mematikan dinamika, kreativitas dan oleh karena itu daya-daya inovatif masyarakat perdesaan itu sendiri. Uniformitas ini akan mencekik partisipasi dan keswadayaan mereka.
5. Sudah terbukti berdasarkan pengalaman selama ini bahwa persistensi eksistensi masyarakat desa menunjukkan adanya satu kemampuan yang tinggi untuk mempertahankan diri dalam menghadapi dan mengatasi problema-problema mereka sendiri. Oleh karena itu persepsi bahwa masyarakat perdesaan tidak produktif karena miskin materi adalah tidak benar sama sekali.
6. Bahwa sifat hubungan antara LSM dengan masyarakat perdesaan (kelompok mitra kerja) adalah dialogis dan rembug strategis. Artinya, antara pihak-pihak yang berhubungan terdapat kesamaan derajat. LSM yang datang ke perdesaan bukanlah atasan atau pimpinan masyarakat perdesaan (kelompok mitra kerja), demikian pula sebaliknya. Hubungan dialogis dan rembug strategis ini tidak dapat disederhanakan menjadi sekedar tindakan LSM untuk “menabungkan” gagasan-gagasannya kepada masyarakat perdesaan, atau sekedar sebagai sebuah pertukaran gagasan untuk “dikonsumsi” oleh masyarakat perdesaan atau LSM. Sebagai satu hubungan horizontal, maka dialog harus pula didasarkan kepada adanya keyakinan pada fitrahnya untuk menjadi manusia seutuhnya (yang bukan hak istimewa kelompok elit, tetapi hak kelahiran semua insan manusia).

D. Sasaran dan Pencapaian Sasaran LSM

Dengan peranan dan persepsi semacam itu, LSM harus mengubah struktur-struktur sosial, ekonomi, dan politik, struktur-struktur yang membuat masyarakat lapisan bawah harus terus menerus tergantung dari dan dieksploitasi oleh pihak lain. Kesadaran LSM bahwa kebijaksanaan ekonomi saja tidaklah cukup untuk mengatasi ketimpangan dan kemiskinan struktural, berarti bahwa aksi-aksi LSM mestinya tidak hanya berbau *income*

generating saja, atau lebih umum lagi, bagi LSM prioritas pengembangan perdesaan bukan hanya salah satu kebudayaan materil (misalnya sumberdaya alam, benda-benda hasil teknologi, dll.) atau kebudayaan non materil saja (misalnya adat-istiadat, kepercayaan, falsafah, hukum, sikap mental, pemerintahan, dll.), melainkan dilakukan serentak keduanya sekaligus. Oleh karena kemiskinan juga merupakan fenomena organisasional, maka pola-pola organisasi institusional masyarakat perdesaan harus pula ditata ulang sesuai dengan kebutuhan baru. Penata ulangan pola-pola organisasi institusional tersebut hanya mungkin apabila golongan-golongan yang ekonomi dan sosialnya lemah, masyarakat lapisan bawah harus diikutsertakan secara aktif dan sekaligus menumbuhkan modal keswadayaan mereka. Partisipasi aktif ini mau tidak mau harus mengambil bentuk organisasi yang dapat menjadi sarana untuk mengurangi ketimpangan dalam bergaining power antara masyarakat lapisan bawah dan masyarakat lapisan yang lebih tinggi.

Dengan strategi pendekatan yang terpadu ini, kemajuan-kemajuan yang diperoleh diyakini tidak akan mengalami kepincangan-kepincangan. Oleh karena itu aksi-aksi LSM pada wilayah perdesaan harus dilakukan secara intensif (terus-menerus) dan menyentuh langsung masyarakat lapisan bawah.

E. Hubungan Kerjasama dengan Pemerintah

Meskipun terdapat perbedaan menyolok antara pola, metode, pendekatan dan strategi kerja pemerintah dengan LSM, itu tidak berarti bahwa LSM akan menyaingi dan menggantikan peranan pemerintah. Sebab, bila dilihat dari sudut pembiayaan perkembangan perdesaan, hal itu pasti sudah tidak memungkinkan. Tetapi bagi kepentingan-kepentingan masyarakat lapisan bawah, LSM dapat melakukan penguatan dan pembelajaran masyarakat untuk mengatasi kelemahan-kelemahan pemerintah, demikian pula sebaliknya. Oleh karena itu, tuduhan bahwa LSM adalah merupakan perpanjangan tangan pemerintah hanya karena mengadopsi sasaran-sasaran pemerintah atau adanya kesamaan kegiatan, pada hakekatnya tidak memiliki dasar sama sekali. Tuduhan perpanjangan tangan pemerintah akan lebih tepat apabila bertitik tolak dari tingkat kelonggaran atau keketatan LSM untuk mempertahankan eksistensinya dalam berhadapan atau berhubungan dengan pemerintah. Apabila dalam melaksanakan aksi-aksinya LSM dapat didikte oleh pemerintah, maka LSM yang bersangkutan pantas dikatakan perpanjangan tangan pemerintah. Jadi, meskipun kegiatan, sasaran dan tujuannya sama, tetapi LSM dalam mengimplementasikan pendekatan, pola dan metode operasional tetap berbeda, maka kemandirian idealisme LSM yang bersangkutan tidak perlu diragukan lagi.

Adalah wajar apabila LSM menjalin hubungan dan kerjasama dengan pihak pemerintah, baik di tingkat pusat, propinsi, kabupaten, kecamatan maupun di tingkat desa tetapi harus tetap berdasarkan prinsip:

- Saling respek terhadap hakekat keberadaan, potensi dan keterbatasan serta kelemahan masing-masing pihak.
- Kebersamaan dalam pengambilan keputusan dan tanggung jawab sesuai dengan kesepakatan bersama.

Untuk itu, pemerintah dan seluruh birokrasinya tampaknya harus belajar untuk hidup bersama dan saling menunjang dengan LSM. Dengan cara mendukung dan merangsang

perkembangannya, tanpa merusaknya dengan pengaturan-pengaturan yang mengekang sebagaimana rencana keppres 1994 tentang dunia per LSM.

F. Jaringan Kerjasama LSM

Sebagian orang berpendapat bahwa komunikasi dan kerjasama di antara LSM Indonesia sangat jarang terjadi. Hal ini dapat mengakibatkan pertikaian dan persaingan dengan mengutamakan kepentingannya masing-masing. Walaupun ada terjadi hubungan dan kerjasama, maka itu lebih mungkin terjadi di antara LSM yang sejenis, seukuran dan selembaga bantuan asing (*Foreign Aid Agency*). Tetapi apabila disadari bahwa sebagai suatu lembaga yang sangat bervariasi, baik dilihat dari segi ukuran, jenis, skala, kelompok sasaran, motivasi, visi, misi, metode, strategi dan pendekatan yang dipakai dengan segala kelebihan dan keterbatasan masing-masing, maka LSM mutlak perlu menjalin hubungan dan kerjasama dalam bentuk jaringan kerja di antara LSM untuk saling berbagi rasa dan pengalaman serta efisiensi tenaga, pikiran

Syukur sejak dekade 80an dunia LSM telah banyak berjaringan antara satu lembaga dengan lembaga lainnya.

Kami yakin paparan sumbang pikir ini belum dapat dikatakan sempurna dan utuh, untuk itu mari bersama-sama kita cermati seluruh makalah dan sajian para penyaji pada seminar ini, agar dapat kita rumuskan bersama dalam pencapaian tujuan konkrit dari seminar yang bertemakan **“WAWASAN TENTANG LSM INDONESIA: SEJARAH, PERKEMBANGAN DAN PROSPEKNYA”**.

Salam hangat

Yayasan Indonesia Untuk Kemajuan Desa

Jl. Airlangga No. 16B, Medan 20112

Telp. : (061) 4516338, 4535016

Faks. : (061) 4564794